



LAPORAN TAHUNAN 2016

PT Bakrie Telecom Tbk

DAFTAR ISI ►



04 LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Informasi Saham
Laporan Direksi
Laporan Dewan Komisaris

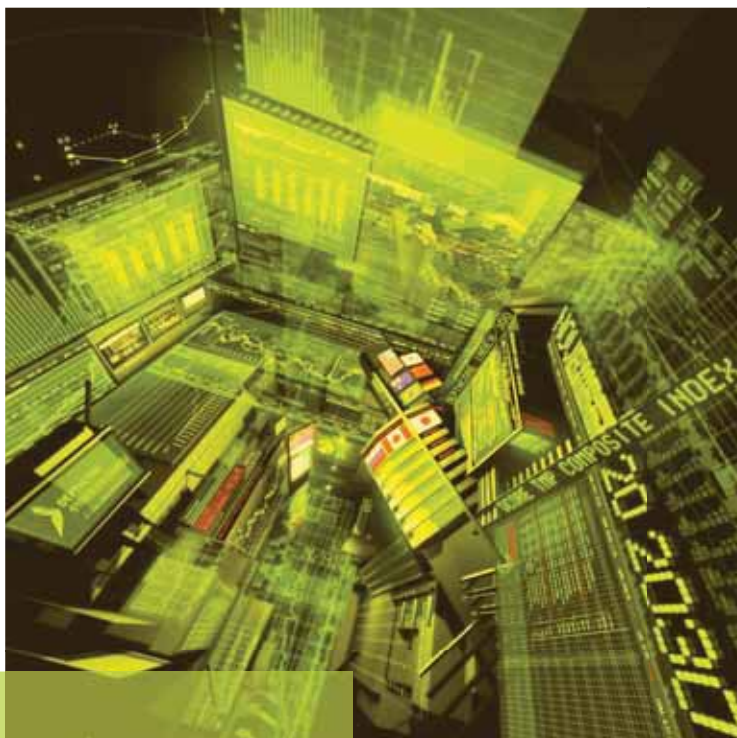
08 DATA PERUSAHAAN

Profil Bakrie Telecom
Riwayat Perusahaan
Visi Dan Misi Perusahaan
Kegiatan Usaha Perusahaan
Struktur Organisasi Perusahaan
Profil Direksi
Profil Dewan Komisaris
Sumber Daya Manusia
Komposisi Pemegang Saham
Anak Perusahaan

40 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

55 LAPORAN BERKELANJUTAN

Tata Kelola Perusahaan
Dewan Komisaris
Internal Control
Manajemen Risiko
Perkara Penting
Sanksi Administrasi
Kode Etik
Corporate Culture
Penerapan GCG
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 2016
Laporan Keuangan



LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN LABA RUGI (DALAM MILIAR RUPIAH)	2016	2015	2014
Pendapatan Usaha Kotor	172,0	637,8	1.453,7
Pendapatan Usaha Bersih	89,8	401,6	1.179,2
Laba (Rugi) Bruto	(958,1)	3.833,7	(945)
EBITD	(142,4)	(484,9)	162,5
EBIT	(958,1)	(3.833,7)	((945,0)
Laba (Rugi) Bersih	(1.392,1)	8.640,8)	(2.869,4)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	(1.392,1)	(8.640,8)	(2.869,4)
Total laba (rugi) komprehensif	(1.384,4)	(8.636,6)	(2.848,2)
Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	(1.384,4)	8.636,6)	2.848,2)
Jumlah Saham Beredar (juta lembar)	30.584,6	30.584,6	30.584,6
Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar	(45,5)	(282,5)	(93,8)
NERACA (DALAM MILIAR RUPIAH)			
Kas dan Setara Kas	2,2	5,7	15,8
Aktiva Lancar Lainnya	41,3	58,3	133,7
Aktiva Tidak Lancar	1.526,3	2.347,6	7.438,5
Total Aktiva	1.569,8	2.411,6	7.588,0
Kewajiban Lancar	8.191,0	7.649,2	5.949,3
Kewajiban Tidak Lancar	7.276,3	7.275,6	5.515,3
Total Kewajiban	15.467,3	14.924,8	11.464,6
Total Ekuitas	(13.897,5)	(12.513,2)	(3.876,6)
Modal Kerja Bersih	1.569,8	2.411,6	7.588,0
RASIO (%)			
Margin Pendapatan Bersih	52,2	63,0	81,1
Margin EBITDA	(82,8)	(76,0)	11,2
Margin EBIT	(557,0)	601,1)	(65,0)
Margin Rugi Bersih	(809,3)	(1.354,7)	(197,4)
Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	(88,7)	(358,3)	(37,8)
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	10,0	69,1	74,0
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan	(8,1)	(13,5)	(2,0)
Rasio lancar	0,5	0,8	2,52
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	(111,3)	(119,3)	(295,7)
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	985,3	618,9	151,1

INFORMASI SAHAM

INFORMASI PERDAGANGAN SAHAM

INFORMASI SAHAM	2016	2015
Harga saham penutupan (Rp per lembar)	50	50
Jumlah saham beredar (juta lembar)	30.584,6	30.584,6
Kapitalisasi pasar (juta Rp)	1.529.229,5	1.529.229,5

PERGERAKAN HARGA SAHAM	2016			2015		
	TERTINGGI	TERENDAH	PENUTUPAN	TERTINGGI	TERENDAH	PENUTUPAN
Kuartal 1 (Rp)	50	50	50	50	50	50
Kuartal 2 (Rp)	50	50	50	50	50	50
Kuartal 3 (Rp)	50	50	50	50	50	50
Kuartal 4 (Rp)	50	50	50	50	50	50

Volume perdagangan saham pada Bursa Efek Indonesia selama 2016 adalah sebanyak 273.550.000 saham.

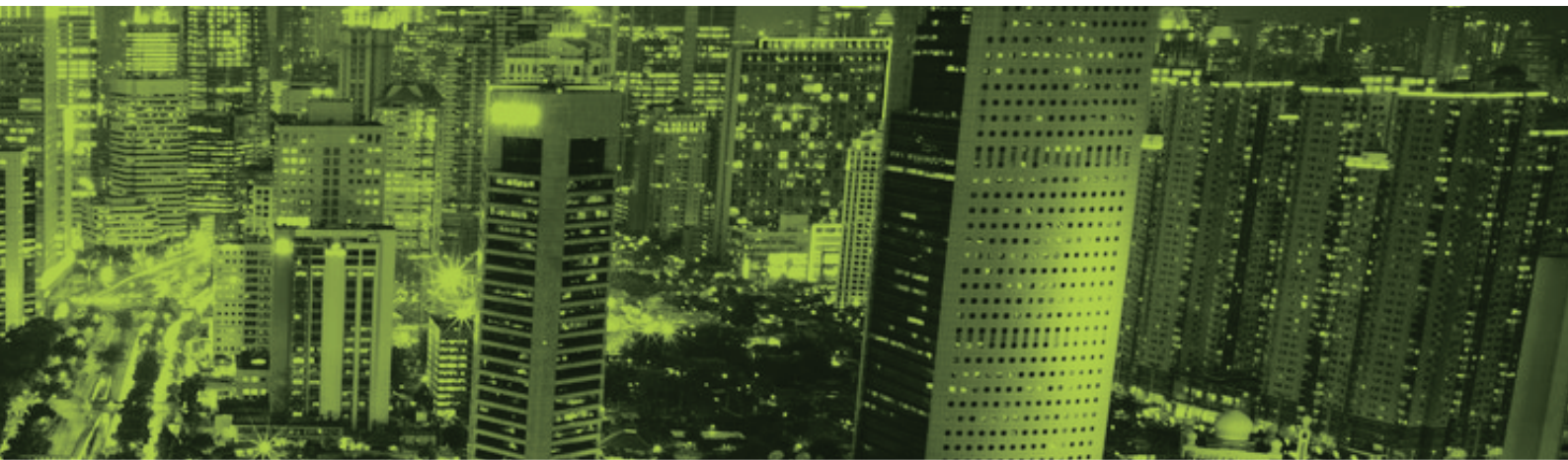


INFORMASI AKSI KORPORASI

Pada tanggal 28 April 2016 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham telah menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebesar sebanyak-banyaknya Rp 7.601.111.817.800 (tujuh triliun enam ratus satu miliar seratus sebelas juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) atau 38.005.559.089 (tiga puluh delapan miliar lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) lembar saham seri B.

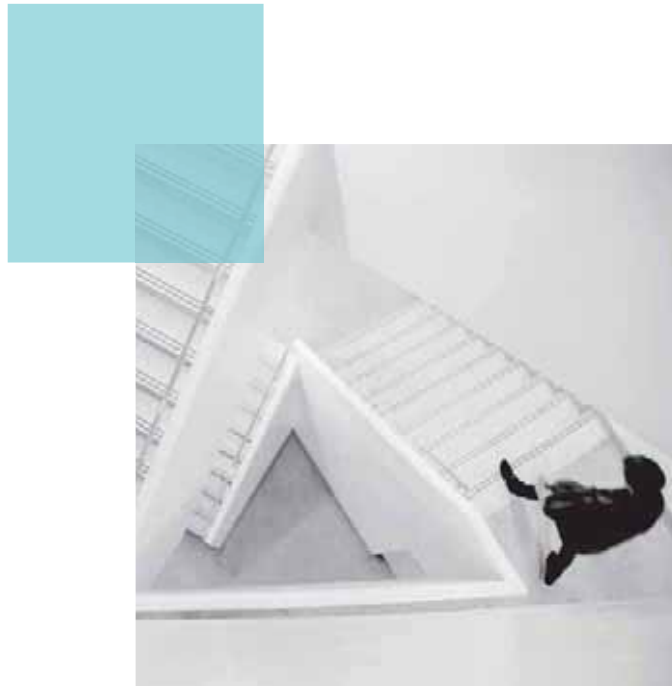
INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION)

Sepanjang tahun 2016 Perseroan mengalami dua kali penghentian sementara perdagangan saham BTEL (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 dan pada tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016. Kedua Suspensi tersebut dikenakan masing-masing karena Perseroan belum memenuhi pembayaran denda dan terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya Perusahaan dapat menyelesaikan suspensi tersebut dengan baik.



LAPORAN
KEPADA
PEMEGANG SAHAM





TAHUN PEMANTAPAN

Strategi dan kebijakan BTEL untuk bertransformasi dinilai tepat karena Perusahaan melihat faktor kebutuhan masyarakat yang sangat besar dan dinamis seiring perkembangan teknologi yang cepat dan dengan segmen pengguna yang sangat luas.

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

LAPORAN DIREKSI

“Menghubungkan Semua
Generasi Dengan Dunia
Digital Melalui
Dunia Informasi,
Komunikasi, Dan Hiburan”



Para Pemangku Kepentingan yang Kami hormati

Tahun 2016 telah dilewati BTEL sebagai tahun yang penuh tantangan dan sebagai tahun pemantapan proses transformasi perusahaan. Pencanaan inisiatif dan model usaha baru dengan fokus pada layanan informasi, komunikasi, hiburan berbasis digital yang dimulai pada tahun 2015 terus berlanjut sebagai upaya transformasi BTEL yang berkesinambungan sampai dengan saat ini. Sebelumnya BTEL telah pula melakukan konsolidasi kekuatan fundamental Perusahaan yang ditandai dengan restrukturisasi utang pada tahun 2014 yang disetujui kreditur BTEL melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dukungan kreditur

dalam restrukturisasi ini jelas menjadi modal berharga bagi BTEL untuk memperbaiki kinerja operasional dengan memunculkan ide-ide, inisiatif dan model usaha baru.

Pemikiran untuk menggulirkan model usaha baru berbasis digital dengan fokus pada layanan informasi, komunikasi, hiburan merupakan strategi dari buah pengamatan Perusahaan terhadap perkembangan industri informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital.

Industri informasi, komunikasi, hiburan digital dianggap sebagai industri yang sangat dinamis seiring perkembangan teknologi yang cepat dan dengan segmen pengguna yang sangat luas dimana disadari atau tidak produk layanan ini sudah melebihi dari sekedar kebutuhan sekunder penggunanya. Perkembangan teknologi dan layanan informasi, komunikasi, hiburan digital secara nyata telah mengubah pola hidup masyarakat dan cenderung akan membawa suatu perubahan global ke arah masyarakat yang akan sangat tergantung pada teknologi digital atau serba digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal inilah yang membawa BTEL untuk tidak terpacu pada strategi bisnis telekomunikasi dengan teknologi dan moda layanan saat ini yang dirasakan sudah cukup konvensional.

Strategi dan kebijakan BTEL untuk bertransformasi dinilai tepat karena Perusahaan melihat faktor kebutuhan masyarakat yang sangat besar dan dinamis yang bersanding dengan kemampuan serta pengalaman Perusahaan untuk mengambil bagian dalam kompetisi pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Hal ini juga sejalan dengan visi kami untuk “Menghubungkan Semua Generasi dengan Dunia Digital” dan misi “Memberikan pengalaman unik dan menyenangkan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan dunia informasi, komunikasi, dan hiburan”

Sebagai tahun pemantapan proses transformasi, BTEL sendiri menyadari bahwa tahun 2016 bukan merupakan tahun dimana Perusahaan akan memperlihatkan kinerja operasional dan keuangan yang meningkat secara signifikan. Perusahaan masih membukukan rugi bersih dari kinerja operasional sepanjang tahun 2016. Kondisi ini menurut kami dapat dipahami karena sepanjang tahun tersebut dan tahun sebelumnya Perusahaan lebih memfokuskan diri pada perancangan dan persiapan produk atau inisiatif baru layanan informa-

si, komunikasi, hiburan berbasis digital. Proses perancangan dan persiapan ini merupakan satu langkah yang mesti dilalui sebelum digulirkan menjadi suatu produk layanan handal yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam upaya penyediaan layanan informasi, komunikasi, hiburan berbasis digital bukannya tidak dihadapi oleh BTEL. Modal kerja yang memadai, persaingan usaha, dan penggunaan teknologi yang tepat merupakan sebagian dari tantangan yang dihadapi BTEL.

Namun BTEL tetap optimis mampu untuk melewati tantangan tersebut dengan berka- ca pada pengalaman dan kepercayaan kepada BTEL yang terus bertumbuh. Terkait dengan tata kelola Perusahaan, manajemen bersama segenap fungsi organ dan insan di Perusahaan tidak sedikitpun goyah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dimana hal ini sudah menjadi lebih dari sekedar rangkaian prosedur tata kelola melainkan dirasakan dan dipraktekkan sebagai sebuah nilai yang melekat pada Perusahaan maupun insan BTEL.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan tidak lagi dipandang sebagai suatu syarat atau acuan yang harus dipatuhi sebagai perusahaan publik, namun lebih ditekankan pada kebermanfaatannya yang dirasakan langsung secara positif oleh Perusahaan. Sinergi yang baik antara tata kelola perusahaan dan nilai-nilai korporasi terbukti selama ini menjadi salah satu kekuatan BTEL dalam mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usaha.

Di sisi pengawasan dan pemberian nasehat terhadap direksi, kami merasakan bahwa dewan komisaris dan komite-komite sebagai fungsi atau organ perusahaan telah berperan aktif sepanjang tahun 2016 dengan memberikan energi positif dan menumbuhkan kepercayaan diri yang besar bagi manajemen dan segenap insan BTEL untuk terus berupaya melakukan peningkatan kinerja Perusahaan di era yang baru. Dewan Komisaris dan komite-komite turut serta melakukan pengamatan dan mempelajari model bisnis baru yang akan digelar oleh Perusahaan dan membagi pengetahuannya kepada direksi demi pematangan transformasi Perusahaan di era baru.

Tidaklah sulit bagi direksi untuk berkomunikasi dan melakukan diskusi dan konsultasi melalui forum maupun media yang sangat fleksibel dengan kesepahaman yang sejalan bahwa strategi BTEL untuk bertransformasi adalah tepat dan harus terus didukung dari waktu ke waktu.

Tidak luput kami pula memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap karyawan Perusahaan yang telah menunjukkan integritas, dedikasi, dan loyalitasnya secara konsisten kepada Perusahaan. Sebagian besar karyawan telah melewati situasi pasang surut bersama-sama dengan manajemen beberapa tahun belakangan ini. Komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan Perusahaan merupakan etos kerja yang terus terpelihara dengan baik. Bersama dengan insan-insan yang terpilih ini direksi meyakini bahwa strategi transformasi Perusahaan akan bergerak cepat ke arah era baru yang diharapkan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan, Dewan Komisaris, manajemen, seluruh jajaran BTEL, para mitra usaha, segenap institusi pasar modal dan jajaran pemerintah yang terkait atas dukungan selama ini. Kami semua mengharapkan suatu masa yang cerah di era yang baru.

Atas nama Direksi,



R. BISMARKA KURNIAWAN
Direktur Utama

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

LAPORAN DEWAN KOMISARIS



"Masyarakat di belahan dunia manapun cepat dan pasti akan bertransformasi menjadi masyarakat dalam dunia digital."

Para Pemangku Kepentingan yang Kami hormati,

Setelah melewati tahun konsolidasi fundamental di tahun 2014 yang ditandai dengan catatan positif BTEL yang memperoleh persetujuan kreditur Perusahaan atas restrukturisasi utang Perusahaan melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan masa persiapan transformasi Perusahaan di tahun 2015, kami selaku Dewan Komisaris BTEL melihat bahwa tahun 2016 bukanlah tahun yang mudah bagi Perusahaan untuk segera meningkatkan kinerja operasional dan keuangannya secara signifikan. Tahun 2016 merupakan kelanjutan dari persiapan menyongsong era baru dimana strategi transformasi Perusahaan yang semula menyediakan layanan telekomunikasi suara dan pesan singkat menjadi Perusahaan yang menggelar produk layanan informasi, komunikasi, dan hiburan dengan basis teknologi digital, semakin dimatangkan.

Kami menyadari bahwa proses transformasi untuk menuju era baru yang sudah dan masih terus digulirkan oleh Perusahaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun demikian sudahlah tepat kiranya menurut kami penetapan strategi dan pengambilan kebijakan oleh direksi untuk menyikapi kinerja Perusahaan yang kurang menguntungkan beberapa tahun belakangan ini yang dibarengi dengan kompetisi industri telekomunikasi yang semakin sengit. Kejelian direksi yang melihat peluang dan potensi besar di sektor informasi komunikasi, dan hiburan berbasis digital sebagai wujud kreatifitas dan semangat kompetitif patut untuk diapresiasi.

Selaku Dewan Komisaris kami memiliki keyakinan yang tidak luntur terhadap direksi dan jajaran manajemen Perusahaan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang tepat dalam upaya mencapai apa yang menjadi target dan harapan Perusahaan ke depan dengan melakukan transformasi yang telah ditetapkan. Dewan komisaris dalam hal ini memiliki pandangan yang seirama dengan direksi bahwa model bisnis baru yaitu layanan informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital memiliki prospek yang sangat cerah dan akan bertumbuh. Kebutuhan masyarakat akan informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital dirasakan sudah bergeser menjadi kebutuhan yang nyaris primer. Masyarakat yang tidak memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam mendukung pola hidupnya sehari-hari hampir dapat dipastikan akan tertinggal dari segi kecepatan, kepraktisan, dan efisiensi dibanding masyarakat pemanfaat teknologi digital. Masyarakat di belahan dunia manapun cepat dan pasti akan bertransformasi menjadi masyarakat dalam dunia digital. Oleh karena prospek yang semakin cerah, sangatlah

tepat direksi secara cepat dan terukur melakukan strategi transformasi ini.

Seperti yang telah diupayakan oleh direksi sebagaimana diamati oleh dewan komisaris, tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai tahun pemantapan dan pembentukan pondasi transformasi Perusahaan. Sejak mula direksi telah menyampaikan pandangan atas strategi dan kebijakan transformasi ini kepada Dewan Komisaris, dan kami menilai strategi dan kebijakan tersebut sangat rasional, implementatif dan berada dalam jangkauan untuk dicapai. Pendapat dan masukan dewan komisaris senantiasa kami berikan kepada direksi sebagai bentuk dukungan nyata dan suntikan moril kepada direksi.

Sangat dimaklumi kemudian bahwa kinerja operasional dan keuangan yang dicatat oleh Perusahaan di tahun 2016 tidak terlalu menggembirakan mengingat sepanjang tahun tersebut konsentrasi Perusahaan lebih didorong ke arah perencanaan dan persiapan transformasi. Namun demikian kami juga sangat mengapresiasi direksi yang tidak hanya terfokus pada persiapan transformasi saja, melainkan di tahun 2016 juga telah menggulirkan layanan sambungan telekomunikasi dengan menggarap segmen pengguna di perkantoran dan hunian yang berada di gedung-gedung tinggi (high rise building).

Belanja modal yang tidak material, kepraktisan, dan kecepatan dalam penyediaan layanan menjadi faktor yang menguntungkan bagi siapapun pemain dalam segmen ini termasuk Perusahaan. Dengan demikian prospek bisnis ini tidaklah dapat dipandang sebelah mata.

Dari sisi kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kami memandang bahwa Perusahaan sebagai perusahaan publik terus berupaya mempertahankan konsistensi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sekalipun Perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Hal ini membuktikan bahwa prinsip tata kelola Perusahaan telah menjadi nilai tersendiri yang dipegang oleh manajemen dan insan-insan BTEL lebih dari sekedar sebagai syarat atau ornamen yang harus ada dan melekat pada perusahaan publik.

Terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, sepanjang tahun 2016, kami selaku dewan komisaris secara berkesinambungan baik dalam forum rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, pembicaraan lisan, maupun pertemuan tidak terjadwal, melakukan diskusi dan konsultasi dengan direksi. Penyelenggaraan diskusi dan konsultasi ini selain merupakan amanat dari anggaran dasar Perusahaan, juga dirasakan sebagai suatu media penting bagi direksi dan dewan komisaris untuk dapat menentukan strategi dan kebijakan serta untuk mendapatkan laporan perkembangan kinerja Perusahaan pada tahun berjalan. Forum diskusi dan konsultasi ini juga termasuk dalam hubungannya dengan pemberian nasehat dan masukan dari komite-komite yang dimiliki oleh Perusahaan dan berada dalam naungan koordinasi Dewan Komisaris.

Sebagai kesimpulan atas telah selesainya kerja Perusahaan untuk tahun buku 2016, kami dewan komisaris memandang bahwa direksi BTEL telah menetapkan

strategi dan kebijakan transformasi yang rasional, implementatif, dan berada dalam jangkauan untuk dicapai. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis BTEL terus menerus berupaya untuk konsisten dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan senantiasa melakukan diskusi sertakonsultasi dengan dewan komisaris dan komite-komite.

Sebagai penutup, kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi pemangku kepentingan, direksi, manajemen, seluruh karyawan dan jajaran BTEL, paramitra usaha, segenap institusi pasar modal dan jajaran pemerintah yang terkait atas dukungan selama ini.


Atas nama Dewan Komisaris,



ANINDYA NOVYAN BAKRIE
Komisaris Utama

DATA PERUSAHAAN RIWAYAT PERUSAHAAN

PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL atau Perseroan) pertama kali didirikan dengan nama PT Radio Telepon Indonesia pada tahun 1993. Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bakrie Telecom sendiri terjadi pada tahun 2003. Pada awal berdiri, Perseroan menggelar layanan telekomunikasi berbasis teknologi E-TDMA (Enhanced -Time Division Multiple Access) dengan brand Ratelindo. Pada tahun 2003 Perseroan meningkatkan bentuk dan teknologi layanan telekomunikasi dengan menghadirkan layanan telekomunikasi *fixed wireless access (FWA)* yang mengusung teknologi terbaru satu itu *CDMA (Code Division Multiple Access)* dengan cakupan wilayah layanan meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (JBB). Dengan brand Esia dan tarif yang lebih terjangkau, layanan FWA Perseroan disambut antusias masyarakat luas yang pada masa itu masih tergantung pada layanan telekomunikasi berbasis *Global System for Mobile communication (GSM)* yang disediakan oleh beberapa operator.



Menyadari potensi yang sangat besar ini industri telekomunikasi dan harapan untuk menjadi Perusahaan telekomunikasi yang handal dan terkemuka, pada Februari 2006 Perseroan menorehkan sejarah dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan sejak saat itu Perseroan menjadi perusahaan terbuka publik dengan ticker BTEL.

Memperhatikan peningkatan penggunaan layanan Esia oleh pelanggan dan animo masyarakat yang berada di luar wilayah cakupan layanan Esia, Perseroan berupaya untuk mengembangkan layanan Esia di luar wilayah cakupan selama ini. Pada tahun 2007, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memberikan lisensi layanan FWA dengan cakupan wilayah nasional kepada Perseroan. Dengan lisensi tersebut Perseroan mulai mengembangkan dan memperluas layanan Esia ke beberapa kota dan provinsi di Indonesia, antara lain pulau Jawa, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan provinsi lainnya. Di tahun yang sama Perseroan juga mulai menggelar layanan sambungan langsung internasional (SLI) dengan sebelumnya memperoleh lisensi penyelenggaraan SLI dari Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Tidak berhenti pada layanan FWA dengan teknologi CDMA, pada tahun 2010, BTEL mulai menambah layanan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada layanan percakapan dan SMS menjadi penyedia layanan data Broadband Wireless Access (BWA) dengan menggunakan teknologi terbaru yang merupakan pengembangan dari CDMA yaitu EVDO (Evolution Data Optimized) yang setara dengan teknologi GSM 3G (third generation). Penyediaan layanan dengan brand Aha ini merupakan jawaban Perseroan atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan data. Pada tahun 2012, BTEL mengintegrasikan merek dagang Aha yang berada di bawah naungan perusahaan Bakrie Connectivity (BCON) dan ESIA yang berada di bawah naungan perusahaan Bakrie Connectivity (BCON) dan ESIA yang berada di bawah lingkup

BTEL guna mendukung optimalisasi layanan Data. Bersatunya dua merek dagang besar ini ditandai dengan peluncuran modem ESIA Max-D pada 1 Juni 2012. Disamping sejalan dengan strategi bisnis awal BTEL sebagai budget operator, langkah ini juga merupakan jawaban Perseroan dalam menghadapi tantangan persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat.

Sejak tahun 2013 dan tahun 2014, BTEL mulai mengkoncentrasikan layanannya secara lebih intensif di daerah JBB yang secara historis dan operasional telah terbukti memberikan kontribusi paling besar dan dominan terhadap pendapatan Perseroan. Seiring dengan pemfokusan area layanan, mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Perseroan telah memulai langkah peninjauan untuk mengelola dan menghadirkan suatu produk layanan

berbasis digital dengan fokus pada kebutuhan masyarakat akan informasi, komunikasi, dan hiburan. Di tahun 2016, Perseroan semakin memantapkan pondasi untuk memulai kegiatan usaha dan inisiatif baru tersebut dengan harapan lini usaha baru ini akan menjadi andalan Perseroan dalam kontribusi pendapatan ke depan.



VISI DAN MISI PERUSAHAAN

01

VISI:

Menghubungkan semua generasi dengan dunia digital.

02

MISI:

Memberikan pengalaman unik dan menyenangkan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan dunia informasi, komunikasi dan hiburan.

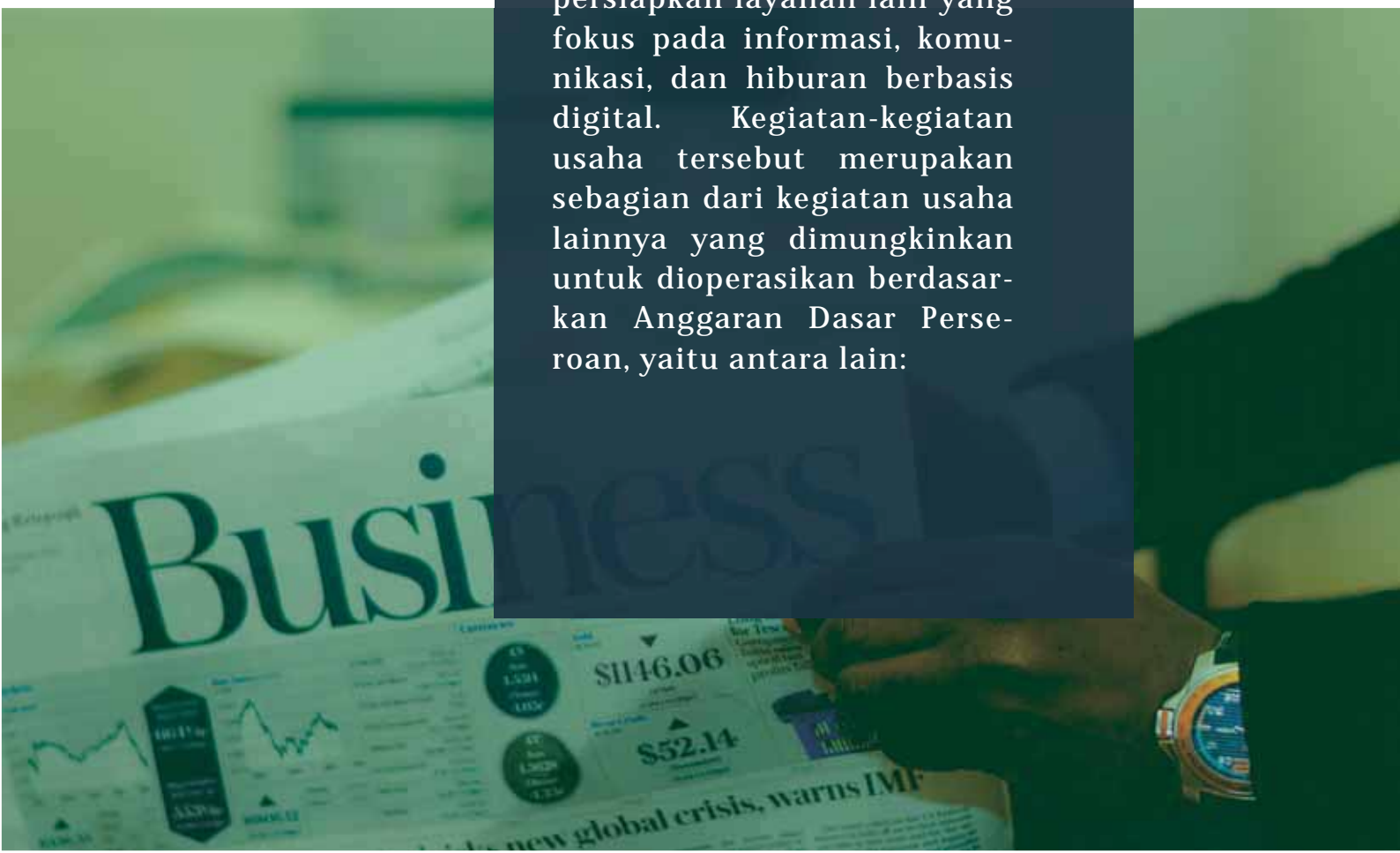


DATA PERUSAHAAN

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Sejak awal pendiriannya di tahun 1993, Perseroan senantiasa fokus pada kegiatan usaha utama yaitu penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Perseroan memulai langkah untuk mengelola dan menghadirkan suatu produk layanan berbasis digital dengan fokus pada kebutuhan masyarakat akan komunikasi, informasi, dan hiburan. Di tahun 2016 sendiri, walaupun belum terlalu masif Perseroan telah menghadirkan layanan telekomunikasi dengan sasaran utama pelanggan di gedung-gedung perkantoran.

Perseroan masih terus mempersiapkan layanan lain yang fokus pada informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital. Kegiatan-kegiatan usaha tersebut merupakan sebagian dari kegiatan usaha lainnya yang dimungkinkan untuk dioperasikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu antara lain:





Menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa, telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap, serta jasa transaksi keuangan secara elektronik termasuk jasa pembayaran dengan menggunakan kartu dan jasa pengiriman uang secara elektronik baik di dalam maupun lintas negara dalam rangka memperluas pelayanan jasa telekomunikasi bagi masyarakat.



Merencanakan, mendesain, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya sebagai pendukung usaha Perseroan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi.



Melaksanakan usaha dan kegiatan pengoperasian, dan penjualan jaringan dan/atau jasa yang diselenggarakan Perseroan, pemeliharaan, penelitian, pengembangan dan/atau fasilitas telekomunikasi.



Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tidak terbatas import atas barang-barang, perangkat dan/atau produk-produk tersebut, termasuk namun tidak pada handset dan terminal telekomunikasi





DATA PERUSAHAAN
**STRUKTUR
ORGANISASI**

DEWAN KOMISARIS



BOBBY GAFUR S. UMAR
Wakil Komisaris Utama



ANINDYA N. BAKRIE
Komisaris Utama



AI MOELYADI MAMOER
Komisaris Independen

DIREKSI



JASTIROMO ABI
Wakil Direktur Utama



**ROBERTUS BISMARKA
KURNIAWAN**
Direktur Utama



TAUFAN E. N. ROTORASIKO
Wakil Direktur Utama



ANDI PRAVIDIA SALIMAN
Direktur



HARYA MITRA HIDAYAT
Direktur



WILLIAM MARK ROBSON
Direktur Independen



DATA PERUSAHAAN

PROFIL DIREKSI

DATA PERUSAHAAN

PROFIL DIREKSI



R. BISMARCA KURNIAWAN
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, warga negara Indonesia, 45 tahun. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Visi Media Asia Tbk sejak 2011. Di samping itu beliau juga dipercaya untuk menjabat beberapa posisi antara lain Komisaris Utama PT Digital Media Capital sejak 2015, Komisaris PT Bakrie Global Ventura, Komisaris PT Intermedia Capital Tbk. sejak 2012, Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi, Direktur PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal, Direktur Capital Managers Asia Pte. Ltd. dan Direktur Great Asian Holding Pte. Ltd. sejak 1996.

*Bachelor of Science in Civil Engineering (Construction) - the University of Southern California, USA - 1993,
Master of Engineering in Structural Engineering minoring in Business Administration - Cornell University, USA- 1994,
Master of Business Administration in Finance, Investment and Banking - the University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, USA - 1995.*

JASTIRO ABI Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Jastiro Abi menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak 2016 dan Direktur Utama Perseroan periode 2013-2016 dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan kurun waktu 2011-2013 dan Direktur Keuangan Perseroan dari tahun 2007 sampai 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Bakrie Swasakti Utama dan berbagai posisi manajerial pada divisi Corporate Banking, Credit Recovery Unit, Trade Finance di HSBC pada tahun 1998 sampai 2002 dan PT Astra International Tbk. pada tahun 1997 sampai 1998. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Badan Pengawas di Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI).



*Sarjana Teknik dari Universitas Diponegoro - 1995,
M.Eng.Sc. - Queensland University of Technology Australia - 1997,
M.B.A. dari University of Western Australia - 2005,
Doktor dari BINUS University*



TAUFAN EKO NUGROHO ROTORASIKO Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, usia 41 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak 2016. Taufan E.N Rotorasiko memulai karir di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai Network Engineer dan Software Engineer di beberapa perusahaan IT di Amerika Serikat diantaranya Nth Information System, Bell Atlantic, dan Verizon. Beliau bergabung di Grup Bakrie sejak tahun 2002 sebagai Group Information System Administration Manager di PT Bakrie & Brothers sampai tahun 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Multi Kontrol Nusantara dan Komisaris PT Bakrie Indo Infrastructure. Beliau terafiliasi dengan Komisaris Utama BTEL karena hubungan keluarga.

*Bachelor of Science in Computer Information System,
Strayer College Washington DC - 1998.
Master of Business Administration dari UCLA-NUS Executive
MBA Program pada tahun 2009.*

HARYA MITRA HIDAYAT

Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak 2012, dan terakhir diangkat kembali sebagai direktur pada tahun 2015. Sebelumnya di PT Bakrie Telecom Tbk. menjabat sebagai Executive Vice President 2006–2007. Jabatan lain sebelumnya adalah Direktur Utama PT Bakrie Toll Road dari 2007–2012, VP Corporate Finance di PT Bumi Resources Tbk. 2004–2007, VP Corporate Finance di Asia Capital Manager selama 2002–2004. Tahun 2001–2002 menjabat Associate Director di AAJ Associates. Tahun 1998 menjabat sebagai Management Trainee di Worldcom, Associates di Merrill Lynch, Singapura tahun 1999–2001.



*Gelar MBA dari University of Baltimore, Maryland 1999,
B.S. Business Administration dari Denver University, Colorado 1996*



ANDI PRAVIDIA SALIMAN

Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak 2016. Andi Pravidia mulai berkarir sebagai auditor di beberapa Kantor Akuntan di Jakarta. Selanjutnya antara tahun 1998 sampai 2002, beliau berkarya di PT. Putra Sumber Utama Timber, Paper & Forest Product Industry dan di PT Dinar Securities. Pengalamannya sebagai auditor dan kompetensi di bidang keuangan dan accounting membawa Andi Pravidia bergabung dengan Group Bakrie pada tahun 2002 sampai dengan saat ini dengan beberapa posisi terakhir antara lain Vice President PT Bakrie Global Ventura, Presiden Direktur PT Bumi Fajar Sakti, dan Chief Finance Officer Perseroan.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, STEI/AAI, Jakarta - 1996

W. MARK ROBSON
Direktur Independen

Warga Negara Inggris, 49 tahun. Menjabat Direktur Independen sejak 2016. Mark Robson mengawali karirnya sebagai CATV, SMATV and CADD Designer pada tahun 1988 di Cen-Comm Communications, Toronto, Canada. Karir dan kompetensi beliau kian terasah sebagai Technical Advisor di Fortress Satellite Hong Kong LTD, Hong Kong dan Rogers Cable TV & Telecom, Toronto, Canada. Pengalaman di sektor TV engineering membawa beliau selanjutnya untuk berkarir di Indonesia pada tahun 1997, bergabung dengan Group Lippo dalam beberapa unit usaha diantaranya Kabel Vision dan First Media. Mark juga berkontribusi dalam pengembangan Sitra dan Wimax-Bolt dengan posisi terakhir sebagai Vice President of System Network implementation & Engineering sampai tahun 2012. Dengan pengalaman dan keahlian engineering tersebut Mark bergabung sebagai Technical Advisor pada tahun 2012 sampai dengan pertengahan 2015 dengan Pay TV Company yang menggelar layanan TV kabel berbayar.



Architectural Engineering, Sheridan College, Institute for Technology, Toronto, Canada.

Fiber Optics Engineering and Installation Electrical Engineering. George Brown College, Toronto, Canada.



DATA PERUSAHAAN

PROFIL
DEWAN
KOMISARIS



ANINDYA NOVYAN BAKRIE KOMISARIS UTAMA

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Anindya Novyan Bakrie telah menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 2013. Sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2003. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Viva Media Baru sejak 2013, Direktur Utama PT Visi Media Asia (VIVA) sejak 2008, Komisaris Utama PT Lativi Mediakarya sejak tahun 2007, Komisaris Utama PT Intermedia Capital Tbk. sejak 2013, dan Komisaris Utama PT Cakrawala Andalas Televisi sejak 2009. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Deputy Chief Operating Officer dan Managing Director di PT Bakrie & Brothers Tbk. 1997–1999 dan Analis Keuangan di Salomon Brothers Inc., New York dari tahun 1996 sampai 1997. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media di Kamar Dagang Indonesia (“KADIN”), setelah menjabat sebagai Ketua Komite Tetap

Telekomunikasi di KADIN hingga 2008 dan Anggota Dewan Penasehat Asia Pacific Media Forum (APMF) sejak tahun 2003. Sebelumnya beliau adalah Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media, dan anggota Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Anggota Asia Pacific Economic Perusahaan Business Advisory Council (ABAC) Delegasi Indonesia dan Dewan Internasional di Belfer Center for Science and International Affairs of Harvard University, serta pendiri dan Ketua Bakrie Center Foundation. Penerima gelar Sarjana di bidang Ilmu Teknik Industri dari Northwestern University, Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1996 dan gelar Master di bidang Administrasi Bisnis dari Program Manajemen Global di Stanford Graduate School of Business, California, Amerika Serikat pada tahun 2001.





BOBBY GAFUR S. UMAR
Wakil Komisaris Utama



AI MULYADI MAMOER
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Bobby Gafur S. Umar menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013 dan sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2003. Saat ini beliau adalah Direktur Utama & CEO PT Bakrie & Brothers Tbk. sejak Juni 2010. Di samping itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris P T Bakrie Sumatera Plantations sejak Juli 2002, Direktur Utama/CEO PT Bakrie Indo Infrastructure sejak Maret 2008. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota direksi di beberapa Perusahaan antara lain, Vice President Commissioner PT Bakrie & Brothers Tbk., Direktur PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., Direktur PT Bakrie Pasaman Plantations, dan Direktur PT Agrowiyana. Beliau juga merupakan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia masa bakti 2012–2015, Ketua Asosiasi Keinsinyuran se-ASEAN (AFEO) masa bakti 2012–2013, wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia masa bakti 2011–2017, dan Ketua Komite tetap Pengembangan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia masa bakti 2010–2015. Gelar Master of Business Administration diperoleh Bobby Gafur S. Umar dari University of Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 1995.

Warga Negara Indonesia, 70 tahun. Ai Mulyadi Mamoer menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2006. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Tiga Pilar Kemitraan, sebuah asosiasi anti-korupsi yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dan setelahnya menggagas berdirinya Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) dan Gerakan Nasional Indonesia Berintegritas (GNIB). Beliau adalah Eksekutif Indonesia Procurement Watch, pendiri dan anggota Dewan Eksekutif Masyarakat Pengusaha Indonesia, pendiri dan anggota dari Tim 45 Dewan Integritas Bangsa. Ia juga anggota dari Dewan Eksekutif Transparency International Indonesia, Komunitas Telematika Indonesia, Masyarakat Komisaris Indonesia, Komite Integritas BULOG, PERTAMINA, dan JAMSOSTEK. sebelumnya beliau bertindak sebagai Expert Advisor dan Koordinator Expert Advisor Presiden Direktur PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., Komisaris PT Ratelindo, Komisaris Perum Pos dan Giro dan Kepala Departemen Perencanaan di Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Ai Mulyadi Mamoer menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung dan gelar Master di bidang Ekonomi dari University of Michigan.





DATA PERUSAHAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mewujudkan visi, misi dan target Perseroan terutama atas inisiatif dan kegiatan usaha di era baru yang berfokus pada layanan informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, berkompeten, dan selalu berkemauan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Di samping itu, efisiensi jumlah sumber daya manusia berikut pemetaan tugas dan tanggung jawab berbasis keahlian merupakan salah satu prasyarat utama bagi Perseroan dalam proses transformasi usaha ini.

Pada tahun 2016, jumlah karyawan adalah sebesar 103 orang dengan demografi sebagai berikut:

Pendidikan	2016	2015
S2	11%	8%
S1	68%	70%
Diploma	16%	17%
SMA/ Sederajat	5%	5%

Tahun	2016	2015
25-35	23%	29%
36-45	59%	57%
>45	18%	14%



DATA PERUSAHAAN
**KOMPOSISI
PEMEGANG SAHAM**



DAFTAR PEMEGANG SAHAM:

DAFTAR PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2016	SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH (LEMBAR)	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
PT Mahindo Agung Sentosa	5.000.439.000	16.35
PT Bakrie Global Ventura	2.505.574.713	8.19
Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch S/A Best Quality Global Limited	2.213.279.000	7.24
PT Bakrie & Brothers Tbk	43.043.142	0.14
Masyarakat	20.822.254.800	68.08
TOTAL	30.584.590.655	100,00

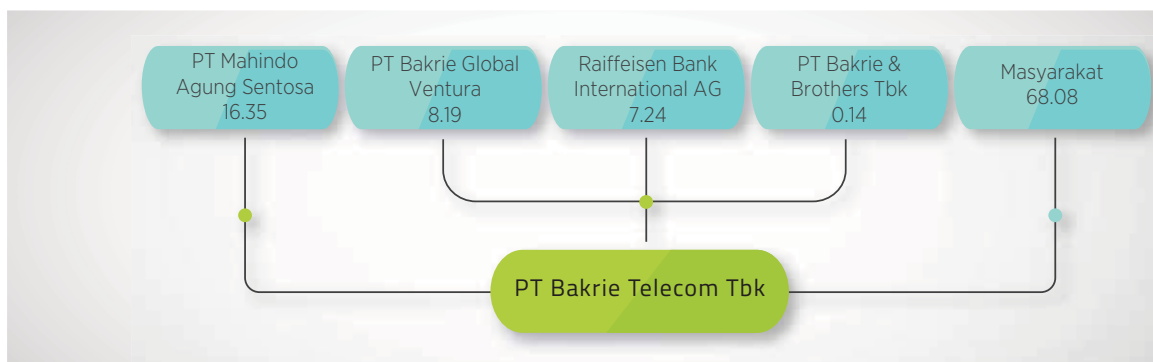
Tidak ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham BTEL pada tahun 2016.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN INSITUSI DAN INDIVIDU PER 31 DESEMBER 2016

DAFTAR PEMEGANG SAHAM	SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH (LEMBAR)	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
Institusi Lokal	7.549.055.855	24.68
Institusi Asing	2.213.279.000	7.24
Individu Lokas	20.822.255.800	68.08
Individu Asing	-	-
TOTAL	30.584.590.655	100,00

Entitas induk akhir Perseroan adalah PT Bakrie Global Ventura. Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Bakrie.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



Entitas induk akhir Perseroan adalah PT Bakrie Global Ventura. Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Bakrie.



DATA PERUSAHAAN
ANAK
PERUSAHAAN

ANAK PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN	% KEPEMILIKAN	BIDANG USAHA	MULAI BEROPERASI	DOMISILI
PT. Bakrie Connectivity	99,99%	Perdagangan Telekomunikasi	2010	Indonesia
PT. Bakrie Digital Net (dahulu PT. Bakrie Network)	99,80%	Infrastruktur Telekomunikasi	Tahap Pengembangan	Indonesia
Bakrie Telecom Pte. Ltd	100,00%	Entitas Bertujuan Khusus	2010	Singapura
PT. Anugrah Andalan Investama	99,80%	Produk & Jasa Digital	2016	Indonesia

PENCATATAN SAHAM

JENIS PENCATATAN	TANGGAL PENCATATAN	JUMLAH SAHAM BEREDAR (LEMBAR)
Penawaran Umum Perdana	3 Februari 2006	5.500.000.000
Pencatatan Saham	3 Februari 2006	18.779.415.495
Penerbitan Saham dengan Hak untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu	29 Februari 2008	28.482.417.579
Penerbitan Saham Tanpa Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu	22 Juni 2012 & 29 Agustus 2012	30.584.590.655

PROFESI PENUNJANG

PROFESI PENUNJANG	ALAMAT	TIPE JASA	NOMOR STTD
PT Ficomindo Buana Registrar	Mayapada Tower Lantai 10, Suite 02B Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920	Biro Administrasi Efek	09.03.1.66.53633
KAP Gideon Adi & Rekan	Plaza Sentral 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta 12930	Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasi	1158/KM.1/2015

PENCATATAN OBLIGASI

NAMA OBLIGASI	JUMLAH NOMINAL	TINGKAT SUKU BUNGA	JATUH TEMPO	PERINGKAT
Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007	RP. 650.000.000.000,-	11,9 p.a.	4 September 2012	id A-
Wesel Senior (Diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte. Ltd)	USD 380.000.000	11,50 p.a.	7 Mei 2015	-

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN



Pembahasan dan analisis kinerja keuangan BTEL berikut ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan serta informasi tertentu mengenai data keuangan dan operasi yang terkonsolidasikan.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk beberapa standar baru atau yang direvisi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013, serta peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM-LK).

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember

2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan dengan opini bahwa laporan konsolidasi Perseroan telah disajikan secara wajar dengan pengecualian dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

ANALISIS HASIL OPERASIONAL

Pada tahun 2015 yang merupakan tahun dimana Perseroan memulai untuk mempersiapkan model bisnis baru yaitu layanan komunikasi, informasi, dan hiburan berbasis digital, Perseroan mencatatkan jumlah pelanggan sebanyak 2.405.778 pelanggan. Sedangkan di tahun 2016 dimana Perseroan semakin memfokuskan langkah untuk mengelola dan menghadirkan produk layanan komunikasi, informasi, dan hiburan berbasis digital. Oleh karena fokus Perseroan dalam model

bisnis baru tersebut di tahun 2016, dan dalam rangka mempertahankan kualitas layanan keseluruhan yang baik dan efisiensi sistem, Perseroan mendata ulang secara internal pelanggan-pelanggan dari sisi pemanfaatan layanan Perseroan. Dari pendataan ulang tersebut, Perseroan mencatatkan 327.130 pelanggan yang masih secara aktif menggunakan layanan pada tahun 2016.



PENDAPATAN USAHA

Tabel berikut menjabarkan pendapatan usaha selama tahun 2015 dan 2016, di mana setiap item ditampilkan sebagai persentase dari pendapatan usaha.

DESKRIPSI	2016	%	2015	%	PERUBAHAN
Pendapatan Usaha Kotor	172,0	100,0	637,8	100,0	-73,0%
Pendapatan Jasa Telekomunikasi	141,3	82,2	534,0	83,7	-73,5%
Pendapatan Jasa Interkoneksi	30,7	17,8	103,9	16,3	-70,5%
Beban Jasa Interkoneksi	(30,0)	-17,4	(108,0)	-16,9	-72,2%
Potongan Harga	(52,6)	-31,0	(128,2)	-20,1	-59,0%
Pendapatan Usaha Bersih	89,8	52,2	401,6	63,0	-77,7%

Pendapatan kotor BTEL di 2016 sebesar Rp 172,0 miliar, mengalami penurunan sebesar 73% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan menurunnya pendapatan jasa telekomunikasi sebagai akibat menurunnya pelanggan bisnis layanan suara dan pesan. Di sisi lain, Perseroan mulai mulai memperoleh pendapatan dari pelanggan dengan target pangsa pasar perkantoran dan

hunian yang berlokasi di gedung-gedung tinggi. Walaupun kontribusi pendapatan dari pelanggan tersebut positif, namun masih belum bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap seluruh pendapatan Perseroan.

Dengan demikian secara keseluruhan realisasi pendapatan Perseroan belum mencapai sasaran yang diharapkan

BEBAN USAHA

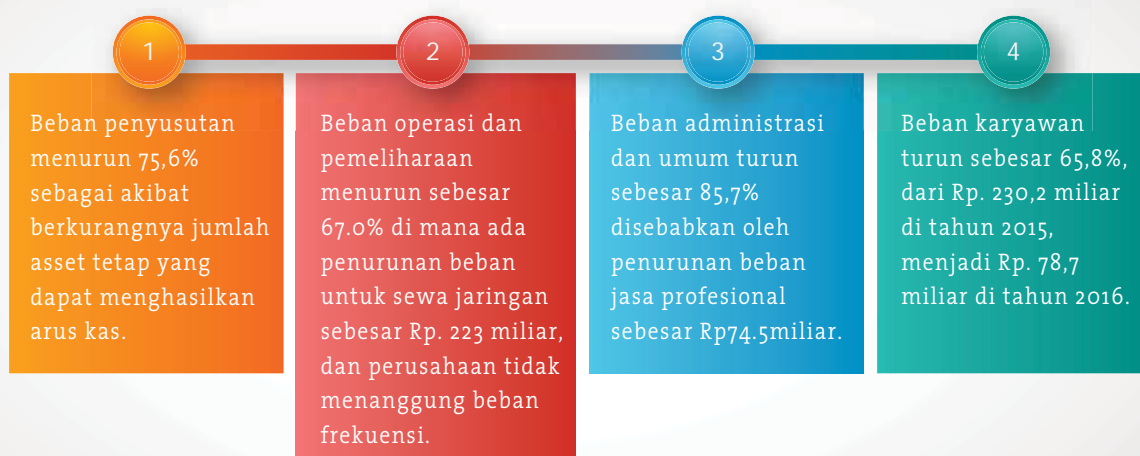
Tabel di bawah ini menunjukkan beban usaha selama tahun 2015 dan 2016, dengan setiap item disajikan dalam persentase dari beban usaha.



(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	%	2015	%	PERUBAHAN
Total Beban Usaha	1.047,9	608,3	4.235,3	664,0	75,2%
Penyusutan	815,7	74,3	3.348,8	525,0	75,6%
Operasi dan Pemeliharaan	125,4	72,9	379,6	59,5	67,0%
Administrasi dan Umum	26,6	15,5	186,5	29,2	85,7%
Karyawan	78,7	45,8	230,2	36,1	65,8%
Penjualan dan Pemasaran	1,4	0,8	90,2	14,1	98,4%

Beban usaha menurun sebesar 75,2% dibandingkan tahun lalu atau menjadi sebesar Rp 1,0 triliun untuk tahun 2016 dibandingkan dengan Rp 4,2 triliun pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh penurunan beban sebagai berikut:



Beban penjualan dan pemasaran turun sebesar 98,4% dari tahun sebelumnya, terutama dari aktivitas promosi.

BEBAN PENYUSUTAN

Beban penyusutan terdiri dari beban penyusutan atas peralatan jaringan dan aset tetap lainnya, termasuk beban instalasi dan beban konstruksi, serta hak sewa guna usaha dengan dasar sewa pembiayaan selama masa manfaat.

BEBAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Beban operasi dan pemeliharaan ini mencakup biaya lisensi dan konsesi, biaya listrik, pembayaran sewa dan beban operasional lainnya. Tabel di bawah ini menyajikan beban operasional dan beban pemeliharaan periode 2015 dan 2016, dengan setiap item yang disajikan dalam persentase dari pendapatan usaha kotor.

DESKRIPSI	2016	%	2015	%	PERUBAHAN
Total Beban Operasi dan Pemeliharaan	125,4	72,9	379,6	59,5	66,6%
Lisensi	-	-	3,1	0,5	100%
Listrik	9,6	5,6	30,2	4,7	68,2%
Sewa	114,0	66,3	337,2	52,9	66,2%
Royalti Konsesi kepada Depkominfo	1,6	0,9	6,4	1,0	75%
Pemeliharaan dan Perbaikan	0,2	0,1	2,4	0,4	91,7%
Asuransi	-	-	0,3	0,0	100%

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi di dalamnya termasuk beban profesional, sewa, transportasi dan beban administrasi dan umum lainnya. Tabel berikut menunjukkan beban umum dan administrasi selama periode 2015 dan 2016, dengan setiap item yang disajikan dalam persentase dari pendapatan usaha kotor.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	%	2015	%	PERUBAHAN
Total Beban Umum dan Administrasi	26,6	15,5	186,5	29,2	85,7%
Jasa Profesional	12,1	7,0	86,6	13,6	86%
Sewa	8,3	4,8	31,3	4,9	73,5%
Transportasi	0,2	0,1	2,5	0,4	92%
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	5,1	3,0	40,7	6,4	87,5%
Pemeliharaan Kantor	0,2	0,1	3,3	0,5	94%
Telepon, Listrik dan Air	0,2	0,1	0,8	0,1	75%
Perlengkapan Kantor	0,2	0,1	0,9	0,1	77,8%
Perijinan, lisensi dan bea masuk	0,1	0,1	17,6	2,8	99,4%
Lain - lain	0,2	0,1	2,8	0,4	92,9%

BEBAN KARYAWAN

Beban Karyawan terdiri dari biaya gaji dan upah, transportasi dan biaya karyawan lainnya yang berkaitan dengan manfaat dan pelatihan. Tabel berikut menunjukkan biaya karyawan selama periode 2015 dan 2016, dengan setiap item yang disajikan dalam persentase dari pendapatan usaha kotor.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	%	2015	%	PERUBAHAN
Total Beban Karyawan	78,7	45,8	230,2	36,1	65,8%
Gaji dan Upah	75,9	44,1	209,6	32,9	63,8%
Transportasi	1,9	1,1	11,0	1,7	82,7%
Tunjangan Kesehatan	0,1	0,4	6,4	1,0	98,4%
Tunjangan Uang Makan	0,8	0,1	3,3	0,5	75,8%

BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

Tabel berikut menunjukkan penjualan dan biaya pemasaran selama periode 2015 dan 2016, dengan setiap item yang disajikan dalam persentase dari pendapatan usaha kotor.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	%	2015	%	PERUBAHAN
Total Beban Penjualan dan Pemasaran	1,4	0,8	90,2	14,1	98,4%
Iklan, Promosi dan Pameran	0,4	0,2	85,7	13,4	99,5%
Sewa	0,8	0,5	2,0	0,3	60%
Lain - Lain	0,2	0,1	2,5	0,4	92%

LABA DAN MARGIN USAHA

EBITDA negatif berjumlah Rp. 142,4 miliar untuk tahun 2016. Manajemen berupaya untuk terus mencari sumber-sumber pendapatan baru, dan juga melanjutkan upaya pengendalian biaya, untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan sasaran yang diharapkan pada awal tahun 2016, maka turunya EBITDA negatif ini sesuai dengan perhitungan. Pada awal tahun 2016, Perseroan memperhitungkan bahwa pendapatan jasa telekomunikasi akan menurun seiring dengan menurunnya

pelanggan bisnis layanan suara dan pesan. Perseroan mengharapkan untuk memperoleh pendapatan dari pelanggan dari pangsa pasar perkantoran dan hunian yang berlokasi di gedung-gedung tinggi. Dalam realisasinya, walaupun pendapatan dari pelanggan tersebut positif, namun secara keseluruhan masih belum bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

Di tahun 2017, Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan dari layanan pelanggan korporat ini.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	2015	PERUBAHAN
EBITDA	(142,4)	(484,9)	70,6%
Margin EBITDA	-82,8%	-76,0%	-8,9%
Laba (Rugi) Usaha	(958,1)	(3.833,7)	75%

PENDAPATAN (BEBAN) NETTO LAIN-LAIN

Pada tahun 2016, Perseroan mengalami kerugian yang cukup besar dari pergerakan yang merugikan pada nilai tukar dari Rp 13.795/USD per 31 Desember 2015 turun menjadi Rp 13.436/USD per 31 Desember 2016 (2,6%). Selain itu, Perseroan mengakui penurunan aset tetap pada aset berteknologi usang.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	%	2015	%	PERUBAHAN
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(372,3)	-216,5	(4.672,7)	-732,6	92%
Laba Atas Penjualan Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	-		55,7	8,7	-100%
Beban Keuangan	(709,7)	-412,6	(752,0)	-117,9	5,6%
Laba (Rugi) Selisih Kurs	337,8	196,4	(793,1)	-124,3	-57,4%
Penurunan Nilai Aset Tetap	-	-	(1.447,5)	-226,9	100%
Beban Sisa Masa Sewa	-	-	(1.667,8)	-261,5	100%
Lain-lain Bersih	(0,3)	-0,2	(68,0)	-10,7	99,6%

LABA (RUGI) BERSIH

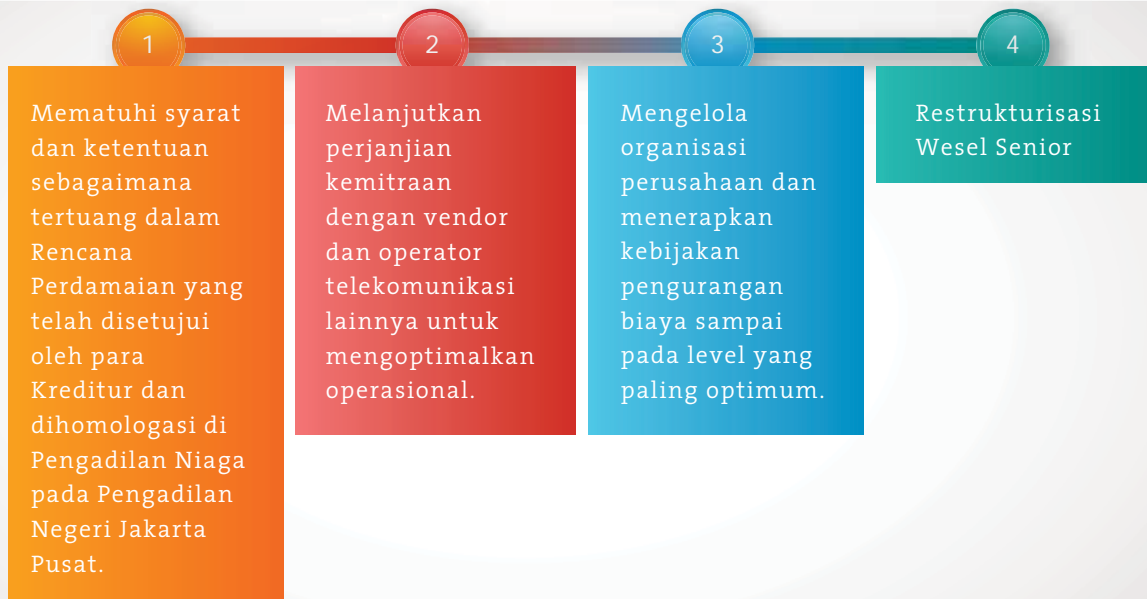
Pada tahun 2016, Perseroan membukukan kerugian bersih sebesar Rp 1,3 triliun.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	2015	PERUBAHAN
Laba (Rugi) Bersih	(1.392,1)	(8.640,8)	83,9%
Manfaat (Beban) Pajak	(61,8)	(134,4)	54%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(1.330,3)	(8.506,4)	84,3%

LIKUIDITAS DAN EKUITAS

Pada tahun 2016 sumber dana Likuiditas Perseroan diperoleh hanya terbatas dari aktivitas operasional Perseroan. Selain itu, belanja modal Perseroan berkurang secara signifikan hanya untuk mendukung pemeliharaan jaringan yang sudah ada. Perseroan berada dalam posisi defisiensi modal sebesar Rp 13,9 triliun pada tanggal 31 Desember 2016. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kerugian penurunan nilai aset tetap, kerugian dari selisih kurs, beban keuangan, dan kerugian operasional dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan melebihi Total Aset Lancar, hal ini disebabkan Utang Obligasi Entitas Anak telah direklasifikasi menjadi Liabilitas Jangka Pendek. Sehubungan dengan hal ini, manajemen Perseroan telah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:



ARUS KAS

Tabel berikut menunjukkan ringkasan laporan arus kas perusahaan untuk periode 2015 dan 2016.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	2015	PERUBAHAN
Arus Kas dari Aktivasi Operasi	(2,9)	(157,6)	-98,2%
Arus Kas dari Aktivasi Investasi	0,6	147,3	-99,6%
Arus Kas Bersih	(3,5)	(10,3)	-66,0%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	0,0	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(3,5)	(10,3)	-66,0%
Akibat dari Selisih Kurs	(0,0)	0,2	-100%
Kas dan Setara Kas, Awal Tahun	5,7	15,8	-63,9%
Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun	2,2	5,7	-61,4%

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Selama tahun 2016, kas bersih dikeluarkan untuk aktivitas operasi adalah Rp 2,9 miliar, yang terdiri atas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 98,9 miliar, diikuti dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 17,5 miliar, pembayaran untuk karyawan Rp 82,9 miliar, pembayaran beban keuangan Rp 1,5 miliar, dan pembayaran pajak sebesar Rp 0,1 miliar.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Selama tahun 2016, kas bersih yang diterima dari aktivitas investasi adalah Rp 0,6 miliar, yang merupakan pembayaran akuisisi entitas anak.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Selama tahun 2016, tidak ada kas bersih yang diterima atau dikeluarkan dari aktivitas pendanaan.

NERACA

Aset Lancar

Tabel berikut menunjukkan ringkasan aset lancar pada akhir tahun 2015 dan 2016. Aset lancar menurun sebesar 32,0% dari Rp 64,0 miliar menjadi Rp 43,5 miliar pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan aset lancar lainnya terutama oleh Piutang Usaha, Persediaan, Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	2015	PERUBAHAN
Total Aset Lancar	43,5	64,0	-32,0%
Kas dan Setara Kas	2,2	5,7	-61,4%
Aset Lancar Lainnya	41,3	58,3	-29,2%

Aset Tidak Lancar

Tabel berikut menunjukkan ringkasan aset tidak lancar pada akhir tahun 2015 dan 2016. Aset tidak lancar turun menjadi Rp 1,5 triliun, terutama disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap.

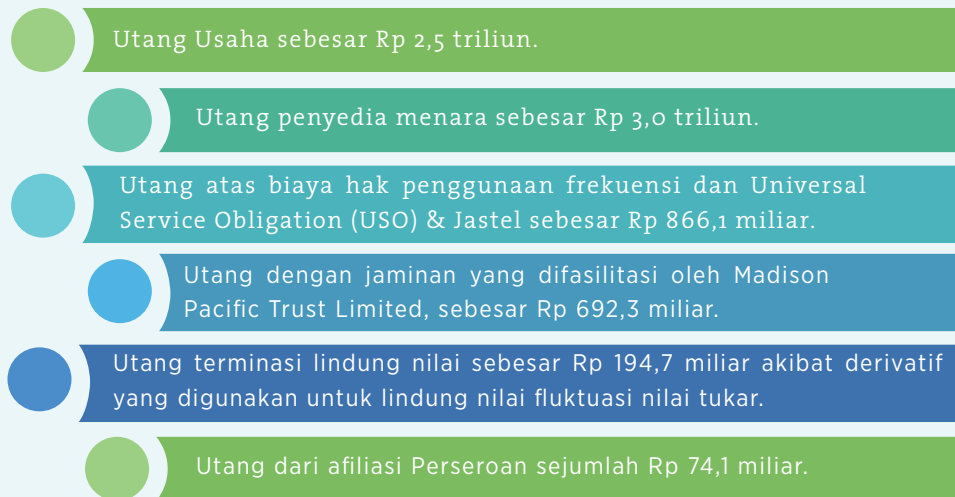
(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	2015	PERUBAHAN
Aset Tidak Lancar	1.526,3	2.347,6	-35%
Aset Tetap - Netto	816,3	1.631,9	-50%

Liabilitas

Jumlah Liabilitas mencapai Rp 15,5 triliun pada 31 Desember 2016. Liabilitas Lancar meningkat 7,1% menjadi Rp 8,2 triliun pada tahun 2016. Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 326,7 miliar merupakan saldo di luar utang usaha yang diselesaikan melalui PKPU.

Pada tahun 2016, utang sebesar Rp 7,2 triliun dicatat sebagai Liabilitas Jangka Panjang dalam akun utang yang diselesaikan melalui PKPU yang terdiri atas:



(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	2015	PERUBAHAN
Jumlah Liabilitas Lancar	8.198,4	7.649,2	7,2%
Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	5.105,9	5.242,6	-2,6%
Kewajiban Lancar Lainnya	3.092,5	2.406,6	28,5%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.276,3	7.275,7	0,0%
Pajak Tangguhan	118,2	54,6	116,5%
Liabilitas Imbalan Kerja	0,8	23,1	-96,5%
Pinjaman Bank	0,3	0,8	-62,5%
Utang yang Diselesaikan Melalui PKPU	7.157,0	7.197,2	-0,6%

Pinjaman Bank

Untuk keterangan yang lengkap mengenai Pinjaman Bank dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit halaman 46 catatan 16.

Laporan Keuangan Audit halaman 47 catatan 17.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pada tanggal 8 Desember 2014 rapat kreditur yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan

oleh Perseroan sebagai akibat dari tidak dibayarkannya utang jatuh tempo. Pada tanggal 9 Desember 2014 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (homologasi) atas Perjanjian Perdamaian tersebut (lihat catatan 40 atas Laporan Keuangan konsolidasian).

Obligasi Global / Wesel Senior

Untuk keterangan lebih lengkap mengenai Wesel Senior dapat dilihat pada

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	2015	PERUBAHAN
Pinjaman Bank	0,5	1,3	-61,5%
Wesel Senior	5.105,7	5.242,1	-2,6%
Utang yang Diselesaikan Melalui PKPU	7.157,0	7.197,2	-0,6
Total	12.263,2	12.440,5	-1,4%

Rasio Utang

DESKRIPSI	2016	2015
Rasio Hutang terhadap Asset	0.63	0.37
Rasio Hutang terhadap Ekuitas	0.07	0.07
Jumlah hari hutang	513.5	120.3

Tingkat Kolektibilitas Piutang

DESKRIPSI	2016	2015
Jumlah Hari Piutang	6.6	14.6

Struktur Permodalan

Struktur Permodalan Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2016	PORSI	2015	PORSI
Jumlah Modal yang Diinvestasikan	0,0	-	(72,6)	100,0%
Hutang	12.263,2	-	12.440,5	-17125,5%
Jangka Pendek	5.105,9	-	5.242,6	-7216,9%
Jangka Panjang	7.157,3	-	7.197,9	-9908,6%
Modal	(13.897,5)	-	(12.513,2)	17225,5%

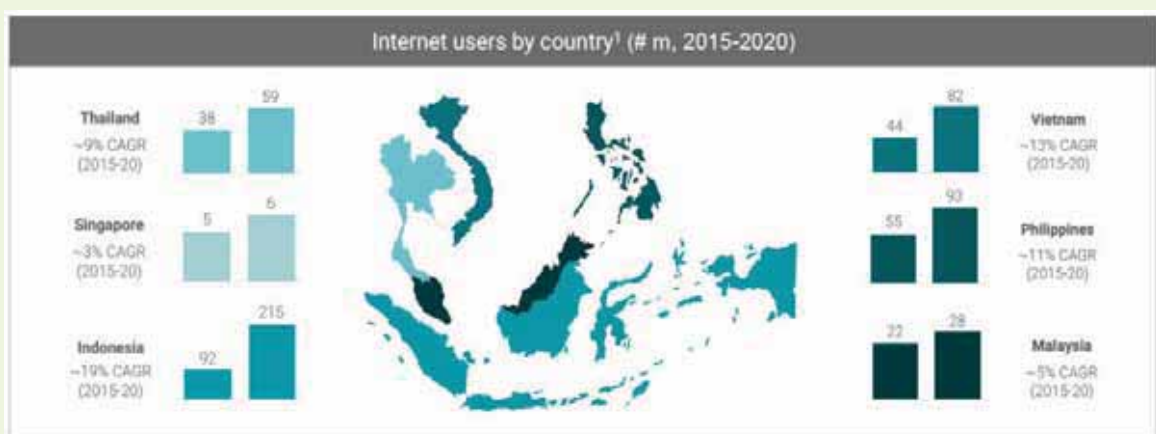
Perseroan berada pada posisi defisiensi modal sebesar Rp 13,9 triliun per 31 Desember 2016. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kerugian operasional tahun-tahun sebelumnya, penurunan Aset Tetap, rugi selisih kurs, dan biaya keuangan yang signifikan. Apabila dibandingkan dengan proyeksi untuk tahun 2016, maka struktur permodalan pada tahun 2016 sesuai dengan perhitungan.

Investasi Barang Modal

Pada tahun 2016, Perseroan tidak melakukan perikatan material untuk investasi barang modal dan belum merealisasikan investasi barang modal baru. Hal ini karena bisnis yang dilakukan Perseroan belum sampai pada tahap untuk pengadaan barang modal.

Prospek Usaha

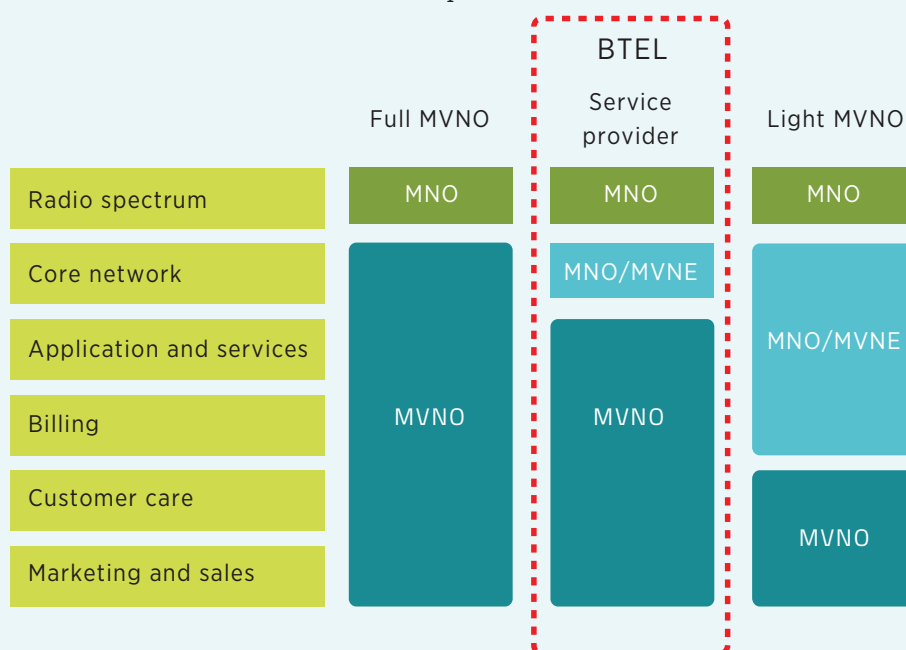
Berdasarkan riset dari Worldbank, Google, dan Temasek, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, dengan perkiraan 215 juta pengguna pada tahun 2020. Sedangkan seiring pertumbuhan Smartphone dan koneksi internet, aplikasi data juga akan mengalami perkembangan, untuk komunikasi dan juga untuk layanan konten. Berdasarkan Survei GlobalWebIndex dalam laporan wearesocial, 27% pengguna smartphone menggunakan mobile messenger, 22% menonton video dan 19% bermain games di perangkat mobile. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar di bisnis komunikasi, informasi, dan hiburan digital.



Strategi Perseroan untuk melayani pelanggan bisnis komunikasi, informasi, dan hiburan digital tersebut adalah dengan tidak membangun atau memiliki jaringan telekomunikasi sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan operator pemilik jaringan berdasarkan konsep MVNO, sehingga Perseroan tidak perlu mengeluarkan belanja modal yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian Pyramid Research, secara umum ada 3 model operasi utama MVNO yaitu full MVNO, service provider, dan light MVNO. Model operasi MVNO yang sesuai untuk Perseroan yaitu Perseroan sebagai service provider, dimana spektrum frekuensi dan core network disediakan oleh MNO sedangkan Perseroan menjalankan fungsi customer care, sales, and marketing.

Model Bisnis Operasi Utama MVNO



Strategi Pemasaran

Dalam melakukan pemasaran atas produknya, strategi Perseroan adalah dengan menargetkan pangsa pasar perkantoran dan hunian yang berlokasi di gedung-gedung tinggi. Perseroan juga memfokuskan pada pelanggan yang produktif yang menghasilkan pendapatan per pelanggan yang tinggi.

Kebijakan Deviden

Selama 2 tahun buku terakhir, Perseroan tidak membagikan deviden oleh karena Perseroan mencatatkan rugi bersih pada periode 2 tahun buku terakhir tersebut.

Penawaran Umum

Perseroan melakukan Penawaran Umum terakhir kali adalah pada tahun 2008 untuk Penawaran Umum Terbatas I tahun 2008, dimana tujuan penggunaan telah selesai dilaporkan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian sejak akhir pelaporan tersebut hingga akhir tahun buku 2016 tidak ada lagi pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ataupun perubahannya.

Informasi Material

Investasi Pada Anak Perusahaan

Pada tahun 2016, Perseroan telah memiliki Entitas Anak yang bernama PT Anugerah Andalan Investama (AAI), dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan antara lain perdagangan produk dan jasa berbasis internet, internet provider, jasa penyediaan sumber daya manusia, jasa televisi berbayar, jasa multimedia, dan jasa media cetak dan elektronik. Kepemilikan saham Perseroan pada AAI yaitu 99,8%, dengan nilai aset AAI pada tahun 2016 yaitu Rp717 juta.

Di tahun 2016 Perseroan melalui AAI melakukan pengambilalihan saham perusahaan di PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK) sebesar 70,7% dari total saham yang ditempatkan dan disetor. MKK sendiri merupakan perusahaan yang dapat bergerak di kegiatan usaha meliputi perdagangan barang dan jasa antara lain perdagangan alat-alat telekomunikasi, elektronik, jasa pembangunan instalasi telekomunikasi, industri barang-barang elektronik, jasa penerbitan dan desain grafis, jasa teknologi informasi dan internet konten serta jasa multimedia. Pada saat diambil alih nilai aset MKK pada tahun 2016 yaitu Rp869 juta. Dalam menjalankan kegiatan usahanya MKK memiliki anak perusahaan operasional yaitu PT. Layanan Prima Digital (LPD) yang bergerak di kegiatan usaha meliputi perdagangan barang-barang elektronik dan telekomunikasi serta peralatan jaringan, penyediaan jasa internet dan multimedia, jasa

televisei berbayar, jasa telekomunikasi, jasa publikasi dan penyiaran, jasa e-commerce dan jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa-jasa terkait lainnya. Sejak awal pendiriannya, PT. Layanan Prima Digital (LPD) telah melakukan kegiatan operasional antara lain penyediaan layanan Call Center, Contact Center, Customer Relation Management (CRM), layanan sambungan telekomunikasi dengan segmen pengguna hunian dan perkantoran di high rise building. Melalui anak-anak perusahaan ini, Perseroan sudah mulai melakukan pengembangan model bisnis baru dan ke depan diharapkan anak-anak Perusahaan tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Perseroan.

Penambahan Modal

Pada tanggal 28 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk melakukan penambahan modal baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.





SAMANTHA BLACK
Marketing Director

EXPERIENCE

POSITION TITLE | [Company Name] | [Dates]

[Detailed description of the position and the responsibilities and tasks of the position.]

POSITION TITLE | [Company Name] | [Dates]

[Detailed description of the position and the responsibilities and tasks of the position.]

POSITION TITLE | [Company Name] | [Dates]

[Detailed description of the position and the responsibilities and tasks of the position.]

POSITION TITLE | [Company Name] | [Dates]

[Detailed description of the position and the responsibilities and tasks of the position.]

REFERENCES

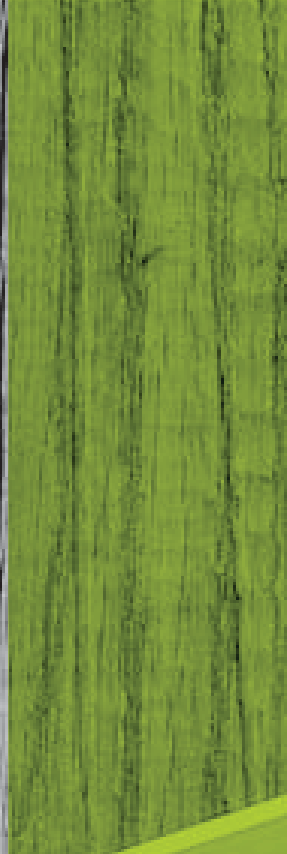
ELIOT BROWN
[Title]
[Company Name]

ELIOT BROWN
[Title]
[Company Name]

ELIOT BROWN
[Title]
[Company Name]

COVER LETTER

[Detailed description of the position and the responsibilities and tasks of the position.]





LAPORAN BERKELANJUTAN

LAPORAN BERKELANJUTAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

DIREKSI

Direksi merupakan komponen utama dalam suatu perseroan terbatas untuk menggerakkan roda organisasi dan kegiatan operasional perseroan terbatas tersebut. Ketentuan tentang pengangkatan Direksi BTEL tercantum dalam Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Direksi BTEL diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BTEL, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai tujuannya.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan
- c. dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:
 - Meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang Diperoleh dengan membeli atau dengan cara lain (kecuali hibah), barang tidak bergerak dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
 - Menjual atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak (kecuali dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
 - Mendirikan suatu usaha baru dan/ atau turut serta dalam perusahaan lain tanpa mengurangi setiap persetujuan yang mungkin diperlukan dari instansi yang berwenang, satu dan lain tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan bursa efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
 - Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist)
 - Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur manajemen Perseroan
- d. Direktur Utama dan satu anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

Direksi telah memiliki dan menyatakan komitmennya terhadap Piagam Direksi (Board of Directors Charter) sebagai pedoman etik dan perilaku sebagai anggota direksi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengurusan Perusahaan.

Keanggotaan dan periode jabatan Direksi BTEL pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN TERAKHIR	PERIODE JABATAN
R. Bismarka Kurniawan	Direktur Utama	RUPS 28 April 2016	2016 - 2018
Jastiro Abi	Wakil Direktur Utama	RUPS 28 April 2016	2016 - 2018
Taufan EN Rotorasiko	Wakil Direktur Utama	RUPS 12 Januari 2016	2016 - 2018
W. Mark Robson	Direktur Independen	RUPS 28 April 2016	2016 - 2018
Andi Pravidia Saliman	Direktur	RUPS 28 April 2016	2016 - 2018
Harya Mitra Hidayat	Direktur	RUPS 22 Juni 2015	2015 - 2018

Jika tidak ditetapkan lebih lanjut, maka bidang tugas dan tanggung jawab anggota direksi adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
R. Bismarka Kurniawan	Direktur Utama	Koordinasi seluruh bidang kerja direksi
Jastiro Abi	Wakil Direktur Utama	Strategy & Business Development
Taufan EN Rotorasiko	Wakil Direktur Utama	Operasional & Komersial
W. Mark Robson	Direktur	Produk & Teknologi
Andi Pravidia Saliman	Direktur	Keuangan
Harya Mitra Hidayat	Direktur	Risk, Compliance & Human Capital



Sepanjang tahun 2016 Direksi mengadakan rapat sebanyak 14 kali dengan perincian sebagai berikut:

TANGGAL	Fokus Agenda	KEHADIRAN (%)
8 Januari 2016	Pembahasan rencana penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai implementasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Persiapan RUPS Luar Biasa untuk agenda penambahan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dan pengangkatan anggota direksi baru.	100
23 Februari 2016	Pembahasan secara umum kinerja operasional dan keuangan tahun 2015 dan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. Pembahasan lebih lanjut proses penerbitan OWK dan penambahan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu Update kinerja operasional dan keuangan	100
31 Maret 2016	Pembahasan update Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 Pembahasan model bisnis baru dan unit usaha. Persiapan RUPS Luar Biasa Update kinerja operasional dan keuangan	100
12 April 2016	Pembahasan kinerja operasional dan keuangan kuartal I tahun 2016 Pembahasan model bisnis Persiapan RUPS LB	100
26 April 2016	Persiapan RUPS LB	60
17 Mei 2016	Pembahasan penerbitan OWK dan penambahan modal tanpa HMETD Update kinerja operasional dan keuangan	100
2 Juni 2016	Persiapan RUPS Tahunan dan Luar Biasa Update kinerja operasional dan keuangan	100
24 Juni 2016	Persiapan RUPS Tahunan dan Luar Biasa Persiapan penerbitan OWK dan penambahan modal tanpa HMETD	100
19 Juli 2016	Pembahasan strategi bisnis Pembahasan laporan keuangan kuartal II 2016	100
24 Agustus 2016	Update kinerja operasional dan keuangan Pembahasan strategi bisnis dan unit usaha	83%
28 September 2016	Update kinerja operasional dan keuangan	100
17 Oktober 2016	Pembahasan laporan keuangan kuartal II 2016 Update kinerja unit usaha	100
24 November 2016	Update kinerja operasional dan keuangan Update kinerja unit usaha	100
20. Desember 2016	Update kinerja operasional dan keuangan Update kinerja unit usaha Persiapan Public Expose	100

Selama 2016 Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat bersama sebanyak empat kali dengan perincian sebagai berikut:

TANGGAL	FOKUS AGENDA	KEHADIRAN (%)
8 Januari 2016	Update umum kinerja bisnis tahun 2015 Pembahasan rencana penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai implementasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Persiapan RUPS Luar Biasa untuk agenda penambahan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dan pengangkatan anggota direksi baru.	100
26 April 2016	Pembahasan kinerja operasional dan keuangan kuartal I tahun 2016 Pembahasan model bisnis Persiapan RUPS LB	75
24 Juni 2016	Persiapan RUPS Tahunan dan Luar Biasa Update kinerja operasional dan keuangan	88
19 Desember 2016	Update kinerja operasional dan keuangan Persiapan bisnis tahun 2017.	90

Di samping rapat bersama antara dewan komisaris dan direksi, dalam tugas pengawasan Perusahaan sepanjang tahun 2016, Direksi BTEL mendapatkan dukungan yang positif dari organ komite-komite yang dimiliki Perusahaan. Komite-komite Perusahaan secara aktif memantau situasi Perusahaan dan memberikan masukan, saran, serta rekomendasi kepada direksi apabila diperlukan. Selain itu, forum diskusi dan konsultasi yang diadakan antara komite-komite dengan direksi juga merupakan sarana yang efektif bagi direksi untuk mendapatkan masukan, saran, serta rekomendasi dari komite-komite tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan dan implementasi hasil Rapat Umum Pemegang Saham BTEL, pada tahun 2015 Perseroan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp 5,211 triliun menjadi Rp 10,711 triliun. Peningkatan modal dasar Perseroan ini bertujuan untuk mencukupi alokasi penerbitan saham baru yang merupakan salah satu dari rang-

kaian implementasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Perseroan dimana salah satu bentuk penyelesaian kewajiban Perseroan adalah dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) untuk para kreditur. Pada tahun yang sama modal dasar Perusahaan telah ditingkatkan sesuai dengan putusan RUPS Luar Biasa tersebut.

Pada tahun 2016, Perseroan juga telah melaksanakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui Perseroan untuk menambah modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (Non HMETD) dengan terlebih dahulu menerbitkan OWK. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, Direksi telah melaksanakan kewajiban yang telah digariskan dalam RUPS sebelumnya dan Perjanjian Perdamaian. Terhitung sejak bulan September 2016 kreditur Perseroan yang telah memegang OWK berhak untuk mengkonversi OWK tersebut menjadi saham baru Perseroan. Sepanjang tahun 2016 ini tidak terdapat permintaan konversi OWK menjadi saham baru Perseroan.

DATA PERUSAHAAN

DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan Dewan Komisaris tercantum dalam Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan: Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 01** Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perseroan, dan hal-hal penting lainnya.
- 02** Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran dengan segera memberikan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- 03** Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- 04** Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

Keanggotaan dan periode jabatan dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Keanggotaan Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 orang anggota terdiri dari 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang atau lebih Komisaris
- Periode jabatan dari Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal RUPS pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah pengangkatan

Dewan Komisaris telah memiliki dan menyatakan komitmennya terhadap Piagam Dewan Komisaris (Board of Commissioners Charter) sebagai pedoman etik dan perilaku sebagai anggota dewan komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi Perusahaan.

Keanggotaan dan periode jabatan Dewan Komisaris BTEL pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN TERAKHIR	PERIODE JABATAN
Anindya Novyan Bakrie	Komisaris Utama	RUPST 22 Juni 2015	2015 – 2018
Bobby Gafur S Umar	Wakil Komisaris Utama	RUPST 22 Juni 2015	2015 – 2018
Ai Mulyadi Mamoer	Wakil Komisaris Utama	RUPST 22 Juni 2015	2015 – 2018

Selama tahun 2016 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	FOKUS AGENDA	KEHADIRAN (%)
8 Januari 2016	Pembahasan saran penguatan kinerja Perusahaan di tahun 2016 dan GCG	100
30 Maret 2016	Pembahasan saran penguatan organisasi perusahaan.	67
26 April 2016	Pembahasan umum laporan keuangan Perusahaan tahun 2016	67
24 Juni 2016	Pembahasan saran persiapan RUPS Tahunan dan Luar Biasa	67
19 Oktober 2016	Pembahasan umum laporan keuangan Perusahaan Semester II tahun 2016	67
19 Desember 2016	Pembahasan saran strategi bisnis tahun 2017 dan kegiatan komite-komite	67

Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi

1. Kebijakan Remunerasi Komisaris diatur dalam Pasal 113 UU PT bahwa gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris diputuskan oleh RUPS. Dengan demikian diketahui remunerasi untuk Dewan Komisaris adalah gaji atau honorarium dan tunjangan. RUPS menentukan remunerasi bagi para Komisaris.
2. Kebijakan remunerasi Direksi Pasal 96 UU PT mengatur bahwa gaji dan tunjangan Direksi diputuskan oleh RUPS. Dengan demikian diketahui remunerasi untuk Direksi adalah gaji dan tunjangan
3. Kewenangan RUPS untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris
4. Tabel berikut menguraikan jumlah dan jenis remunerasi Komisaris dan Direksi

(dalam miliar Rupiah)

REMUNERASI	2016	2015
Dewan Komisaris	2.846,0	2.846,0
Direksi	8.772,5	7.695,0
Total	11.618,5	10.541,0

KOMITE-KOMITE

Dalam anggaran dasar tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan serta tugas dan wewenang dari komite-komite yang membantu Dewan Komisaris. Komite yang wajib dimiliki perusahaan terbuka adalah Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan komite-komite lainnya merupakan suatu wewenang yang dimiliki oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai ketentuan pasal 121 UU PT dan ini juga merupakan itikad baik dari perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

1. Komite Audit

Komite Audit Perseroan pertama kali dibentuk dan pengangkatan anggota Komite Audit didasarkan pada peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana diubah melalui Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Dalam menjalankan kegiatannya, Komite Audit memiliki kerangka tugas dan wewenang sebagai berikut:

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam periode tahun 2016 Komite Audit beranggotakan dua orang yang terdiri dari satu orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan satu orang anggota. Satu keanggotaan yang lowong karena adanya pengunduran diri salah satu anggota masih dalam proses penggantian atau pencalonan anggota baru. Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi keahlian dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. Susunan Komite Audit per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

• **AI MULYADI MAMOER**

(CV dapat dilihat di profil Dewan Komisaris)

• **YANSEN PASARIBU, CPA**

Pimpinan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Yansen Pasaribu sejak tahun 1995 - 2009, sekarang Partner KAP Arman Dhani & Rekan. Memiliki pengalaman selama 20 tahun di bidang akuntansi, audit, dan pajak. Anggota dari Institut Akuntan Publik Indonesia (No. Reg. IAPI: 711). Pengalaman di bidang audit bergabung dengan KPMG dari tahun 1989 - 1995. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1991 dan terdaftar sebagai Akuntan Publik (No. Reg. Akuntan Negara D-8968, dan No. Akuntan Publik: AP-0840), serta gelar Indonesia Certified Public Accountant (CPA) No. C-000070, dari IAPI pada 16 Januari 2009.

Sebagai perusahaan publik yang wajib memiliki Komite Audit, sejak beberapa tahun yang lalu BTEL telah menyusun dan memiliki Piagam Komite Audit yang menjadi salah satu pedoman bagi Komite Audit dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pada tahun buku 2016, sebagaimana juga pada tahun-tahun sebelumnya, Perseroan tetap menjaga prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Pakta Integritas Komite Audit. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Pakta Integritas ini sangat ditekankan oleh Komite Audit untuk selalu diperhatikan dan diterapkan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Pakta Integritas ini didukung dengan 7 karakteristik integritas BTEL yang menjadi landasan penerapan Good Corporate Governance yaitu sebagai berikut:

1. Jujur, yang bermakna bahwa terdapat keselarasan antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan; menghindari benturan kepentingan; menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas; dan mengakui kesalahan serta menyampaikan sesuatu sesuai fakta.
2. Tanggung Jawab, yang bermakna bahwa terdapat kemampuan untuk menerima amanat dan menjalankan tugas serta

kewajiban yang diberikan; dan menuntaskan pekerjaan yang diberikan

3. Visioner, yang bermakna bahwa terdapat keyakinan dalam mewujudkan rencana dan cita-cita; dan ingin melakukan penyempurnaan dan menjadi yang terbaik.
4. Disiplin, yang bermakna bahwa konsistensi terhadap rencana yang telah dibuat dan menjalankan sesuai ketentuan; dan tidak berhenti berupaya hingga mencapai hasil yang diinginkan.
5. Kerja sama, yang bermakna bahwa terdapat optimalisasi potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, dan saling mendukung untuk menyelesaikan tugas bersama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang disepakati bersama;
6. Adil, yang bermakna bahwa terdapat pengambilan sikap dan keputusan secara proporsional, dan mengapresiasi serta menghukum sesuai dengan ketentuan.
7. Peduli, yang bermakna bahwa terdapat pemahaman atas kondisi pihak lain dan ikut merasakan kesulitan yang dihadapi; dan berinisiatif membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan.

Komite Audit juga senantiasa mendorong Perseroan berikut insan-insan di dalamnya untuk mengedepankan etika dan integritas dalam melakukan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Terkait pemenuhan komitmen integritas insan BTEL, sejak beberapa tahun yang lalu secara rutin atas peran Komite Audit, BTEL memberikan penghargaan "Integrity Award BTEL" kepada beberapa karyawan yang memenuhi kriteria atau aspek Good Corporate Governance, Pakta Integritas, SOP, dan Peraturan Perusahaan dengan baik selama tahun tersebut. Tradisi pemberian "Integrity Award BTEL" tersebut merupakan prakarsa dan dorongan dari Komite Audit kepada Perusahaan dan diharapkan dapat dilangsungkan secara terus menerus setiap tahunnya.

2. Komite Manajemen Risiko

- a. Dasar hukum pengangkatan komite manajemen risiko adalah:
 1. Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
 2. Peraturan Bapepam/Ojk no. IX.B.1 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik.
- b. Tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko adalah membantu dewan komisaris untuk:
 1. Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko (risk management policy) dan memberikan penilaian atas limit risiko (risk appetite and risk tolerance) yang ditetapkan oleh direksi.
 2. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan prasarana, sarana, sumber daya, dan kompetensi untuk penerapan manajemen risiko perusahaan (enterprise risk manajemen (ERM))
 3. Memastikan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan (risks identification, risks assessment and risks treatment, risks monitoring) berlangsung sesuai dengan standar manajemen risiko yang diakui secara internasional.
 4. Meminta dan mengumpulkan laporan secara berkala dari manajemen mengenai risiko-risiko usaha yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - Risiko Teknologi
 - Risiko Regulasi
 - Risiko Operasional
 - Risiko Strategis
 - Risiko Persaingan Usaha
 - Risiko Keuangan
 - Risiko Kemitraan
 - Risiko Sosial
 5. Melakukan diskusi, evaluasi, verifikasi, dan rekomendasi atas laporan-laporan manajemen risiko tersebut pada butir (4) dan melaporkan hasilnya kepada dewan komisaris.
 6. Bila diperlukan komite manajemen risiko dapat berkomunikasi dengan komite audit terkait dengan hasil audit yang menyangkut aspek pengkajian risiko dan kepatuhan.
 7. Bila diperlukan komite manajemen risiko atas persetujuan dewan komisaris dapat mengundang pihak luar yang independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (ERM)
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh dewan komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban dewan komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Wewenang komite manajemen risiko adalah sebagai berikut:
 1. Memperoleh data/informasi dari internal auditor mengenai hasil audit internal yang terkait dengan risiko usaha
 2. Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan pantauan risiko dan kepatuhan yang dilakukan auditor eksternal
 3. Memantau secara langsung efektivitas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan dan berkomunikasi dengan penanggung jawab pelaksana manajemen risiko perusahaan
 4. Atas persetujuan dewan komisaris, dapat memperoleh fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu:
 - Mendapatkan asistensi, nasehat, masukan dari tenaga ahli risiko
 - Mendapatkan informasi yang diperlukan dari seluruh karyawan mengenai risiko
 - Menemui semua pejabat perusahaan, eksternal auditor, dan konsultan perusahaan bila diperlukan
 5. Atas persetujuan dewan komisaris dan direksi, melaksanakan pemeriksaan khusus bila ditemukan adanya indikasi penanganan risiko usaha yang tidak benar yang dapat menimbulkan dampak besar bagi perusahaan

d. Komite manajemen risiko terdiri dari dua orang yaitu satu ketua dan satu anggota. Seluruh keanggotaan komite Manajemen risiko telah memenuhi kriteria independensi keahlian dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. Susunan komite manajemen risiko pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Anindya N. Bakrie	Ketua
Bobby Gafur S. Umar	Anggota

e. Laporan Kegiatan tahun 2016

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sepanjang tahun 2016 sebanyak dua kali, Selama tahun tersebut Komite Manajemen Risiko kembali mengingatkan Direksi BTEL untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Agar direksi selalu meninjau kembali risiko-risiko yang telah diungkapkan sebelumnya dan masih relevan dengan kondisi saat ini dan menyempurnakan serta memonitor langkah mitigasinya. Sehubungan dengan fokus Perusahaan untuk melakukan proses transformasi menjadi penyedia layanan informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital, risiko yang menjadi perhatian utama dalam langkah mitigasinya antara lain risiko perkembangan teknologi, risiko kemitraan, risiko perubahan perilaku konsumen, dan risiko perubahan regulasi.
- ii. Agar direksi melakukan upaya terbaik dalam pelaksanaan kewajiban penyelesaian utang sesuai Perjanjian Perdamaian PKPU BTEL.
- iii. Agar mematangkan dan mempertajam model bisnis baru dalam rangka transformasi menjadi penyedia layanan informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital, mengin-

3. Komite Nominasi Dan Remunerasi

a. Dasar Hukum

Dasar hukum/legal pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Bapepam No. IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik
3. Peraturan OJK No, 34/PJOK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
- iii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
- iv. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
- v. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- a. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

- d. Memberikan usulan mengenai calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2. Terkait dengan fungsi Remunerasi :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi;
 - iii. Besaran atas Remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Susunan Keanggotaan dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2016 sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Anindya N. Bakrie (Komisaris Utama)	Ketua
Budi Benzani (Chief Human Resources Officer)	Anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki telah memiliki dan mengacu pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan OJK Nomor 34/PJOK.04/2014 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

- d. Laporan Kegiatan Tahun 2016.

Sepanjang tahun 2016 Komite Nominasi dan Remunerasi BTEL melaksanakan kegiatan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali yang dirangkaikan dengan kegiatan evaluasi kinerja serta melakukan pengkajian terhadap penyesuaian organisasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Di samping itu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan peninjauan terhadap kebutuhan Perusahaan untuk mengubah susunan Direksi termasuk calon-calon anggota Direksi yang akan dimintakan persetujuan pengangkatannya kepada RUPS. Peninjauan tersebut termasuk untuk memastikan lebih lanjut kapasitas calon-calon anggota Direksi termasuk komponen remunerasi yang dapat diberikan oleh Perusahaan. Selanjutnya calon-calon anggota Direksi diajukan pada RUPS Luar Biasa BTEL, yaitu :

1. RUPS Luar Biasa tanggal 12 Januari 2016 yang menyetujui Taufan E.N. Rotorasiko sebagai Wakil Direktur Utama.
2. RUPS Luar Biasa tanggal 28 April 2016 yang menyetujui perubahan susunan Direksi dengan mengangkat :
 - W. Mark Robson sebagai Direktur Independen
 - Andi Pravidia Saliman sebagai Direktur
3. RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2016 yang menyetujui perubahan susunan Direksi dengan mengangkat :
 - R. Bismarka Kurniawan sebagai Direktur Utama
 - Jastiro Abi sebagai Wakil Direktur Utama

AUDITOR INDEPENDEN

BTEL menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan, yang beralamat di Plaza Sentral Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta, Indonesia, sebagai Auditor Independen yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian BTEL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Kantor akuntan ini mulai melakukan audit untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang bera-

Kantor akuntan tidak menerima penugasan lain yang menyebabkan benturan kepentingan. Kantor akuntan ini juga tidak ada kaitan apapun ataupun hubungan istimewa dengan Perseoran. Biaya audit total untuk laporan keuangan tahunan BTEL adalah di luar VAT sebesar Rp 600 juta.

Sekretaris Perusahaan

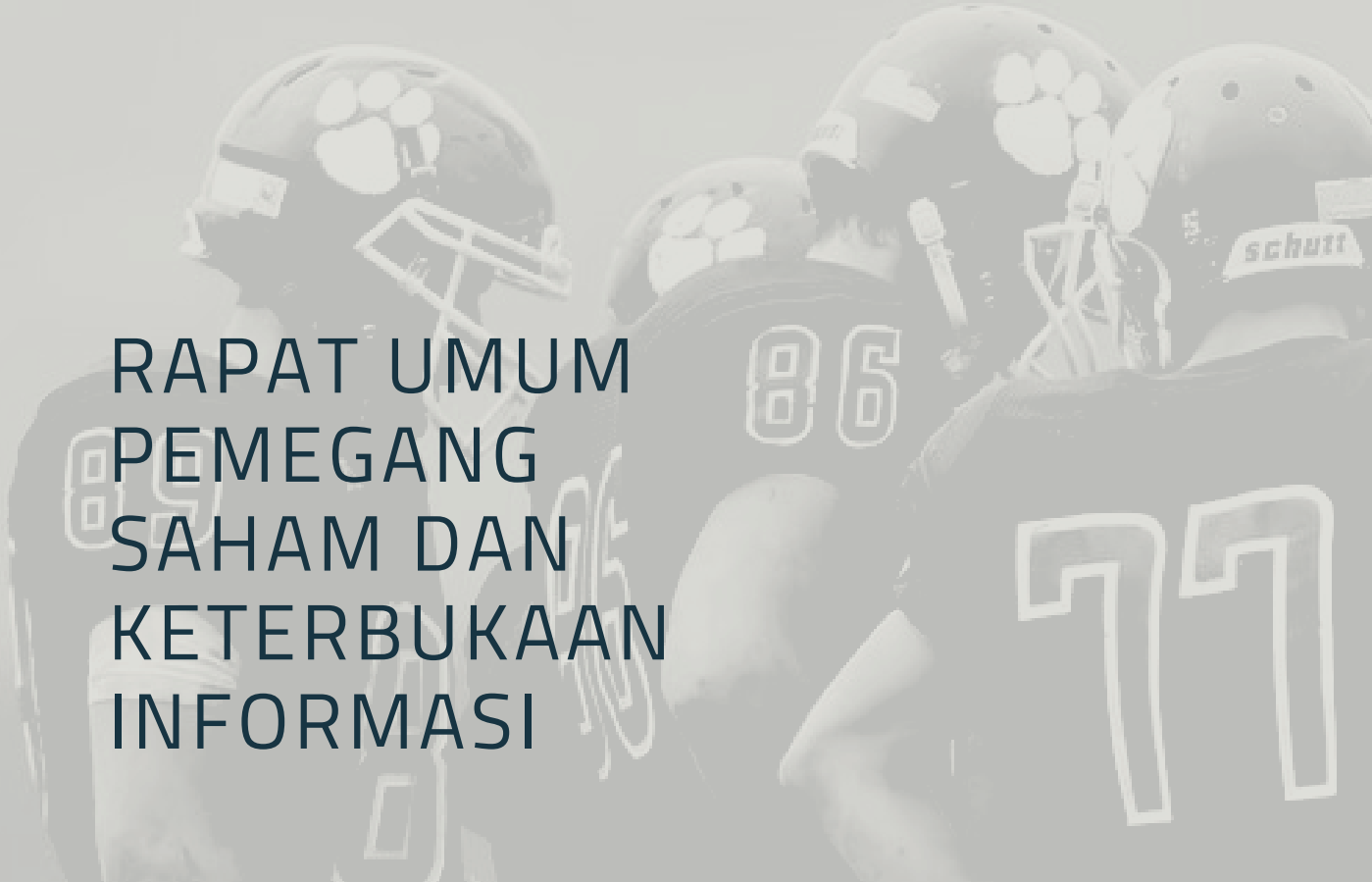
Fungsi Sekretaris Perusahaan merupakan fungsi yang telah dimiliki Perusahaan sejak tahun 2006 atau sejak Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa. Sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, tugas dan wewenang sekretaris perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti Perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi
 - a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
 - b) Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan/atau dewan komisaris;
 - d) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi dan/atau dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sekretaris perusahaan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya untuk menjalankan tugasnya.

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas untuk menjembatani komunikasi dan informasi antara Perusahaan dan pemangku kepentingan di bidang pasar modal, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, pemegang saham, dan masyarakat. Selain itu Sekretaris Perusahaan melakukan korespondensi dengan institusi pasar modal baik yang merupakan mandatory seperti laporan berkala dan penyampaian informasi penting, maupun yang bersifat administratif atau rutin. Sekretaris Perusahaan juga memastikan agar segala kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham, public expose, dan kegiatan wajib lainnya dapat diselenggarakan sebaik-baiknya dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Profil Sekretaris Perusahaan

Fungsi sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Agustinus Harimurti yang dijabat sejak tahun 2015, berdomisili di Indonesia. Sebelum diangkat menjadi sekretaris Perusahaan beliau menjabat sebagai Vice President Legal di BTEL. Agustinus Harimurti memperoleh gelar sarjana di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999. Memulai karier sebagai advokat/pengacara di Kantor Hukum Yan Apul & Rekan dan kemudian bergabung dengan PT Bakrie Swasakti Utama sebagai Manager Legal pada tahun 2001 selain juga menempati posisi managerial di PT Austral Byna, dan selanjutnya bergabung dengan PT Bakrie Telecom Tbk pada tahun 2004.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai perusahaan publik, BTEL berkewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik Tahunan maupun Luar Biasa. Penyelenggaraan RUPS merupakan bukti kontrol pemegang saham atas kepemilikan dan pemberian persetujuan atas kepengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Pada prosesnya, BTEL mempersiapkan dan melaksanakan RUPS dengan prinsip kepatuhan pada peraturan yang berlaku di antaranya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Anggaran Dasar BTEL.

Di samping itu Perusahaan juga berkewajiban untuk menyampaikan paparan publik dan keterbukaan informasi kepada publik baik informasi atau laporan yang bersifat rutin atau berkala maupun yang insidental.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama kurun waktu tahun 2016, BTEL telah menyelenggarakan RUPS sebagai berikut:

NO	JENIS RUPS	TANGGAL	RESOLUSI
1.	RUPS Luar Biasa	12 Januari 2016	Menyetujui pengangkatan Bapak Taufan Eko Nugroho Rotorasiko sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang telah diangkat terlebih dahulu.
2.	RUPS Luar Biasa	28 April 2016	<p>a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Bachder Bachtarudin dan Bapak Imanuddin Kencana Putra dari jabatan masing-masing selaku Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sepanjang tindakan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.</p> <p>b. Menyetujui pengangkatan Bapak W. Mark Robson sebagai Direktur Independen dan Bapak Andi Pravidia Saliman sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang telah diangkat terlebih dahulu.</p> <p>c. Menegaskan susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Komisaris Utama : Bapak Anindya Novian Bakrie -Wakil Komisaris Utama : Bapak Gafur Sulistyono Umar -Komisaris Independen : Bapak Ai Moelyadi Mamoer <p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Direktur Utama : Bapak Jastiro Abi -Wakil Direktur Utama : Bapak Taufan Eko Nugroho Rotorasiko -Direktur Independen : Bapak W. Mark Robson -Direktur : Bapak Harya Mitra Hidayat -Direktur : Bapak Andi Pravidia Saliman

NO	JENIS RUPS	TANGGAL	RESOLUSI
3.	RUPS Tahunan	28 Juni 2016	<p>a. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p>b. Menyetujui tidak terdapatnya pembagian keuntungan saham atau dividen kepada Pemegang Saham karena Perseroan mengalami kerugian bersih pada tahun buku 2015.</p> <p>c. Menyetujui pemberian kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorariumnya.</p>
4.	RUPS Luar Biasa	28 Juni 2016	<p>a. Menyetujui pengangkatan Bapak Robertus Bismarka Kurniawan sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Jastiro Abi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa ini, untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang telah diangkat terlebih dahulu;</p> <p>b. Menegaskan kembali susunan Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <p>Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie Wakil Komisaris Utama : Bobby Gafur Umar Komisaris Independen : Ai Mulyadi Mamoer</p> <p>Direksi :</p> <p>Direktur Utama : Robertus Bismarka Kurniawan Wakil Direktur Utama : Taufan Eko Nugroho Rotorasiko Direktur : Harya Mitra Hidayat Direktur : Andi Pravidia Saliman Direktur (Independen) : Mark W. Robson</p> <p>c. Menyetujui Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya Rp. 7,601,111,817,843 atau 38.005.559.090 lembar saham seri B, dengan terlebih dahulu menerbitkan Obligasi Wajib Konversi sesuai Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi melalui keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2014.</p> <p>d. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui setiap pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut dari konversi Obligasi Wajib Konversi-A dan Obligasi Wajib Konversi-B sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi melalui keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2014.</p>

PAPARAN PUBLIK

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, BTEL telah melaksanakan paparan publik tahunan (annual public expose) pada tanggal 21 Desember 2016 bertempat di Bakrie Tower Lantai 36 Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan. Dalam paparan publik tahunan tersebut, manajemen BTEL menyampaikan informasi terkait rencana strategis BTEL untuk melakukan transformasi model bisnis baru yaitu penyediaan layanan informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital dan layanan komunikasi seluler dengan konsep MNVO atau pemanfaatan jaringan telekomunikasi seluler pihak lain. Selain itu disampaikan pula telaahan kinerja keuangan dan operasional Perusahaan, dan gambaran umum proyeksi bisnis di masa yang akan datang, dan gambaran penyelesaian kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Perdamaian PKPU.

KORESPONDENSI DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Sepanjang tahun 2016, di samping pertemuan bersifat diskusi dan konsultatif dengan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan telah melakukan komunikasi korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

TANGGAL	PERIHAL
11 Januari 2016	Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bakrie Telecom Tbk
15 Januari 2016	Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bakrie Telecom Tbk
11 Februari 2016	Surat Tanggapan atas Surat OJK tentang permintaan dokumen
15 Maret 2016	Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bakrie Telecom Tbk
15 Maret 2016	Pencabutan Pernyataan Pendaftaran
22 Maret 2016	Penyampaian Bukti Iklan
6 April 2016	Tanggapan atas Surat OJK
26 April 2016	Tanggapan atas Surat OJK
29 April 2016	Tambahan Penjelasan atas Surat OJK
2 Mei 2016	Penyampaian Bukti Iklan atas Tambahan Informasi kepada OJK
2 Mei 2016	Tanggapan atas Surat OJK
4 Mei 2016	Informasi Tambahan atas Tanggapan atas Surat
10 Mei 2016	Informasi Tambahan/Perubahan atas Tanggapan atas Surat
25 Mei 2016	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
8 Juni 2016	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
24 Juni 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
01 Juli 2016	Penyampaian Hasil RUPS
15 Agustus 2016	Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Bakrie Telecom Tbk ("BTEL")
18 Agustus 2016	Penyampaian bukti pengumuman Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
28 Oktober 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2016

KORESPONDENSI DENGAN BURSA EFEK INDONESIA

Sepanjang tahun 2016, di samping pertemuan bersifat diskusi dan konsultatif dengan Bursa Efek Indonesia, Perusahaan telah melakukan komunikasi korespondensi dengan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

TANGGAL	PERIHAL
8 Januari 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
14 Januari 2016	Penyampaian Bukti Iklan
15 Januari 2016	Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa
22 Januari 2016	Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa
29 Januari 2016	Laporan Kepemilikan Saham
10 Februari 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
11 Februari 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
10 Maret 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
11 Maret 2016	Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa
22 Maret 2016	Rencana Rapat Umum Pemegang Saham
23 Maret 2016	Penyampaian Bukti Iklan
24 Maret 2016	Penyampaian Bukti Iklan
31 Maret 2016	Penjelasan atas Volatilitas
6 April 2016	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
8 April 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
27 April 2016	Laporan Kepemilikan Saham
9 Mei 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
20 Mei 2016	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
23 Mei 2016	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
6 Juni 2016	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
14 Juni 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
24 Juni 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
24 Juni 2016	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik
30 Juni 2016	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
13 Juli 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
15 Juli 2016	Penyampaian Laporan Tahunan
11 Agustus 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
22 Agustus 2016	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa
24 Agustus 2016	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa
25 Agustus 2016	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa
5 September 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
7 September 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
7 Oktober 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
1 November 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
2 November 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
8 November 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
25 November 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
6 Desember 2016	Rencana Penyelenggaraan Public Expose
7 Desember 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BTEL
16 Desember 2016	Penyampaian Materi Public Expose
19 Desember 2016	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik
22 Desember 2016	Laporan Hasil Public Expose

INTERNAL CONTROL

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal BTEL yang diimplementasikan dalam kegiatan operasional merupakan bentuk kepatuhan Perusahaan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana yang digaungkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Di samping itu untuk memperkuat sistem pengendalian internal, BTEL juga mengadopsi sistem pengendalian internal yang mengacu pada pendekatan Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission (COSO) yang meliputi:

- Control environment
- Risk assessment
- Control activities
- Information and communication
- Monitoring activities



Penerapan sistem pengendalian internal yang meliputi kelima aspek tersebut berlaku sebagai suatu metode yang diikuti dan dipatuhi oleh pucuk pimpinan sampai dengan karyawan yang berada dalam organisasi Perusahaan. Sistem pengendalian internal dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan kesanggupan untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di samping itu sistem pengendalian internal diharapkan mampu untuk mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efektif dan efisien salah satunya di sektor pengendalian keuangan. Dengan penerapan sistem pengendalian internal dapat dihasilkan bentuk pelaporan keuangan dan operasional yang handal.

Salah satu perwujudan sistem pengendalian internal adalah pembentukan standard operation procedure (SOP) dan pembagian tugas yang jelas pada setiap fungsi organ, manajemen, dan karyawan (job descriptions). SOP dan job descriptions ini dipegang sebagai manual atau kerangka tindakan dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan. Namun demikian seiring dengan perkembangan industri dan faktor-faktor lainnya, SOP dan job descriptions ini harus terus mengadaptasi perubahan-perubahan yang ada namun tetap dalam koridor sistem pengendalian internal. Perubahan yang memerlukan adaptasi SOP dan job descriptions juga tidak tertutup kemungkinan berasal internal dimana Perusahaan secara aktif melakukan prosedur risk assesment terhadap setiap divisi atau bagian di dalam Perusahaan. Prosedur ini dirasakan sangat penting dan bermanfaat dikarenakan divisi-divisi atau bagian-bagian ini merupakan ujung tombak dan penggerak utama roda kegiatan bisnis Perusahaan dan mengetahui lebih dalam seluk beluk bisnis yang digeluti Perusahaan di lapangan.

Sepanjang tahun 2016 relatif tidak terdapat perubahan dalam sistem pengendalian internal BTEL. Konsentrasi Perusahaan pada pematangan rencana transformasi tidak terlalu mempengaruhi untuk melakukan adaptasi terhadap aspek sistem pengendalian internal. Sistem yang telah ada dirasakan cukup handal untuk mengawal proses persiapan dan pematangan strategi transformasi Perusahaan. Bisnis lain yang dilakukan BTEL di segmen sambungan telepon di high rise building juga masih mengandalkan sistem pengendalian internal yang ada. Pada prosesnya, baik terhadap kegiatan pematangan strategi transformasi, bisnis yang ada existing, maupun sistem manajemen keuangan, Perseroan tetap mengimplementasikan sistem

pengendalian internal yang ada dengan tujuan yang solid adalah tercapainya kinerja operasional Perusahaan yang positif, terpenuhinya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menghadirkan manajemen pelaporan keuangan yang handal.

Untuk memastikan diberlakukannya SOP, job descriptions, maupun aturan atau pedoman kerja lainnya dalam kerangka sistem pengendalian, Perusahaan memiliki unit tugas Audit Internal.

AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal BTEL pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Corporate Internal Audit (CIA) yang dikepalai oleh Inge Anggia Rahardja sebagai Ketua Corporate Internal Audit sejak April 2014. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of IT Audit sejak Juli 2011 hingga Maret 2014 dan sebagai konsultan IT dan auditor IT pada PT Deloitte Konsultan Indonesia. Gelar Sarjana Komputer diperoleh dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 1997. Inge memiliki sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA) yang dikeluarkan oleh ISACA (Information System Audit and Control Association).

Dalam rangka memperkuat aktivitas audit internal agar sejalan dengan perkembangan bisnis Perusahaan, maka anggota tim Audit Internal terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan sertifikasi di antaranya bidang hukum dan keuangan.

CIA berperan sebagai strategic business partner bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran BTEL dengan melakukan evaluasi berdasarkan risk based audit secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan risk management, control, dan governance processes. Hal ini dilakukan melalui

pendekatan yang proaktif, antusias, dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan stakeholder, pemahaman terhadap pokok permasalahan dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan dapat dilaksanakan.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal BTEL yang disetujui oleh Direktur Utama tanggal 3 April 2009 dimaksudkan sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh BTEL serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal. Piagam Audit Internal ini ditujukan pula agar terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan BTEL.

Ruang lingkup pekerjaan audit oleh CIA mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan organisasi BTEL. Pekerjaan audit tersebut dilakukan melalui pendekatan risk based audit dengan melihat risiko-risiko terkait dengan objek penugasan audit.

CIA bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berdasarkan arahan Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris ruang lingkup pekerjaan audit oleh CIA juga mencakup kegiatan badan-badan usaha afiliasi dan anak perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan BTEL.

Ruang lingkup CIA mencakup audit dan penilaian atas efektivitas risk management, kecukupan dan efektivitas system pengendalian intern, kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan, serta efektivitas governance processes dengan melakukan:

1. Audit ketaatan (compliance audit) terhadap kebijakan, rencana dan anggaran, prosedur, peraturan dan kegiatan operasional lainnya.
2. Audit operasional (operational/management audit) dalam rangka meningkatkan efisiensi, pengamanan sumber daya dan dana, serta konsistensi dan efektivitas atas manfaat suatu kegiatan operasional atau program yang telah ditetapkan.

3. Audit Teknologi Sistem Informasi (TSI) untuk memastikan terjaminnya integritas data (benar, lengkap, aman, tepat waktu), efektivitas dan efisiensi prosedur operasional dan kelangsungan operasional teknologi sistem informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknologi sistem informasi. Termasuk melakukan audit atas setiap implementasi aplikasi TSI untuk memastikan bahwa aplikasi telah sesuai dengan yang ditetapkan, kepatuhan terhadap ketentuan, terdapat control yang memadai dan tersedianya sarana penelusuran kembali (audit trail), serta memberi rekomendasi mengenai kontrol yang perlu diterapkan.
4. Audit jaringan telekomunikasi (telecommunication network) untuk optimasi peningkatan kualitas jaringan radio CDMA dalam pemenuhan cakupan, kualitas, dan kapasitas jaringan.
5. Audit khusus dan investigasi (special and investigation audit) terhadap hal-hal yang patut diduga atau diperkirakan merupakan suatu tindak perbuatan kecurangan/penyalahgunaan/manipulasi (fraud), penggelapan, penyimpangan terhadap ketentuan/peraturan internal maupun eksternal, dan lain sebagainya berdasarkan instruksi Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Pemantauan secara off-site atau monitoring (desk audit) terhadap segala aktivitas di seluruh unit kerja BTEL melalui analisis terhadap dokumen dan laporan.

Sesuai dengan program kerja, CIA melakukan kegiatan audit dan lainnya, sebagai berikut:

PARTISIPASI AUDIT INTERNAL

01	02	03
Dalam rangka memperluas dan mengembangkan wawasan dan kompetensi profesional Auditor Internal, CIA BTEL telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya dalam berbagai organisasi perhimpunan (asosiasi) profesi auditor internal.	CIA BTEL telah menyertakan para auditornya dalam berbagai kegiatan perhimpunan profesi internal auditor lain, di antaranya sebagai anggota Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR), Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFE), dan Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Chapter.	Keikutsertaan anggota CIA pada berbagai perhimpunan profesi Internal Auditor sangat mendukung peningkatan kompetensi dan wawasan anggota CIA untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas audit maupun pengembangan dalam pengelolaan kegiatan auditnya. Perhimpunan-perhimpunan tersebut merupakan ajang pertukaran informasi serta forum diskusi (benchmarking) diantara para internal auditor terkait isu-isu terkini dalam dunia audit.

DIAGRAM KEGIATAN INTERNAL AUDIT

Pada tahun 2016, walaupun kegiatan operasional Perusahaan belum semasif seperti tahun-tahun sebelumnya, CIA BTEL telah melakukan kegiatan internal consulting services. Pada pelaksanaannya, jasa konsultasi internal diarahkan pada pengawasan untuk penyelenggaraan operasional perusahaan khususnya berkenaan dengan respon terhadap risiko, pengembangan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko, termasuk proses risk assessment, dalam pemetaan terhadap unit bisnis yang berisiko tinggi sebagai lang-

kah antisipatif agar penyelenggaraan bisnis tetap mengindahkan rambu-rambu yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa hasil audit dan internal consulting memperoleh tanggapan yang memadai dari auditee, maka dilakukan upaya pengawasan tindak lanjut. Tindak lanjut di lapangan dilakukan oleh auditee yang kemudian dimonitor oleh CIA. Untuk hal ini, tindak lanjut dibatasi pada area-area proses bisnis yang signifikan dengan target waktu yang disepakati bersama.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Matrix

		Impact →				
		Negligible	Minor	Moderate	Significant	Severe
Likelihood ↑	Very Likely	Low Med	Medium	Med Hi	High	High
	Likely	Low	Low Med	Medium	Med Hi	High
	Possible	Low	Low Med	Medium	Medium	Med Hi
	Unlikely	Low	Low Med	Low Med	Medium	Med Hi
	Very Unlikely	Low	Low	Low Med	Medium	Medium

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RESIKO

Manajemen risiko bagi BTEL merupakan bagian penting dari implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Peran sistem manajemen risiko disadari penuh oleh BTEL sangat krusial dalam setiap proses operasional Perusahaan. Setiap tahapan proses dari awal sampai akhir akan diukur dan disimulasikan dengan potensi risiko kemungkinan besar akan dihadapi berikut dengan perencanaan mitigasi yang matang. Memasuki era baru yang dimulai dengan persiapan dan pematangan strategi transformasi, BTEL tetap memegang dan menerapkan sistem manajemen risiko sebagai proses yang menghasilkan produk layanan yang handal sekaligus siap dengan segala antisipasi yang diperlukan. BTEL sendiri memiliki kemampuan untuk

mengidentifikasi potensi risiko yang terdapat dilingkungan bisnis dan perencanaan serta kemungkinan dampaknya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. BTEL melaksanakan prosedur manajemen risiko yang disebut risk self assessment, yang membantu BTEL mengevaluasi eksposur risiko di setiap proses bisnis. Seluruh karyawan yang terlibat di dalam proses bisnis berperan dalam menentukan, mengevaluasi, dan mengawasi risiko dalam upaya membangun kerja sama tim dan komitmen yang kuat untuk mengelola risiko dan melaksanakan proses bisnis.

MANAJEMEN RESIKO DALAM PROSES OPERASIONAL BTEL

Secara umum manajemen risiko di BTEL dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko Operasional PT. Bakrie Telecom, Tbk. (BTEL)

Identifikasi dilakukan untuk setiap produk, aktivitas, proses dan sistem informasi yang ada dan akan digunakan oleh perusahaan. Identifikasi dimulai dari memahami bagaimana proses bisnis dilakukan sesuai dengan pemetaan proses operasional yang ada. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran perusahaan.

- b. Penilaian/Pengukuran Risiko Operasional PT. Bakrie Telecom, Tbk. (BTEL)
Melakukan klasifikasi kejadian risiko ke dalam beberapa kategori, mulai dari yang dampak dan atau frekuensinya paling rendah (Very Low Frequency/Very Low Impacts) hingga yang tertinggi (Very High Frequency/Very High Impacts). Kemudian diterapkan Risk Appetite untuk menentukan level besaran risiko operasional yang dapat diterima Perseroan agar mampu memaksimalkan hasil dari risiko operasional yang ada ataupun yang mungkin akan terjadi. Toleransi risiko operasional BTEL direfleksikan dalam suatu evaluasi risiko berupa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko operasional yang telah disepakati yang dihasilkan dalam proyek ERM. Aspek dalam kriteria yang berdampak lebih besar dari high tidak dapat ditoleransi dan perlu ditangani dengan segera.
- c. Pengawasan/Pemantauan Risiko Operasional PT. Bakrie Telecom, Tbk. (BTEL)
Pemantauan/pengawasan risiko operasional dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian (loss events) yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional (major business line), antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal (internal control). Operational Risk Department menyusun laporan mengenai dampak kerugian risiko operasional dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi.
- d. Pengendalian Risiko Operasional PT. Bakrie Telecom, Tbk. (BTEL)
Pengendalian risiko operasional dicantumkan di dalam kebijakan manajemen risiko Perusahaan, yang meliputi :
- i. Risk Acceptance, yaitu manajemen mengambil sepenuhnya risiko operasional karena memang harus diambil untuk memanfaatkan kesempatan bisnis. Kontrol risiko operasional yang ketat dijalankan apabila risk acceptance akan diterapkan.
 - ii. Risk Avoidance, yaitu risiko operasional dihindarkan dengan apabila manfaat suatu aktivitas bisnis tidak lebih besar atau sama dengan eksposur risiko operasional.
 - iii. Risk Transfer, yaitu risiko operasional yang masih melekat pada aktivitas bisnis dipindahkan ke pihak lain yang akan mengambil alih risiko operasional tersebut.
 - iv. Risk Mitigation: Upaya memperkecil kemungkinan terjadinya risiko operasional dengan menciptakan tindakan-tindakan alternatif yang dapat memperkecil kerugian apabila risiko operasional terjadi.

PENGENDALIAN ATAS RISIKO-RISIKO LAINNYA

Risiko-risiko yang dihadapi oleh BTEL tidak terbatas pada risiko operasional melainkan juga risiko-risiko lainnya yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal yang terkait erat dengan industri telekomunikasi. Risiko-risiko ini dikendalikan dibawah koordinasi Direksi dan fungsi-fungsi terkait di BTEL dan melalui arahan Komite Manajemen Risiko BTEL. Risiko-risiko lain yang termasuk dalam lingkup pengendalian manajemen BTEL adalah:

a. Risiko Stabilitas Ekonomi.

Perusahaan menghadapi risiko dari kondisi perekonomian domestik maupun global; termasuk faktor perekonomian makro seperti inflasi, tingkat bunga, dan nilai tukar. BTEL telah mengantisipasi risiko tersebut dengan melakukan pengawasan dan mencari ahli di luar BTEL yang akan memberikan saran jika diperlukan.

b. Risiko Perubahan Kebijakan, Politik dan Pemerintahan.

Industri telekomunikasi merupakan indus-

tri yang sarat peraturan (fully regulated). Setiap perubahan dalam peraturan pemerintah akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. BTEL mengantisipasi risiko ini dengan menyusun rencana contingency untuk menghadapi lingkungan politik yang tidak mendukung atau kurang mendukung. Di samping itu, BTEL mengoptimalkan kinerja unit-unit terkait yang menjalankan fungsinya dalam memonitor kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga kepatuhan tetap terjaga.

c. Risiko Fluktuasi Valuta Asing.

BTEL beroperasi di Indonesia dengan pendapatan dalam mata uang Rupiah. Di lain pihak, sebagian kewajiban BTEL adalah dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dapat berdampak langsung kepada keuntungan Perusahaan .

d. Risiko Persaingan.

BTEL menghadapi persaingan yang ketat dengan banyaknya pemain di sektor telekomunikasi termasuk di dalamnya segmen informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital. Perusahaan mengantisipasi lingkungan yang penuh persaingan dengan meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk secara terus-menerus dan dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh.

e. Risiko Perkembangan Teknologi

BTEL sangat dipengaruhi oleh perubahan yang cepat di bidang teknologi yang terdapat di industri telekomunikasi termasuk di dalamnya segmen informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital. BTEL mengantisipasi risiko ini dengan cara mendorong product development yang mengikuti dan mengantisipasi perkembangan teknologi terkini. Langkah ini membuat BTEL mampu mengantisipasi kebutuhan pasar terhadap teknologi tersebut.

f. Risiko Ketergantungan pada Jaringan Pihak Lain.

Kegiatan usaha BTEL sangat tergantung kepada perjanjian interkoneksi atau perjanjian pemanfaatan Jaringan telekomunikasi dengan pihak atau operator penyedia jaringan telekomunikasi serta infrastruktur lainnya yang melekat. Tidak tersedianya jaringan dapat berdampak pada terjadinya terganggunya layanan kepada pelanggan dan hilangnya pendapatan potensial. Untuk mengurangi risiko ini, BTEL sangat memperhatikan hubungan dengan pemerintah dan operator-operator lain untuk memungkinkan pemanfaatan jaringan secara terus-menerus.

g. Risiko ketergantungan pada Pola Kemitraan.

Model bisnis baru di depan maupun yang telah ada saat ini dapat dijalankan oleh BTEL dengan setidaknya dua pola, yaitu pola mandiri dan pola kemitraan. Pola mandiri dimaksudkan bahwa BTEL dapat menjalankan sendiri bisnisnya dengan sarana dan prasarana yang disediakan sendiri. Hal ini berkaitan langsung dengan lisensi yang dimiliki atau peraturan yang dapat dipenuhi oleh BTEL dan kesanggupan secara keuangan dan operasional dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Pola kedua adalah kemitraan dimana dalam kondisi BTEL belum memiliki sarana dan prasarana sendiri maupun lisensi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, maka bermitra dengan pihak lain yang telah memiliki fasilitas dan lisensi yang diperlukan merupakan pilihan yang rasional. Namun demikian, risiko yang mungkin timbul adalah terkait dengan posisi tawar dan dominan yang biasanya berada lebih besar pada mitra. Pemutusan kemitraan dari waktu ke waktu merupakan risiko dengan perencanaan mitigasi tersendiri.

h. Risiko Fraud dan Berkurangnya Pendapatan

Dalam aktivitas operasional dan finansial BTEL, ada kemungkinan muncul risiko terhadap terjadinya fraud. Fraud adalah penipuan, penggelapan atau bentuk penyimpangan lainnya baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas operasional dan finansial BTEL. Dengan banyaknya inovasi pasar yang dilakukan oleh BTEL, risiko yang berasal dari fraud memiliki potensi dampak negatif yang harus diperhitungkan jika berlangsung dalam waktu lama dan dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan dan keuntungan. BTEL melakukan pencegahan

terhadap terjadinya fraud dengan menerapkan revenue assurance untuk pencegahan pengurangan pendapatan. Revenue assurance melakukan pemeriksaan pencatatan, kelengkapan transaksi dan sistem penagihan secara menyeluruh. Prosedur pengujian juga berlaku bagi produk dan layanan baru, sebelum diluncurkan secara komersial.

PERKARA PENTING

Pada tahun 2016 terdapat perkara penting yang melibatkan Perusahaan yaitu perkara gugatan perdata di pengadilan New York Amerika Serikat terhadap beberapa pihak termasuk Perusahaan oleh Universal Investment Advisory SA, Vaquero Master EM Credit Fund Ltd, dan Trucharm Ltd yang memegang lebih dari 25% (duapuluh lima persen) Wesel Senior –USD yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom, Pte.Ltd (entitas anak). Gugatan tersebut terkait pemenuhan kewajiban pembayaran bunga Wesel Senior-USD. Gugatan ini sudah muncul sejak September 2014. Sampai dengan Laporan Tahunan ini disusun proses pemeriksaan gugatan ini masing berlangsung di Pengadilan New York. Gugatan perdata ini hingga saat ini tidak

memiliki dampak terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

SANKSI ADMINISTRASI

Sebagai perusahaan publik dan emiten, BTEL memiliki kewajiban terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal, dalam hal ini terutama peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (Bursa). Salah satu kewajiban perusahaan publik yang harus dilaksanakan adalah penyampaian laporan berkala dalam hal ini laporan keuangan dan laporan tahunan. Pada tahun 2016, Perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan akhir tahun buku 2015 yang terdapat konsolidasi dengan entitas anak. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan tahunan 2015 kepada OJK dan Bursa. atas keterlambatan tersebut OJK dan Bursa mengenakan sanksi administrasi berupa denda. Sanksi denda tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh Perusahaan.

KODE ETIK

Kode Etik yang dipegang sebagai bagian dari nilai-nilai Perusahaan adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Jujur, yang bermakna bahwa terdapat keselarasan antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan; menghindari benturan kepentingan; menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas; dan mengakui kesalahan serta menyampaikan sesuatu sesuai fakta.
2. Tanggung Jawab, yang bermakna bahwa terdapat kemampuan untuk menerima amanat dan menjalankan tugas serta kewajiban yang diberikan; dan menuntaskan pekerjaan yang diberikan
3. Visioner, yang bermakna bahwa terdapat keyakinan dalam mewujudkan rencana dan cita-cita; dan ingin melakukan penyempurnaan dan menjadi yang terbaik.
4. Disiplin, yang bermakna bahwa konsistensi terhadap rencana yang telah dibuat dan menjalankan sesuai ketentuan; dan tidak berhenti berupaya hingga mencapai hasil yang diinginkan.

5. Kerja sama, yang bermakna bahwa terdapat optimalisasi potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, dan saling mendukung untuk menyelesaikan tugas bersama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang disepakati bersama;
6. Adil, yang bermakna bahwa terdapat pengambilan sikap dan keputusan secara proporsional, dan mengapresiasi serta menghukum sesuai dengan ketentuan.

Peduli, yang bermakna bahwa terdapat pemahaman atas kondisi pihak lain dan ikut merasakan kesulitan yang dihadapi; dan berinisiatif membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan.

CORPORATE CULTURE

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Dalam kerangka kerja Perusahaan di samping dukungan sistem pengendalian internal, penerapan GCG, dan kode etik, Perusahaan juga membangun nilai-nilai yang didorong menjadi corporate culture dan identitas yang melekat pada setiap insan Perusahaan.

- **PASSION**

Dorongan untuk menyebarkan energi positif dan menularkannya kepada lingkungan perusahaan. Perilaku nilai tersebut meliputi integritas, penghargaan martabat, motivasi, semangat, dan mempelajari tren, teknologi, metode, dan keterampilan baru.

- **APPRECIATING PEOPLE**

Menghargai karyawan sebagai faktor terpenting dengan memahami dan mengakui kontribusi setiap individu. Perilaku nilai tersebut meliputi penghormatan dan penghargaan terhadap sesama, baik internal maupun eksternal, dan pengembangan para pegawai dan mitra sendiri.

- **CUSTOMER CENTRIC**

Menyenangkan pelanggan dan melayani mereka dengan produk dan layanan berkualitas tinggi. Perilaku nilai tersebut meliputi interaksi secara langsung dengan pasar, mencari tahu dan memahami kebutuhan pelanggan, pelayanan yang setara bagi semua pelanggan.



- **OPERATIONAL EXCELLENCE**

Memahami pentingnya efisiensi dan efektivitas dan dampaknya kepada kepuasan pelanggan. Perilaku nilai tersebut meliputi semangat lebih cepat, lebih baik, dan lebih terjangkau harganya, profesionalisme, disiplin, kerja sama dan sinergi.

- **INNOVATION**

keberanian untuk berkompetisi, memproduksi, dan menyuarakan terobosan untuk mendorong perusahaan agar menjadi yang terdepan dalam persaingan bisnis. Perilaku nilai tersebut meliputi mental "Bisa", berpikir kreatif, berpikir secara unik dalam hubungan dengan pengalaman pelanggan, dan berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan

PENERAPAN GCG

TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENERAPANNYA

BTEL dengan identitas sebagai perusahaan publik dan organisasi yang berpengalaman telah mengubah sudut pandang terhadap prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) yang sebelumnya dipandang sebagai suatu instrumen syarat yang wajib ditaati menjadi suatu nilai hidup yang disadari membawa kebermanfaatan yang sangat positif dalam perjalanan bisnis BTEL. Gagasan prinsip-prinsip dasar GCG telah diaplikasikan oleh BTEL secara internal antara lain untuk:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan melalui penerapan maksimal prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan agar Perseroan mempunyai daya saing kuat baik secara nasional maupun regional.
2. Mendukung pengelolaan perusahaan secara bersih, transparan, dan profesional serta memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing organ BTEL, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham, dan Karyawan.
3. Mendorong agar pengelolaan perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral integritas yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial BTEL terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar BTEL.

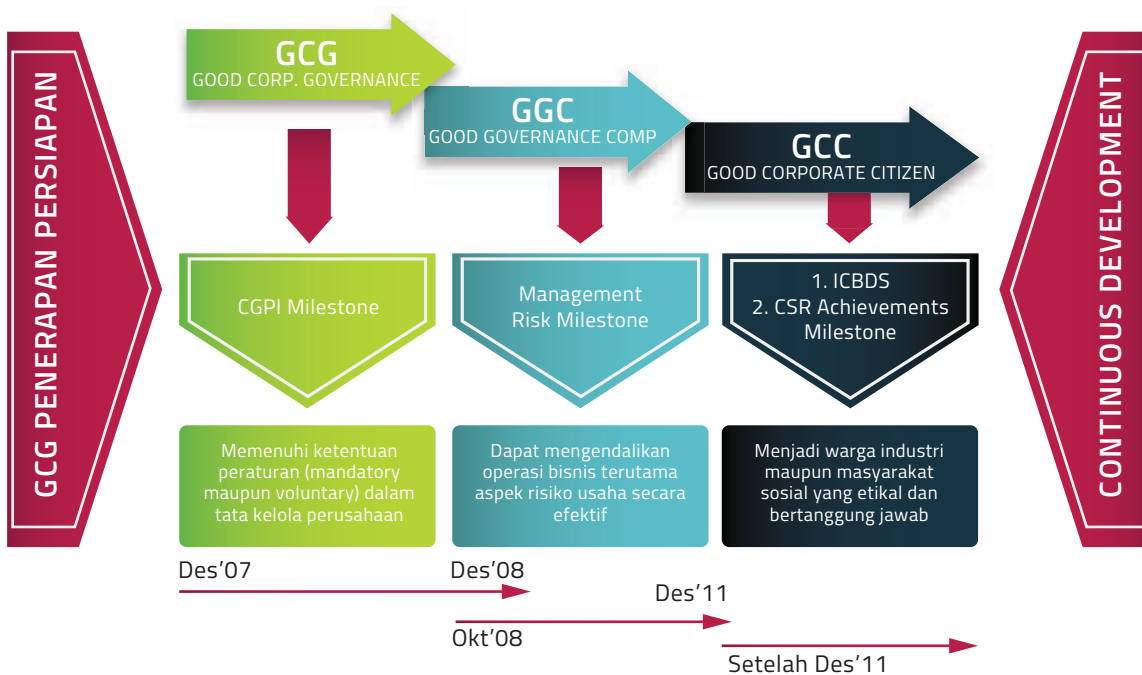
Dari sisi eksternal, penerapan GCG di Perusahaan berpatokan pada kerangka hukum yang menjadi dasar gagasan pemikiran dan penerapan GCG tersebut yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Lebih jauh lagi, BTEL beberapa tahun yang lalu berinisiatif untuk membuat peta jalan (roadmap) tata kelola perusahaan sebagai acuan bagi insan BTEL tanpa kecuali dalam menjalankan roda usaha. Adapun roadmap ini sendiri disusun dengan bersandarkan pada :

1. Visi dan misi Perusahaan
2. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
3. Pertimbangan atas faktor-faktor dan kondisi internal organisasi Perusahaan serta dinamika lingkungan bisnis di industri saat ini dan masa yang akan datang.

Roadmap tersebut berangkat dari konsep suatu proses yang dimulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi GCG sebagai berikut:



Keterangan:

- Milestone 1. GCG (Good Corporate Governance)
Memenuhi ketentuan dan peraturan (mandatory maupun voluntary) dalam tata kelola perusahaan
- Milestone II. GGC (Good Governance Compliance)
Dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek risiko usaha secara efektif
- Milestone III. GCC (Good Corporate Citizen)

Menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang memiliki etika dan bertanggung jawab
Pada masa ini, penerapan GCG di BTEL, sedang memasuki tahapan Milestone III

Pada masa ini, penerapan GCG di BTEL, sedang memasuki tahapan Milestone III

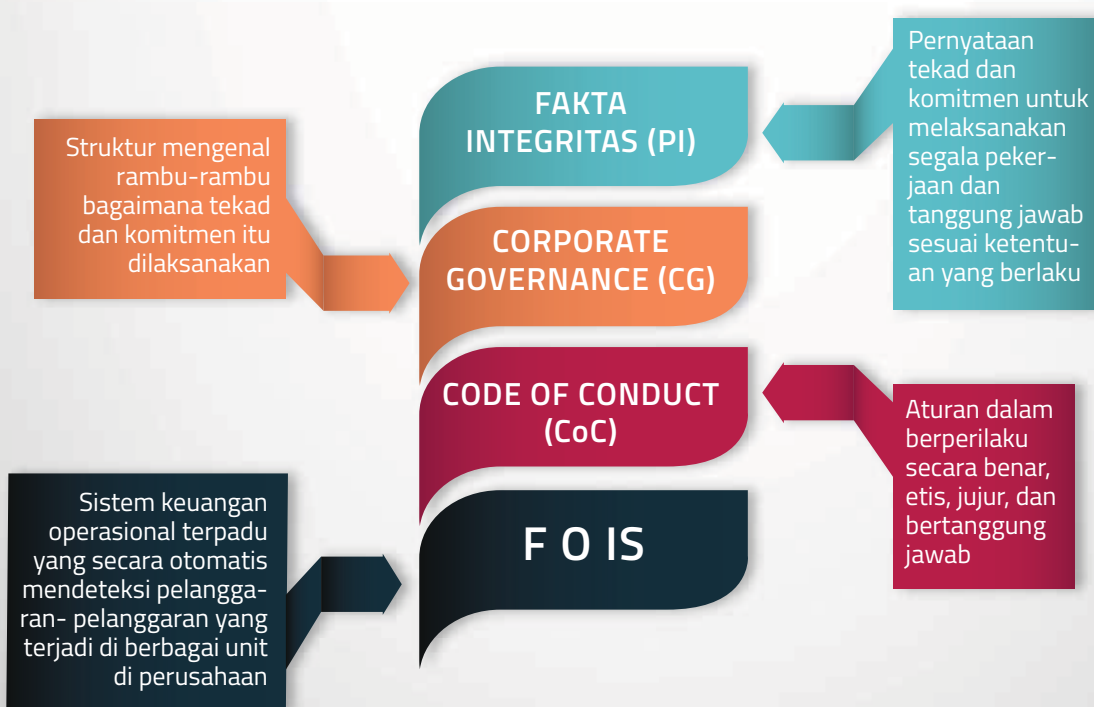
Milestone I. GCG (<i>Good Corporate Governance</i>)	Milestone II. GGC (<i>Good Governance Compliance</i>)	Milestone III. GCC (<i>Good Corporate Citizen</i>)
<p>“Memenuhi ketentuan dan peraturan (<i>mandatory</i> maupun <i>voluntary</i>) dalam tata kelola perusahaan”</p> <p>BTEL telah memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelaksanaan Komite Audit (<i>Audit Committee charter</i>) 2. Pedoman pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi (<i>Nomination & Remuneration Committee charter</i>) 3. Pedoman pelaksanaan Komite Manajemen Risiko (<i>Risk Committee charter</i>) 4. Pedoman pelaksanaan Komite Corporate Governance (<i>CG Committee charter</i>) 5. Modul Pakta Integritas yang berisi Kode Etik 6. Peraturan perusahaan 7. Manual Mutu BTEL-QMS (Sistem Manajemen Mutu BTEL) 	<p>“Dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek risiko usaha secara efektif”</p> <p>BTEL telah menerapkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Internal (<i>Corporate Internal Audit</i>) • Program BTEL Integriy dan Best Performance Award sebagai bentuk penilaian kepatuhan, etika, dan kinerja • Manajemen Risiko Perusahaan (<i>Enterprise Risk Management (ERM)</i>) • Survei mutu internal secara periodik • Penerapkan konsep FBC (<i>Faster, Better, Cheaper</i>) di aktivitas operasional • Penyusunan Kebijakan & Prosedur Manajemen (<i>Policy & Procedures</i>): <ul style="list-style-type: none"> Pemetaan proses bisnis terkait Penetapan kebijakan manajemen pada proses-proses bisnis tersebut Penyusunan <i>Standard Operating Procedures</i> 	<p>“Menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang memiliki etika dan bertanggung jawab”</p> <p>Dalam rangka mewujudkan agar BTEL menjadi Warga Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Citizen</i>) yang merupakan salah satu bentuk implementasi GCG, sejak 2011 BTEL telah menjadi anggota Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Indonesian Business Council for Sustainability Development (IBCSA). Melalui IBCSD (www.ibcsd.or.id) yang merupakan suatu organisasi nirlaba, BTEL turut berpartisipasi dalam program-program yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.</p>

KOMPONEN-KOMPONEN UTAMA UNTUK PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BTEL

Pendekatan yang berkesinambungan terhadap kepatuhan dan penerapan prinsip serta praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada segenap Direksi dan Dewan Komisaris BTEL.

Kedua Dewan tersebut senantiasa menjadi bagian dari budaya etika dan integritas Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Suatu konsep penerapan GCG di BTEL telah diterapkan untuk membentuk budaya etis dan penuh integritas.

Diagram berikut menjabarkan konsep penerapan GCG yang menggunakan kerangka logika untuk membangun GCG:



1. PAKTA INTEGRITAS (PI)

PI merupakan pernyataan/janji pimpinan dan karyawan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan. Komitmen tersebut ditunjukkan BTEL dengan telah ditandatanganinya Piagam Pakta Integritas sejak 1 Agustus 2006 dan dilanjutkan dengan penyusunan Modul PI PT Bakrie Telekom Tbk. yang merupakan kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci, meliputi segala aspek yang diperlukan dalam rangka melaksanakan PI secara benar dan efektif di lingkungan PT Bakrie Telekom Tbk., menuju perwujudan Perseroan sebagai suatu lingkungan integritas yang efektif di Indonesia.

2. TATA KELOLA PERUSAHAAN/ CORPORATE GOVERNANCE (CG)

Secara umum CG didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Baik (Good) dalam konteks CG adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional per usahaan sesuai dengan konsep CG. Untuk memastikan tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), BTEL menggunakan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

3. ATURAN BERPERILAKU/ CODE OF CONDUCT (CoC)

Aturan berperilaku yang diterapkan BTEL mencakup kewajiban dan larangan yang mengatur hubungan kerja baik secara hubungan internal antar pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan karyawan,

karyawan dengan karyawan, dan hubungan eksternal antara perusahaan dengan pihak eksternal.

CoC berasal dari budaya Perseroan. Dalam CoC terdapat dua panduan etika:

- a. Etika umum sebagai kontrol atas perilaku karyawan, misalnya dalam hal berinteraksi dan kerahasiaan.
- b. Etika bisnis yang berlaku dalam masalah tender dan berinteraksi dengan piutang dagang.

4. FOIS (FINANCIAL OPERATIONAL INTEGRATED SYSTEM)

FOIS (Financial Operational Integrated System) dalam logical framework penerapan BTP (Bersih, Transparan, dan Profesional) di BTEL memiliki fungsi menterjemahkan prinsip-prinsip GCG dan CoC ke dalam tindakan nyata dengan menitikberatkan pengecekan secara detail dan simetris antara kegiatan operasional di lapangan dengan aspek keuangannya baik dalam anggaran, penggunaan, dan pencatatannya.

Kegunaan FOIS adalah mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang bersifat koruptif baik yang dilakukan oleh orang dalam, maupun bekerja sama dengan pihak luar. Ada 2 hal yang diperhatikan dalam penerapan FOIS, yaitu:

- a. Aktualisasi kebijakan, aturan, dan SOP di operasional perusahaan yang sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan; dan
- b. Sistem pengawasan dari aspek keuangan dan operasional secara terpadu.

Pada tingkatan operasional, BTEL memiliki berbagai kebijakan dan aturan seperti batasan kewenangan (BTEL-Approval Authority), Manual Mutu BTEL-QMS, Pedoman dan Prosedur di Unit-unit Kerja, dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang membantu karyawan bekerja dan beraktivitas sesuai dengan koridor dan aturan yang telah ditetapkan sehingga kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari semaksimal mungkin.

Untuk sistem pengawasan secara terpadu dalam aspek keuangan dan operasional, BTEL memiliki Risk Management, Corporate Internal Audit, dan Quality Audit yang mengemban tugas yang sangat penting untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin muncul, melakukan investigasi terhadap potensi kecurangan dan menganalisis ketidaksesuaian yang bisa muncul dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah yang diperlukan.

5. Prosedur Kerja Standar (Standard Operational Procedure/SOP)

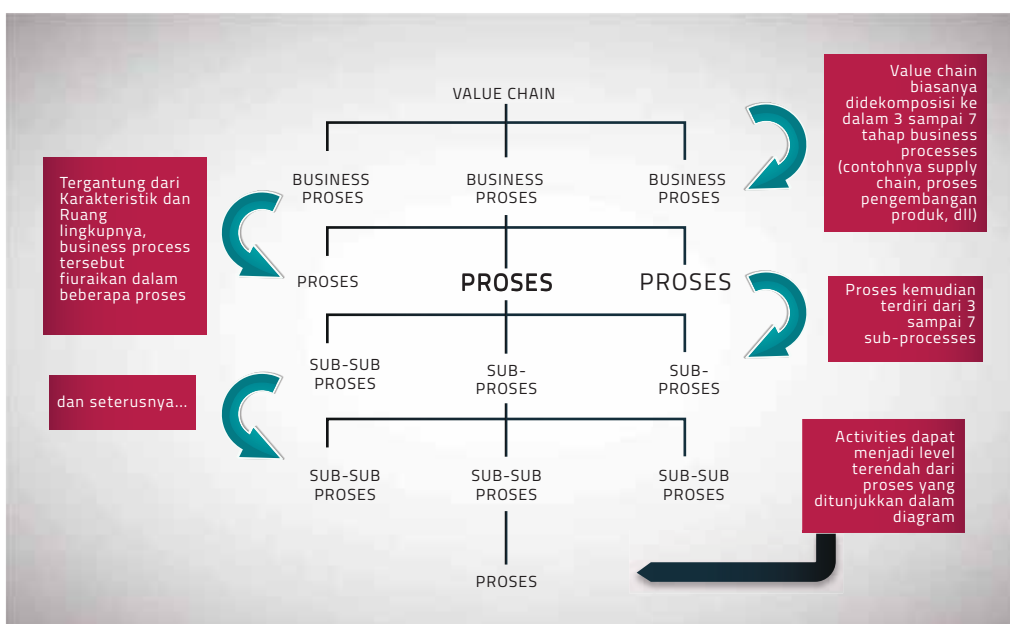
SOP menjadi bagian penting dalam pergerakan proses bisnis BTEL. Konsep pembangunan dan penerapan SOP dilakukan oleh Perusahaan melalui dua pendekatan yaitu : Top down Approach dan Bottom Up Approach yang sangat dipengaruhi dengan karakteristik SOP yang dibutuhkan pada saat atau pada tujuan bisnis tertentu.

TOP DOWN APPROACH

Dimulai dari value chain BTEL kemudian dikembangkan dalam bussines process dan sub process sampai ke level aktivitas.

BOTTOM UP APPROACH

Pendekatan yang dimulai dari aktivitas-aktivitas yang telah ada di level operasional kemudian dikembangkan menjadi suatu prosedur kerja standar (SOP)



6. TARIF

Salah satu acuan konsep GCG adalah prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness). Uraian dari TA RIF adalah sebagai berikut:

a. Transparency (Transparansi)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, BTEL menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. BTEL mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pokok-pokok pelaksanaan prinsip transparansi adalah sebagai berikut:

- i. BTEL menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- ii. Informasi yang diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha, dan strategi BTEL, kondisi keuangan, susunan pengurus, pemegang saham pengendali, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi BTEL.
- iii. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh BTEL tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- iv. Kebijakan BTEL dibuat secara tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Accountability (akuntabilitas)

BTEL harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu BTEL dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan BTEL dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pokok-pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- i. BTEL menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ BTEL dan karyawan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai BTEL (corporate values), dan strategi BTEL untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan bagi mereka.
- ii. BTEL meyakini bahwa semua organ BTEL dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- iii. Pemantauan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan BTEL.

- iv. BTEL memiliki system penilaian kinerja serta dan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- v. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ BTEL dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman berperilaku (code of conduct) atau peraturan kerja yang berlaku.

c. Responsibility (Tanggung Jawab)

BTEL mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pokok-Pokok prinsip tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- i. Organ BTEL berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan dan kebijakan intern (by-laws), serta standar etika BTEL.
- ii. BTEL melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar BTEL dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independency (Kemandirian)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, BTEL dikelola secara independen sehingga masing-masing organ BTEL tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pokok-pokok prinsip kemandirian adalah sebagai berikut:

- i. Masing-masing organ BTEL menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- ii. Masing-masing organ BTEL melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, BTEL senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pokok-pokok prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah sebagai berikut:

- i. BTEL memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BTEL serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- ii. BTEL memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BTEL.

- iii. BTEL memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

7. ETIKA BISNIS

Etika bisnis merupakan bagian awal dari upaya BTEL untuk membangun kerangka GCG di Perseroan. Etika bisnis merupakan kerangka dasar tingkah laku atau filosofi yang digunakan oleh seluruh karyawan BTEL dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dengan berpedoman pada etika bisnis maka akan terbentuk perusahaan yang bersih (GCG).

Konsep etika bisnis di BTEL adalah bagaimana unsur-unsur yang ada di BTEL yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu dan perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis atau menjalankan bisnis berlaku secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Prinsip yang digunakan dalam etika bisnis, yaitu:

- a. Prinsip Otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya lebih baik untuk dilakukan. Dan orang yang otonom tahu apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.
- b. Prinsip Kejujuran, yang terbagi menjadi tiga bagian:
 - Kejujuran dalam syarat perjanjian dan kontrak.
 - Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harga.
 - Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
- c. Prinsip Keadilan, menekankan perlakuan yang sama pada setiap individu sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Prinsip Saling Menguntungkan, menekankan agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution.
- e. Prinsip Integritas Moral, dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Selain berfungsi sebagai kendaraan ekonomi yang berorientasi pada penyediaan produk layanan berkualitas dengan imbal balik berupa keuntungan usaha, Perseroan juga memiliki fungsi tanggung jawab sosial untuk membantu sesama atau kalangan yang membutuhkan bantuan atau memberikan stimulasi bagi pihak-pihak yang dinilai memerlukan perbaikan kesejahteraan. Tanggung jawab sosial ini pada implementasinya juga tergantung pada kondisi keuangan dan operasional Perseroan tanpa menghilangkan kesadaran akan tanggung jawab sosial itu sendiri. Kesadaran akan tanggung jawab sosial ini sudah menjadi bagian dari nilai korporat dan pribadi insan BTEL yang menjadi satu kesatuan Corporate Social Responsibility-CSR yang berkelanjutan dan bermanfaat. Hal ini juga sejalan dengan amanah dari visi dan misi sosial Kelompok Usaha Bakrie.

Kondisi kinerja operasional dan keuangan Perseroan di tahun 2016 yang kurang menguntungkan tidak menyurutkan semangat berbagi dalam diri Perseroan dan pribadi insan BTEL dalam memberikan perhatian sosial kepada sesama. Perseroan berupaya untuk menyesuaikan kondisi tersebut dengan apa yang bisa diberikan atau dilakukan Perseroan dalam upaya membantu sesama sekecil apapun namun tetap memberikan manfaat.

MAJELIS TA'LIM ESIA

Bekerja sama dengan Majelis Ta'lim Esia dan Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Bakrie Telecom, Perseroan secara rutin

menyediakan konsumsi berbuka puasa bagi jamaah mushola Wisma Bakrie. Jamaah tersebut tidak hanya para karyawan Perseroan maupun dari kantor tetapi juga masyarakat sekitar Wisma Bakrie dalam hal ini termasuk para pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar Wisma Bakrie. Di samping itu terdapat pula penyaluran dana zakat/inafaq, karyawan melalui Komunitas Majelis Ta'lim ESIA dan HRD Perseroan (Employee Relations).

CEK KESEHATAN GRATIS DAN DONOR DARAH

Sebagai kegiatan yang diselenggarakan secara rutin maupun insidental, Perseroan juga berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat dan program donor darah yang merupakan kegiatan donasi darah bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Palang Merah Indonesia. Kegiatan-kegiatan sosial ini termasuk dalam agenda kegiatan sosial bersama antara perusahaan kelompok usaha Bakrie dan Yayasan Bakrie Untuk Negeri, dimana Perseroan adalah salah satu anggota kelompok usaha Bakrie yang terlibat aktif.

DONASI BAKRIE AMANAH

Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan, Perseroan mendorong manajemen dan karyawan BTEL untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana melalui kaleng amal yang dikordinasi oleh Bakrie Amanah.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2016 PT BAKRIE TELECOM TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bakrie Telecom Tbk tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 September 2017

DEWAN KOMISARIS



ANINDYA NOVYAN BAKRIE
Komisaris Utama



BOBBY GAFUR S. UMAR
Wakil Komisaris Utama



AI MULYADI MAMDER
Komisaris Independen

DIREKSI



R. BISMARKA KURNIAWAN
Direktur Utama



TAUFAN E.N. ROTORASIKO
Wakil Direktur Utama



JASTIROMO ABI
Wakil Direktur Utama



HARYA MITRA HIDAYAT
Direktur



ANDI PRAVIDIA SALIMAN
Direktur



W. MARK ROBSON
Direktur

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES***

*Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015*

***AND
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

Daftar Isi	<u>Halaman/ Page</u>	<i>Table of Contents</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Defisiensi Modal Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Changes in Capital Deficiency</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT BAKRIE TELECOM TBK
DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
OF
PT BAKRIE TELECOM TBK
AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : R. Bismarka Kurniawan
Alamat kantor : PT Bakrie Telecom Tbk
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,
Jakarta - 12920
Alamat rumah : Jl. Pinang Merah II SK-01
RT.014/RW.016 Pondok Pinang
Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
Telepon : (62 21) 91101112
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Andi Pravidia Saliman
Alamat kantor : PT Bakrie Telecom Tbk
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,
Jakarta - 12920
Alamat rumah : Jl. Puter II ED 2/32 Bintaro 5
RT.002/RW.009
Jurangmangu Timur
Pondok Aren - Tangerang
Telepon : (62 21) 91101112
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. Name : R. Bismarka Kurniawan
Office address : PT Bakrie Telecom Tbk
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,
Jakarta - 12920
Residential address : Jl. Pinang Merah II SK-01
RT.014/RW.016 Pondok Pinang
Kebayoran Lama Jakarta
Selatan
Telephone : (62 21) 91101112
Title : President Director
2. Name : Andi Pravidia Saliman
Office address : PT Bakrie Telecom Tbk
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,
Jakarta - 12920
Residential address : Jl. Puter II ED 2/32 Bintaro 5
RT.002/RW.009
Jurangmangu Timur
Pondok Aren - Tangerang
Telephone : (62 21) 91101112
Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements;
2. PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' internal control system.

This statement is made in all truth.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors


METERAI
TEMPEL
9D1FBAEF591558172
6000
ENAM RIBU RUPIAH

R. Bismarka Kurniawan
Direktur Utama / President Director

Andi Pravidia Saliman
Direktur / Director

Jakarta, 8 Agustus 2017 / August 8, 2017

PT Bakrie Telecom Tbk

Office:

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 108/BTEL/VIII/17

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT BAKRIE TELECOM Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No.: 108/BTEL/VIII/17

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT BAKRIE TELECOM Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bakrie Telecom Tbk and subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2016 the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2016 and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the

audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis untuk opini wajar dengan pengecualian

Seperti diungkapkan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan Bakrie Telecom Pte. Ltd. (Entitas Anak) sedang dalam proses untuk merestrukturisasi utang Wesel Senior dengan pokok sebesar USD380 juta yang sampai dengan tanggal laporan ini belum dapat ditentukan hasilnya. Lebih lanjut, seperti diungkapkan dalam catatan 17 atas laporan keuangan konsolidasian, pemegang Wesel Senior telah mengajukan gugatan kepada Kelompok Usaha. Hal-hal tersebut menyebabkan ketidakpastian material atas kelangsungan usaha Kelompok Usaha. Kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya tergantung pada hasil usaha yang positif, arus kas yang positif dan restrukturisasi Wesel Seniornya. Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasal dari kondisi ini.

Opini wajar dengan pengecualian

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini Wajar dengan pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Kami membawa perhatian ke Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, Kelompok Usaha mengalami defisiensi modal dan total liabilitas jangka pendek Kelompok Usaha telah melampaui total asetnya. Kondisi tersebut, bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 43 laporan keuangan konsolidasian, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasal dari kondisi tersebut.

Seperti diungkapkan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha mempunyai liabilitas kontinjensi berupa berbagai tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari transaksi bisnis normal.

reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Basis for qualified opinion

As disclosed in Note 17 to the Consolidated financial statements, the Company and Bakrie Telecom Pte. Ltd., (a Subsidiary) are in the process of restructuring the debt of the Senior Notes in a principal amount of USD380 million, the outcome of which could not be determined as of the date of this report. Moreover, as disclosed in Note 17 to the consolidated financial statements, the holders of Senior Notes have filed lawsuit against the Group. These matters resulting in a material uncertainty in regard to the going concern status of the Group. The ability of the Group to continue as a going concern depends on achieving positive operating results, positive cash flows and restructuring its Senior Notes. The consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from these matters.

Qualified opinion

In our opinion, except for the effects of the matter described in the basis for qualified opinion paragraph, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the Consolidated financial position of PT Bakrie Telecom Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

We draw attention to Note 43 to the accompanying consolidated financial statements which describes that as of December 31, 2016, the Group has a capital deficiency and total current liabilities of the Group have exceeded its total assets. These conditions, along with other matters as set forth in Note 43 to the consolidated financial statements, indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Group's ability to continue as a going concern. The consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of this uncertainty.

As disclosed in Note 41 to the consolidated financial statements, the Group is contingently liable for various claims from third parties arising from the ordinary conduct of business.

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini dengan modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 20 Mei 2016.

The consolidated Statement of financial position as of December 31, 2015 and for the year then ended, which were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such consolidated financial statements on May 20, 2016.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
GIDEON ADI & REKAN**



Gideon Adi Siallagan, M.Acc., CA., CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0460 / Public Accountant Registration No. AP. 0460

8 Agustus 2017/ August 8, 2017

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2c,4	2,211	5,720	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	5	48	48	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	2d,6	38	39	Restricted cash
Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp70.811 pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp65.712 pada tanggal 31 Desember 2015)	7	2,557	21,318	Trade receivables (net of allowance for impairment loss of Rp70,811 as of December 31, 2016 and Rp65,712 as of December 31, 2015)
Uang muka	8	1,995	4,151	Advances
Biaya dibayar di muka	2g,9	190	1,100	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	29a	36,477	31,638	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		43,516	64,014	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp8.555.004 pada tanggal 31 Desember 2016, Rp7.739.305 pada tanggal 31 Desember 2015, penurunan nilai sebesar Rp Nil dan Rp3.837.405 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)	2h,2i,2j,2 k,10	816,308	1,631,896	Fixed assets (net of accumulated depreciation of Rp8,555,004 as of December 31, 2016, of Rp7,739,305 as of December 31, 2015, impairment of Rp Nil and Rp3,837,405 as of December 31, 2016 and 2015)
Aset tidak lancar lainnya	2l,11,40	709,951	715,686	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,526,259	2,347,582	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		1,569,775	2,411,596	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	
LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL				CAPITAL DEFICIENCY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	12			<i>Trade payables</i>
Pihak ketiga		314,134	285,757	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2e,12	12,557	6,486	<i>Related parties</i>
Utang lain-lain	13	51,180	16,696	<i>Other payables</i>
Utang pihak berelasi	2e,30	47,098	47,098	<i>Due to related parties</i>
Pendapatan diterima di muka	2o	-	32,504	<i>Unearned revenues</i>
Uang muka pelanggan	14	-	6,700	<i>Customer deposits</i>
Beban akrual	15	2,546,179	1,908,413	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	2r,29b	113,961	102,908	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				<i>Current maturities of long-term liabilities</i>
Pinjaman	16	240	501	<i>Loans</i>
Wesel senior - neto	17	5,105,680	5,242,100	<i>Senior notes – net</i>
Total Liabilitas Jangka Pendek		8,191,029	7,649,163	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan-neto	2r,29d	118,238	54,546	<i>Deferred tax liability - net</i>
Liabilitas imbalan kerja	2p,31	767	23,131	<i>Employee benefits liability</i>
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun				<i>Long-term liabilities-net of current maturities</i>
Pinjaman	16	295	759	<i>Loans</i>
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	18,40	7,156,994	7,197,152	<i>Settlement of payables through PKPU</i>
Total Liabilitas Jangka Panjang		7,276,294	7,275,588	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		15,467,323	14,924,751	Total Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	
DEFISIENSI MODAL				CAPITAL DEFICIENCY
Modal saham				<i>Capital stock</i>
Nilai nominal Saham biasa seri A Rp200 seri B Rp100 (dalam satuan penuh)				<i>Par value Common shares series A Rp200 series B Rp100 (in full amount)</i>
Modal dasar				<i>Authorized shares</i>
Saham biasa seri A				<i>Common shares series A</i>
10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015				<i>10,000,000,000 shares as of December 31, 2016 and 2015</i>
Saham biasa seri B				<i>Common shares series B</i>
87.111.652.195 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015				<i>87,111,652,195 shares as of December 31, 2016 and 2015</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh				<i>Issued and fully paid share</i>
Saham biasa seri A				<i>Common shares</i>
5.751.502.450 saham				<i>series A 5,751,502,450 shares</i>
Saham biasa seri B				<i>Common shares series B</i>
24.833.088.205 saham	19	3,633,609	3,633,609	<i>24,833,088,205 shares</i>
Tambahan modal disetor	20	2,488,014	2,488,014	<i>Additional paid-in capital</i>
Saham beredar yang diperoleh kembali	2n,21	(11,000)	(11,000)	<i>Treasury stock</i>
Agio saham beredar yang diperoleh kembali	2n,21 2p,2q,21	50,623	50,623	<i>Premium on treasury stock</i>
Cadangan modal lainnya	,10	7,171	(551)	<i>Other capital reserves</i>
Defisit		<u>(20,065,744)</u>	<u>(18,673,601)</u>	<i>Deficit</i>
Defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		(13,897,327)	(12,512,906)	<i>Capital deficiency attributable to owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	2b, 21	<u>(221)</u>	<u>(249)</u>	<i>Non-controlling interest</i>
Defisiensi Modal - Neto		<u>(13,897,548)</u>	<u>(12,513,155)</u>	<i>Capital Deficiency – Net</i>
TOTAL LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL		<u>1,569,775</u>	<u>2,411,596</u>	TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL DEFICIENCY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	
PENDAPATAN USAHA				OPERATING REVENUES
Pendapatan usaha – bruto				Operating revenue - gross
Jasa telekomunikasi		141,328	533,958	Telecommunication services
Jasa interkoneksi	2e,2o,23	30,677	103,867	Interconnection services
Total pendapatan usaha	,30,35,3	172,005	637,825	Total operating revenues
Beban interkoneksi	6,37	(29,516)	(107,976)	Interconnection expenses
Potong harga		(52,640)	(128,229)	Discount
Pendapatan Usaha - Neto		89,849	401,620	Operating Revenues - Net
BEBAN USAHA	2e,2o,30			OPERATING EXPENSES
Penyusutan	2h,10	815,699	3,348,763	Depreciation
Operasi dan pemeliharaan	24	125,429	379,588	Operating and maintenance
Karyawan	26	78,712	230,236	Employee
Umum dan administrasi	25	26,633	186,503	General and administrative
Penjualan dan pemasaran	27	1,446	90,220	Sales and marketing
Total Beban Usaha		1,047,919	4,235,310	Total Operating Expenses
RUGI USAHA		(958,070)	(3,833,690)	OPERATING LOSS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Laba atas penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual	10,40	-	55,650	Gain on sale available-for-sale of financial asset
Beban keuangan	28b	(709,747)	(751,976)	Financing charges
Laba (rugi) selisih kurs – neto	2q,28a	337,780	(793,093)	Gain (loss) on foreign exchange-net
Rugi penurunan nilai aset	2j,10	-	(1,447,483)	Impairment loss of assets
Beban sisa masa sewa	17	-	(1,667,835)	Residual value expenses of the lease
Lain-lain – neto	28c	(296)	(67,980)	Others-net
Beban Lain-lain – Neto		(372,263)	(4,672,717)	Other Charges-Net
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(1,330,333)	(8,506,407)	LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2r,29d	(61,782)	(134,350)	INCOME TAX EXPENSE
RUGI BERSIH		(1,392,115)	(8,640,757)	NET LOSS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja	2p,31	9,650	5,161	Remeasurement gain on employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	29e	(1,930)	(1,032)	Related income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		2	48	Exchange differences due to financial statements translation
Pajak penghasilan terkait		-	(10)	Related income tax
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto Setelah Pajak		7,722	4,167	Other Comprehensive Income- net of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF		(1,384,393)	(8,636,590)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
Rugi neto yang dapat diatribusikan kepada:				Net loss attributable to:
Pemilik entitas Induk		(1,392,143)	(8,640,755)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	2b,22	28	(2)	Non-controlling interest
Jumlah		(1,392,115)	(8,640,757)	
Total rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive loss attributable to:
Pemilik entitas Induk		(1,384,408)	(8,636,598)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	2b,22	15	8	Non-controlling interest
Jumlah		(1,384,393)	(8,636,590)	Total
RUGI NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Angka penuh)	2s,34	(45.52)	(282.52)	BASIC LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF PARENT (Full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT BAKRIE TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN DEFISIENSI MODAL KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAKRIE TELECOM Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL DEFICIENCY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Defisiensi Modal yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Capital Deficiency Attributable to Owners of the Parent									
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid Shares	Tambahan Modal Disetor/ Additio- nal Paid-in Capital	Saham Beredar yang Diperoleh Kembali/ Treasury Stock	Agio Saham Beredar yang Diperoleh Kembali/ Premium on Treasury Stock	Cadangan Modal Lainnya/ Other Capital Reserves	Defisit/ Deficit	Total/ Total	Kepentingan Nonpengendalian/ Non-controlling Interest	Defisiensi Modal - Neto/ Capital Deficiency-Net	Balance as of January 1, 2015- as previously reported
Saldo 1 Januari 2015- dilaporkan sebelumnya	3,633,609	2,488,014	(11,000)	50,623	144	(10,039,929)	(3,878,539)	(247)	(3,878,786)	
Penyesuaian untuk efek pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013)	-	-	-	-	(4,862)	7,083	2,221	-	2,221	
Saldo 1 Januari 2015- disajikan kembali	3,633,609	2,488,014	(11,000)	50,623	(4,718)	(10,032,846)	(3,876,318)	(247)	(3,876,565)	
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	(8,640,755)	(8,640,755)	(2)	(8,640,757)	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	48	-	48	-	48	
Pengukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	5,161	-	5,161	-	5,161	
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-	(1,042)	-	(1,042)	-	(1,042)	
Saldo 31 Desember 2015	3,633,609	2,488,014	(11,000)	50,623	(551)	(18,673,601)	(12,512,906)	(249)	(12,513,155)	
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	(1,392,143)	(1,392,143)	28	(1,392,115)	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	9,650	-	9,650	-	9,650	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	2	-	2	-	2	
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-	(1,930)	-	(1,930)	-	(1,930)	
Saldo 31 Desember 2016	3,633,609	2,488,014	(11,000)	50,623	7,171	(20,065,744)	(13,897,327)	(221)	(13,897,548)	

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	98,921	423,566	<i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan aktivitas operasi lainnya	(17,457)	(371,390)	<i>Cash paid to suppliers and other operating activities</i>
Pembayaran kas kepada karyawan	(82,918)	(173,020)	<i>Cash paid to employees</i>
Pembayaran beban keuangan	(1,458)	(3,591)	<i>Payment of financing charges</i>
Pembayaran pajak	(53)	(33,273)	<i>Payment of taxes</i>
Penerimaan bunga	46	67	<i>Receipt of interest</i>
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	<u>(2,919)</u>	<u>(157,641)</u>	<i>Net Cash Flows Used in Operating Activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual	-	146,650	<i>Proceed from sale of available- for-sale financial asset</i>
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	1,873	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Pembelian aset tetap	-	(1,206)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Pembayaran akuisisi entitas anak	(563)	-	<i>Acquisition of subsidiaries</i>
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	<u>(563)</u>	<u>147,317</u>	<i>Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities</i>
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(3,482)	(10,324)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
EFEK PERUBAHAN NILAI KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(27)	221	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>5,720</u>	<u>15,823</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u>2,211</u>	<u>5,720</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Bakrie Telecom Tbk (dahulu PT Radio Telepon Indonesia) ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1993 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris No. 94 oleh Muhani Salim, SH., sebagaimana diperbaiki dengan Akta Notaris Pembetulan No. 13 tanggal 5 November 1993 dan diubah dengan Akta Notaris No. 129 tanggal 27 November 1993, keduanya dibuat oleh Abdurachman Kadir, SH., Notaris pengganti dari Muhani Salim, SH.

Status Perusahaan mengalami perubahan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana tertuang dalam resolusi para pemegang saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 6 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat oleh Agus Madjid, SH. Dimana perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No. C-03880 HT.01.04.TH.2006, tanggal 13 Februari 2006.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi penyediaan jaringan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi nasional dengan daerah operasi mencakup Jakarta, beberapa wilayah di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Bakrie, Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan. Perusahaan memulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 November 1995.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Agustus 2008, ruang lingkup kegiatan Perusahaan telah diperluas yang meliputi; merencanakan, membangun dan menyewakan sarana/fasilitas telekomunikasi, melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, melakukan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana/fasilitas telekomunikasi, serta memperdagangkan perangkat/produk telekomunikasi.

1. GENERAL

a. Company Establishment

PT Bakrie Telecom Tbk (previously PT Radio Telepon Indonesia) (the "Company") was established in the Republic of Indonesia on August 13, 1993 within the framework of the Domestic Investment Law No. 6 Year 1968, as amended by Law No. 12 Year 1970 based on Notarial Deed No. 94, of Muhani Salim, SH., as amended by Amendment Notarial Deed No. 13 dated November 5, 1993 and amended by Notarial Deed No. 129 dated November 27, 1993, both made of Abdurachman Kadir, SH., substitute of Notary Muhani Salim, SH.

The Company's status was changed to that of a public company through the resolutions of the Company's shareholders as notarized by Deed No. 6 of Agus Madjid, SH., dated February 3, 2006. This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. C-03880 HT.01.04.TH.2006 dated February 13, 2006.

The scope of activities of the Company comprises the provision of fixed digital radio cellular telecommunication national network and services. The Company's operational areas are located in Jakarta, certain regions in West Java, Banten, Central Java, East Java, Bali, Sumatra, Sulawesi and Kalimantan. The Company is domiciled in Jakarta with its head office located at Wisma Bakrie, 3rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, South Jakarta. The Company started its commercial operations on November 1, 1995.

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting held on August 11, 2008, the scope of activities of the Company was modified to comprise; planning, development and lease of telecommunication equipment/facilities, marketing and sales activities of telecommunication network and/or services, maintenance, research and development of telecommunication equipment/facilities, and selling of telecommunication products/utilities.

1. UMUM (Lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan modal dasar ditempatkan Perusahaan, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 dan No. 28 masing-masing tertanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No. AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara No.98 Tambahan No.43892 tanggal 6 November 2015, tanggal 7 Agustus 2015.

Pada tanggal 10 Oktober 2016, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1765 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 298/KEP/M.KOMINFO/6/2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas PT. Bakrie Telecom Tbk.

Sejalan dengan Surat pencabutan ijin tersebut, Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas PT. Bakrie Telecom Tbk dihentikan.

Pada tanggal 12 Februari 2009, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional (SLI) dan jasa teleponi dasar, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 59/KEP/M.KOMINFO/02/2009 tentang izin penyelenggaraan SLI PT Bakrie Telecom Tbk. Izin penyelenggaraan SLI akan dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun. Sebelumnya, Perusahaan memperoleh izin prinsip untuk SLI pada tanggal 8 Oktober 2007.

Pada tanggal 7 November 2016, diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 213 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 184/DIRJEN/2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi PT. Bakrie Telecom Tbk.

1. GENERAL (Continued)

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment in relation to the Company's Articles of Association that have been adapted to the Financial Services Authority (OJK) rules and the increase of authorized capital issued was based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 29, 2015, as stated in Deed of Resolution No. 27 and No. 28 which dated June 22, 2015 made before Lenny Janis Ishak, SH, Notary. This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 and was published in the State Gazette No. 89, Supplement No. 43892 dated November 6, 2015, dated August 7, 2015.

On October 10, 2016, The government issued the Ministry of Communication and Information Decree No. 1765 Year 2016 that revoked the Ministry of Communication and Information Decree Number 298/KEP/M.KOMINFO/6/2007 concerning Operational License of Local Fixed Wireless Network of PT. Bakrie Telecom Tbk.

In line with the Ministry Decree, the operation of Local Fixed Wireless Network with limited mobility services of PT. Bakrie Telecom Tbk. was terminated.

On February 12, 2009, the Company received a License for International Fixed-Line Direct Connection (SLI) and basic telephone service, based on Decision Letter of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 59/KEP/M.KOMINFO/02/2009 in respect to license for SLI PT Bakrie Telecom Tbk. The SLI license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. Previously, the Company had received a principal license for SLI on October 8, 2007.

On November 7, 2016, The government issued the Director General of Managing Post and Information Decree Number. 213 Year 2016 that revoked the Director General of Post and Telecommunication Decree Number 184/DIRJEN/2009 concerning Operational License of Call Center of PT. Bakrie Telecom Tbk.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

Sejalan dengan Surat pencabutan ijin tersebut, Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi PT. Bakrie Telecom Tbk dihentikan.

Pada tanggal 9 November 2016, diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 195/DIRJEN/2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) PT. Bakrie Telecom Tbk.

Sejalan dengan Surat pencabutan ijin tersebut, Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet oleh PT. Bakrie Telecom Tbk dihentikan.

Pada tanggal 14 November 2016, diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 242 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 16/DIRJEN/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) PT. Bakrie Telecom Tbk.

Sejalan dengan Surat pencabutan ijin tersebut, Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) oleh PT. Bakrie Telecom Tbk dihentikan.

Pada tanggal 26 September 2014, Perusahaan memperoleh persetujuan pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz PT Bakrie Telecom Tbk kepada PT Smartfren Telecom Tbk, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular.

Perusahaan tergabung dalam Kelompok Usaha Bakrie.

b. Penawaran Umum Saham Perdana

Pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan mencatat sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) melalui Penawaran Umum Perdana Saham Seri B Atas Nama Tahun 2005 sebanyak lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. GENERAL (Continued)

In line with the that the Director General Decree, the operation of Call Center Services of PT. Bakrie Telecom Tbk. was terminated.

On November 9, 2016, The government issued the Director General of Managing Post and Information Decree Number 235 Year 2016 that revoked the Director General of Post and Telecommunication Decree Number 195/DIRJEN/2010 concerning Operational License of Network Access Point Services of PT. Bakrie Telecom Tbk.

In line with the that the Director General Decree, the operation of Network Access Point Services by PT. Bakrie Telecom Tbk. was terminated.

On November 14, 2016, The government issued the Director General of Managing Post and Information Decree Number 242 Year 2016 that revoked the Director General of Post and Telecommunication Decree Number 16/DIRJEN/2006 concerning Operational License of Public Internet Telephony (VoIP) Services of PT. Bakrie Telecom Tbk.

In line with the that the Director General Decree, the operation of Public Internet Telephony (VoIP) Services by PT. Bakrie Telecom Tbk. was terminated.

On September 26, 2014, the Company obtained approval permits for transfer the radio frequency spectrum bandwidth 800 Mhz of PT Bakrie Telecom Tbk to PT Smartfren Telecom Tbk, based on Decision Letter of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 in respect to Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 30 Year 2014 concerning Settlement 800 MHz Radio Frequency Band the Purpose of Implementation of Cellular Mobile Network.

The Company is part of the Bakrie Group.

b. Initial Public Offering

On February 3, 2006, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (previously Jakarta Stock Exchange) through an Initial Public Offering (IPO) of five billion five hundred million (5,500,000,000) registered Shares Series B in Year 2005 with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.

1. UMUM (Lanjutan)

Dalam rangka penawaran umum perdana ini, Perusahaan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak satu miliar seratus juta (1.100.000.000) lembar Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma yang menyertai seluruh saham Seri B atas nama. Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Seri B atas nama dengan harga pelaksanaan sebesar seratus tiga puluh lima rupiah (Rp135) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 3 Agustus 2006 sampai 2 Februari 2009.

Pada bulan Maret 2009, semua waran telah selesai dilaksanakan.

Penawaran Umum Saham Perdana tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 September 2005 dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 39 oleh Agus Madjid, SH.

c. Penawaran Umum Terbatas (PUT)

Pada tanggal 14 Februari 2008, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa keuangan melalui surat No. S-944/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar seratus rupiah (Rp100) setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar tiga ratus lima puluh rupiah (Rp350). PUT tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Februari 2008 dengan Akta Notaris No. 38 oleh Agus Madjid, SH., dan pada tanggal 29 Februari 2008, PUT tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

d. Pembelian kembali (buy-back) Saham Perusahaan

Pada tanggal 15 Oktober 2008, Direksi menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak satu koma satu triliun rupiah (Rp1,1 triliun) atau 20% dari modal disetor Perusahaan. Pembelian kembali saham tahap pertama akan dilakukan sebesar-besarnya seratus miliar rupiah (Rp100,0 miliar) dan pembelian kembali saham tahap kedua akan dilakukan sesuai dengan kemampuan, keperluan dan kondisi Perusahaan.

Pembelian kembali dilaksanakan dalam periode Oktober dan November tahun 2008, dimana sebanyak enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (689.425.500) lembar saham telah dibeli kembali, dan pada tahun 2009, sebanyak lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (579.425.500) lembar saham telah dijual kembali (Catatan 21).

1. GENERAL (Continued)

For the purposes of this public offering, the Company also simultaneously issued one billion one hundred million (1,100,000,000) Series I Warrants that were issued at no cost (naked warrants) accompanying the registered Series B shares. Series I Warrants gave the right to their holders to purchase Series B shares at an exercise price of one hundred and thirty-five rupiah (Rp135) per share, which could be exercised within the period of August 3, 2006 to February 2, 2009.

In March 2009, all warrants had been accomplished.

The IPO was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on September 23, 2005 and notarized by Deed No. 39 of Agus Madjid, SH.

c. Rights Issue

On February 14, 2008, the Company obtained the notice of effectiveness from the Chairman of the Financial Services Authority per letter No. S-944/BL/2008 dated February 14, 2008 of its Rights Issue for a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share which were offered at three hundred fifty rupiah (Rp350) per share. The Rights Issue, which was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on February 15, 2008 and notarized by Deed No. 38 of Agus Madjid, SH., was listed on the Indonesia Stock Exchange on February 29, 2008.

d. Buy-Back of the Company's Shares of Stock

On October 15, 2008, the Board of Directors approved the buy-back of the Company's shares up to a maximum of one point one trillion rupiah (Rp1.1 trillion) or 20% of the paid-in capital of the Company. The buy-back of shares of stock in the first phase worth of up to one hundred billion rupiah (Rp100.0 billion) and the second phase of the balance will be carried out according to the availability, needs and condition of the Company.

The buy-back was undertaken during the period of October and November 2008, during which time six hundred eighty-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (689,425,500) shares were bought back, and in 2009, five hundred seventy-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (579,425,500) shares were reissued (Note 21).

1. UMUM (Lanjutan)

**e. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMT-HMETD)**

Pada tanggal 22 Juni 2012 dan 29 Agustus 2012, Perusahaan menerbitkan saham Seri B dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham masing-masing sebesar lima ratus enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam (566.037.736) saham dan satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh (1.536.135.340) saham, untuk PT Bakrie Global Ventura, pihak berelasi melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) dengan harga pelaksanaan dua ratus enam puluh lima rupiah (Rp265) per saham.

f. Struktur Entitas Anak

Pada tanggal 11 Maret 2010, berdasarkan Akta Notaris No. 03 dibuat oleh Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Bakrie Connectivity.

Ruang lingkup kegiatan Entitas Anak meliputi usaha perdagangan produk dan/atau perangkat telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa penyedia dan pemanfaatan multimedia dan jasa pengadaan sumber daya manusia, telekomunikasi serta media cetak.

Pada tanggal 11 Maret 2010, berdasarkan Akta Notaris No. 04 dibuat oleh Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network). Perubahan nama Entitas Anak berdasarkan Akta Notaris No. 03 pada tanggal 9 September 2013. Pada tanggal 31 Desember 2015, Entitas Anak masih dalam tahap pengembangan.

Pada tanggal 19 April 2010, Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama Bakrie Telecom Pte., Ltd. Kantor Entitas Anak berlokasi di Singapura. Entitas Anak tidak memiliki kegiatan usaha lain selain memberikan jasa kepada Perusahaan dan memperoleh pendapatan dari jasa tersebut.

Pada tanggal 16 Juni 2016, berdasarkan Akta Notaris No. 09 dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, SH., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Anugerah Andalan Investama (AAI).

Ruang lingkup kegiatan AAI adalah meliputi perdagangan produk dan jasa berbasis internet, internet *provider*, jasa penyediaan sumber daya manusia, jasa televisi berbayar, jasa multimedia, dan jasa media cetak dan elektronik.

1. GENERAL (Continued)

**e. Capital Stock Issuance Through Non-Preemptive
Right (PMT-HMETD)**

On June 22, 2012 and August 29, 2012, the Company issued Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share amounting to five hundred sixty-six million, thirty-seven thousand, seven hundred thirty-six (566,037,736) shares and one billion, five hundred thirty-six million, one hundred thirty-five thousand, three hundred forty (1,536,135,340) shares, respectively, to PT Bakrie Global Ventura, a related party through Capital Stock Issuance Without Preemptive Right (PMT-HMETD) at an exercise price of two hundred sixty-five rupiah (Rp265) per share.

f. Structure of the Subsidiaries

On March 11, 2010, based on Notarial Deed No. 03, of Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., the Company established a Subsidiary, PT Bakrie Connectivity.

The scope of its Subsidiary activities consists of trading of products and/or telecommunications equipment, services as information technology service providers, and the use of multimedia and human resources services, telecommunications and media.

On March 11, 2010, based on Notarial Deed No. 04, of Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., the Company established a Subsidiary, PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network). The change in name of the Subsidiary was based on Notarial Deed No. 03 dated September 9, 2013. As of December 31, 2015, this Subsidiary is still under the development stage.

On April 19, 2010, the Company established a Subsidiary, Bakrie Telecom Pte., Ltd. The registered office of the Subsidiary is located in Singapore. The Subsidiary has no other business operation than to provide services to the Company and earns revenue from rendering such services.

On June 16, 2016, based on Notarial Deed no. 09 of Ervina Christina Sembiring, SH., M.Kn. The Company established a Subsidiary, PT Anugerah Andalan Investama (AAI).

The scope of AAI consist of trading and services internet product, internet provider, human resources services, subscription television services, multimedia services, and printing and electronic media services.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

Pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris No 22 yang kemudian ditegaskan kembali dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 24 Januari 2017 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, AAI telah mengambilalih saham-saham pada PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK).

Ruang lingkup kegiatan MKK adalah meliputi perdagangan barang dan jasa antara lain perdagangan alat-alat telekomunikasi, elektronik, jasa pembangunan instalasi telekomunikasi, industri barang-barang elektronik, jasa penerbitan dan desain grafis, jasa teknologi informasi dan internet konten serta jasa multimedia.

MKK adalah selaku pemegang saham pada PT. Layanan Prima Digital (LPD) berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Agustus 2016 yang kemudian ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No. 2 tanggal 28 Oktober 2016 yang keduanya dibuat oleh Firdhonal S.H.

Ruang lingkup kegiatan LPD meliputi perdagangan barang-barang elektronik dan telekomunikasi serta peralatan Jaringan, penyediaan jasa internet dan multimedia, jasa televisi berbayar, jasa telekomunikasi, jasa publikasi dan penyiaran, jasa e-commerce dan jasa penyediaan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa-jasa terkait lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan sebagai berikut (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut sebagai "Kelompok Usaha"):

Entitas Anak/ Subsidiaries	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Bidang Usaha/ Scope of Activities	Saat Dimulainya Kegiatan Usaha Komersial/ Start of Commercial Operations	Domisili/ Domicile	Total Aset sebelum Eliminasi/ Total Asset before Elimination	
					2016	2015
Kepemilikan langsung/ Direct ownership:						
PT Bakrie Connectivity	99,99	Perdagangan Telekomunikasi/ Telecommunication Trading	2010	Indonesia	9.195	9.721
PT Bakrie Digital Net	99,80	Infrastruktur Telekomunikasi/ Telecommunication Infrastructure	-	Indonesia	515	514
Bakrie Telecom Pte., Ltd	100,00	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	2010	Singapura/ Singapore	7.027.324	7.151.334
PT Anugerah Andalan Investama (AAI)	99,80	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	2016	Indonesia	717	NA

1. GENERAL (Continued)

On December 27, 2016, based on Notarial Deed No. 22 reaffirmed with Notarial Deed No. 15 dated January 24, 2017 of Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, both of them, AAI has taken over PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK) shares.

The scope of MKK consist of trading goods and services such as telecommunication equipment, electronic, develop telecommunication instalation, electronic goods, services publications and graphic design, information technology services, and internet content with multimedia services.

MKK as a shareholders at PT. Layanan Prima Digital (LPD) based on Notarial Deed No. 8 dated August 31, 2016 reaffirmed with Notarial Deed No.2 dated October 28, 2016 of Firdhonal S.H both of them.

The scope of LPD consist of trading electronic telecommunication goods with and network equipment, internet and multimedia services provider, subscription television services, telecommunication services, publication and broadcasting services, e-commerce services, and multimedia services and utilize through the telecommunication and others related services.

As of December 31, 2016 and 2015, the Company had ownership interest in Subsidiaries as follows (together with the Company hereinafter referred to as the "Group"):

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Bidang Usaha/ Scope of Activities	Saat Dimulainya Kegiatan Usaha Komersial/ Start of Commercial Operations	Domisili/ Domicile	Total Aset sebelum Eliminasi/ Total Asset before Elimination	
					2016	2015
Indirect ownership:						
<i>Melalui / Through AAI</i>						
PT Mitra Kreasi Komunika (MKK)	70,00	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	2016	Indonesia	869	N/A

g. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit serta Karyawan

g. Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee and Employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2016 and 2015 was as follows:

31 Desember 2016 / December 31, 2016

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen

Anindya Novyan Bakrie
Gafur Sulistyio Umar
Ai Mulyadi Mamoer

Board of Commissioners
President Commissioner
Vice President Commissioner
Independent Commissioner

31 Desember 2016 / December 31, 2016

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Independen
Direktur
Direktur

R Bismarka Kurniawan
Jastiro Abi
Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
W. Mark Robson
Harya Mitra Hidayat
Andi Pravidia Saliman

Board of Directors
President Director
Vice President Director
Vice President Director
Independent Director
Director
Director

31 Desember 2015 / December 31, 2015

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen

Anindya Novyan Bakrie
Gafur Sulistyio Umar
Ai Mulyadi Mamoer

Board of Commissioners
President Commissioner
Vice President Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur (Tidak Terafiliasi)

Jastiro Abi
Harya Mitra Hidayat
Bachder Bachtarudin
Imanuddin Kencana Putra

Board of Directors
President Director
Director
Director
(Non Affiliated) Director

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Ai Mulyadi Mamoer
Anggota	Yansen Pasaribu
Anggota	Leo J. Susilo

Audit Committee

Chairman
Members
Members

2016 dan/and 2015

Sekretaris Perusahaan

Agustinus Harimurti

Corporate Secretary

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah karyawan Kelompok Usaha masing-masing adalah 23 dan 337 karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2016 and 2015, the Group had 23 and 337 employees, respectively (unaudited).

h. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2017.

h. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on August 8, 2017.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies issued by the Financial Services Authority (OJK).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, kecuali untuk penerapan pernyataan dan interpretasi baru dan revisi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 seperti yang diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait.

The accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with the accounting policies in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2014, except for the adoption of new and revised statements and interpretations effective January 1, 2015 as described in the related accounting policies.

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", menggantikan PSAK No.1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK revisi tersebut memperkenalkan perubahan signifikan berikut ini:

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statement,." Which superseded PSAK No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements". The revised PSAK introduces the following significant amendments:

- (a) perubahan judul yang digunakan untuk laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
- (b) perubahan dalam penyajian penghasilan komprehensif lain.

- (a) the title used for statement of comprehensive income has changed to statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- (b) change in the presentation of other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat (termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas) dan dikelompokkan menjadi pos-pos yang:

- (a) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
- (b) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian direvisi dengan mempertimbangkan perubahan di atas.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak tertentu.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian". Dengan diterbitkannya PSAK tersebut, PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" diubah namanya menjadi PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", dan juga menggantikan ISAK No. 7, "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus".

Penerapan PSAK No. 65 tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan *investee*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The other comprehensive income section shall present line items for amounts of other comprehensive income in the period, classified by nature (including share of the other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using the equity method) and grouped into items that:

- (a) will not be reclassified subsequently to profit or loss; and*
- (b) will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met.*

Accordingly, the consolidated financial statements were revised to consider the above amendments.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing and financing activities.

When the entity adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the entity reclassifies the items in its financial statements, the statements of financial position at the beginning of comparative period are presented.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its certain Subsidiaries.

b. Principles of Consolidation

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements." With the issuance of such PSAK, PSAK No. 4 (Revised 2009), "Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements" was renamed to PSAK No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements," and ISAK No. 7, "Consolidation - Special Purpose Entities" was superseded.

The adoption of PSAK No. 65 has no impact in the Group's consolidated financial statements.

An entity (the parent) that controls one or more other entities (subsidiaries) were present consolidated financial statements. Investors, apart of the nature of its involvement with an entity (investee), determine whether the investor is a parent by assessing whether the investor controls the investee.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)**

Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee*;
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga (3) elemen pengendalian.

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas *investee*.

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang:

- (a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
- (b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- (c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Entitas induk yang adalah entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Therefore, the investor controls the investee if and only if the investor has all of the following:

- (a) power over the investee;
- (b) exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee; and
- (c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns.

Investors reassess whether the investor controls the investee if facts and circumstances indicate that one or more of the three (3) control elements have changed.

Investee is consolidated from the date of the investor obtains control of investee and continues to be consolidated until the date that such control ceases.

A parent determines whether the parent entity is an investment entity. An investment entity is an entity that:

- (a) obtains funds from one or more investors for the purpose of providing investment management services;
- (b) its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and
- (c) measures and evaluates the performance of its investments on a fair value basis.

A parent that is an investment entity measures its investments in particular subsidiaries at fair value through profit or loss.

Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.

Total comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau (jika sesuai) biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai "Kas yang Dibatasi Penggunaannya." Kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo dalam satu (1) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Rekening bank dan deposito berjangka lainnya yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai aset tidak lancar.

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

If a parent loses control of a subsidiary, the parent:

- (a) *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statements of financial position.*
- (b) *recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, when appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.*
- (c) *recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.*

c. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral nor restricted in use.

d. Restricted Cash

Cash in banks and time deposits, which are restricted in use, are presented as "Restricted Cash." Restricted cash to be used to pay currently maturing obligations that are due within one (1) year are presented under current assets. Other current accounts and time deposits that are restricted in use are presented under non-current assets.

e. Transaction with Related Parties

The Group discloses transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures."

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

All significant transactions with related parties whether or not conducted under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES (Continued)

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*), dimana biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir tahun.

f. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by the weighted-average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

g. Biaya Dibayar Di muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

h. Aset Tetap

Kelompok Usaha telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

h. Fixed Assets

The Group has chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of the assets are as follows:

	Tahun/Years	
Bangunan	20	Buildings
Peralatan telekomunikasi	5	Telecommunication equipment
Fasilitas telekomunikasi	5	Telecommunication facilities
Peralatan pengangkutan	5	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	4 - 5	Office equipment and fixtures
Aset sewaan	10	Leased assets

Masa manfaat ekonomis aset tetap dan metode depresiasi ditelaah, dan disesuaikan jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun. Sebelum tahun 2014, masa manfaat aset tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun.

The fixed assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, at each end of the reporting period. As of December 31, 2015 and 2014, the Group estimated the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years. Prior 2014, the useful lives of those assets were 10 (ten) years.

Tanah dinyatakan sebesar nilai perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Aset dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Assets under construction are stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

(Lanjutan)

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

i. Sewa

Sewa yang mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee* diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, sewa pembiayaan dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan pada laba rugi. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan dicatat pada akun aset tetap dan disusutkan sepanjang masa manfaat dari aset sewaan tersebut atau periode masa sewa, mana yang lebih pendek, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Dalam hal transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

j. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

PSAK No. 48 (Revisi 2014) menitikberatkan pada pengungkapan atas nilai terpulihkan untuk aset nonfinansial. Pernyataan yang direvisi mensyaratkan pengungkapan informasi tambahan jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

POLICIES (Continued)

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

i. Leases

Leases that transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item to the lessee are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or at the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than the fair value. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recorded in profit or loss. Leased assets held by the lessee under finance leases are included in fixed assets and depreciated over the estimated useful life of the assets or the lease term, whichever is shorter, if there is no reasonable certainty that lessee will obtain ownership by the end of the lease term.

In the case of sale and leaseback results in a finance lease, this is to be treated as two separate transactions, i.e. sale and lease. The excess of sales proceeds over the carrying amount is deferred and amortized over the lease term.

Leases that do not transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

j. Impairment of Non-Financial Assets

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets."

PSAK No. 48 (Revised 2014) focuses on the recoverable amount disclosures for non-financial assets. The revised statement requires additional disclosure of information if the recoverable amount represents the fair value less costs of disposal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

k. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi tertentu terhadap pengeluaran untuk aset kualifikasian tersebut.

l. Jaminan

Jaminan merupakan uang jaminan yang dibayarkan untuk sewa lokasi untuk menara *Base Transceiver Stations* (BTS), sewa gedung kantor dan apartemen sesuai dengan perjanjian dan akan dikembalikan pada saat berakhirnya periode sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** *(Continued)*

The Group evaluates at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Reversal on impairment loss for non-financial assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized on profit or loss, except for assets that presented using the revaluation model in accordance with other PSAK. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

k. Borrowing Costs

Borrowing costs, either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying asset.

l. Security Deposits

Security deposits represent guarantee for field rental of Base Transceiver Stations (BTS), office building rent and apartment rent in accordance with the agreements, which will be returned at the end of the rental period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

m. Segmen Operasi

Pembuat keputusan operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa *CDMA Mobile* dan jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 23 dan 36).

n. Saham Beredar Yang Diperoleh Kembali

Saham beredar yang diperoleh kembali (*treasury stock*) untuk dikeluarkan lagi di kemudian hari dicatat dengan metode nilai nominal atau *par value method*. Berdasarkan metode ini, saham beredar yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominalnya dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Apabila saham beredar yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun tambahan modal disetor akan disesuaikan. Selisih lebih harga perolehan dari harga penerbitannya akan dikoreksi ke saldo laba.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak penjualan (PPN).

Pendapatan Jasa Telekomunikasi

Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan dari jasa penyambungan diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan sedangkan pendapatan pulsa serta pendapatan bulanan diakui pada saat terjadinya.

Pendapatan kartu pra bayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana dan kartu pulsa isi ulang diakui sebagai berikut:

- Penjualan kartu perdana diakui sebagai pendapatan saat penyerahan kepada agen penjual atau penjualan langsung kepada pelanggan akhir.
- Penjualan kartu pulsa isi ulang (pra bayar) diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan diakui secara proporsional sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat kartu telah habis masa berlakunya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

m. Operating Segment

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board of Directors reviews the Company's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Board of Directors considers the business from the return of invested capital perspective. Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment that provides CDMA Mobile and telecommunications network services to its customers. Further details are disclosed in (Notes 23 and 36).

n. Treasury Stock

Re-acquisition of capital stock to be held as treasury stocks for future reissuance is accounted for under the par value method. Under this method, treasury stock is presented at par value as a reduction from the capital stock account. If the treasury stock had been originally issued at a price above par value, the related additional paid-in capital account is adjusted. Any excess of the reacquisition cost over the original issuance price is treated as an adjustment to retained earnings.

o. Revenues and Expenses Recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and sales taxes (VAT).

Telecommunication Services

For post-paid subscribers, revenues from connection services are recognized as income at the time the connections take place, while usage airtime and monthly subscription charges are recognized when earned.

Revenues from pre-paid cards, which consist of sale of starter packs and pulse reload vouchers, are recognized as follows:

- *Starter pack sales are recognized as revenue upon delivery of starter packs to dealers or directly to customers.*
- *Pulse reload vouchers (pre-paid) sales are initially recorded as unearned revenue and then proportionally recognized as usage revenue based on successful calls made by the subscribers or whenever the unused stored value of the voucher has expired.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi, yang didasarkan pada perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional, diakui berdasarkan trafik sebenarnya yang tercatat dan disajikan sebesar pendapatan bruto (*gross*).

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat penyerahan jasa tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

p. Imbalan Kerja

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". PSAK No. 24 (Revisi 2013) memberikan, antara lain, (i) penghapusan "pendekatan koridor" yang diizinkan dalam versi sebelumnya dan (ii) memberikan perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan kerja, antara lain, sebagai berikut:

- Laba dan rugi aktuarial kini diwajibkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dikeluarkan secara permanen dari laba rugi.
- Biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak dapat ditangguhkan lagi dan diakui selama periode *vesting* masa depan. Sebaliknya, semua biaya jasa lalu akan diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Kelompok Usaha mengakui biaya restrukturisasi; atau keputusan hubungan kerja terkait.

Kelompok Usaha telah menerapkan pernyataan revisi secara retrospektif sesuai dengan ketentuan transisi dan laporan keuangan konsolidasian tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

Kelompok Usaha menentukan liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("Undang-undang") tanggal 25 Maret 2003. PSAK No. 24 (Revisi 2013) mensyaratkan entitas menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

Interconnection Revenues

Revenues from network interconnection, which are based on agreements with other domestic and international telecommunication carriers are recognized based on the actual recorded traffic and are presented on a gross basis.

Other Revenues

Revenues from other services are recognized when the services are rendered.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

p. Employee Benefits

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits." PSAK No. 24 (Revised 2013) provides, among others, (i) the elimination of the "corridor approach" permitted under the previous version and (ii) significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits which, among others, are as follows:

- Actuarial gains and losses are now required to be recognized in other comprehensive income and excluded permanently from profit or loss.
- Unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period. Instead, all past service costs will be recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs or when the Group recognizes related restructuring or termination costs.

The Group has applied the revised statement retrospectively in accordance with the transitional provisions and the prior year consolidated financial statements have been restated accordingly (Note 48).

The Group determines its employee benefits liabilities under the Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("the Law"). PSAK No. 24 (Revised 2013) requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "*Projected Unit Credit*" method.

When an entity has a surplus in a defined benefit plan, an entity measures the defined benefit asset at the lower amount between the surplus of defined benefit plan and the upper limit on assets that determined using a discount rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

(Lanjutan)

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:

- (a) keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- (c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

Kelompok Usaha mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi. Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi, atau terminasi atau penghentian program. Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, Kelompok Usaha mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

POLICIES (Continued)

An entity recognizes the components of defined benefit cost, except SAK require or permit such costs as the acquisition cost of the asset, as follows:

- (a) service cost in profit or loss;*
- (b) net interest on net liability (asset) of defined benefits in profit or loss; and*
- (c) remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit in other comprehensive income.*

Remeasurement on net liability (asset) of defined benefits that is recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in subsequent periods. However, the entity may transfer the amounts recognized as other comprehensive income in another account in equity.

Remeasurement the net liability (asset) of defined benefits consists of:

- (a) actuarial gains and losses;*
- (b) return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and*
- (c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).*

The entity recognizes past service cost as an expense in an earlier of when the amendments or curtailment of program occurs and when the entity recognizes related restructuring costs or severances.

The Group recognizes gains or losses on the settlement of defined benefit plan when it occurs. A curtailment occurs when an entity make a material reduction in the number of employees covered by a plan; or amending the terms of a defined benefit plan so a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits. A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan. Before determining the past service cost, gains or losses on the settlement, the Group shall remeasure the net liability (asset) of defined benefits using current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) which reflects the rewards offered in the program prior to amendment, curtailment or settlement program.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

q. Foreign Currency Transactions and Balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to functional currency to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. Gains or losses resulted from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged as current period profit or loss.

Pembukuan Entitas Anak tertentu diselenggarakan dalam mata uang asing. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Entitas Anak pada tanggal pelaporan dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan, dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan penghasilan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Selisih kurs yang terjadi diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada akun "Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan".

The books of accounts of certain Subsidiaries are maintained in foreign currencies. For consolidation purposes, assets and liabilities of the Subsidiaries at the reporting date are translated into Rupiah, which is the presentation currency, using the exchange rates at that date, while income and expenses are translated at the transaction rates of exchange. Resulting translation adjustments are recognized in other comprehensive income under "Exchange Differences due to Financial Statements Translation" account.

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The closing exchange rates used as of December 31, 2016 and 2015 were as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Dolar AS	13.436	13.795	US Dollar
Dolar Singapura	9.299	9.751	Singapore Dollar

r. Pajak Penghasilan

r. Income Taxes

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes." The adoption of this revised PSAK has no impact in the Group's consolidated financial statements.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period.

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

s. Laba atau Rugi per Saham

Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

t. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that sufficient future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Group, when the result of the objection and/or appeal is determined.

s. Earnings or Losses per Share

Basic earnings or losses per share are calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

t. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

u. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Kelompok Usaha juga menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" dan ISAK No. 26 (Revisi 2014), "Penilaian Kembali Derivatif Melekat".

Penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2014), PSAK No. 55 (Revisi 2014), PSAK No. 60 (Revisi 2014) dan ISAK No. 26 (Revisi 2014) tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

(1) Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi yang pada awalnya diukur dengan nilai wajar. Klasifikasi aset keuangan antara lain sebagai aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang atau aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awal dan, sepanjang diperbolehkan dan diperlukan, ditelaah kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

u. Financial Instruments

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation," PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement," and PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures." The Group also applied PSAK No. 68, "Fair Value Measurement," and ISAK No. 26 (Revised 2014), "Reassessment of Embedded Derivatives."

The adoption of PSAK No. 50 (Revised 2014), PSAK No. 55 (Revised 2014), PSAK No. 60 (Revised 2014) and ISAK No. 26 (Revised 2014) has no impact in the Group's consolidated financial statements.

(1) Financial Assets

Initial Recognition

Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss which are initially measured at fair value. Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL), held-to-maturity (HTM) investments, loans and receivables or available-for-sale (AFS) financial assets. The Group determines the classification of their financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each end of reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

- Investasi HTM

Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Kelompok Usaha mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laburugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

Subsequent measurement

- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL where the financial assets are either held for trading or they are designated as FVTPL at initial recognition. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at FVTPL are carried on the consolidated statements of financial position at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. The gains or losses recognized in profit or loss include any dividend or interest earned from the financial assets.

- HTM investments

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Group has the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method less any impairment. Gains or losses are recognized in profit or loss when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

- Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted on an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment. Gains or losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

• Aset keuangan AFS

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Akan tetapi, bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas (12) bulan dari tanggal pelaporan.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah aset keuangannya mengalami penurunan nilai.

• Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka jumlah kerugian tersebut, yang diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif yang dihitung saat pengakuan awal aset tersebut, diakui pada laba rugi.

• Aset keuangan AFS

Jika terdapat bukti obyektif bahwa aset AFS mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

• AFS financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial recognition, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses being recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and gains or losses due to changes in exchange rates, until the financial assets are derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously reported in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustments. However, interest is calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss. These financial assets are classified as non-current assets unless the intention is to dispose of them within twelve (12) months from the reporting date.

Impairment of financial assets

The Group evaluates at the end of each reporting period whether any of their financial asset is impaired.

• Financial assets measured at amortized cost

If there is objective evidence of impairment, the amount of loss, which is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not been incurred) discounted at the effective interest rate computed at initial recognition of the asset, is recognized in profit or loss.

• AFS financial assets

If there is objective evidence that an AFS financial asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustments even though such financial asset is not derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Kelompok Usaha mengalihkan aset keuangan, maka Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Pengakuan awal

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau sebagai derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha dicatat sebesar hasil yang diperoleh, dikurangi biaya penerbitan instrumen ekuitas.

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen sejenis yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, dipisahkan antara liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi dengan menggunakan suku bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen *non-convertible* yang serupa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (Continued)

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes financial assets if, and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but assumes a contractual obligation to pay those cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Group transfers a financial asset, it evaluates the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.

(2) Financial Liabilities and Equity Instruments

Initial recognition

The Group determines the classification of their financial liabilities at initial recognition. Debt and equity instruments are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at FVTPL, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

Compound financial instruments, a bond or similar instrument convertible by the holder into a fixed number of ordinary shares, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. At the date of issuance of compound financial instruments, the fair value of the liability component is estimated using the prevailing market interest rate for a similar non-convertible instrument.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas dengan dasar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan liabilitas tersebut berakhir melalui konversi atau pada tanggal instrumen jatuh tempo. Komponen ekuitas ditentukan dengan cara mengurangi jumlah komponen liabilitas dari keseluruhan nilai wajar instrumen keuangan majemuk. Jumlah tersebut diakui dan dicatat dalam ekuitas, dikurangi dengan pajak penghasilan, dan tidak ada pengukuran setelah pengakuan awal.

Pengukuran selanjutnya

(a) Liabilitas keuangan FVTPL

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada FVTPL. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali liabilitas derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dinyatakan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi termasuk bunga yang dibayar atas liabilitas keuangan.

(b) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan Kelompok Usaha menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Kelompok Usaha dilepaskan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

This amount is recorded as a liability on an amortized cost basis using the effective interest method until extinguished upon conversion or at the instrument's maturity date. The equity component is determined by deducting the amount of the liability component from the fair value of the compound financial instruments as a whole. This amount is recognized and included in equity, net of income tax effects, and is not subsequently remeasured.

Subsequent measurement

(a) Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL. Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. The gains or losses recognized in profit or loss incorporate any interest paid on the financial liabilities.

(b) Financial liabilities measured at amortized cost

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities if, and only if, the Group's obligations are discharged, cancelled or expire.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

(3) Instrumen Derivatif

Instrumen derivatif dicatat pada pengakuan awal sebesar nilai wajar pada tanggal perjanjian derivatif ditandatangani dan diukur kembali setiap akhir periode laporan. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajar positif dan liabilitas keuangan saat nilai wajar negatif.

Derivatif melekat disajikan dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang mencerminkan penyajian yang memadai atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan. Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan atau kontrak awal diperlakukan sebagai derivatif yang berbeda saat risiko dan karakteristiknya tidak saling berhubungan dengan kontrak utamanya dan kontrak utama tersebut tidak diukur dengan nilai wajar serta perubahan pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa periode jatuh tempo dari instrumen tersebut lebih dari dua belas (12) bulan dan tidak diharapkan untuk direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui sebagai laba tahun berjalan, kecuali seluruh persyaratan khusus (contoh, dokumen formal, penetapan dan pengukuran keefektifan transaksi) untuk diakui sebagai "Penghasilan Komprehensif Lainnya" sesuai dengan tipe akuntansi lindung nilai tertentu terpenuhi.

Seluruh instrumen derivatif Kelompok Usaha tidak memenuhi kriteria khusus untuk akuntansi lindung nilai, dan oleh karenanya, tidak ditentukan sebagai transaksi lindung nilai untuk tujuan akuntansi.

(4) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

(3) Derivative Instruments

Derivative instruments are initially recognized at fair value as at the date a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured to their fair value at each end of reporting period. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Embedded derivative is presented with the host contract on the consolidated statements of financial position which represents an appropriate presentation of overall future cash flows for the instrument taken as a whole. Derivatives embedded in other financial instruments or other host contracts are treated as separate derivatives when their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value, with changes in fair value recognized in profit or loss.

A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than twelve (12) months and it is not expected to be realized or settled within twelve (12) months.

Gains or losses arising from changes in the fair value of the derivative instrument be recognized currently in earnings, unless meeting all the specific requirements (i.e., formal documentation, designation and assessment of the effectiveness of the transaction) to allow deferral as "Other Comprehensive Income" under certain types of hedge accounting.

None of the derivative instruments of the Group qualifies the specific criteria for hedge accounting, and therefore, are not designated as hedges for accounting purposes.

(4) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

(5) Instrumen keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

(6) Pengukuran Nilai Wajar

PSAK No. 68 bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi kompleksitas dengan memberikan definisi yang tepat dari nilai wajar dan sumber tunggal pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan untuk digunakan di seluruh PSAK. Persyaratan ini tidak memperluas penggunaan akuntansi nilai wajar namun memberikan pedoman tentang bagaimana hal tersebut diterapkan ketika penggunaannya sudah disyaratkan atau diizinkan oleh pernyataan lain dalam PSAK. Akibatnya, pedoman dan persyaratan yang berkaitan dengan pengukuran nilai wajar yang sebelumnya terletak di PSAK lain kini telah dipindahkan ke PSAK No. 68. PSAK No. 68 tidak berpengaruh material pada pengukuran nilai wajar aset atau liabilitas Kelompok Usaha, dimana perubahannya terbatas pada penyajian dan pengungkapan, dan oleh karena itu tidak berdampak dalam posisi keuangan atau kinerja Kelompok Usaha.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- (a) di pasar utama (principal market) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- (b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

(5) Financial instruments measured at amortized
cost

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

(6) Fair Value Measurement

PSAK No. 68 aims to improve consistency and reduce complexity by providing a precise definition of fair value and a single source of fair value measurement and disclosure requirements for use across PSAKs. The requirements do not extend the use of fair value accounting but provide guidance on how it should be applied where its use is already required or permitted by other statements within PSAKs. As a result, the guidance and requirements relating to fair value measurement that were previously located in other PSAKs have now been relocated to PSAK No. 68. PSAK No. 68 did not materially affect any fair value measurements of the Group's assets or liabilities, with changes being limited to presentation and disclosure, and therefore has no effect on the Group's financial position or performance.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants in the principal (or most advantageous market) at the measurement date under current market conditions (i.e. an exit price) regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique at the measurement date.

A fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- (a) in the principal market for the asset or liability; or
- (b) in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Kelompok Usaha mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Hirarki nilai wajar dikategorikan dalam tiga (3) level *input* untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, sebagai berikut:

- (a) *Input* Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- (b) *Input* Level 2 – *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk 34 aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (c) *Input* Level 3 adalah *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Kelompok Usaha menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

The Group measures the fair value of an asset or a liability using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Fair value hierarchy are categorized into three (3) levels the inputs to valuation techniques used to measure fair value, as follows:

- (a) Level 1 inputs - quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- (b) Level 2 inputs – inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
- (c) Level 3 inputs - unobservable inputs for the asset or liability.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group determines appropriate classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability, and the level of the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak termasuk, antara lain, mata uang:

- yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa,
- dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas,
- yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa,
- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, dan
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Kelompok Usaha, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah (Rp), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Kelompok Usaha dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi utama dimana Kelompok Usaha beroperasi dan harga jual barang dalam mata uang Rupiah.

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada (Catatan 2).

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Group based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in the process of applying the Group's accounting policies have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determining functional currency

The factors considered in determining the functional currency of the Company and each of its Subsidiary include, among others, the currency:

- *that mainly influences sales prices for goods and services;*
- *of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services;*
- *that mainly influences labor, material and other costs of providing goods or services;*
- *in which funds from financing activities are generated; and*
- *in which receipts from operating activities are usually retained.*

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rupiah (Rp), as this reflected the fact that majority of the Group's businesses are influenced by primary economic environment in which the Group operates and sales prices for goods in Rupiah currency.

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in (Note 2).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya
perolehan dari instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Kelompok Usaha. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 35).

Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan

Kelompok Usaha mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 7).

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 8).

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan (Catatan 10).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Determining fair value and calculation of cost
amortization of financial instruments

The Group records certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which require the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization were determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Group utilized different valuation methodology or assumption. Such changes would directly affect the Group's profit or loss. Further details are disclosed in (Note 35).

Assessing recoverable amounts of financial assets

The Group evaluates specific accounts receivable where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce their receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the provision for impairment. Further details are disclosed in (Note 7).

Assessing recoverable amounts of non-financial assets

Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical condition, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details are disclosed in (Note 8).

The recoverable amounts of fixed assets is based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the provision of impairment already booked (Note 10).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur
manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara empat (4) sampai dengan dua puluh (20) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 2h dan 10).

Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 29).

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 31).

Mengevaluasi perjanjian sewa

Kelompok Usaha menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Kelompok Usaha. Sewa guna usaha dimana Kelompok Usaha memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 19).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Determining depreciation method and estimated useful
lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within four (4) to twenty (20) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in (Notes 2h and 10).

As of December 31, 2014, the Group estimated that the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years.

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in (Note 29).

Estimate of pension cost and employee benefits

The determination of the Group's liabilities and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on their selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. While the Group believes that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect their employee benefits liability and expense. Further details are discussed in (Note 31).

Evaluating lease agreements

The Group has entered into lease agreements as lessee. The management exercises judgment in determining whether all significant risk and rewards of ownership of the leased property are transferred to the Group. Lease wherein the Group acquires all significant risks and rewards of ownership of the leased property is accounted for as finance lease; otherwise it is accounted for as operating lease. Further details are discussed in (Note 19).

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Kelompok Usaha terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasehat hukum Kelompok Usaha yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Kelompok Usaha mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan memperhitungkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Kelompok Usaha tidak yakin bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 32 dan 43).

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(Continued)*

Evaluating provisions and contingencies

The Group involved in various legal and tax proceedings. The management exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies mainly through consultation with the Group's legal counsel handling those proceedings. The Group sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and takes the relevant risks and uncertainty into account.

In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset."

The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

As of December 31, 2016, the Group did not believe that those proceedings will have a significant adverse effect on the consolidated financial statements. Further details are discussed in (Notes 32 and 43).

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	
Kas			Cash on hand
Rupiah	220	449	Rupiah
Dolar AS	13	68	US Dollar
Total Kas	<u>233</u>	<u>517</u>	Total Cash on Hand
Kas di bank			Cash in banks
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Permata Tbk	727	1,321	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	539	340	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	79	360	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	60	172	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	76	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	143	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	181	PT Bank Capital Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank	-	122	Standard Chartered Bank
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 juta)	16	198	Others (each below Rp100 million)
Sub-total	<u>1,421</u>	<u>2,913</u>	Sub-total
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
PT Bank Permata Tbk	73	1,419	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	75	PT Bank DBS Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 juta)	3	312	Others (each below Rp100 million)
Sub-total	<u>76</u>	<u>1,806</u>	Sub-total
<u>Dolar Singapura</u>			<u>Singapore Dollar</u>
Deutsche Bank Indonesia	481	484	Deutsche Bank Indonesia
Total Kas di Bank	<u>1,978</u>	<u>5,203</u>	Total Cash in Banks
Total	<u>2,211</u>	<u>5,720</u>	Total

Kas dan setara kas seluruhnya ditempatkan pada pihak ketiga.

All cash and cash equivalents were placed with third parties.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

Investasi jangka pendek merupakan penempatan deposito jangka pendek di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jangka waktu empat (4) sampai dengan dua belas (12) bulan dalam Rupiah masing-masing sebesar Rp48 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Tingkat bunga tahunan investasi jangka pendek di deposito berjangka adalah 6,00%- 6,75%.

Short-term investments represent placements of time deposits with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp48 million as of December 31, 2016 and 2015, respectively, with terms of four (4) to twelve (12) months and denominated in Rupiah with interest rates of 6.00%- 6.75% per annum.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 30 Agustus 2012 dan adendumnya tanggal 12 November 2012, dengan Credit Suisse (Singapura) Limited (CS), *facility agent*, Perusahaan melakukan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya di CS yang akan digunakan oleh Perusahaan untuk membayar angsuran pokok termasuk bunga pinjaman (Catatan 39). Pada tahun 2014, *facility agent* berubah dari CS menjadi Madison Pacific Trust Limited.

Berdasarkan perjanjian perwalian dengan The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) sehubungan dengan penunjukan BNY Mellon sebagai wali amanat, agen pembayaran dan pelaku pendaftaran "11,50% *Guaranteed Senior Notes due 2015*" (selanjutnya disebut "Wesel Senior") (Catatan 17), penempatan kas yang dibatasi penggunaannya di BNY Mellon akan digunakan untuk membayar bunga pinjaman Wesel Senior.

Total kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp38,0 juta dan Rp39,0 juta.

6. RESTRICTED CASH

In accordance with the credit agreement dated August 30, 2012 and amendment dated November 12, 2012, with Credit Suisse (Singapore) Limited (CS), facility agent, the Company made placement of restricted cash in CS that will be used for installment payment of principle including interest on the loan facility (Note 39). In 2014, the facility agent changed from CS to Madison Pacific Trust Limited.

Based on a trustee agreement with The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) appointing BNY Mellon as the trustee, paying agent and registrar of "11.50% Guaranteed Senior Notes due 2015" (thereafter referred to as the "Senior Notes") (Note 17), placement of restricted cash was made in BNY Mellon that will be used for the payment of interest on the Senior Notes.

The total outstanding balances of restricted cash as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp38.0 million and Rp39.0 million, respectively.

7. PIUTANG USAHA

	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
Jasa interkoneksi	16,932	24,569	<i>Interconnection services</i>
Jasa telekomunikasi	56,436	62,461	<i>Telecommunication services</i>
Total	73,368	87,030	<i>Total</i>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(70,811)	(65,712)	<i>Less allowance for impairment loss</i>
Neto	2,557	21,318	Net

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Trade receivables based on currencies are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
Rupiah	58,207	66,210	<i>Rupiah</i>
Dolar AS	15,161	20,820	<i>US Dollar</i>
Jumlah	73,368	87,030	<i>Total</i>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(70,811)	(65,712)	<i>Less allowance for impairment loss</i>
Neto	2,557	21,318	Net

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>
Sampai dengan 30 hari	-	-
Lebih dari 30 hari - 60 hari	77	4,583
Lebih dari 60 hari - 90 hari	205	4,496
Lebih dari 90 hari	<u>2,275</u>	<u>12,239</u>
Jumlah	<u>2,557</u>	<u>21,318</u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang seluruhnya berdasarkan penilaian secara individual adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo awal tahun	65.712	24.973
Penyisihan selama tahun berjalan	<u>5.099</u>	<u>40.739</u>
Saldo Akhir Tahun	<u>70.811</u>	<u>65.712</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang usaha.

7. TRADE RECEIVABLES (Continued)

The aging schedule of trade receivables was as follows:

Up to 30 days
Over 30 days - 60 days
Over 60 days - 90 days
Over 90 days
Total

Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables which were wholly based on individual assessments were as follows:

Beginning balance for the year
Provision during the year
Ending Balance for the Year

The management believed that allowance for impairment loss of receivables was adequate to cover impairment losses on uncollectible trade receivables.

8. UANG MUKA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Operasional departemen	1.995	3.284
Sewa dan pembelian	<u>-</u>	<u>867</u>
Total	<u>1.995</u>	<u>4.151</u>

Uang muka operasional departemen merupakan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan.

8. ADVANCES

Operational department
Rent and purchases
Total

Operational department represents advances that have not yet been settled by the related departments.

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Lisensi	155	154
Sewa ruang kantor	14	858
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50 juta)	<u>21</u>	<u>88</u>
Total	<u>190</u>	<u>1.100</u>

9. PREPAID EXPENSES

License
Office building rental
Others (each below Rp50 million)
Total

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2016	Penamba- han / Additions	Pengura- ngan/ Deductions	Reklasifi- kasi/ Reclassifi- cation	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2016	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	12,674	-	-	-	12,674	Buildings
Peralatan telekomunikasi	11,636,422	-	-	-	11,636,422	Telecommunication equipment
Fasilitas telekomunikasi	1,408,240	-	-	-	1,408,240	Telecommunication facilities
Peralatan pengangkutan	13,725	-	-	-	13,725	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	137,269	111	-	-	137,380	Office equipment and fixtures
Total Biaya Perolehan	13,208,606	111	-	-	13,208,717	Total Acquisition Costs
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	6,395	2,782	-	-	9,177	Buildings
Peralatan telekomunikasi	7,049,083	677,172	-	-	7,726,255	Telecommunication equipment
Fasilitas telekomunikasi	541,558	130,994	-	-	672,552	Telecommunication facilities
Peralatan pengangkutan	10,034	1,911	-	-	11,945	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	132,235	2,840	-	-	135,075	Office equipment and fixtures
Total Akumulasi Penyusutan	7,739,305	815,699	-	-	8,555,004	Total Accumulated Depreciation
Penurunan Nilai Aset Tetap						Impairment of Fixed Assets
Peralatan telekomunikasi	3,027,432	-	-	-	3,027,432	Telecommunication equipment
Fasilitas telekomunikasi	809,973	-	-	-	809,973	Telecommunication facilities
Total Penurunan Nilai Aset Tetap	3,837,405	-	-	-	3,837,405	Total Impairment of Fixed Assets
Jumlah Tercatat	1,631,896				816,308	Carrying Amounts
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2015	Penamba- han / Additions	Pengura- ngan/ Deductions	Reklasifi- kasi/ Reclassifi- cation	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2015	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	12,674	-	-	-	12,674	Buildings
Peralatan telekomunikasi	10,636,796	-	18,123	1,017,749	11,636,422	Telecommunication equipment
Fasilitas telekomunikasi	983,913	-	5,407	429,734	1,408,240	Telecommunication facilities
Peralatan pengangkutan	23,035	-	9,310	-	13,725	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	147,867	16	10,614	-	137,269	Office equipment and fixtures
Total Biaya Perolehan	11,804,561	16	43,454	1,447,483	13,208,606	Total Acquisition Costs
<u>Pemilikan tidak langsung</u>						<u>Indirect ownership</u>
Aset sewaan Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	3,575,933	-	3,575,933	-	-	Leased assets Telecommunication equipment and facilities
Jumlah	15,380,494	16	3,619,387	1,447,483	13,208,606	
Aset Dalam Penyelesaian						
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	1,446,293	1,190	-	(1,447,483)	-	Telecommunication equipment and facilities
Total Biaya Perolehan	16,826,787	1,206	3,619,387	-	13,208,606	Total Acquisition Costs

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (Lanjutan)

10. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2015	Penamba- han / Additions	Pengura- ngan/ Deductions	Reklasifi- kasi/ Reclassifi- cation	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2015	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	5,767	628	-	-	6,395	Buildings
Peralatan telekomunikasi	5,655,913	1,408,385	15,215	-	7,049,083	Telecommunication equipment
Fasilitas telekomunikasi	404,575	141,032	4,049	-	541,558	Telecommunication facilities
Peralatan pengangkutan	16,871	1,983	8,820	-	10,034	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	135,301	7,178	10,244	-	132,235	Office equipment and fixtures
Total Akumulasi Penyusutan	6,218,427	1,559,206	38,328	-	7,739,305	Total Accumulated Depreciation
Pemilikan tidak langsung						Leased assets
Aset sewaan Peralatan dan fasilitas Telekomunikasi	1,786,376	1,789,557	3,575,933	-	-	Telecommunication equipment and facilities
Total Akumulasi Penyusutan	8,004,803	3,348,763	3,614,261		7,739,305	Total Accumulated Depreciation
Penurunan Nilai Aset Tetap						Impairment of Fixed Assets
Peralatan telekomunikasi	2,009,683	1,017,749	-	-	3,027,432	Telecommunication equipment
Fasilitas telekomunikasi	380,239	429,734	-	-	809,973	Telecommunication facilities
Total Penurunan Nilai Aset Tetap	2,389,922	1,447,483	-	-	3,837,405	Total Impairment of Fixed Assets
Jumlah Tercatat	6,432,062				1,631,896	Carrying Amounts

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar Rp815.699 dan Rp3.348.763.

Depreciation expense for years ended as of December 31, 2016 and 2015 was charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income amounting to Rp815,699 and Rp 3,348,763, respectively.

Jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp15,2 miliar dan Rp7,0 miliar.

The carrying amount of temporarily idle fixed assets as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp15.2 billion and Rp7.0 billion, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp46,0 miliar dan Rp124,0 miliar.

As of December 31, 2016 and 2015, the gross carrying amount of fully depreciated fixed assets that were still in use amounted to Rp46.0 billion and Rp124.0 billion, respectively.

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait (Catatan 40).

Based on the Amicable Settlement Agreement, creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables (Note 40).

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada bulan Juni 2015, Perusahaan menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa. Oleh karena itu pada tahun 2015, seluruh aset sewaan telah dihapusbukukan.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 terdapat penurunan nilai atas aset tetap masing-masing sebesar nil dan Rp3,8 triliun yang disebabkan oleh indikasi keusangan teknologi dan keterbatasan kemampuan untuk menghasilkan arus kas.

10. FIXED ASSETS (Continued)

In June 2015, the Company discontinued the use of the leased service tower. Therefore, in 2015, all leased assets were written off.

Based on a management review as of December 31, 2015, impairment was recognized on fixed assets amounting to nil and Rp3,8 trillion respectively, due to indication of out dated technology and limited ability to generate cash flow.

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

11. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
Jaminan pelunasan kewajiban pembayaran biaya frekuensi terutang (Catatan 40)	500,000	500,000	Guarantee payment on obligation of frequency fee payables (Note 40)
Lisensi (Catatan 38)	200,917	200,917	License (Note 38)
Jaminan	449	12,305	Security deposits
Lain-lain	8,585	2,464	Others
Total	709,951	715,686	Total

Pada tanggal 14 Oktober 2010, Perusahaan dan Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Postel menandatangani Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio No. 2149/BA/DITFREK/10/2010 dilakukan untuk menghitung kembali biaya perijinan (BHP Frekuensi Radio) dengan melakukan klarifikasi antara data Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dari tahun 2006 sampai dengan pisah batas tanggal 30 September 2010, dan untuk menentukan apakah pembayaran tersebut sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dengan penerapan formula yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk layanan CDMA berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2005 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BHP Frekuensi Radio".

Berdasarkan hasil pemeriksaandari Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 30 September 2010, Perusahaan memiliki kelebihan bayar sebesar Rp200,9 miliar. Kelebihan bayar tersebut dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya dan akan digunakan untuk pembayaran kewajiban Perusahaan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika pada periode berikutnya (Catatan 14).

On October 14, 2010, the Company and the Directorate of Radio Frequency Spectrum Management signed Minutes of Claims Optimizing Radio BHP Frequency and Data Matching Radio Frequency No. 2149/BA/DITFREK/10/2010, to recalculate the Company's license fees (Radio BHP Frequency) to clarify the payments made to the Directorate General of Post and Telecommunication from year 2006 until September 30, 2010 cut-off, and to determine whether these payments were in accordance with the requirements for CDMA services based on issued regulation No. 19 Year 2005 concerning "Implementation Guidelines of State Tariff for Non-Income Tax from Radio BHP Frequency" by the Ministry of Communication and Information.

Based on the conclusion of the Directorate of Radio Frequency Spectrum Management, the Company made over payment amounting to Rp200.9 billion from 2006 until September 30, 2010. This over payment has been treated as other non-current assets and will be used for payment of obligation of the Company to the Department of Communication and Information in the future (Note 14).

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. UTANG USAHA

12. TRADE PAYABLES

	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign currencies</u>
Blackberry Singapore Pte. Limited	7,240	7,433	Blackberry Singapore Pte. Limited
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp4 miliar)	<u>39,181</u>	<u>44,446</u>	Others (each below Rp4 billion)
Sub-total	<u>46,421</u>	<u>51,879</u>	Sub-total
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Smartfren Telecom Tbk	197,278	172,138	PT Smartfren Telecom Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp4 miliar)	<u>19,960</u>	<u>11,865</u>	Others (each below Rp4 billion)
Sub-total	<u>217,237</u>	<u>184,003</u>	Sub-total
Beban interkoneksi	<u>50,476</u>	<u>49,875</u>	Interconnection expense
Total pihak ketiga	<u>314,134</u>	<u>285,757</u>	Total third parties
Pihak berelasi			Related parties
PT Bakrie Swasakti Utama	8,007	4,857	PT Bakrie Swasakti Utama
PT Multi Kontrol Nusantara	1,358	950	PT Multi Kontrol Nusantara
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	<u>3,192</u>	<u>679</u>	Others (each below Rp500 million)
Total pihak berelasi	<u>12,557</u>	<u>6,486</u>	Total related parties
Total	<u>326,691</u>	<u>292,243</u>	Total
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Persentase Utang Usaha Pihak Berelasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian	<u>0,0812%</u>	<u>0,0435%</u>	Percentage of Related Parties Trade Payables to Total Consolidated Liabilities

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging schedule of trade payables was as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Sampai dengan 30 hari	45.296	35	Up to 30 days
Lebih dari 30 hari - 60 hari	429	799	Over 30 days - 60 days
Lebih dari 60 hari - 90 hari	3.062	21.202	Over 60 days - 90 days
Lebih dari 90 hari	<u>277.903</u>	<u>270.207</u>	Over 90 days
Total	<u>326.691</u>	<u>292.243</u>	Total

13. UTANG LAIN-LAIN

13. OTHER PAYABLES

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Dalam mata uang Rupiah	46.994	12.253	In Rupiah currency
Dalam mata uang asing	<u>4.186</u>	<u>4.443</u>	In foreign currencies
Total	<u>51.180</u>	<u>16.696</u>	Total

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UANG MUKA PELANGGAN

Uang muka pelanggan masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp6,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 merupakan uang muka yang diterima dari agen dan dealer untuk pembelian voucher, kartu perdana dan produk Perusahaan lainnya.

14. CUSTOMER DEPOSITS

Customer deposits as of December 31, 2016 and 2015 amounting to Rp nil and Rp6.7 billion, respectively, mostly represent deposits received from agents and dealers for the purchase of vouchers, starter packs and other Company products.

15. BEBAN AKRUAL

15. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
Bunga	2,213,582	1,597,530	Interest
Gaji dan pensiun	75,351	66,843	Salaries and pension
Kewajiban kepada Departemen Komunikasi dan Informatika - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	134,244	132,647	Obligation to the Department of Communication and Informatics - the Directorate General of Post and Telecommunication
Jasa profesional	34,343	16,780	Professional fees
Sewa	13,549	41,782	Rent
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp20 miliar)	75,110	52,831	Others (each below Rp20 billion)
Total	2,546,179	1,908,413	Total

Kewajiban kepada Departemen Komunikasi dan Informatika - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi merupakan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dengan tarif sebesar 0,5% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu, ditambah dengan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) atau *Universal Service Obligation* (USO) sebesar 1,25% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu. Selain itu, ada juga kewajiban BHP Pita dan Terrestrial.

Obligation to the Department of Communication and Information - the Directorate General of Post and Telecommunication represents the Cost of Frequency Utilization Providing Righttelecommunications at a rate of 0.5% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off, plus an additional Universal Service Obligation (USO) of 1.25% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off. Also, included obligations related to Frequency License and Microwave.

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG

16. LONG-TERM LOAN

	2016	2015	
PT Mandiri Tunas Finance	535	1,260	PT Mandiri Tunas Finance
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	240	501	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	295	759	Long-Term Portion

Pada tanggal 2 Januari 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Mandiri Tunas Finance, yang digunakan untuk pembelian kendaraan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,00% - 10,00% per tahun.

On January 2, 2013, the Company entered into a loan agreement with PT Mandiri Tunas Finance, which was used for the purchase of vehicles. This loan is subject to interest rates of 6.00% - 10.00% per annum.

17. WESEL SENIOR

11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015

Pada tanggal 7 Mei 2010, Bakrie Telecom Pte., Ltd, Entitas Anak, menerbitkan "11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015" (selanjutnya disebut "Wesel Senior") sebesar USD250,0 juta dengan jangka waktu lima (5) tahun yang berakhir pada tanggal 7 Mei 2015, yang terdaftar di *Singapore Exchange Securities Trading*. Wesel Senior tersebut dibebani tingkat suku bunga sebesar 11,5% per tahun yang akan dibayarkan per semester pada setiap tanggal 7 Mei dan 7 November dimulai pada tanggal 7 November 2010. Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perusahaan sebagai entitas induk perusahaan penjamin, PT Bakrie Connectivity dan PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network) sebagai Entitas Anak penjamin. Credit Suisse (Singapura) Limited (CS), Singapura, Merrill Lynch (Singapura) Pte., Ltd dan Morgan Stanley Asia (Singapura) Pte., bertindak sebagai pembeli awal (*initial purchasers*), dengan CS sebagai koordinator global tunggal (*sole global coordinator*). The Bank of New York Mellon ditunjuk sebagai wali amanat, agen pembayaran dan selaku pendaftaran, sedangkan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, ditunjuk sebagai agen penjamin Indonesia sehubungan dengan saham yang dijamin. Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Wesel Senior tersebut adalah sebesar Rp82,8 miliar. Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perusahaan dalam bentuk pinjaman berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* antara Bakrie Telecom Pte., Ltd dan Perusahaan tanggal 7 Mei 2010. Utang *Intercompany* tersebut digunakan untuk melunasi utang dan modal belanja Perusahaan.

Sebelum tanggal 7 Mei 2013, Bakrie Telecom Pte., Ltd, Entitas Anak, memiliki opsi untuk melunasi Wesel Senior dengan cara sebagai berikut:

- a. Melunasi seluruh atau sebagian Wesel Senior dengan harga pelunasan sebesar 100% dari jumlah pokok Wesel Senior ditambah dengan premium yang berlaku, beserta bunga yang masih harus dibayar, jika ada.
- b. Melunasi sampai dengan 35% dari jumlah pokok Wesel Senior, dengan hasil penerimaan neto dari penawaran saham tersebut, dengan harga pelunasan 111,5% dari jumlah pokok Wesel Senior, beserta bunga yang masih harus dibayar, jika ada.

Pada tanggal 27 Januari 2011, Bakrie Telecom Pte., Ltd, menerbitkan Wesel Senior sebesar USD130,0 juta pada harga 107%. Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perusahaan, PT Bakrie Connectivity, PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network) dan Bakrie Telecom Pte., Ltd. Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perusahaan dalam bentuk pinjaman berdasarkan *Supplemental Intercompany Loan Agreement* antara Bakrie Telecom Pte., Ltd dan Perusahaan tanggal

17. SENIOR NOTES

11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015

On May 7, 2010, Bakrie Telecom Pte., Ltd, a Subsidiary, issued "11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015" (hereafter referred to as the "Senior Notes") amounting to USD250.0 million with a maturity of five (5) years ended May 7, 2015, which are listed on *Singapore Exchange Securities Trading*. These Senior Notes are subject to interest of 11.5% per annum that is payable semi-annually on May 7 and November 7 of each year commencing on November 7, 2010. These Senior Notes are guaranteed by the Company as Parent Guarantor, PT Bakrie Connectivity and PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network) as Subsidiary Guarantors. Credit Suisse (Singapore) Limited (CS), Singapore, Merrill Lynch (Singapore) Pte., Ltd, and Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., acted as initial purchasers with CS as the sole global coordinator. The Bank of New York Mellon has been appointed as the trustee, paying agent and registrar, while Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, has been appointed as Indonesian collateral agent with respect to the pledged shares. The issuance costs related to the Senior Notes amounted to Rp82.8 billion. The proceeds of the Senior Notes were passed through by Bakrie Telecom Pte., Ltd to the Company in the form of loan based on *Intercompany Loan Agreement* between Bakrie Telecom Pte., Ltd and the Company dated May 7, 2010 and used to pay outstanding debt and for capital expenditures of the Company.

At any time prior to May 7, 2013, Bakrie Telecom Pte., Ltd, the Subsidiary, could at its option redeem the Senior Notes, as follows:

- a. Redeem the Senior Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the Senior Notes plus the applicable premium, and accrued and unpaid interest, if any.
- b. Redeem up to 35% of the aggregate principal amount of the Senior Notes, with the net proceeds of sales of its common stock in an equity offering, at a redemption price of 111.5% of the principal amount of the Senior Notes, plus accrued and unpaid interest, if any.

Bakrie Telecom Pte., Ltd, issued Senior Notes amounting to USD130.0 million on January 27, 2011 at 107%. These Senior Notes are guaranteed by the Company, PT Bakrie Connectivity, PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network) and Bakrie Telecom Pte., Ltd. The proceeds of Senior Notes were passed through by Bakrie Telecom Pte., Ltd to the Company in the form of loan based on *Supplemental Intercompany Loan Agreement* between Bakrie Telecom Pte., Ltd and the Company dated January 27, 2011. The *Intercompany*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. WESEL SENIOR (Lanjutan)

27 Januari 2011. Utang *Intercompany* tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada CS dan belanja modal Perusahaan. Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan USD130,0 juta Wesel Senior tersebut adalah sebesar Rp71,5 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo Wesel Senior adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Wesel Senior (USD380,0 juta)	5.105.680	5.242.100	Senior Notes (USD380.0 million)
Premi Wesel Senior (USD9,1 juta)	-	-	Senior Notes Premium (USD9.1 million)
Total	5.105.680	5.242.100	Total

Wesel Senior ini dalam kondisi wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran pokok dan bunga pada tanggal 31 Desember 2015 (wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2014).

Perusahaan dan Bakrie Telecom Pte., Ltd, sedang dalam proses untuk merestrukturisasi utang Wesel Senior.

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, Perusahaan dapat melaksanakan penawaran penukaran (exchange offer) dengan menerbitkan wesel senior baru yang akan ditukar dengan Wesel Senior yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih dalam proses finalisasi penawaran penukaran (exchange offer) tersebut.

17. SENIOR NOTES (Continued)

Loan was used to pay outstanding debts to CS and for capital expenditure of the Company. The issuance costs related to the USD130.0 million Senior Notes amounted to Rp71.5 billion.

As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding balance of Senior Notes was as follows:

As of December 31, 2015, the Senior Notes were in default condition due to late payment of principal and its interest (default condition due to late payment of interest as of December 31, 2014).

The Company and Bakrie Telecom Pte., Ltd, is in the process of restructuring the debt of Senior Notes.

Based on the Amicable Settlement Agreement in Suspension of Payment (PKPU), the Company can arrange an exchange offer by issuing new senior notes that will be exchanged with Senior Notes issued by Bakrie Telecom Pte., Ltd. As of the date of the consolidated financial statements, the Company is still in the process of finalizing the exchange offer.

18. UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU

18. SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU

	2016	2015	
Utang penyedia menara	3.035.290	3.035.290	Tower provider payables
Utang usaha	2.487.286	2.507.035	Trade payables
Utang biaya hak penggunaan dan <i>universal service obligation</i>	866.057	866.057	Payables on fee of right to use and the universal service obligation
Utang dengan jaminan	692.278	710.775	Payables with collateral
Utang akibat derivatif	194.727	196.532	Derivatives payables
Utang afiliasi	74.125	74.232	Affiliate payables
Total	7.349.763	7.389.921	Total
Diskonto utang	(192.769)	(192.769)	Discount on payables
Neto	7.156.994	7.197.152	Net

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**18. UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU
(Lanjutan)**

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya(Catatan 40).

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, kreditor atas Utang *Tower Provider* dapat menghentikan layanan penggunaan *tower* yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang *Tower Provider* terkait.

Pada bulan Juni 2015, Perusahaan menghentikan layanan penggunaan *tower* yang disewa. Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU maka 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A). Pada tahun 2015, Perusahaan mencatat utang nilai sisa masa sewa sebesar Rp1.818,7miliar dan beban terkait disajikan dalam laba rugi sebesar Rp1.667,8 miliar.

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang menyetujui penambahan modal Perusahaan atau penerbitan saham baru Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi terlebih dahulu. Saham baru Perusahaan tersebut diterbitkan sebagai pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

19. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Ficomindo Buana Registrar adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2016		Shareholders
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam satuan penuh)/ <i>Number of Shares Issued and Fully Paid (in full amount)</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	
Total saham biasa seri A dan B			<i>Total common shares series A and B</i>
PT Mahindo Agung Sentosa	5,000,439,000	16.35%	<i>PT Mahindo Agung Sentosa</i>
PT Bakrie & Brothers Tbk	43,043,142	0.14%	<i>PT Bakrie & Brothers Tbk</i>
PT Bakrie Global Ventura	2,505,574,713	8.19%	<i>PT Bakrie Global Ventura</i>
Raiffeisen Bank International s/a			<i>Raiffeisen Bank International s/a</i>
Best Quality Global Limited	2,213,279,000	7.24%	<i>Best Quality Global Limited</i>
Masyarakat	20,822,254,800	68.08%	<i>Public</i>
Total	30,584,590,655	100.00%	<i>Total</i>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU
(Continued)**

On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors (Note 40).

Based on the Amicable Settlement Agreement, creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.

In June 2015, the Company discontinued the use of the leased service tower. Based on the Amicable Settlement Agreement, 100% of the residual value of the lease will be exchanged with the Mandatory Convertible Bond (MCB-A). In 2015, the Company booked residual value payable of the lease amounting to Rp1,818.7 billion and the related expense was presented in profit or loss amounting Rp1,667.8 billion.

On June 26th, 2016, Company obtained approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which approved the issuance of new shares by way of non-preemptive rights by issuing Mandatory Convertible Bonds before hand. The new shares to be issued as the implementation of conversion of Mandatory Convertible Bonds as governed under the Amicable Settlement Agreement.

19. CAPITAL STOCK

The composition of shareholders as of December 31, 2016 and 2015 based on registration by PT Ficomindo Buana Registrar, was as follows:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL SAHAM (Lanjutan)

19. CAPITAL STOCK (Continued)

Pemegang Saham	2015		Shareholders
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam satuan penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (in full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	
Total saham biasa seri A dan B			Total common shares series A and B
PT Mahindo Agung Sentosa	5,000,439,000	16.35%	PT Mahindo Agung Sentosa
PT Bakrie & Brothers Tbk	43,043,142	0.14%	PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Bakrie Global Ventura	2,505,574,713	8.19%	PT Bakrie Global Ventura
Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited Masyarakat	2,213,279,000	7.24%	Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited
	20,822,254,800	68.08%	Public
Total	30,584,590,655	100.00%	Total

Pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan mencatat sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).

On February 3, 2006, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (previously Jakarta Stock Exchange).

Sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut, Perusahaan telah menerima:

In connection with the IPO, the Company received:

- Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Januari 2006 sesuai dengan Surat No. S-123/PM/2006.
- Persetujuan tertulis dari Bank Mandiri sesuai dengan Surat No. CBG.TRE/RD9.069/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang perubahan persyaratan kredit atas *negative covenant* sehubungan dengan pembagian bonus, dividen dan/atau keuntungan lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman No. KP-COD/014/PK-KI/2004 dan Akta Notaris No. 52 oleh Imas Fatimah, SH. pada tanggal 27 September 2004.

- The Effective Statement Letter from the Chairman of the Financial Services Authority on January 23, 2006 per Letter No. S-123/PM/2006.
- Written approval from Bank Mandiri through Letter No. CBG.TRE/RD9.069/2006 dated January 12, 2006 concerning the changes of credit terms regarding the negative covenants in relation to the distribution of bonuses, dividends and/or other benefits as stated in Loan Agreement No. KP-COD/014/PK-KI/2004 and Notarial Deed No. 52 of Imas Fatimah, SH. dated September 27, 2004.

Sehubungan dengan Penawaran Umum di atas, sebelumnya Perusahaan juga telah melakukan perubahan atas nilai nominal saham sebagai berikut:

In connection with the above IPO, the Company had previously changed the nominal value of its shares as follows:

- Setiap satu (1) saham seri A dengan nilai nominal semula seribu rupiah (Rp1.000) per saham menjadi lima (5) saham dengan nilai nominal dua ratus rupiah (Rp200) per saham.
- Setiap satu (1) saham seri B dengan nilai nominal semula lima ratus rupiah (Rp500) per saham menjadi lima (5) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham.

- Each common share series A with nominal value amounting to one thousand rupiah (Rp1,000) per share was converted into five (5) shares with nominal value of two hundred rupiah (Rp200) per share.
- Each common share series B with nominal value amounting to five hundred rupiah (Rp500) per share was converted into five (5) shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.

Modal saham Perusahaan, PT Bakrie Connectivity dan PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network), Entitas Anak, pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, digunakan sebagai jaminan atas Wesel Senior yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd. Entitas Anak (Catatan 17).

As of December 31, 2016 and 2015, the capital stock of the Company, PT Bakrie Connectivity and PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network), Subsidiaries, were used as collateral for the Senior Notes issued by Bakrie Telecom Pte., Ltd. A Subsidiary (Note 17).

Jumlah saham modal dasar pada tanggal 31 Desember 2016 and 2015 berdasarkan anggaran dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

The number of authorized shares as of December 31, 2016 and 2015 based on the Company's articles of association, was as follows:

19. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Jenis saham	Jumlah Saham Modal Dasar (dalam satuan penuh)/ Number of Authorized Shares (in full amount)	Nominal/ Nominal (Rp)	Total Dalam Jutaan Rupiah/ Total In Million Rupiah	Shares
Saham biasa seri A	10.000.000.000	200	2.000.000	Common shares series A
Saham biasa seri B	87.111.652.195	100	8.711.165	Common shares series B
Total	97.111.652.195		10.711.165	Total

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam akta notaris No. 28 tanggal 10 Juli 2015 oleh Lenny Janis Ishak, SH; modal dasar Perusahaan ditingkatkan menjadi Rp10.711.165.219.500 (dalam satuan penuh) dengan komposisi saham seri A sejumlah sepuluh miliar (10.000.000.000) saham dengan nilai nominal dua ratus rupiah (Rp200) setiap saham dan saham seri B sejumlah delapan puluh tujuh miliar seratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima (87.111.652.195) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) setiap saham.

19. CAPITAL STOCK (Continued)

Based on the result of the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on June 22, 2015 as stated in the notarial deed No. 28 dated July 10, 2015 of Lenny Janis Ishak, SH; the authorized capital of the Company has increased to be of Rp10,711,165,219,500 (in full amount) consist of common stock series A of ten billion (10,000,000,000) share with nominal value of two hundred rupiah (Rp200) per share and common stock series B of eighty seven billion, one hundred eleven million, six hundred fifty two thousand, one hundred ninety five (87,111,652,195) share with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Melalui Penawaran Umum Perdana pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan telah menerima sebesar Rp605,0 miliar untuk penawaran lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham seri B atas nama dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) dengan harga penawaran seratus sepuluh rupiah (Rp110).

Melalui Penawaran Umum Terbatas I pada tanggal 29 Februari 2008, Perusahaan menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) setiap saham yang ditawarkan dengan harga tiga ratus lima puluh rupiah (Rp350) setiap saham dengan nilai keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3,0 triliun dan dengan selisih harga yang ditawarkan dengan harga nominal sebesar Rp2,2 triliun.

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Through the Initial Public Offering on February 3, 2006, the Company received the amount of Rp605.0 billion for the offering of five billion five hundred million (5,500,000,000) share series B with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) at an offering price of one hundred and ten rupiah (Rp110).

Through the Rights Issue I on February 29, 2008, the Company issued a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share, which were offered at three hundred fifty rupiah (Rp350) per share in the total maximum amount of Rp3.0 trillion and with an excess offering price over nominal price amounting to Rp2.2 trillion.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, Perusahaan telah melakukan penyesuaian harga pelaksanaan sebesar seratus dua puluh tujuh rupiah (Rp127) setiap sahamnya dan menerbitkan sebanyak tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu (38.549.131) lembar Waran Seri I yang berlaku efektif mulai tanggal 27 Maret 2008. Waran Seri I merupakan lanjutan dari Penawaran Umum Saham Perdana.

Selisih neto antara harga penawaran dengan harga nominal diakui sebagai tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (Continued)

In accordance with Rights Issue I, the Company adjusted the exercise price to one hundred twenty-seven rupiah (Rp127) per share and issued thirty-eight million, five hundred forty-nine thousand, one hundred thirty-one (38,549,131) Series I Warrants effective March 27, 2008. Series I Warrants were an extension of the Initial Public Offering.

Net excess of price over par value of shares between nominal price and offering price was recognized as additional paid-in capital as of December 31, 2016 and 2015 as follows:

	31 Desember 2016 dan 2015/ December 31, 2016 and 2015			
	Selisih Lebih Harga Atas Nilai Nominal Saham/ Excess of Price Over Par Value of Shares	Biaya Penerbitan Saham/ Issuance Cost of Shares	Selisih Lebih Harga Atas Nilai Nominal Saham - Bersih/ Net Excess of Price Over Par Value of Shares	
Penerbitan 5.500.000.000 saham melalui penawaran umum (Catatan 1b)	55.000	27.229	27.771	<i>Issuance of 5,500,000,000 shares through initial public offering (Note 1b)</i>
Penerbitan 566.037.736 saham seri B melalui PMTHMETD (Catatan 1e)	93.396	-	93.396	<i>Issuance of 566,037,736 shares seri B through PMTHMETD (Note 1e)</i>
Penerbitan 1.536.135.340 saham seri B melalui PMTHMETD (Catatan 1e)	253.462	11	253.451	<i>Issuance of 1,536,135,340 shares seri B through PMTHMETD (Note 1e)</i>
Penerbitan 8.626.486.836 saham melalui PUT (Catatan 1c)	2.156.622	80.881	2.075.741	<i>Issuance of 8,626,486,836 shares through rights issue (Note 1c)</i>
Penerbitan 1.076.515.248 saham melalui pelaksanaan waran	37.655	-	37.655	<i>Issuance of 1,076,515,248 shares through exercise of warrants</i>
Total	<u>2.596.135</u>	<u>108.121</u>	<u>2.488.014</u>	Total

21. SAHAM BEREDAR YANG DIPEROLEH KEMBALI

Transaksi saham beredar yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

21. TREASURY STOCK

Transactions regarding treasury stock were as follows:

Keterangan	Periode/ Period	31 Desember 2016 dan 2015 / December 31, 2016 and 2015			Description
		Jumlah Saham (Dalam satuan penuh)/ Number of Shares (in full amount)	Realisasi/ Realization (%)	Harga Nominal/ Par Value Shares	
Disetujui dalam Rapat Direksi (Catatan 1d)	2008	11.000.000.000			Approved in Board of Directors Meeting (Note 1d)
Pembelian kembali	2008	689.000.000	6,27%	68.900	Buy-back
Penerbitan kembali	2009	(579.000.000)		(57.900)	Re-issuance
Total		110.000.000		11.000	Total

Selisih neto antara harga perolehan dengan harga nominal per lembar saham diakui sebagai "Agi Saham Beredar yang Diperoleh Kembali" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Net excess of price over par value of shares between nominal price and acquisition price was recognized as "Premium on Treasury Stock" in the consolidated statements of financial position.

22. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Akun ini terdiri dari:

22. NON-CONTROLLING INTEREST

This account consists of:

a. Kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak

a. Non-controlling interest in net assets of Subsidiaries

	2016	2015	
PT Bakrie Digital Net	2	2	PT Bakrie Digital Net
Bakrie Telecom Pte., Ltd	-	-	Bakrie Telecom Pte., Ltd
PT Bakrie Connectivity	(251)	(251)	PT Bakrie Connectivity
PT Andalan Andalan Investama	28	-	PT Bakrie Connectivity
Total	(221)	(249)	Total

b. Laba(rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali

b. Income (loss) attributable to non-controlling interest

	2016	2015	
Bakrie Telecom Pte., Ltd	-	-	Bakrie Telecom Pte., Ltd
PT Bakrie Digital Net	-	-	PT Bakrie Digital Net
PT Bakrie Connectivity	28	(2)	PT Bakrie Connectivity
PT Anugerah Andalan Investama			
Total	28	(2)	Total

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha meliputi pendapatan yang berasal dari telepon tidak bergerak dan telepon bergerak terbatas, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pendapatan jasa telekomunikasi			<i>Telecommunication services</i>
Prabayar	124.503	480.108	<i>Pre-paid</i>
Pascabayar	<u>16.825</u>	<u>53.850</u>	<i>Post-paid</i>
Total pendapatan jasa telekomunikasi	141.328	533.958	<i>Total telecommunication services</i>
Pendapatan jasa interkoneksi	<u>30.677</u>	<u>103.867</u>	<i>Interconnection services</i>
Total pendapatan usaha	172.005	637.825	<i>Total operating revenues</i>
Beban interkoneksi dan biaya bagi hasil	(29.516)	(107.976)	<i>Interconnection expense and sharing cost</i>
Potongan harga	<u>(52.640)</u>	<u>(128.229)</u>	<i>Discount</i>
Neto	<u>89.849</u>	<u>401.620</u>	Net

Transaksi pendapatan yang berasal dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar nihil dan Rp1,0 Miliar (Catatan 30).

Operating revenues represent revenues from fixed line and limited mobility telephone revenues, with details as follows:

Revenue transactions from related parties for the years ended December 31, 2016 and 2015, amounted to nil and Rp1.0 billion, respectively (Note 30).

Selain itu, terdapat biaya bagi hasil untuk pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar nihil dan Rp842,0 juta (Catatan 30) yang dicatat sebagai bagian dari potongan harga dan biaya bagi hasil.

In addition, revenue sharing cost to related party for the years ended December 30, 2016 and 2015 amounting to nil and Rp842.0 million (Note 30), was recorded as part of discount and sharing cost.

24. BEBAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Sewa	114.010	337.179	<i>Rent</i>
Listrik	9.617	30.221	<i>Electricity</i>
Kewajiban kepada Departemen Komunikasi dan Informatika - Direktorat Jenderal			<i>Obligation to Department of Communication and Information - the Directorate General of</i>
Pos dan Telekomunikasi	1.598	6.379	<i>Post and Telecommunication</i>
Pemeliharaan dan perbaikan	204	2.408	<i>Repairs and maintenance</i>
Lisensi frekuensi	-	3.113	<i>Frequency licenses</i>
Kewajiban kepada asuransi	<u>-</u>	<u>288</u>	<i>Obligation to the insurance</i>
Total	<u>125.429</u>	<u>379.588</u>	Total

24. OPERATING AND MAINTENANCE EXPENSES

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember / December 31,		
	2016	2015	
Jasa profesional	12,073	86,599	<i>Professional fees</i>
Sewa	8,283	31,278	<i>Rent</i>
Rugi penurunan nilai piutang usaha (Catatan 7)	5,099	40,739	<i>Impairment loss of trade receivables (Note 7)</i>
Transportasi	201	2,488	<i>Transportation</i>
Perlengkapan kantor	182	922	<i>Office supplies</i>
Beban pos	176	508	<i>Postage</i>
Telepon, listrik dan air	155	760	<i>Telephone, electricity and water</i>
Pemeliharaan kantor	154	3,260	<i>Office maintenance</i>
Perizinan, lisensi dan bea masuk	132	17,626	<i>Permits, licenses and customs clearance</i>
Iuran keanggotaan	14	675	<i>Memberships</i>
Keamanan	-	370	<i>Security</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	164	1,278	<i>Others (each below Rp500 million)</i>
Total	26,633	186,503	Total

26. BEBAN KARYAWAN

26. EMPLOYEES EXPENSES

	31 Desember / December 31,		
	2016	2015	
Gaji dan upah	75,901	209,559	<i>Salaries and wages</i>
Transportasi	1,924	10,989	<i>Transportation</i>
Tunjangan uang makan	752	3,245	<i>Meal allowance</i>
Tunjangan kesehatan	135	6,373	<i>Medical allowance</i>
Pelatihan	-	70	<i>Training</i>
Total	78,712	230,236	Total

27. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

27. SALES AND MARKETING EXPENSES

	2016	2015	
Sewa	863	2.016	<i>Advertising, promotion and Rent</i>
Iklan, promosi dan pameran	412	85.683	<i>exhibition</i>
Lain-lain	171	2.521	<i>Others</i>
Total	1.446	90.220	Total

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

28. OTHER INCOME (CHARGES)

a. Selisih kurs

a. Foreign exchange

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Laba selisih kurs	603.529	1.003.333	Gain on foreign exchange
Rugi selisih kurs	(265.749)	(1.796.426)	Loss on foreign exchange
Neto	<u>337.780</u>	<u>(793.093)</u>	Net

b. Beban keuangan

b. Financing charges

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Beban bunga, amortisasi beban keuangan neto dan beban keuangan lainnya	(708.289)	(748.385)	Interest charges, amortization of net financial charges and other financial charges
Administrasi bank	(1.458)	(3.303)	Bank charges
Beban bunga atas sewa pembiayaan	-	(288)	Interest expenses on financial lease
Total	<u>(709.747)</u>	<u>(751.976)</u>	Total

c. Lain-lain

c. Others

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Penghasilan bunga	67	67	Interest income
Amortisasi laba ditangguhkan atas penjualan dan penyewaan kembali	-	16.231	Amortization of deferred gain on sale and leaseback
Laba (rugi) atas penjualan aset tetap yang tidak digunakan	-	(3.252)	Gain (loss) on disposal of unused fixed assets
Piutang yang dihapus selama periode berjalan karena tidak dapat ditagih	-	(9.405)	Gain on sale available for sale financial asset
Penghapusan uang muka proyek dan pembelian aset tetap	-	(43.442)	Advances purchase of fixed assets and projects written-off
Lain-lain	(363)	(28.179)	Others
Total	<u>(296)</u>	<u>(67.980)</u>	Total

29. PERPAJAKAN

29. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	36.305	31.466	Value-Added Tax
Bea materai dan lainnya	172	172	Stamp duty and others
Total	<u>36.477</u>	<u>31.638</u>	Total

29. PERPAJAKAN (Lanjutan)

29. TAXATION (Continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	44.352	34.334	Article 21
Pasal 23	6.599	5.788	Article 23
Pasal 26	62.791	62.786	Article 26
Pajak Pertambahan Nilai	218	-	Value-Added Tax
Total	<u>113.961</u>	<u>102.908</u>	Total

c. Pajak Kini

c. Current Tax

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between loss before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated fiscal loss for the years ended December 31, 2016 and 2015 was as follows:

	31 Desember / December 31,		
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Rugi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(1,330,333)	(8,506,407)	Loss before income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba (rugi) Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	(439)	(16,404)	Income (loss) of Subsidiaries before income tax expense
Transaksi eliminasi	2,800	16,363	Elimination transactions
Rugi sebelum beban pajak yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan	<u>(1,327,972)</u>	<u>(8,506,448)</u>	Loss before income tax expense attributable to the Company
Beda temporer			Temporary differences
Penyusutan	215,757	801,598	Depreciation
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	5,099	36,491	Provision for impairment loss of trade receivables
Rugi (laba) pelepasan aset	-	3,212	Loss (gain) on disposal of assets
Penyisihan imbalan kerja	2,263	(28,092)	Provision for employee benefits
Total	<u>223,119</u>	<u>813,209</u>	Total

29. PERPAJAKAN (Lanjutan)

29. TAXATION (Continued)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Beda tetap			Permanent differences
Transaksi sewa pembiayaan	-	1.789.557	Finance lease transactions
Beban sisa masa sewa	-	1.667.835	Residual value expenses of the lease
Pajak dan pengembangan usaha	221	-	Taxes and business development
Gaji dan upah	162	-	Salary and wages
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(10)	-	Interest income already subjected to final tax
Bagian atas laba neto Entitas Anak	343	-	Equity in net income of Subsidiaries
Penyisihan penurunan nilai aset tetap		1.447.293	Entertainment, donation and representation
Lain-lain	338	103.610	Others
Total	<u>1.054</u>	<u>5.008.295</u>	Total
Taksiran Akumulasi Rugi Fiskal	<u>(1.103.798)</u>	<u>(2.684.944)</u>	Estimated Cumulative Fiscall Loss
Rugi Fiskal:			Fiscal Loss:
2010	-	-	2010
2011	-	(1.536.249)	2011
2012	(2.576.928)	(2.576.928)	2012
2013	(3.089.046)	(3.089.046)	2013
2014	(1.592.976)	(1.592.976)	2014
2015	(2.684.944)	-	
Total Rugi Fiskal	<u>(9.943.894)</u>	<u>(8.795.199)</u>	Total Fiscal Loss
Taksiran Akumulasi Rugi Fiskal	<u>(11.047.692)</u>	<u>(11.480.143)</u>	Estimated Cumulative Fiscal Loss

Perusahaan tidak melakukan penyisihan beban pajak penghasilan kini karena Perusahaan masih mengalami rugi fiskal.

No provision for current income tax expense was made due to the Company still being in a fiscal loss position.

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Perusahaan:			The Company:
Penyisihan aset pajak tangguhan	(69.636)	(280.094)	Allowance for deferred tax assets
Penyisihan penurunan nilai piutang	1.020	(4.930)	Impairment of trade receivables
Liabilitas imbalan kerja	(4.473)	(10.245)	Employee benefits liability
Aset tetap	11.185	160.960	Fixed assets

29. PERPAJAKAN (Lanjutan)

29. TAXATION (Continued)

	2016	2015	
Beban Pajak Tangguhan - Perusahaan	(61.904)	(134.309)	Deferred Tax Expense - Company
Beban Pajak Tangguhan - Entitas Anak	122	(41)	Deferred Tax Expense - Subsidiaries
Beban Pajak Tangguhan - Neto	(61.782)	(134.350)	Deferred Tax Expense - Net

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The deferred tax assets and liability of the Group as of December 31, 2016 and 2015 were as follows:

	2016	2015	
Perusahaan:			The Company:
Aset pajak tangguhan:			Deferred tax assets:
Penyisihan aset pajak tangguhan	2.209.539	-	Allowance for deferred tax assets
Akumulasi rugi fiskal dikurangi penyesuaian dan penyisihan	(2.296.029)	-	Accumulated fiscal loss deducted with adjustment and allowance
Piutang usaha	13.248	-	Trade receivables
Liabilitas imbalan kerja	153	-	Employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan:			Deferred tax liability:
Aset tetap	(43.151)	(54.337)	Fixed assets
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Perusahaan - Neto	(116.240)	(54.337)	Deferred Tax Assets (Liability) Company - Net
Liabilitas Pajak Tangguhan Entitas Anak - Neto	(68)	(209)	Deferred Tax Liability Subsidiaries - Net
Total Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	(116.308)	(54.546)	Total Deferred Tax Assets (Liability)

e. Pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain

e. Income tax relating to each item of other comprehensive income

	2016	2015	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	-	(10)	Translation adjustments of financial statements
Pengukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja	(1,930)	(1,032)	Remeasurement of gain on employee benefits liability
Penghasilan Komprehensif Lain	(1,930)	(1,042)	Other Comprehensive Income

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan karena besar kemungkinan aset pajak tangguhan tidak dapat terealisasi di masa yang akan datang.

The management believed that the Company did not recognize deferred tax assets because it is probable that deferred tax assets can not be realized in the future.

29. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, oleh karena itu, telah menggunakan pengurangan tarif pajak sebesar 5% dalam penghitungan pajak penghasilan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan telah dihitung dengan menggunakan tarif-tarif tersebut.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku yang dihitung dari rugi sebelum beban pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,		
	2016	2015	
Rugi Perusahaan sebelum beban pajak penghasilan	<u>(1,330,333)</u>	<u>(8,506,407)</u>	<i>Loss before income tax expense attributable to the Company</i>
Pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 20%	(266,067)	(1,701,281)	<i>Income tax at prevailing tax rate of 20%</i>
Pengaruh pajak dengan tarif 20% atas:			<i>Tax effects at tax rate 20% on:</i>
Beda tetap	211	1,001,660	<i>Permanent differences</i>
Penyesuaian dan penyisihan aset pajak tangguhan	<u>327,760</u>	<u>833,931</u>	<i>Adjustment and allowance for deferred tax assets</i>
Beban pajak penghasilan Perusahaan	61,904	134,309	<i>Income tax expense Company</i>
Entitas Anak	<u>(122)</u>	<u>41</u>	<i>Subsidiaries</i>
Penyisihan aset pajak tangguhan	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Allowance for deferred tax assets</i>
Jumlah	<u>61,782</u>	<u>134,350</u>	Total

f. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 4 Oktober 2011, Perusahaan menerima salinan Memori Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak tentang Surat Ketetapan Pajak Penghasilan pasal 23 tahun 2007. Pada tanggal 28 Oktober 2011, Perusahaan telah mengirim Jawaban Memori Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima putusan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

29. TAXATION (Continued)

The Company has complied with the requirements of the Government Decree No. 81 Year 2007 and Law No. 36 Year 2008, and therefore, has effected the 5% tax rate reduction on its corporate income tax computation. Deferred tax assets and liabilities have been calculated using these enacted tax rates.

A reconciliation between income tax expense calculated by applying the applicable tax rate to loss before income tax expense and income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

f. Tax Assessment Letter

On October 4, 2011, the Company received a copy of a Memorandum for Judicial Review on the Tax Court's Decision Letter regarding Tax Assessment Letter for the fiscal year 2007 Withholding Income Tax article 23. On October 28, 2011, the Company submitted a Counter Memorandum for Judicial Review to the Supreme Court, and as of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not received a letter of decision from the Directorate General of Tax (DGT) for a judicial review request.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

29. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Pada tanggal 29 April 2011, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00125/406/054/11 atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2009 sejumlah Rp18,3 miliar. Ketetapan pajak ini mengurangi jumlah kerugian pajak yang dapat dikompensasi menjadi Rp59,1 miliar. Perusahaan menyampaikan surat keberatan No. 28745/EST-05/Finance/VII/2011 kepada Kantor Pajak pada bulan Juli 2011 terhadap SKPLB. Sesuai dengan Surat Keputusan DJP No. 965/WPJ.19/2012 tanggal 17 Juli 2012, DJP menolak surat keberatan Perusahaan. Pada tanggal 16 Oktober 2012, Perusahaan telah mengajukan banding atas keputusan DJP tersebut. Pada tanggal 9 September 2014, Perusahaan menerima Surat Putusan Pengadilan Pajak No.Put.54583/PP/M.XVA/15/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Perusahaan atas Keputusan DJP No.965/WPJ.19/2012 tanggal 17 Juli 2012.

Pada tanggal 4 Mei 2015, Perusahaan menerima salinan Memori Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2009 No. S-7299/PJ.07/2014 tanggal 24 November 2014 yang diajukan oleh DJP. Pada tanggal 26 Mei 2015, Perusahaan telah mengirim Jawaban Memori Permohonan Peninjauan Kembali dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Pajak Penghasilan Badan tahun 2009 masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dan Perusahaan belum menerima putusan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJP.

Pada tanggal 25 April 2012, Perusahaan menerima SKPLB No. 00027/406/10/092/12 atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2010 sejumlah Rp10,9 miliar. Ketetapan pajak ini mengurangi jumlah kerugian pajak yang dapat dikompensasi menjadi Rp266,7 miliar. Perusahaan menyampaikan surat keberatan No. 33274/EST-06/Dir/VII/2012 kepada Kantor Pajak pada bulan Juli 2012 terhadap SKPLB. Sesuai dengan Surat Keputusan DJP No.KEP-515/WPJ.19/2013 tanggal 22 April 2013, DJP menolak surat keberatan Perusahaan. Pada tanggal 3 Februari 2015, Perusahaan menerima Surat Putusan Pengadilan Pajak No.PUT.558/PP/M.XVA/15/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Perusahaan atas Keputusan DJP No. KEP-515/ WPJ.19/2013 tanggal 22 April 2013.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. TAXATION (Continued)

On April 29, 2011, the Company received Tax Assessment Letter of Over payment (SKPLB) No. 00125/406/054/11 relating to Corporate Income Tax for the fiscal year 2009 confirming overpayment of Rp18.3 billion. The SKPLB reduced the compensated tax loss carry forward to Rp59.1 billion. The Company filed objection letter No.28745/EST-05/Finance/VII/2011 to the Tax Authority in July 2011 against the SKPLB. In accordance with Decision Letter DGTNo.965/WPJ.19/2012 dated July 17, 2012, DGT rejected the Company's objection. On October 16, 2012, the Company submitted an appeal memorandum against the DGT's decision. On September 9, 2014, the Company received the Tax Court Decision No.Put.54583/PP/M.XVA/15/2014 dated August 25, 2014, which approved the Company's appeal against the DGT's decision No.965/WPJ.19/2012 dated July 17, 2012 in its entirety.

On May 4, 2015, the Company received a copy of a Memorandum submitted by the DGT for Judicial Review on the Tax Court's Decision Letter for the fiscal year 2009 Corporate Income Tax No. S-7299/PJ.07/2014 dated November 24, 2014. On May 26, 2015, the Company submitted a Counter Memorandum for Judicial Review to the Supreme Court, and as of the completion date of the consolidated financial statements, 2009 Corporate Income Tax Judicial Review process is still ongoing, and the Company has not received a decision letter for DGT's judicial review request.

On April 25, 2012, the Company received SKPLB No. 00027/406/10/092/12 relating to Corporate Income Tax for the fiscal year 2010 confirming overpayment of Rp10.9 billion. The SKPLB reduced the compensated tax loss carry forward to Rp266.7 billion. The Company filed objection letter No.33274/EST-06/Dir/VII/2012 to the Tax Authority in July 2012 against the SKPLB. In accordance with Decision Letter of DGT No. KEP-515/WPJ.19/2013 dated April 22, 2013, DGT rejected the Company's objection. On February 3, 2015, the Company received the Tax Court Decision No.PUT.558/PP/M.XVA/15/2015 dated January 19, 2015, which approved the Company's appeal partially against the DGT's decision No. KEP-515/ WPJ.19/2013 dated April 22, 2013.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Pada tanggal 26 April 2013, Perusahaan menerima SKPLB No. 00038/406/11/092/13 atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2011 sejumlah Rp860,6 juta. Ketetapan pajak ini mengurangi jumlah kerugian pajak yang dapat dikompensasi menjadi Rp1,5 triliun. Perusahaan menyampaikan surat keberatan kepada Kantor Pajak terhadap SKPLB. Pada tanggal 4 Agustus 2014, Perusahaan menerima surat keputusan keberatan No.1567/WPJ.19/2014, DJP menolak keberatan Perusahaan. Atas penolakan keberatan ini, Perusahaan sudah mengirimkan Surat Banding No. 14107/EST-05/Finance/2014 pada tanggal 10 Oktober 2014. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses banding sedang berlangsung.

Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei 2016, Perusahaan menerima SKPLB No. 00071/407/092/16 atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2014 sejumlah Rp9.742,5 juta yang berbeda dengan jumlah yang diklaim oleh Perusahaan sejumlah Rp9.999,9 juta. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima kelebihan atas pembayaran pajak tersebut.

29. TAXATION (Continued)

On April 26, 2013, the Company received SKPLB No. 00038/406/11/092/13 relating to Corporate Income Tax for the fiscal year 2011 confirming over payment of Rp860.6 million. The SKPLB reduced the compensated tax loss carry forward to Rp1.5 trillion. The Company filed an objection letter to the Tax Authority against the SKPLB. On August 4, 2014, the Company received Decision Letter No.1567/WPJ.19/2014, from DGT that rejected the Company's objection. The Company has submitted Appeal Letter No. 14107/EST-05/Finance/2014 on October 10, 2014 to the Tax Court. As of the completion date of the consolidated financial statements, the process on this appeal is still ongoing.

Subsequently, on May 4, 2016, the Company received SKPLB No. 00071/407/092/16 relating to over payment of Value-Added Tax for the fiscal year 2014 amounted to Rp9,742.5 million instead of Rp9,999.9 million as claimed by the Company. As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not received the over payment of VAT.

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

30. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group entered into transactions with related parties.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Sewa ke (Catatan 39)			Rental to (Note 39)
PT Bakrie Swasakti Utama	4,623	10,318	PT Bakrie Swasakti Utama
PT Multi Kontrol Nusantara	398	950	PT Multi Kontrol Nusantara
Total	<u>5,021</u>	<u>11,268</u>	Total
Pendapatan dari pihak berelasi			Revenues from related parties
(dibawah Rp1 miliar)			(below Rp1 billion)
(Catatan 23)	<u>-</u>	<u>4,800</u>	(Note 23)
Persentase pendapatan dari pihak berelasi terhadap pendapatan usaha konsolidasian	<u>0.0000%</u>	<u>1.1952%</u>	Percentage of revenue from related parties to consolidated operating revenues

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**30. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Nature of relationships and transactions with related parties were as follows:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Related Parties
PT Bakrie Swasakti Utama	Afiliasi/Affiliate	PT Bakrie Swasakti Utama
PT Provices Indonesia	Afiliasi/Affiliate	PT Provices Indonesia
PT Multi Kontrol Nusantara	Afiliasi/Affiliate	PT Multi Kontrol Nusantara
PT Viva Media Baru	Afiliasi/Affiliate	PT Viva Media Baru
PT Asia Global Media	Afiliasi/Affiliate	PT Asia Global Media
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	Afiliasi/Affiliate	Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika
PT Bakrie Global Ventura	Afiliasi/Affiliate	PT Bakrie Global Ventura

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada (Catatan 1g). Total remunerasi dan imbalan lainnya yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Key management personnel of the Company are the Boards of Commissioners and Directors as described in (Note 1g). Total remuneration and other benefits given to key management personnel were as follows:

31 Desember / December 31, 2016				
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Total/ Total	
Imbalan kerja jangka pendek	2.139	6.733	8.873	Short-term employment benefits
Imbalan pascakerja	6	139	145	Post-employment benefits
Total	2.145	6.872	9.018	Total
31 Desember / December 31, 2015				
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Total/ Total	
Imbalan kerja jangka pendek	2,846	7,695	10,541	Short-term employment benefits
Imbalan pascakerja	9	186	195	Post-employment benefits
Total	2,855	7,881	10,736	Total

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

**30. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Utang Pihak Berelasi

Due to Related Parties

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Liabilitas jangka pendek:			Current liabilities
Koperasi Karyawan Mitra Usaha			Koperasi Karyawan Mitra Usaha
Dinamika	35.186	35.186	Dinamika
PT Bakrie Global Ventura	11.912	11.912	PT Bakrie Global Ventura
Total	<u>47.098</u>	<u>47.098</u>	Total
Persentase terhadap			Percentage to Total
Total Liabilitas Konsolidasian	<u>0,3802%</u>	<u>0,3156%</u>	Consolidated Liabilities

Utang pihak berelasi yang diperoleh PT Bakrie Connectivity (BCON), Entitas Anak, dari Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) merupakan utang usaha yang pembayarannya ditunda selama 18 bulan sejak tanggal 23 Desember 2014.

Due to a related party obtained by PT Bakrie Connectivity (BCON), a Subsidiary, from Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) represents trade payable, which payment was deferred for 18 months starting from December 23, 2014.

Utang pihak berelasi yang diperoleh Perusahaan dari PT Bakrie Global Ventura merupakan utang yang pembayarannya ditunda selama 18 bulan sejak tanggal 24 Maret 2015.

Due to a related party obtained by the Company from PT Bakrie Global Ventura represents payable, which payment was deferred for 18 months starting from March 24, 2015.

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA

31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (dihitung oleh aktuaris independen PT Sigma Prima Solusindo) dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

The employee benefits liability of the Group as of December 31, 2016 and 2015 (was calculated by an independent actuary PT Sigma Prima Solusindo), respectively, used the "Projected Unit Credit" method with considerations of the following assumptions:

Tingkat diskonto	9,09% pada 31 Desember 2016 dan 2015 9,09% in December 31, 2016 and 2015	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,5% per tahun / per annum	Salary increment rate
Tingkat mortalitas	TMI-III tahun 2011 / TMI-III year 2011	Mortality rate
Tingkat kemungkinan	5% dari tingkat mortalitas / 5% of mortality rate	Disability rate
Usia pensiun normal	55 tahun / 55 years	Normal retirement age
Tingkat pengunduran diri	1% - 5%	Resignation rate

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Analisa sensitivitas kuantitatif liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

The quantitative sensitivity analysis of the employee benefits liability to the changes in the weighted principal assumptions as of December 31, 2016 was as follows:

	Peningkatan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Kerja/ Impact on Employee Benefits Liability	
Tingkat diskonto	1,00%	(2.169)	Discount rate
	-1,00%	2.530	
Tingkat kenaikan gaji	1,00%	2.491	Salary increment rate
	-1,00%	(2.237)	

Kelompok Usaha menghadapi sejumlah risiko signifikan terkait program imbalan kerja, sebagai berikut:

- (a) Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- (b) Tingkat kenaikan gaji
Liabilitas imbalan kerja berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dimana semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

The Group was exposed to a number of significant risks related to its employee benefit plans, as follows:

- (a) Changes in discount rate
A decrease in discount rate will increase plan liabilities.
- (b) Salary increment rate
Employee benefit liability are linked to salary increment rate, whereby the higher salary increment rate will lead to higher liabilities.

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Employee benefits liability was as follows:

	2016	2015	
Nilai kini liabilitas kewajiban kerja	767	23.131	Present value of benefits liability
Nilai wajar atas aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan kerja	767	23.131	Employee benefits liability

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Movements of employee benefits liability were as follows:

	2016	2015	
Saldo awal	23.131	51.223	Beginning balance
Beban imbalan kerja karyawan	2.264	(13.055)	Employee benefits expense
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	(9.650)	(5.161)	Other comprehensive loss (income)
Realisasi pembayaran manfaat	(14.978)	(9.876)	Actual benefits payments
Saldo Akhir	767	23.131	Ending Balance

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect to this employee benefits liability were as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Beban (penghasilan) yang diakui dalam laba rugi :			<i>Expense (income) recognized in profit or loss:</i>
Biaya jasa kini	161	2.295	<i>Current-service cost</i>
Biaya bunga	2.103	4.656	<i>Interest cost</i>
Dampak kurtailmen atau penyelesaian program	-	(20.006)	<i>Curtailment effect or program settlement</i>
Total	<u>2.264</u>	<u>(13.055)</u>	Total

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Movements of the present value of the employee benefits liability were as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja pada awal tahun	23.131	51.223	<i>Present value of employee benefits liability at beginning of year</i>
Biaya jasa kini	161	2.295	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	2.103	4.656	<i>Interest cost</i>
Dampak kurtailmen atau penyelesaian program	-	(20.006)	<i>Curtailment effect or settlement program</i>
Pengukuran kembali dari:			<i>Remeasurements from:</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari:			<i>Actuarial gains (losses) arising from:</i>
Perubahan dalam asumsi aktuaris	-	(4.249)	<i>Changes in actuaries assumption</i>
Penyesuaian pengalaman	(9.650)	(912)	<i>Experience adjustments</i>
Imbalan yang dibayar	(14.978)	(9.876)	<i>Benefit paid</i>
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja Pada Akhir Tahun	<u>767</u>	<u>23.131</u>	Present Value of Employee Benefits Liability at End of Year

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

	<u>Perusahaan/ The Company</u>	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahunan berikutnya)	-	<i>Within the next 12 months (the next</i>
Antara 1 dan 3 tahun	51	<i>Between 1 and 3 years</i>
Antara 3 dan 5 tahun	56	<i>Between 3 and 5 years</i>
Antara 5 dan 10 tahun	121	<i>Between 5 and 10 years</i>
Diatas 10 tahun	<u>539</u>	<i>Beyond 10 years</i>
Total	<u>767</u>	Total

Perbandingan nilai kini liabilitas imbalan kerja, dan penyesuaian yang timbul akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan selama lima (5) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Comparison of the present value of employee benefits liability, and the experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually occurred) over the last five (5) years were as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Nilai kini liabilitas kewajiban kerja	(767)	(23.131)	(51.223)	(72.429)	(55.393)	Present value of employee benefits liability
Penyesuaian dalam liabilitas	(4.106)	(20.918)	40.653	(21.666)	(5.605)	Adjustment on liability

32. INSTRUMEN KEUANGAN

32. FINANCIAL INSTRUMENTS

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

The following table presents the carrying amounts and the estimated fair values: of the financial instruments carried in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2016 and 2015:

<u>Akun</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>		<u>Accounts</u>
	<u>Nilai Tercatat/ Carrying Amounts</u>	<u>Nilai Wajar/ Fair Values</u>	
Aset Keuangan			Financial Assets
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Kas	233	233	Cash on hand
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			<u>Loans and receivables</u>
Kas di bank	1.978	1.978	Cash in bank
Investasi jangka pendek	48	48	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	38	38	Restricted cash
Piutang usaha	2.557	2.557	Trade receivables
Jaminan	<u>449</u>	<u>449</u>	Security deposits
Total Aset Keuangan	<u>5.303</u>	<u>5.303</u>	Total Financial Assets

32. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

32. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Akun	31 Desember 2016/ December 31, 2016		Accounts
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized cost</u>
Utang usaha	326.691	326.691	Trade payables
Utang lain-lain	51.180	51.180	Other payables
Beban akrual	2.553.566	2.553.566	Accrued expenses
Pinjaman	535	535	Loans
Wesel senior	5.105.680	206.014	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	7.156.994	7.156.994	Settlement of payables through PKPU
Total Liabilitas Keuangan	15.241.744	10.342.078	Total Financial Liabilities

Akun	31 Desember 2015/ December 31, 2015		Accounts
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Aset Keuangan			Financial Assets
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Kas	517	517	Cash on hand
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			<u>Loans and receivables</u>
Kas di bank	5.203	5.203	Cash in bank
Investasi jangka pendek	48	48	Short-term investments
Piutang usaha	21.319	21.319	Trade receivables
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	39	39	Restricted cash
Jaminan	12.305	12.305	Security deposits
Total Aset Keuangan	39.431	39.431	Total Financial Assets

32. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

32. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Akun	31 Desember 2015/ December 31, 2015		Accounts
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized cost</u>
Utang usaha	292.243	292.243	Trade payables
Utang lain-lain	16.696	16.696	Other payables
Beban akrual	1.908.413	1.908.413	Accrued expenses
Pinjaman	1.260	1.260	Loans
Wesel senior	5.242.100	243.967	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	Due to a related party
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	7.197.152	7.197.152	Settlement of payables through PKPU
Total Liabilitas Keuangan	14.704.962	9.706.829	Total Financial Liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun (1) atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

Instrumen keuangan ini sangat mendekati nilai tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek (Level 2).

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang:

- (a) Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel yang tidak dikuotasikan (pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan).

Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama (Level 2).

- (b) Liabilitas keuangan yang dikuotasikan dalam pasar aktif (aset keuangan tersedia untuk dijual dan wesel senior).

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Short-term financial assets and liabilities:

Short-term financial instruments with remaining maturities of one (1) year or less (cash and cash equivalents, trade receivables, restricted cash, short-term investments, trade payables, other payables and accrued expenses).

These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities (Level 2).

Long-term financial assets and liabilities:

- (a) Unquoted long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (long-term loan and finance lease payables).

The fair values of these financial liabilities are determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities (Level 2).

- (b) Financial instruments quoted on an active market (available-for-sale financial asset and senior notes).

32. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual ditentukan dengan mengacu pada harga pasar terakhir.

Nilai wajar dari Wesel Senior yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku (Level 1).

(c) Aset keuangan jangka panjang

Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai.

Tabel diatas ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- (a) harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level1);
- (b) *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung (Level 2); dan
- (c) *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Kelompok Usaha secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung oleh Direksi dan terutama oleh *Chief Financial Officer* (CFO). CFO memiliki pusat departemen keuangan berikut kebijakan yang telah disetujui oleh Divisi Manajemen Risiko dan Direksi. Departemen ini mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama yang erat dengan unit-unit operasi Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko dan Direksi menentukan prinsip manajemen risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan pada area tertentu, seperti risiko mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan nonderivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

The fair value of available-for-sale financial asset is determined based on the latest published quoted price.

The fair value of the Senior Notes issued by the Group that are traded on an active market is determined with reference to their quoted market prices(Level 1).

(c) Long-term financial assets

Other non-current financial assets that are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs are carried at their nominal amounts less any impairment losses.

The table above analyzes the financial instruments measured at fair value by level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- (a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level1);*
- (b) inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and*
- (c) inputs are unobservable inputs for the asset or liability (Level 3).*

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is affected by various financial risks, including credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Group's overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on its previous years of financial performance.

Financial risk management is under the direct supervision of the Board of Directors and especially the Chief Financial Officer (CFO). The CFO has a central treasury department that follows policies approved by the Risk Management Division and Board of Directors. The department identifies and evaluates financial risks in close cooperation with the Company's operating units. The Risk Management Division and Board of Directors determine the principles for overall financial risk management, as well as policies covering specific areas, such as foreign currency risk, interest rate risk, credit risk, use of derivative and non-derivative financial instruments, and investment in excess of liquidity.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

a. Risiko kredit

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar nilai tercatat aset keuangan Kelompok Usaha, sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Kas dan setara kas (kecuali kas)	1.978	5.203	Cash and cash equivalents (except cash on hands)
Investasi jangka pendek	48	48	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	38	39	Restricted cash
Piutang usaha	2.557	21.318	Trade receivables
Jaminan	449	12.305	Security deposits
Total	<u>5.070</u>	<u>38.913</u>	Total

Kelompok Usaha mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif. Kelompok Usaha mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan aset derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (Continued)**

a. Credit risk

The Group's exposure to credit risk arises from the default of other parties, with maximum exposure equal the carrying amount of its financial assets, as follows:

The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring. The Group manages credit risk exposed from their deposits with banks and derivative assets by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. There are no significant concentration of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

The analysis of the age of financial assets that were not yet due or not impaired and past due as at the end of the reporting period but not impaired was as follows:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

**33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (Continued)**

31 Desember / December 31, 2016

	Belum Jatuh Tempo ataupun Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due nor Impaired					Total/ Total	
	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Past Due but Not Impaired						
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 bulan - 6 bulan/ 3 months - 6 months	6 bulan - 1 tahun/ 6 months - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year			
Kas dan setara kas (kecuali kas)	1,978	-	-	-	-	1,978	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
Investasi jangka pendek	48	-	-	-	-	48	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	38	-	-	-	-	38	Restricted cash
Piutang usaha	-	77	205	2,275	-	2,556	Trade receivables
Jaminan	449	-	-	-	-	449	Security deposits
Total	2,513	77	205	2,275	-	5,069	Total

31 Desember / December 31, 2015

	Belum Jatuh Tempo ataupun Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due nor Impaired					Total/ Total	
	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Past Due but Not Impaired						
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 bulan - 6 bulan/ 3 months - 6 months	6 bulan - 1 tahun/ 6 months - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year			
Kas dan setara kas (kecuali kas)	5,203	-	-	-	-	5,203	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
Investasi jangka pendek	48	-	-	-	-	48	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	39	-	-	-	-	39	Restricted cash
Piutang usaha - neto	-	4,583	4,496	12,239	-	21,318	Trade receivables - net
Jaminan	12,305	-	-	-	-	12,305	Security deposits
Total	17,595	4,583	4,496	12,239	-	38,913	Total

Manajemen melakukan penilaian atas kualitas kredit *counter parties* karena tidak ada peringkat kredit eksternal yang tersedia dan terpenuhi, dimana tidak terdapat risiko signifikan yang terkait dengan mereka.

The management assessed the credit quality of the *counterparties* for which no external credit rating is available and is satisfied, that there is no significant risk associated with them.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

b. Risiko mata uang asing

Kelompok Usaha terekspos risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari transaksi, aset dan liabilitas tertentu dalam Dolar AS yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Kelompok Usaha memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Kelompok usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Aset			Assets
Kas			Cash
Dolar AS	89	1,874	US Dollar
Dolar Singapura	481	484	Singapore Dollar
Piutang usaha			Trade receivables
Dolar AS	15,162	20,820	US Dollar
Kas yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash
Dolar AS	<u>38</u>	<u>39</u>	US Dollar
Total Aset	<u>15,770</u>	<u>23,217</u>	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha			Trade payables
Dolar AS dan mata uang lain	46,421	51,879	US Dollar and other currencies
Utang lain-lain			Other payables
Dolar AS	4,186	4,443	US Dollar
Beban akrual			Accrued expenses
Dolar AS	2,161,064	1,611,582	US Dollar
Utang pihak berelasi			Due to a related party
Dolar AS	11,912	11,912	US Dollar
Wesel senior			Senior notes
Dolar AS	5,105,680	5,242,100	US Dollar
Utang yang diselesaikan melalui PKPU			Settlement of payables through PKPU
Dolar AS dan mata uang lain	<u>3,031,247</u>	<u>3,071,405</u>	US Dollar and other currencies
Total Liabilitas	<u>10,360,511</u>	<u>9,993,321</u>	Total Liabilities
Liabilitas Neto	<u>(10,344,740)</u>	<u>(9,970,104)</u>	Net Liabilities

Berdasarkan estimasi manajemen, sampai dengan tanggal pelaporan Kelompok Usaha berikutnya, kurs Rupiah terhadap Dolar AS dapat melemah/menguat 5% dibandingkan kurs pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (Continued)**

b. Foreign currency risk

The Group is exposed to changes in foreign currency exchange rates primarily from certain transactions, assets and liabilities in US Dollar which arise from financing activities and daily operations. The Group monitors and manages the risk by matching the foreign currency financial liabilities with relevant foreign currency assets and buying or selling foreign currencies at spot rate when necessary.

As of December 31, 2016 and 2015, the Group had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

Based on management's estimate, until the Group's next reporting date, the exchange rate of Rupiah against US Dollar may weaken/strengthen by 5%, compared to the exchange rate as of December 31, 2016 and 2015.

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN *(Lanjutan)*

Jika nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia berlanjut melemah/menguat 5% terhadap mata uang Dolar AS yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2016 dengan seluruh variable lain tetap, maka rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2016 masing-masing akan berupa peningkatan/penurunan sekitar Rp486,1 miliar.

Jika nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia berlanjut melemah/menguat 5% terhadap mata uang Dolar AS yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2015 dengan seluruh variable lain tetap, maka rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2015 masing-masing akan berupa peningkatan/penurunan sekitar Rp498,5 miliar.

c. Risiko tingkat suku bunga

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman serta aset dan liabilitas berbunga. Kebijakan Kelompok Usaha adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Kelompok Usaha tidak memiliki saldo aset dan liabilitas dengan tingkat suku bunga mengambang yang material.

d. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Kelompok Usaha mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas dan fleksibilitas piutang melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Tabel dibawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan nonderivatif yang diperlukan dalam pemahaman jatuh tempo kebutuhan arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (yang terdiri dari saldo pokok terutang). Utang yang diselesaikan melalui PKPU sebagian akan diselesaikan melalui penerbitan *Mandatory Convertible Bond*.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES *(Continued)*

If the extent the Indonesian Rupiah had weakened/strengthened by 5% against US Dollar at December 31, 2016 with all other variables held constant, the 2016 loss before income tax would have been an increase/a decrease of approximately Rp486.1 billion, respectively.

If the extent the Indonesian Rupiah had weakened/strengthened by 5% against US Dollar at December 31, 2015 with all other variables held constant, the 2015 loss before income tax would have been an increase/a decrease of approximately Rp498.5 billion, respectively.

c. Interest rate risk

The Group's exposure to interest rate risk relates primarily to its borrowing obligations and interest-bearing assets and liabilities. The Group's policies are to obtain the most favorable interest rates available.

As of December 31, 2016 and 2015, the Group did not have material balances of assets and liabilities with floating interest rates.

d. Liquidity risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Group maintains a balance between continuity of accounts receivable collectability and flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

The following table analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities which are essential in understanding the timing of cash flows requirements. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (consisting of outstanding principal balance). Settlement of payables through PKPU will be settled partially by issuing Mandatory Convertible Bonds.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

**33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (Continued)**

31 Desember 2016 / December 31, 2016						
Nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto / Contractual undiscounted cash flows amounts						
Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Lebih dari 1 tahun					
	Total/ Total	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
Utang usaha dan utang lain-lain	377,871	377,871	377,871	-	-	Trade and other payables
Beban akrual	2,546,179	2,546,179	2,546,179	-	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Current maturities of Long-term Liabilities
Pinjaman	240	240	240	-	-	Loans
Wesel senior	5,105,680	5,105,680	-	-	5,105,680	Senior notes
Pinjaman jangka panjang						Long-term loans
Pinjaman	295	295	-	295	-	Loans
Utang pihak berelasi	47,098	47,098	47,098	-	-	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	7,156,994	7,156,994	-	-	7,156,994	Settlement of payables through PKPU
Total	15,234,357	15,234,357	2,971,388	295	12,262,674	Total
31 Desember 2015 / December 31, 2015						
Nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto / Contractual undiscounted cash flows amounts						
Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Lebih dari 1 tahun					
	Total/ Total	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
Utang usaha dan utang lain-lain	308.939	308.939	308.939	-	-	Trade and other payables
Beban akrual	1.908.413	1.908.413	1.908.413	-	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Current maturities of Long-term Liabilities
Pinjaman	501	501	501	-	-	Loans
Wesel senior - neto	5.242.100	5.242.100	5.242.100	-	-	Senior notes - net
Pinjaman jangka panjang						Long-term loans
Pinjaman	759	759	-	759	-	Loans
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	47.098	-	-	Due to a related party
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	7.197.152	2.745.643	-	2.655.576	90.067	Settlement of payables through PKPU
Total	14.704.962	10.253.453	7.507.051	2.656.335	90.067	Total

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN *(Lanjutan)*

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Kelompok Usaha adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Kelompok Usaha mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Kelompok Usaha akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Kelompok Usaha memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal dimana total utang dibagi dengan total modal. Total utang ini adalah utang pokok dari pinjaman yang berbunga dan total modal adalah total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES *(Continued)*

Capital Management

The main objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Group may adjust the amount of dividend payments to shareholders, return capital structure or issue shares certificates. No changes have been made in the objectives, policies and processes as they have been applied in previous years.

The Group monitors its use of capital structure using a debt-to-equity ratio which is total debt divided by total equity. Total debt represents interest bearing borrowings, while equity represents total equity attributable to owners of the parent.

34. RUGI NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

34. LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF PARENTS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Rugi neto diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(1,392,143)	(8,640,755)	<i>Net loss attributable to the owners of parents</i>
Jumlah rata-rata tertimbang saham per saham dasar (angka penuh)	<u>30,584,590,655</u>	<u>30,584,590,655</u>	<i>Weighted average number of ordinary shares (full amount)</i>
Rugi Per Saham Dasar (dalam satuan penuh)	<u>(45.52)</u>	<u>(282.52)</u>	<i>Basic Loss Per Share (in full amount)</i>

35. INFORMASI SEGMENT

Kelompok Usaha hanya mempunyai satu segmen usaha yaitu jasa telekomunikasi yang dipertimbangkan sebagai segmen primer.

Rincian pendapatan jasa telekomunikasi berdasarkan jenis jasa layanan adalah sebagai berikut:

35. SEGMENT INFORMATION

The Group has only one business segment, i.e. telecommunication services, which are considered as a primary segment.

The details of revenues based on the service type were as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pendapatan pemakaian pulsa	136.333	512.681	<i>Usage charge</i>
Pendapatan langganan bulanan	1.891	10.510	<i>Subscription</i>
Pendapatan jasa penyambungan	-	1.129	<i>Connection service</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	<u>3.104</u>	<u>9.638</u>	<i>Others (each below Rp1 billion)</i>
Total	<u>141.328</u>	<u>533.958</u>	<i>Total</i>

36. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 1999 tanggal 8 September 1999 tentang "Telekomunikasi" dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang "Penyelenggaraan Telekomunikasi", tarif untuk penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh operator berdasarkan jenis dan struktur tarif serta mempertimbangkan formula batasan harga yang ditentukan oleh pemerintah.

Tarif Telepon Tetap Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 Tahun 2004 tanggal 11 Maret 2004, tentang "Tarif Telepon Tetap Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas", susunan tarif jasa telekomunikasi teleponi dasar jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, terdiri dari:

1. Tarif jasa pascabayar, terdiri dari:
 - a) Biaya aktivasi
 - b) Biaya bulanan
 - c) Biaya penggunaan
 - d) Biaya fasilitas tambahan
2. Tarif jasa prabayar, terdiri dari:
 - a) Biaya aktivasi
 - b) Biaya penggunaan
 - c) Biaya fasilitas tambahan

Tarif telepon tetap dikenakan pada akses dan pemakaian jaringan. Biaya akses terdiri dari biaya aktivasi yang dibebankan satu kali dan biaya langganan bulanan. Biaya penggunaan dihitung dalam Rupiah per menit dan dikategorikan sebagai sambungan lokal atau jarak jauh. Besarnya tarif tergantung pada jarak percakapan, lama percakapan, waktu percakapan dan hari-hari tertentu dalam seminggu dan hari libur.

Tanggal 30 April 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan No.15/Per/M.KOMINFO/4/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap, yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap. Berdasarkan peraturan tersebut, penentuan tarif dasar harus berdasarkan formula biaya.

Biaya penggunaan yang dibebankan kepada pelanggan yang menghubungi pelanggan lain adalah sebagai berikut:

36. TELECOMMUNICATIONS TARIFFS

Under Law No. 36 Year 1999 dated September 8, 1999 regarding "Telecommunication" and Government Regulation No. 52 year 2000 dated July 11, 2000 regarding "Operation of Telecommunication," tariffs for the use of telecommunication network and telecommunication services are determined by providers based on the structure and tariff category with consideration of a price formula set by the government.

Tariff of Telephone for Wireless Fixed Line with Limited Mobility

Based on Decree of Ministry of Transportation No. KM.35 Year 2004, dated March 11, 2004 regarding the "Tariff of Telephone for Wireless Fixed Line with Limited Mobility," the structure of tariffs for Fixed Wireless Access with Limited Mobility is as follows:

1. *Tariffs for post-paid services are as follows:*
 - a) *Activation fee*
 - b) *Subscription fee*
 - c) *Usage charge*
 - d) *Additional facilities fee*
2. *Tariffs for prepaid services are as follows:*
 - a) *Activation fee*
 - b) *Usage charge*
 - c) *Additional facilities fee*

The tariff for fixed line is charged to network access and usage charge. Access fee includes activation fee, which is charged only once, and a monthly subscription fee. Usage charge is in Rupiah per minute and is categorized as local or long-distance calls. The tariff amount depends on call distance, call duration, call time and special days in a week and holidays.

On April 30, 2008, the Ministry of Communications and Information issued Regulation No. 15/Per/M.KOMINFO/4/2008 regarding Procedure for Stipulation of Basic Telephone Service Tariff for Fixed Network, which revoked the previous Regulation of the Ministry of Communication and Information Number:09/Per/M.KOMINFO/02/2006 regarding Procedure and Initial Stipulation of Tariff Rate Change Basic Telephony Services for Fixed Network. Based on this regulation, the determination of basic tariff should be based on a cost-based formula.

The usage charges to customers making a call to other customers were as follows:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

36. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (Lanjutan)

Jenis Panggilan	Satuan Penuh / Full Amount		Type of Calls
	Pasca Bayar (Rp/menit)/ Post-Paid (Rp/minute)	Pra Bayar (Rp/menit)/ Pre-Paid (Rp/minute)	
Telepon rumah			Fixed-line
Lokal	250	250	Local
Antar kota:			Inter-city:
- Zona <200 km	1,000	1,000	Zone <200 km -
- Zona >200 km	2,091	2,273	Zone >200 km -
Selular			Mobile
Lokal	636	800	Local
Antar kota:			Inter-city:
- Zona < 200 km	1,727	1,545	Zone < 200 km -
- Zona > 200 km	2,545	2,727	Zone > 200 km -

Tanggal 8 Februari 2006, diberlakukan ketentuan baru interkoneksi yang mengatur bahwa penentuan tarif interkoneksi harus berdasarkan formula biaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006. Sejak tanggal 1 Januari 2007, Perusahaan menggunakan perhitungan tarif interkoneksi berbasis biaya untuk perhitungan transaksi interkoneksi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kominfo No. PM.08/Per/M.KOMINFO/02/ 2006.

Perhitungan tarif interkoneksi dari masing-masing penyelenggara dilakukan dengan menggunakan formula berbasis biaya sebagaimana ditetapkan dalam PM. 08/2006. Perusahaan mengadakan Nota Kesepakatan tentang kerjasama interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan, baik penyelenggara jaringan tetap lainnya maupun penyelenggara jaringan selular.

37. INTERKONEKSI

Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, maka panggilan yang berasal dari Perusahaan ke operator lainnya (originasi) menimbulkan "beban interkoneksi" yang dibebankan kepada Perusahaan (originator) yang melakukan panggilan. Sementara itu, panggilan yang berasal dari operator lainnya ke Perusahaan (terminasi), menimbulkan "pendapatan interkoneksi" yang dibebankan kepada operator lain yang melakukan panggilan.

Berdasarkan Siaran Pers oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 30 Desember 2010 No. 145/PIH/KOMINFO/12/2010, pada awal tahun 2011 akan diberlakukan penurunan tarif interkoneksi. Kebijakan implementasi tarif interkoneksi tahun 2011 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/2/2006.

Berdasarkan hasil evaluasi BRTI tersebut, besaran biaya interkoneksi yang berlaku mulai tahun 2011 adalah sebagai berikut:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. TELECOMMUNICATIONS TARIFFS (Continued)

On February 8, 2006, a new interconnection regulation was introduced that regulates interconnection tariff based on a cost-based formula as in Ministry Decree No.08/Per/M.KOMINFO/02/2006. Commencing January 1, 2007, the Company used the cost-based calculation for interconnection transactions in accordance with Ministry Cominfo Decree No.PM.08/Per/M.KOMINFO/02/ 2006.

The calculation of interconnection cost from each telecommunication operator is based on a cost-based formula as stated in PM. 08/2006. The Company had an Agreement Note of cooperative interconnection between telecommunication networks with fixed network or cellular network.

37. INTERCONNECTION

Based on the Agreement Note, the calls from the Company to another operator (origination) will incur an "interconnection expense" that is chargeable to the Company (originator) who made the call. On the other hand, the calls from another operator to the Company (termination), will incur an "interconnection revenue" that is chargeable to the other operator who made the call.

Based on a press release dated December 30, 2010 by the Ministry of Communications and Information No. 145/PIH/KOMINFO/12/2010, reduction in interconnection tariff was to be applied in 2011. This was in accordance with applicable provisions in the Regulation of the Ministry of Information and Communication No. 8/PER/M.KOMINFO/2/2006.

Based on BRTI evaluation, the interconnection costs for year 2011 were as follows:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INTERKONEKSI (Lanjutan)

37. INTERCONNECTION (Continued)

Jenis Panggilan	Satuan Penuh / Full Amount		Type of Calls
	Beban Interkoneksi (Originasi)/ Interconnection Charge (Origination)/	Pendapatan Interkoneksi (Terminasi)/ Interconnection Revenue (Termination)/	
Selular SLJJ			Mobile long-distance call
- Interkoneksi langsung	Rp344 per menit / Rp344 per minute	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Direct interconnection -
- Melalui transit	Rp586 per menit / Rp586 per minute	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Through transit -
Jaringan PSTN			PSTN Network
PSTN lokal			PSTN local
Fixed WL	Rp73 per menit / Rp73 per minute	Rp73 per menit / Rp73 per minute	Fixed WL
FWA	Rp135 per menit / Rp135 per minute	Rp211 per menit / Rp211 per minute	FWA
Selular	Rp202 per menit / Rp202 per minute	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Mobile
Satelit	Rp208 per menit / Rp208 per minute	Rp278 per menit / Rp278 per minute	Satellite
VOIP	Rp302 per menit / Rp302 per minute	-	VOIP
PSTN SLJJ			Long-distance call
FWA	Rp586 per menit / Rp586 per minute	Rp202 per menit / Rp202 per minute	FWA
Selular	Rp665 per menit / Rp665 per minute	Rp211 per menit / Rp211 per minute	Mobile
Satelit	Rp674 per menit / Rp674 per minute	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Satellite
VOIP	Rp626 per menit / Rp626 per minute	Rp585 per menit / Rp585 per minute	VOIP
SLI	Rp624 per menit / Rp624 per minute	Rp594 per menit / Rp594 per minute	International call
Melalui transit			Through transit
Lokal Fixed WL	Rp68 per menit / Rp68 per minute	-	Local
SLJJ Fixed WL	Rp263 per menit / Rp263 per minute	-	Long-distance call
IGW Fixed WL	Rp304 per menit / Rp304 per minute	-	IGW
Jaringan FWA			FWA Network
PSTN lokal			Local
Fixed WL	Rp73 per menit / Rp73 per minute	Rp73 per menit / Rp73 per minute	Fixed WL
FWA	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Rp211 per menit / Rp211 per minute	FWA
Selular	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Mobile
Satelit	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Satellite
VOIP	Rp289 per menit / Rp289 per minute	-	VOIP
PSTN SLJJ			Long-distance call
FWA	Rp427 per menit / Rp427 per minute	Rp211 per menit / Rp211 per minute	FWA
Selular	Rp602 per menit / Rp602 per minute	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Mobile
Satelit	Rp638 per menit / Rp638 per minute	Rp585 per menit / Rp585 per minute	Satellite
VOIP	Rp640 per menit / Rp640 per minute	-	VOIP
SLI			SLI
Satelit	Rp640 per menit / Rp640 per minute	-	Satelit
SMS	Rp 24 per SMS / Rp 24 per SMS	Rp 24 per SMS / Rp 24 per SMS	SMS

Jenis Panggilan	Satuan Penuh / Full Amount		Type of Calls
	Beban Interkoneksi (Originasi)/ Interconnection Charge (Origination)/	Pendapatan Interkoneksi (Terminasi)/ Interconnection Revenue (Termination)/	
PSTN SLJJ			Long-distance call
FWA	Rp427 per menit / Rp427 per minute	Rp211 per menit / Rp211 per minute	FWA
Selular	Rp602 per menit / Rp602 per minute	Rp209 per menit / Rp209 per minute	Mobile
Satelit	Rp638 per menit / Rp638 per minute	Rp585 per menit / Rp585 per minute	Satellite
VOIP	Rp640 per menit / Rp640 per minute	-	VOIP
SLI			SLI
Satelit	Rp640 per menit / Rp640 per minute	-	Satelit
SMS	Rp 24 per SMS / Rp 24 per SMS	Rp 24 per SMS / Rp 24 per SMS	SMS

Efektif tanggal 1 Juni 2012, Perusahaan menerapkan skema interkoneksi berbasis biaya (*cost-based*) untuk setiap pesan singkat (SMS) yang terkirim dari sebelumnya berbasis *Sender Keep All* (SKA).

Effective June 1, 2012, the Company implemented a *cost-based interconnection scheme (cost-based)* for every SMS sent to replace the previous *Sender Keep All (SKA)* scheme.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

37. INTERKONEKSI (Lanjutan)

Biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010 sebesar Rp24 per SMS, sedangkan tarif yang menjadi beban konsumen adalah biaya interkoneksi ditambah dengan beberapa komponen biaya lainnya.

Berdasarkan surat No.118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tanggal 30 Januari 2014, perihal implementasi biaya interkoneksi tahun 2014, ditetapkan biaya interkoneksi yang berlaku sampai dengan Desember 2016.

Besaran biaya interkoneksi yang berlaku mulai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INTERCONNECTION (Continued)

The SMS interconnection costs based on the result of the calculation of interconnection rate in 2010 amounted to Rp24 per SMS, while tariff charged to customers was based on the interconnection cost plus several other component costs.

Based on letter No.118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 dated January 30, 2014, from the Ministry of Communications and Information, concerning interconnection costs implementation year 2014, the new interconnection costs is set until December 2016.

The interconnection costs for year 2014 were as follows:

Jenis Panggilan	Satuan Penuh / Full Amount		Type of Calls
	Beban Interkoneksi (Originasi)/ Interconnection Charge (Origination)/	Pendapatan Interkoneksi (Terminasi)/ Interconnection Revenue (Termination)/	
Jaringan Tetap Nirkabel			Fixed Wireless Access (FWA)
Panggilan Lokal			Local Call
- Tetap (PSTN)	Rp 73 per menit / Rp 73 per minute	Rp 73 per menit / Rp 73 per minute	Fixed -
- Tetap Nirkabel	Rp 209 per menit / Rp 209 per minute	Rp 209 per menit / Rp 209 per minute	FWA -
- Selular	Rp 209 per menit / Rp 209 per minute	Rp 209 per menit / Rp 209 per minute	Mobile -
- Satelit	Rp 209 per menit / Rp 209 per minute	Rp 209 per menit / Rp 209 per minute	Satellite -
- VoIP	Rp 289 per menit / Rp 289 per minute	Rp 289 per menit / Rp 289 per minute	VoIP -
Panggilan Interlokal (SLJJ)			Long Distance
- Tetap (PSTN)	Rp 427 per menit / Rp 427 per minute	Rp 427 per menit / Rp 427 per minute	Fixed -
- Tetap Nirkabel	Rp 427 per menit / Rp 427 per minute	Rp 427 per menit / Rp 427 per minute	FWA -
- Selular	Rp 602 per menit / Rp 602 per minute	Rp 602 per menit / Rp 602 per minute	Mobile -
- Satelit	Rp 638 per menit / Rp 638 per minute	Rp 638 per menit / Rp 638 per minute	Satellite -
- VoIP	Rp 640 per menit / Rp 640 per minute	Rp 640 per menit / Rp 640 per minute	VoIP -
Panggilan Internasional (SLI)	Rp 640 per menit / Rp 640 per minute	Rp 640 per menit / Rp 640 per minute	International Call
SMS	Rp 24 per SMS / Rp 24 per SMS	Rp 24 per SMS / Rp 24 per SMS	SMS
Jaringan Tetap (PSTN)			PSTN Networks
Panggilan Lokal			Local Call
- Tetap (PSTN)	Rp 73 per menit / Rp 73 per minute	Rp 73 per menit / Rp 73 per minute	Fixed -
- Tetap Nirkabel	Rp 135 per menit / Rp 135 per minute	Rp 135 per menit / Rp 135 per minute	FWA -
- Selular	Rp 202 per menit / Rp 202 per minute	Rp 202 per menit / Rp 202 per minute	Mobile -
- Satelit	Rp 208 per menit / Rp 208 per minute	Rp 208 per menit / Rp 208 per minute	Satellite -
- VoIP	Rp 302 per menit / Rp 302 per minute	Rp 302 per menit / Rp 302 per minute	VoIP -
- Melalui transit	Rp 68 per menit / Rp 68 per minute	-	Through transit -
Panggilan Interlokal (SLJJ)			Long Distance
- Tetap (PSTN)	Rp 586 per menit / Rp 586 per minute	Rp 586 per menit / Rp 586 per minute	Fixed -
- Tetap Nirkabel	Rp 586 per menit / Rp 586 per minute	Rp 586 per menit / Rp 586 per minute	FWA -
- Selular	Rp 665 per menit / Rp 665 per minute	Rp 665 per menit / Rp 665 per minute	Mobile -
- Satelit	Rp 674 per menit / Rp 674 per minute	Rp 674 per menit / Rp 674 per minute	Satellite -
- VoIP	Rp 626 per menit / Rp 626 per minute	Rp 626 per menit / Rp 626 per minute	VoIP -
- Melalui transit	Rp 263 per menit / Rp 263 per minute	-	Through transit -
Panggilan Internasional (SLI)	Rp 624 per menit / Rp 624 per minute	Rp 624 per menit / Rp 624 per minute	International Call
Transit Melalui IGW	Rp 304 per menit / Rp 304 per minute	-	Through IGW transit -
SMS Transit	Rp 0.8 per SMS / Rp 0.8 per SMS	-	SMS Transit
Jaringan Selular			Mobile
Panggilan Lokal			Local Call
- Tetap	Rp 250 per menit / Rp 250 per minute	Rp 250 per menit / Rp 250 per minute	Fixed -
- Selular	Rp 250 per menit / Rp 250 per minute	Rp 250 per menit / Rp 250 per minute	Mobile -
- Satelit	Rp 250 per menit / Rp 250 per minute	Rp 250 per menit / Rp 250 per minute	Satellite -
Panggilan Interlokal (SLJJ)			Long Distance
- Tetap	Rp 344 per menit / Rp 344 per minute	Rp 344 per menit / Rp 344 per minute	Fixed -
- Selular	Rp 452 per menit / Rp 452 per minute	Rp 452 per menit / Rp 452 per minute	Mobile -
- Satelit	Rp 456 per menit / Rp 456 per minute	Rp 456 per menit / Rp 456 per minute	Satellite -
Panggilan Internasional (SLI)	Rp 488 per menit / Rp 488 per minute	Rp 488 per menit / Rp 488 per minute	International Call
SMS	Rp 24 per SMS / Rp 24 per SMS	Rp 24 per SMS / Rp 24 per SMS	SMS
Jaringan Satelit			Satellite
- Tetap	Rp 3.462 per menit / Rp 3,462 per minute	Rp 3.462 per menit / Rp 3,462 per minute	Fixed -
- Selular	Rp 3.462 per menit / Rp 3,462 per minute	Rp 3.462 per menit / Rp 3,462 per minute	Mobile -
- Panggilan Internasional (SLI)	Rp 3.462 per menit / Rp 3,462 per minute	Rp 3.462 per menit / Rp 3,462 per minute	International Call -

38. LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI

38. TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE

a. Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan bergerak Seluler

Pada tanggal 17 April 2015, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 186 tahun 2015 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler PT Bakrie Telecom Tbk". Lisensi ini diberikan untuk menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak seluler dengan Wilayah Penyelenggaraan Nasional. Izin ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap lima (5) tahun.

b. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

Pada tanggal 25 Agustus 2004, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dengan Akses Radio dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP.282 tahun 2004 tentang "Lisensi untuk Jaringan Tetap Lokal dengan Akses Radio dan Jasa Teleponi Dasar PT Bakrie Telecom". Lisensi ini diberikan untuk menyelenggarakan (i) Jaringan Tetap Lokal dengan alokasi frekuensi 825 Mhz - 835 Mhz berpasangan dengan 870 Mhz - 880 Mhz dan (ii) Jasa Teleponi Dasar dengan wilayah layanan di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dengan akses radio dan jasa teleponi dasar, sesuai dengan Peraturan No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Pada tanggal 15 Juni 2007, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 298/KEP/M.KOMINFO/6/2007. Izin tersebut diberikan untuk menyelenggarakan: (i) Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas yang beroperasi pada pita frekuensi 800 MHz, yaitu pada kanal 37, 78 dan 119 di Propinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat; kanal 201, 242 dan 283 untuk di luar Propinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat; dan (ii) Jasa Teleponi Dasar dengan jangkauan nasional yang mencabut lisensi regional sebelumnya No.KP.282 tahun 2004.

Pada tanggal 14 Oktober 2009, Pemerintah menetapkan penambahan alokasi kanal frekuensi radio dengan nomor kanal 1019 untuk wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat kepada Perusahaan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.363/Kep/ M.KOMINFO/X/2009.

a. License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network

On April 17, 2015, the Company obtained Operational License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network based on the Decree of Director General of Post and Information No. 186 year 2015 regarding "License for the Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network PT Bakrie Telecom Tbk". This license was granted for Basic Telephony Services through cellular mobile network with national service area coverage. The license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years.

b. License for Fixed Wireless Access with Limited Mobility

On August 25, 2004, the Company obtained Operational License for Local Fixed Network with Radio Access License and Basic Telephony Service based on the Decree of Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia No. KP.282 year 2004 regarding "License for the Local Fixed Line with Radio Access and Basic Telephony Services PT Bakrie Telecom." This license was granted for (i) Local Fixed network with frequency allocation of 825 Mhz - 835 Mhz and pair-off with 870 Mhz-880 Mhz, and (ii) Basic Telephone Service covering DKI Jakarta, West Java and Banten provinces. This Local Fixed Network service with Radio Access and Basic Telephone Service is in accordance with Law No. 36/1999 of Telecommunication.

On June 15, 2007, the Company was granted an Operational License for Fixed Wireless Access with Limited Mobility based on the Decree of the Ministry of Communication and Information Republic of Indonesia No. 298/KEP/M.KOMINFO/6/2007. The license was granted for (i) Fixed Wireless Access with Limited Mobility frequency bandwidth of 800 Mhz with channel number 37, 78 and 119 in Banten, DKI Jakarta and West Java provinces; Channel 201, 242 and 283 for outside Banten, DKI Jakarta, Banten and West Java; (ii) Basic Telephony Service with nationwide coverage, which revoked the previous regional license No. KP.282 year 2004.

On October 14, 2009, the Government determined additional frequency channel allocation number 1019 for DKI Jakarta, Banten and West Java Area, as stated in Decree of Ministry of Communication and Information No. 363/Kep/M.KOMINFO/X/2009.

38. LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI

(Lanjutan)

Pada tanggal 10 September 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Dengan peraturan ini maka Pita frekuensi radio 800 MHz pada 824-835 MHz yang berpasangan dengan 869-880 MHz; serta 880-890 MHz yang berpasangan dengan 925-935 MHz dengan moda FDD, diperuntukan seluruhnya bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Berbasis Netral Teknologi dengan cakupan wilayah layanan nasional.

Pada tanggal 26 September 2014, Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 932 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT Bakrie Telecom, Tbk. Kepada PT Smartfren Telecom, Tbk., dengan pengalihan spektrum pita frekuensi dimaksud efektif mulai berlaku terhitung sejak tanggal 14 Desember 2014. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mempersyaratkan Penggabungan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PT Bakrie Telecom Tbk. Dan PT Smartfren Tbk., sehingga PT Bakrie Telecom Tbk. tetap dapat memberikan Layanan Jasa Teleponi Dasar kepada seluruh pelanggannya.

c. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional (SLI)

Pada tanggal 12 Februari 2009, Perusahaan memperoleh izin untuk menyelenggarakan SLI dan jasa teleponi dasar, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 59/KEP/M.KOMINFO/02/2009 tentang "Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional PT Bakrie Telecom Tbk". Izin penyelenggaraan SLI ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun.

d. Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)

Pada tanggal 23 Januari 2006, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, No. 16/Dirjen/2006 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik PT Bakrie Telecom Tbk". ITKP ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun. Evaluasi terbaru dibuat pada tahun 2011.

38. TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE

(Continued)

On September 10, 2014, the Government issued the Regulation of the Ministry of Communication and Information Republic of Indonesia No. 30 Year 2014 concerning Settlement Radio Frequency Band of 800 MHz for the Need Mobile Cellular Network. With this ruling, therefore the radio frequency band of 800 MHz from 824-835 MHz was paired with 869-880 MHz, and 880-890 MHz was paired with 925-935 MHz with FDD mode, intended entirely for Mobile Cellular Network Based 'Neutral' Technology with national service area coverage.

On September 26, 2014, the Government issued Decree of the Minister of Communication and Information No. 932 Year 2014 regarding the approval of Transfer of License Use of Radio Frequency Spectrum at 800 MHz Radio Frequency Band PT Bakrie Telecom Tbk. to PT Smartfren Telecom, Tbk., with the transfer of the frequency band spectrum effectively coming into force as from December 14, 2014. The Minister of Communication and Information, would require the Merger Implementation of Telecommunication Network PT Bakrie Telecom Tbk. and PT Smartfren Tbk., therefore PT Bakrie Telecom Tbk. would still provide basic telephony services to all of its customers.

c. License for Operation of Fixed International Direct Connection Network (SLI)

On February 12, 2009, the Company obtained a license for SLI and basic telephony service, based on Decree of the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia No. 59/KEP/M.KOMINFO/02/2009 regarding "License for Operation of Fixed International Direct Connection Network PT Bakrie Telecom, Tbk." The SLI will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years.

d. License to Operate Internet Telephony Services for Public Interest (VoIP)

On January 23, 2006, the Company obtained License to Operate Internet Telephony Services for Public Interest (VoIP) with nationwide coverage, based on Decree of Director General of Post and Telecommunication, Department of Communication and Information No. 16/Dirjen/2006 regarding "License to Operate Internet Telephony Services for Public Interest PT Bakrie Telecom Tbk." The VoIP will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. The most recent evaluation was conducted in 2011.

38. LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI
(Lanjutan)

e. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP)

Pada tanggal 2 Maret 2007, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 053/DIRJEN/2007 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet PT Bakrie Telecom Tbk". Izin penyelenggaraan jasa ISP ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun. Evaluasi terbaru dibuat pada tahun 2012.

f. Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP)

Pada tanggal 7 Juni 2010, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point Provider/NAP*) dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 195/DIRJEN/2010 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet PT Bakrie Telecom Tbk". Izin NAP ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun.

g. Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi

Pada tanggal 5 Agustus 2009, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa *Call Center* dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 184/DIRJEN/2009 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi PT Bakrie Telecom Tbk". Izin ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun.

39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

Perusahaan memiliki perjanjian dan ikatan yang signifikan, sebagai berikut:

a. PT Indosat Tbk

Pada tanggal 18 Desember 2007, Perusahaan dan PT Indosat Tbk (Indosat) mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jarbersel INDOSAT dengan Jartaplok BAKRIE TELECOM No. INDOSAT 0003/C00-CC0/LGL/2007 dan Jartaplok BAKRIE TELECOM No. 2392/EST-PKS/INDOSAT/XII/2007 dan Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jartap INDOSAT dengan Jartaplok BAKRIE TELECOM No. INDOSAT0006/C00-CC0/LGL/2007 serta No. BAKRIETEL2500/EST-PKS/INDOSAT/XII/2007. Perjanjian tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

38. TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE
(Continued)

e. License for Operation of Internet Service Provider (ISP)

On March 2, 2007, the Company obtained a License for Operational Internet Service Provider with nationwide coverage, based on Decision Letter of the Director General Post and Telecommunication No. 053/DIRJEN/2007 regarding "License for Operation of Internet Service Provider PT Bakrie Telecom Tbk." The ISP license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. The most recent evaluation was conducted in 2012.

f. License for Operation of Network Access Point Provider (NAP)

On June 7, 2010, the Company obtained a License for Operational Network Access Point Provider with nationwide coverage based on Decision Letter of the Director General Post and Telecommunication No. 195/DIRJEN/2010 regarding "License for Operation of Network Access Point Provider PT Bakrie Telecom Tbk." The NAP license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years.

g. License for Operation of Call Center Service Provider

On August 5, 2009, the Company obtained a License for Operation of Call Center Service Provider with nationwide coverage, based on Decree of the Director General Post and Telecommunication No. 184/DIRJEN/2009 regarding "License for Operation of Call Center Service Provider PT Bakrie Telecom Tbk." The license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

The Company had outstanding significant agreements and commitments as follows:

a. PT Indosat Tbk

On December 18, 2007, the Company and PT Indosat Tbk (Indosat) signed a Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network Jarbersel INDOSAT with Jartaplok BAKRIE TELECOM No. INDOSAT 0003/C00-CC0/LGL/2007 and Jartaplok BAKRIE TELECOM No. 2392/EST-PKS/INDOSAT/XII/2007 and Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network Jartap INDOSAT with Jartaplok BAKRIE TELECOM No. INDOSAT 0006/C00-CC0/LGL/2007 and No. BAKRIETEL2500/EST-PKS/INDOSAT/XII/2007. The agreement covered the following, among others:

**39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

- Interkoneksi antara jaringan bergerak Selular Indosat dengan jaringan tetap lokal Perusahaan dan jaringan tetap Indosat dengan jaringan tetap lokal Perusahaan sehingga setiap pengguna masing-masing pihak dapat mengadakan atau menerima panggilan interkoneksi dan dapat juga mengirim dan menerima SMS ke/atau dari setiap pengguna pihak lainnya;
- Besarnya biaya interkoneksi adalah sesuai dengan lalu lintas interkoneksi antara Indosat dengan Perusahaan;
- Perjanjian-perjanjian tersebut berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, maka perjanjian ini akan tetap berlaku secara otomatis.

Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama, maka perjanjian-perjanjian interkoneksi yang telah ditandatangani sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jarbersel INDOSAT dengan Jartaplok BAKRIE TELECOM tersebut telah diperbaharui dengan amandemen keempat yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2011 No. INDOSAT 035/C00-C0H/LGL/2011 dan No. BAKRIE TELECOM 5542/EST-Amd/INDOSAT/X/2011.

Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jartap INDOSAT dengan Jartaplok BAKRIE TELECOM tersebut telah diperbaharui dengan amandemen ketiga yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2011 No. INDOSAT 036/C00-C0H/LGL/2011 dan No. BAKRIE TELECOM 5543/EST-Amd/INDOSAT/X/2011.

b. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) No. TELKOM 148/HK.810/DCI-A1000000/2007 dan No. BAKRIE TELECOM 2501/EST-PKS/TELKOM/XII/2007, dimana masing-masing pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Saling membuka seluruh prefiks dan/atau kode akses, sehingga setiap pelanggan dari kedua pihak dapat memanggil dan/atau menerima panggilan dari nomor pelanggan pihak lainnya memanfaatkan fitur-fitur atas panggilan interkoneksi, mengakses atau memanfaatkan berbagai jenis jasa telepon pada operator lainnya;

**39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

- *Interconnection between mobility network Indosat Cellular with the Company's local fixed line and interconnection of Indosat's fixed line with the Company's local fixed line, whereby the users are able to make or receive interconnection call and also send and receive SMS too from other users;*
- *Total interconnection expenses are according to traffic interconnection between Indosat and the Company;*
- *The agreement is effective from the signing date by both parties. If there are no amendments to or termination of this Cooperation Agreement, then it will remain in effect automatically.*

With the signing of the Cooperation Agreement, the previous interconnection agreement was no longer effective.

The agreement of Interconnection Telecommunication Network Jarbersel INDOSAT with Jartaplok BAKRIE TELECOM was renewed with the fourth amendment that was signed on October 7, 2011 No. INDOSAT 035/C00-C0H/LGL/2011 and No. BAKRIE TELECOM 5542/EST-Amd/INDOSAT/X/2011.

The agreement of Interconnection Telecommunication Network Jartap INDOSAT with Jartaplok BAKRIE TELECOM was renewed with the third amendment that was signed on October 7, 2011 No. INDOSAT 036/C00-C0H/LGL/2011 and No. BAKRIE TELECOM 5543/EST-Amd/INDOSAT/X/2011.

b. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

The Company has a Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network with PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) No. TELKOM 148/HK.810/DCI-A1000000/2007 and No. BAKRIE TELECOM 2501/EST-PKS/TELKOM/XII/2007 under which each party agrees as follows:

- *Opening all prefix and/or access codes, so each customer from either party can make and/or receive calls from other operator numbers, using features of interconnection call, accessing or using telephone services of other operators;*

39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

(Lanjutan)

- Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi tanggal 28 Desember 2007 antara Perusahaan dengan Telkom tersebut, maka perjanjian-perjanjian kerja sama interkoneksi beserta semua perubahan/*side letter*/adendum atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Perjanjian dengan Telkom berlaku selama dua (2) tahun, efektif mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk amandemen/*side letter*.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan adendum pertama yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2008 No. TELKOM 46/HK.820/DCI-A1000000/2008 dan No. BAKRIE TELECOM 388/EST-Amd/TELKOM/III/2008 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum kedua yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2009 No. TELKOM 127/HK.820/DCI-A1000000/2009 dan No. BAKRIE TELECOM 2444/EST-Amd/TELKOM/XII/2009 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum ketiga yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2011 No. TELKOM 193/HK.820/DCI-A1000000/2011 dan No. BAKRIE TELECOM 5228/EST-AMD/TELKOM/VII/2011 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum keempat yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2012 No. TELKOM 126/HK.820/DWS-A1000000/2012 dan No. BAKRIE TELECOM 610/BTEL-AMD/TELKOM/XII/2012.

c. PT XL Axiata Tbk (sebelumnya PT Excelcomindo Pratama Tbk)

1. Perusahaan menandatangani *Master Tower Lease Agreement (MLTA)* dengan PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) tertanggal 16 Juli 2008 mengenai sewa ruang atas satu atau lebih menara telekomunikasi BTS milik XL untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang akan digunakan untuk operasional usaha Perusahaan. Sejak tanggal 1 November 2012 Perusahaan menghentikan kerja sama MLTA. Atas terminasi ini, Perusahaan dikenakan biaya terminasi sebesar Rp163,2 miliar.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

(Continued)

- *With the signing of the Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network between Company and Telkom dated December 28, 2007, the cooperation agreement of interconnection and all the amendments/side letters/addendum previously signed were no longer effective.*
- *Agreement with Telkom was effective for two (2) years, from January 1, 2008 to December 31, 2009 and could be extended or ended before the expiry date based on agreement from both parties in the form of an amendment/side letter.*

The agreement was renewed with the first amendment that was signed on March 31, 2008 No. TELKOM 46/HK.820/DCI-A1000000/2008 and No. BAKRIE TELECOM 388/EST-Amd/TELKOM/III/2008, which was then renewed with the second amendment signed on December 30, 2009 No. TELKOM 127/HK.820/DCI-A1000000/2009 and No. BAKRIE TELECOM 2444/EST-Amd/TELKOM/XII/2009, which was then renewed with the third amendment signed on August 28, 2011 No. TELKOM 193/HK.820/DCI-A1000000/2011 and No. BAKRIE TELECOM 5228/EST-AMD/TELKOM/VII/2011, which was then renewed with the fourth amendment signed on December 18, 2012 No. TELKOM 126/HK.820/DWS-A1000000/2012 and No. BAKRIE TELECOM 610/BTEL-AMD/TELKOM/XII/2012.

c. PT XL Axiata Tbk (formerly PT Excelcomindo Pratama Tbk)

1. *The Company entered into a Master Tower Lease Agreement (MLTA) with PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) dated July 16, 2008 regarding the lease of space on one or more BTS Towers owned by XL and ground space of the property for the placement of the Company communication equipment to be used in the operation of the Company's business. On November 1, 2012, the Company terminated the MLTA. Due to the termination, the Company was charged the termination costs amounting to Rp163.2 billion.*

39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

(Lanjutan)

- Interkoneksi langsung antara jaringan Bakrie Telecom dengan jaringan Excelcom sehingga setiap pengguna masing-masing dapat mengirim atau menerima panggilan atau SMS dari pelanggan masing-masing perusahaan;
- Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan interkoneksi Excelcom atas panggilan keluar sesuai dengan hak Excelcom berdasarkan peraturan pemerintah serta perjanjian diatas; dan
- Perjanjian interkoneksi berlaku efektif sejak tanggal 19 Desember 2007 dan akan berlaku selama jangka waktu lima (5) tahun.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan amandemen kelima yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2012 No. XL:006/LGL-TBU-CR/HAY/V/2012 dan No. BAKRIE TELECOM: 662/BTEL-Amd/XL/VI/2012.

2. Pada tanggal 14 April 2009, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama "Interkoneksi Sumbangan Langsung Internasional" dengan XL No. XL 1838.A/XXXII.S.5360/XL/IV/2009 dan No. BTEL 637/EST-PKS/XL/IV/2009.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan amandemen pertama yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2011 No. XL: 256/LGL-NetCo/X/2011 dan No. BTEL 5578/EST-AMD/XL/X/2011.

d. PT Telekomunikasi Selular

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan dengan Telkomsel dengan Jaringan Tetap Lokal Bakrie Telecom No. Telkomsel : 2162/LG.05/PD-00/XI/2007 dan No. Bakrie Telecom 1408/EST-PKS/TELKOMSEL/XI/ 2007, yang bertujuan mengganti perjanjian yang lama yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi langsung antara jaringan Telkomsel dengan jaringan Perusahaan untuk menyediakan jasa panggil atau panggilan dan mengirim pesan pendek (SMS) melalui Telkomsel dan jaringan Perusahaan dari pelanggan masing-masing perusahaan;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Telkomsel beban interkoneksi sesuai dengan peraturan Pemerintah dan perjanjian atas pendapatan dari panggilan keluar melalui sambungan Telkomsel; dan
- Perjanjian pertama dengan Telkomsel tersebut berlaku efektif untuk dua (2) tahun sejak tanggal 1 November 2007 sampai dengan 31 Oktober 2009 dan diperpanjang secara otomatis untuk setiap dua (2) tahun berikutnya.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

(Continued)

- *Direct interconnection between Bakrie Telecom network and Excelcom network, so each user can send or receive calls or SMS from customers of each company;*
- *The Company has an obligation to pay Excelcom for the interconnection revenue from outgoing calls by rights Excelcom's network based on government regulation and the agreement; and*
- *Interconnection agreement is effective for five (5) years starting December 19, 2007.*

The agreement was renewed with fifth amendment that was signed on June 1, 2012 No. XL:006/LGL-TBU-CR/HAY/V/2012 and No. BAKRIE TELECOM: 662/BTEL-Amd/XL/VI/2012.

2. *On April 14, 2009, the Company and XL signed a Cooperation Agreement No. XL 1838.A/XXXII.S.5360/XL/IV/2009 and No. BTEL 637/EST-PKS/XL/IV/2009 concerning "Interconnection of International Direct Dial."*

This agreement was renewed with the first amendment that was signed on October 17, 2011 No. XL: 256/LGL-NetCo/X/2011 and No. BTEL 5578/EST-AMD/XL/X/2011.

d. PT Telekomunikasi Selular

On November 30, 2007, the Company and Telkomsel entered into a Cooperation Interconnection Network Agreement No. Telkomsel : 2162/LG.05/PD-00/XI/2007 and No. Bakrie Telecom 1408/EST-PKS/TELKOMSEL/XI/2007 to revoke the previous cooperation agreement that had been signed by the two parties. The agreement covers the following:

- *Interconnection of the Company's telecommunication network with Telkomsel network to make outgoing or receive incoming calls and short message service (SMS) through Telkomsel and the Company's network from a customer of either company;*
- *The Company has an obligation to pay interconnection expense to Telkomsel based on the government regulation and the agreement of revenue from outgoing calls made through Telkomsel's networking; and*
- *The original agreement with Telkomsel is effective for two (2) years from November 1, 2007 until October 31, 2009 and will automatically be renewed and remain effective for the next two (2) years.*

**39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan amandemen keenam yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2012 No. TELKOMSEL Amd.703/LG.05/PD-00/V/2012 dan No. Bakrie Telecom 599/BTEL-AMD/TELKOMSEL/V/2012.

e. PT Mobile 8 Telecom Tbk

Pada tanggal 30 Januari 2004, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan dengan PT Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo) dan PT Metro Selular Nusantara (Metroselel), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi jaringan Perusahaan dengan Sambungan Jaringan Selular (STBS) Komselindo dan Metroselel untuk menyediakan jasa panggil atau menerima panggilan dan mengirim atau menerima pesan SMS dari pelanggan masing-masing perusahaan;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Komselindo dan Metroselel biaya interkoneksi sesuai dengan peraturan pemerintah atas pendapatan dari panggilan keluar melalui jaringan Komselindo dan Metroselel; dan
- Perjanjian dengan Komselindo dan Metroselel tersebut berlaku secara efektif sejak tanggal 30 Januari 2004 dan berlaku terus menerus sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan pemerintah yang mencabut izin masing-masing pihak.

Sehubungan dengan telah efektifnya penggabungan usaha antara Metroselel, Komselindo dan Telesera ke dalam PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) pada tanggal 31 Mei 2007 berdasarkan Surat Efektif Pemberitahuan Penggabungan dari Mobile-8 No. 054/M8-LGL/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007, maka sejak tanggal efektif tersebut, seluruh hak dan liabilitas Metroselel, Komselindo dan Telesera berdasarkan Perjanjian Interkoneksi beralih secara hukum kepada Mobile-8.

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Antar Jaringan Tetap Lokal dengan Mobile-8 No. Mobile-8: 37.M8/37.BTEL-FWA.08/TEK/II/2008 No. Bakrie Telecom 2586/EST-PKS/M8/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan diubah dengan addendum pertama yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2010 dengan referensi No. Mobile-8: 205.M8/205.BTEL.10/ICR/VII/2010 Nomor Bakrie Telecom: 1775/EST-Amd/MOBILE-8/VII/2010.

**39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

The agreement was renewed with the sixth amendment that was signed on May 28, 2012 No. TELKOMSEL Amd.703/LG.05/PD-00/V/2012 and No. Bakrie Telecom 599/BTEL-AMD/TELKOMSEL/V/2012.

e. PT Mobile 8 Telecom Tbk

On January 30, 2004, the Company, PT Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo) and PT Metro Selular Nusantara (Metroselel), entered into a Cooperation Interconnection Network Agreement, which covered the following:

- Interconnection of the Company's telecommunication network with cellular lines of Komselindo and Metroselel networks to make outgoing or receive incoming calls and SMS from a customer of any of the companies;
- The Company has an obligation to pay interconnection charges to Komselindo and Metroselel based on the government regulation for revenue from outgoing calls made through Komselindo and Metroselel networking; and
- The agreement between Komselindo and Metroselel has been effective since January 30, 2004 and will be in effect continuously until there is a written notice to terminate the agreement at the latest six (6) months after written notice of either party, or terminated based on the government's decision to revoke the license of either party.

In connection with the effective business acquisitions between Metroselel, Komselindo and Telesera into PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) on May 31, 2007 based on Effective Announcement Letter of Acquisitions from Mobile-8 No. 054/M8-LGL/VI/2007 on June 22, 2007, all rights and liabilities of Metroselel, Komselindo and Telesera were legally transferred to Mobile-8 based on the Interconnection Agreement.

The Company entered into a Cooperation Interconnection Local Fixed Network Agreement with Mobile-8 through No. Mobile-8: 37.M8/37.BTEL-FWA.08/TEK/II/2008 No. Bakrie Telecom 2586/EST-PKS/M8/XII/2007 dated December 28, 2007 and renewal with first amendment was signed on July 13, 2010 with reference No. Mobile-8: 205.M8/205.BTEL.10/ICR/VII/2010 No. Bakrie Telecom: 1775/EST-Amd/MOBILE-8/VII/2010.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

**39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Bergerak Selular Mobile 8 dengan Jaringan Tetap Lokal Bakrie Telecom No. Mobile 8 : 02.MOBILE 8/02.BTEL.08/TEK/II/2008 No. Bakrie Telecom 2585/EST-PKS/M8/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan diubah dengan amandemen pertama yang ditandatangani tanggal 28 Maret 2008 Nomor Mobile 8: 86.MOBILE-8/87.BTEL.08/ICR/III/2008 Nomor Bakrie Telecom: 396/EST-Amd/MOBILE-8/III/2008 dan amandemen kedua yang ditandatangani tanggal 15 April 2009 Nomor Mobile 8: 030.MOBILE-8/030.BTEL.09.ICR/II/2009 Nomor Bakrie Telecom : 348/EST-Amd/MOBILE-8/II/2009, dan amandemen ketiga yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2010 Nomor Mobile 8:197.M8/197.BTEL.10/ICR/VII/ 2010 - No. Bakrie Telecom: 1623/EST-Amd/M8/VII/2010.

f. PT Hutchinson CP Telecommunications

Pada tanggal 22 Desember 2006, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi dengan PT Hutchinson CP Telecommunications ("HCPT") No. BAKRIETEL:1157/EST-PKS/HCPT/XII/2006 dan No. HCPT 243/HCPT-ICR/XII/2006 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi antara jaringan telekomunikasi Perusahaan dengan jaringan telekomunikasi HCPT, sehingga setiap pelanggan Perusahaan dan HCPT dapat mengadakan atau menerima panggilan interkoneksi serta dapat menerima atau mengirim SMS;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya interkoneksi kepada HCPT dan menjaga kualitas pelayanan interkoneksi bagi pelanggannya;
- Perjanjian antara Perusahaan dan HCPT tersebut berlaku secara efektif sejak tanggal 22 Desember 2006 dan berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan pemerintah.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan adendum keempat yang ditandatangani pada tanggal 5 April 2011 No. HCPT: 181/LGL-AMD4-AGR/PT Bakrie Telecom Tbk/IM-LS/ICGR/IV/11 and No. BTEL: 4127/EST-Amd/HCPT/II/2011.

g. PT Smart Telecom

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi dengan PT Smart Telecom ("Smart") pada tanggal 11 Mei 2007 No. BAKRIETEL : 463/EST-PKS/SMART/V/2007 - No. SMART: 090/LO-BOD/IPM/RAI/V/2007 yang mengatur hal-hal sebagai berikut.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

The Cooperation agreement regarding Interconnection Mobile Network Cellular Mobile-8 with Local Fixed Network Bakrie Telecom No. Mobile 8: 02.MOBILE-8/02.BTEL.08/TEK/II/2008 No. Bakrie Telecom 2585/EST-PKS/M8/XII/2007 dated December 28, 2007 and renewed with first amendment that was signed on March 28, 2008 No. Mobile 8: 86.MOBILE-8/87.BTEL.08/ICR/III/2008 No. Bakrie Telecom: 396/EST-Amd/MOBILE-8/III/2008 and second amendment that was signed on April 15, 2009 No. Mobile 8: 030.MOBILE-8/030.BTEL.09.ICR/II/2009 No. Bakrie Telecom: 348/EST-Amd/MOBILE-8/II/2009, and third amendment that was signed on July 13, 2010 No. Mobile 8 :197.M8/197.BTEL.10/ICR/VII/2010 - No. Bakrie Telecom: 1623/EST-Amd/M8/VII/2010.

f. PT Hutchinson CP Telecommunications

On December 22, 2006, the Company entered into a Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network with PT Hutchinson CP Telecommunications ("HCPT") No. BAKRIETEL: 1157/EST-PKS/HCPT/XII/2006 and No. HCPT 243/HCPT-ICR/XII/2006 which covered the following:

- *Interconnection between the telecommunication network of the Company and telecommunication network of HCPT to provide interconnection call service and sending Short Message Service (SMS) and receive calls or SMS from each Company's customers;*
- *The Company has the obligation to pay interconnection charges to HCPT and maintain the quality of interconnection services for customers;*
- *The agreement between the Company and HCPT was effective from December 22, 2006 and could be terminated at any time within three (3) months after written notice from either of the parties, or terminated based on a government decree.*

The agreement was renewed with the fourth amendment that was signed on April 5, 2011 No. HCPT: 181/LGL-AMD4-AGR/PT Bakrie Telecom Tbk/IM-LS/ICGR/IV/11 and No. BTEL: 4127/EST-Amd/HCPT/II/2011.

g. PT Smart Telecom

The Company has a Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network with PT Smart Telecom ("Smart") on May 11, 2007 No. BAKRIETEL : 463/EST-PKS/SMART/V/2007 - No. SMART: 090/LO-BOD/IPM/RAI/V/2007 which states the following:

39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

- Interkoneksi antara jaringan tetap lokal Perusahaan dengan jaringan bergerak selular Smart agar dapat menyediakan jasa telekomunikasi yang lebih handal, sehingga Perusahaan dan Smart saling menyediakan layanan interkoneksi kepada pelanggannya;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya interkoneksi kepada Smart sebagai akibat dari layanan ini dan juga sebaliknya;

Pada tanggal 6 November 2007, Perusahaan dan Smart menandatangani addendum pertama terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi No. BAKRIETEL 2000/EST-Amd/SMART/XI/2007 dan No. SMART: AMD.283/LO-BOD/ST/RAI/XI/2007 untuk mengubah ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi, berkaitan dengan perubahan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular Smart.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan amandemen kedua yang ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2008 No. SMART AMD.097/LO-BOD/ICR/ST/III/2008 dan No. BAKRIETEL 290/EST-Amd/SMART/III/2008 yang selanjutnya diperbaharui dengan addendum ketiga yang ditandatangani pada tanggal 7 September 2009 No. SMART 422/Regulatory-ICR/SMART/Add3-Bakrie/IX/09 dan No. BAKRIETEL 1817/EST-AMD/SMART/IX/2009 dan amandemen keempat yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2010 No. BAKRIETEL: 670/EST-AMD/SMART/IV/2010 dan No. SMART: 135/Regulatory-ICR/SMART/AmdIV-Bakrie/IV/10.

Amandemen kelima yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2011 No. BAKRIETEL: 4655/BTEL-Amd/SMART/V/2011 dan No. SMART: 136/Regulatory-ICR/SMART/Amd5-BAKRIE/V/11. Amandemen keenam yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2013 No. BAKRIETEL: 276/BTEL-Amd/SMARTFREN/V/2013 dan No. SMART: 038a/Regulatory-ICR/SMART/Amd VI-BAKRIE/V/13.

h. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia

1. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi

Pada tanggal 17 April 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) No. Bakrie Telecom: 364/EST-PKS/STI/IV/2007 - Nomor STI: 009/PKS/GA-STI/IV/2007 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

- *Interconnection between Company local fixed network with mobility network cellular Smart is for providing good telecommunication services therefore the Company and Smart can provide interconnection services to their customers;*
- *The Company has the obligation to pay the cost of interconnection service to Smart and vice versa;*

On November 6, 2007, the Company and Smart signed the first Amendment of Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network No. BAKRIETEL 2000/EST-Amd/SMART/XI/2007 and No. SMART: AMD.283/LO-BOD/ST/RAI/XI/2007 to change the consideration requirement in the Cooperative Agreement of Interconnection Telecommunication Network in relation to the amendment of license for Mobility Network Cellular Smart.

The agreement was renewed with the second amendment that was signed on March 6, 2008 No. SMART AMD.097/LO-BOD/ICR/ST/III/2008 and No. BAKRIETEL 290/EST-Amd/SMART/III/2008, which was then renewed with the third amendment signed on September 7, 2009 No. SMART 422/Regulatory-ICR/SMART/Add3-Bakrie/IX/09 and No. BAKRIETEL 1817/EST-AMD/SMART/IX/2009 and fourth amendment that was signed on April 14, 2010 No. BAKRIETEL : 670/EST-AMD/SMART/IV/2010 dan No. SMART: 135/Regulatory-ICR/SMART/AmdIV-Bakrie/IV/10.

The fifth amendment was signed on May 2, 2011 No. BAKRIETEL: 4655/BTEL-Amd/SMART/V/2011 and No. SMART: 136/Regulatory-ICR/SMART/Amd5-BAKRIE/V/11. The sixth amendment was signed on May 8, 2013 No. BAKRIETEL: 276/BTEL-Amd/SMARTFREN/V/2013 and No. SMART: 038a/Regulatory-ICR/SMART/Amd VI-BAKRIE/V/13.

h. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia

1. Cooperative Agreement Of Interconnection Network

On April 17, 2007, the Company entered into a Cooperative Agreement of Interconnection Network with PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) No Bakrie Telecom: 364/EST-PKS/STI/IV/2007 - Nomor STI: 009/PKS/GA-STI/IV/2007 which covers the following:

39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

(Lanjutan)

- Interkoneksi langsung antara jaringan STI dan jaringan Perusahaan dan masing-masing dapat saling menyediakan layanan interkoneksi dan dapat mengirim atau menerima SMS;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya interkoneksi kepada STI dan sebaliknya;
- Perusahaan dan STI wajib menjaga kinerja dan kualitas layanan masing-masing sesuai parameter yang telah ditentukan;
- Perjanjian antara Perusahaan dan STI tersebut berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2007 sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan pemerintah.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan adendum pertama yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2007 No. STI 008/PKS/ES-STI/X/2007 dan No. BAKRIETEL 1977/EST-AMd/STI/X/2007 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum kedua yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2008 No. STI 006/PKS.EA-STI/III/2008 dan No. BAKRIETEL 270/EST-Amd/STI/III/2008 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum ketiga yang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2009 No. STI 005/PKS/EA-STI/V/2009 dan No. BAKRIETEL 1137/EST-Amd/STI/V/2009 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum keempat yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2010 No. STI 001/PKS/EA-STI/II/2010 dan No. BAKRIETEL 150/EST-AMD/STI/2010 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum kelima yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2010 No. STI 004/PKS/EA-STI/IV/2010 dan No. BAKRIETEL 632/EST-AMD/STI/IV/2010.

Selanjutnya diperbaharui dengan adendum keenam yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2011 No. STI 012/PKS/EA-STI/VI.2011 dan No. BAKRIETEL 4571/EST-Amd/STI/IV/2011. Selanjutnya diperbaharui dengan adendum ketujuh yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2013 No. STI 012/PKS/EA-STI/IX.2013 dan No. BAKRIETEL 406/EST-Amd/STI/IX/2013.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

(Continued)

- *Interconnection between the Company telecommunication network and the telecommunication network of STI is to provide interconnection services and sending short message service or SMS from each Company's customers;*
- *The Company has the obligation to pay the cost of these services to STI and vice versa;*
- *The Company and STI have obligations to maintain the performance and quality of their service to defined parameters;*
- *The agreement between the Company and STI was effective from April 17, 2007 and could be terminated at any time within three (3) months after written notice from either of the parties, or terminated based on a government decree.*

The agreement was renewed with the first amendment that was signed on October 25, 2007 No. STI 008/PKS/ES-STI/X/2007 and No. BAKRIETEL 1977/EST-AMd/STI/X/2007, which was then renewed with the second amendment that was signed on March 3, 2008 No. STI 006/PKS.EA-STI/III/2008 and No. BAKRIETEL 270/EST-Amd/STI/III/2008, which was then renewed with the third amendment signed on May 27, 2009 No. STI 005/PKS/EA-STI/V/2009 and No. BAKRIETEL 1137/EST-Amd/STI/V/2009, which was then renewed with the fourth amendment signed on January 29, 2010 No. STI 001/PKS/EA-STI/II/2010 and No. BAKRIETEL 150/EST-AMD/STI/2010, which was then renewed with the fifth amendment signed on April 1, 2010 No. STI 004/PKS/EA-STI/IV/2010 and No. BAKRIETEL 632/EST-AMD/STI/IV/2010.

Then was renewed with the sixth amendment that was signed on April 8, 2011 No. STI 012/PKS/EA-STI/VI.2011 and No. BAKRIETEL 4571/EST-Amd/STI/IV/2011. The next was renewed with the seventh amendment that was signed on September 20, 2013 No. STI 012/PKS/EA-STI/IX.2013 dan No. BAKRIETEL 406/EST-Amd/STI/IX/2013.

39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. Perjanjian Jual Beli Bersyarat

Pada tanggal 14 Maret 2012 Perusahaan mengumumkan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan Sampoerna Strategic, Twinwood Ventures Ltd., dan Polaris Mobile Pte., Ltd., sebagai pemegang saham PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI).

Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan akan memperoleh tiga puluh lima (35) persen dari saham STI dengan perjanjian bahwa tiga (3) tahun ke depan dapat menjadi pemegang saham mayoritas. Sebagai imbalannya Sampoerna Strategic dapat menjadi pemegang saham Perusahaan.

Sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jual Beli Bersyarat, para pihak belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli, dengan demikian perjanjian tersebut dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi melalui surat kesepakatan pengakhiran tertanggal 15 Januari 2015.

i. PT. AXIS Telekom Indonesia (sebelumnya PT. Natrindo Telepon Seluler)

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi dengan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) No. NTS 299/JKT-NTS/IV/2008 dan No. BAKRIETEL 429/EST-PKS/NTS/IV/2008, dimana masing-masing pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi langsung antara jaringan telekomunikasi Perusahaan dengan jaringan telekomunikasi NTS, sehingga setiap pelanggan Perusahaan dan NTS dapat mengadakan atau menerima panggilan interkoneksi serta dapat menerima atau mengirim SMS;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya interkoneksi kepada NTS dan menjaga kualitas pelayanan interkoneksi bagi pelanggannya;
- Perjanjian antara Perusahaan dan NTS tersebut berlaku secara efektif sejak tanggal 1 April 2008 dan berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan pemerintah.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

2. Conditional Sales Purchase Agreement

On March 14, 2012, the Company announced the signing of the Conditional Sales Purchase Agreement with Sampoerna Strategic, Twinwood Ventures Ltd., and Polaris Mobile Pte., Ltd., as the shareholders of PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI).

In the agreement, the Company will acquire 35% of the shares of STI with the agreement that within the next three (3) years, the Company will become the majority shareholder. In return, Sampoerna Strategic will become a shareholder of the Company.

Until end of the period of the Conditional Sales Purchase Agreement, Both Parties can not fulfill requirements as stated in the Sales Purchase Agreement, thus that Sales Purchase Agreement is no longer valid and terminated according to termination agreement dated on January 15, 2015.

i. PT. AXIS Telekom Indonesia (formerly PT. Natrindo Telepon Seluler)

The Company has a Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network with PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) No. NTS 299/JKT-NTS/IV/2008 and No. BAKRIETEL 429/EST-PKS/NTS/IV/2008 under which each party agrees as follows:

- *Interconnection between telecommunication network Company and telecommunication network NTS to provide interconnection call service and sending Short Message Service (SMS) and receive call or SMS from each company's customers;*
- *The Company has the obligation to pay interconnection charges to NTS and maintain the quality of interconnection services for customers;*
- *The agreement between the Company and NTS effective from April 1, 2008 was valid and could be terminated at any time within three (3) months after written notice from either of the parties, or terminated based on a government decree.*

**39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan adendum pertama yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2009 No. 358/EST-Amd/NTS/II/2008 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum kedua yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2009 No. NTS047/JKT-NTS/II/2010 dan No. BAKRIETEL 2382/EST-Amd/NTS/XII/2009.

Selanjutnya diperbaharui dengan adendum ketiga yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011 No. AXIS : 222/JKT-AXIS/V/2011 dan No. BTEL : 4966/EST-Amd/AXIS/VII/2011, dan diperbaharui dengan adendum keempat yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2012 No. AXIS : 138/JKT - AXIS/V/2012 dan No. BTEL : 616/EST-Amd/AXIS/V/2012.

j. PT Mora Telematika Indonesia

Pada tanggal 28 November 2008, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Mora Telematika Indonesia untuk menjual dan memindahkan fasilitas telekomunikasi dan peralatan yang dipasang antara Singapura - Batam, Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan Perusahaan.

k. PT Bakrie Swasakti Utama (Pihak Berelasi)

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama untuk sewa kantor dan lahan parkir untuk satu (1) tahun, yang dapat diperbaharui kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Jumlah beban sewa setiap tahun disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang diungkapkan dalam (Catatan 30).

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 6.559,99m² adalah sebesar Rp471,9 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian pengalihan pengelolaan ruang usaha sektor utara Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30,25 ribu per meter dengan luas area 1.665m² atau sebesar Rp50,4 juta per bulan (Catatan 30).

**39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

The agreement was renewed with the first amendment that was signed on February 24, 2009 No. 358/EST-Amd/NTS/II/2008, which was then renewed with the second amendment signed on December 7, 2009 No. NTS 047/JKT-NTS/II/2010 and No. BAKRIETEL 2382/EST-Amd/NTS/XII/2009.

It has been renewed with the third addendum that was signed on July 1, 2011 No. AXIS: 222/JKT-AXIS/2011 and BTEL No is: 4966/EST-Amd/AXIS/VII/2011. Then was renewed with the fourth amendment that was signed on May 25, 2012 No. AXIS:138/JKT - AXIS/V/2012 and No. BTEL : 616/EST-Amd/AXIS/V/2012.

j. PT Mora Telematika Indonesia

On November 28, 2008, the Company engaged PT Mora Telematika Indonesia to sell and transfer telecommunication facilities and devices installed laying between Singapore and Batam, Indonesia for the purpose of improving the Company's network.

k. PT Bakrie Swasakti Utama (Related Party)

The Company entered into a rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama for the lease of certain office and parking spaces with one (1) year term, subject to renewal after the expiry date. The amount of the rental expense for every year presented in the consolidated financial statements is disclosed in (Note 30).

On October 1, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until August 31, 2015 subject to renewal after the expiry date. The new rental per month amounted to Rp471,9 million for a total area of 6,559.99m².

On December 31, 2013, the Company entered into an agreement to transfer building management of the northern sector of Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from June 3, 2014 until January 2, 2015. Service charges per square meter amounted to Rp30.25 thousand for a total area of 1,665m² or amounting to Rp50.4 million per month (Note 30).

39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

Perusahaan juga menandatangani pengalihan perjanjian pengelolaan ruang usaha sektor selatan Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30,0 ribu per meter dengan luas area 937m² atau sebesar Rp28,3 juta per bulan (Catatan 30).

Pada tanggal 25 September 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 459,74m² adalah sebesar Rp32,9 juta per bulan. Sampai dengan tanggal laporan ini, proses perpanjangan perjanjian sewa masih dalam proses penandatanganan.

I. Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Perusahaan mengadakan Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ("Perjanjian") dengan pihak ketiga, PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), pada tanggal 30 Oktober 2014. Berdasarkan Perjanjian, hak pita frekuensi radio yang sebelumnya dipegang oleh Perusahaan akan digabungkan kepada hak pita frekuensi radio yang dipegang oleh SF berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menkominfo No. 932 tanggal 26 September 2014. Selanjutnya, Perusahaan dapat mempergunakan pita frekuensi radio tersebut dengan skema sewa menyewa jaringan telekomunikasi dengan SF.

Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan akan memperoleh kompensasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan akan memperoleh saham SF sejumlah 1.000.000.000 saham.
- b. Perusahaan akan memperoleh dana sebesar Rp500,0 miliar dari SF untuk digunakan sebagai pembayaran Biaya Frekuensi Terutang, yang akan dibayarkan SF kepada Perusahaan pada tahun ke lima setelah tanggal efektif dari Perjanjian. Dana tersebut akan diterima dan dimiliki penuh oleh Perusahaan, dan akan digunakan senilai klaim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("KOMINFO") atas jumlah sisa Biaya Frekuensi Terutang oleh Perusahaan yang masih belum dibayar pada saat ulang tahun kelima setelah tanggal efektif, apabila ada. Pembayaran tersebut sepenuhnya untuk kepentingan dan atas nama Perusahaan sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Frekuensi Terutang.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

The Company also entered into an agreement to transfer the building management of the southern sector Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from March 1, 2014 until December 31, 2014. Service charges per meter amounted to Rp30.0 thousand for a total area of 937m² amounting to Rp28.3 million per month (Note 30).

On September 25, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until February 28, 2015, subject to renewal after expiry date. The new rental change amounted to Rp32.9 million per month for a total area of 459.74m². As of the date of this report, the extension of the rental agreement is still in the process of signing.

I. Joint Agreement Implementation of Telecommunication Network Business Activities

On October 30, 2014, the Company entered into Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ("Agreement") with PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), a third party. In accordance with the Agreement, the radio frequency previously held by the Company will be merged with that held by SF based on the Menkominfo Decision Letter No. 932 dated September 26, 2014. Furthermore, the Company is allowed to use the radio frequency by using telecommunication network rental scheme with SF.

Based on the Agreement, the Company will receive the following compensation:

- a. *The Company will receive 1,000,000,000 shares of SF.*
- b. *The Company will receive funds of Rp500.0 billion from SF to be used as Payment of Frequency Fees Payable, which will be paid by SF to the Company on the fifth anniversary of the effective date of the Agreement. The funds will be received and fully owned by the Company, and will be used for claim from the Ministry of Communications and Information of the Republic of Indonesia ("KOMINFO") for the remaining Frequency Fee Payable by the Company that remain unpaid at the time of the fifth anniversary of the effective date, if any. The payment made is solely for the benefit and on behalf of the Company as the fulfillment of payment obligations of Frequency Fee Payable.*

39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

(Lanjutan)

Perusahaan akan menyewa jaringan telekomunikasi milik SF guna melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, setelah tanggal efektif dari Perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai tercatat izin pita frekuensi radio adalah nihil, sehingga Perusahaan mencatat imbalan yang diterima dari SF sebesar Rp591,0 miliar sebagai hasil kerjasama penggabungan kegiatan usaha penyelenggara jaringan telekomunikasi.

m. Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi

Perusahaan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi ("Perjanjian Sewa") dengan pihak ketiga, PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") pada tanggal 30 Oktober 2014. Berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut, Perusahaan akan menyewa jaringan telekomunikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh SF, guna melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Jangka waktu atas Perjanjian Sewa ini berlaku selama tiga tahun sejak Perjanjian Sewa ini ditandatangani. Jangka waktu sewa ini dapat diperpanjang berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama antara Perusahaan dan SF.

Jumlah sewa yang harus dibayar oleh Perusahaan kepada SF setiap bulannya selama jangka waktu sewa adalah sebesar Rp30,0 miliar. Denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1% per hari akan dikenakan kepada Perusahaan, apabila terdapat keterlambatan pembayaran sewa.

Perjanjian sewa tersebut telah diperbaharui dengan amandemen yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2015, No. 088A/Commercial/Smartfren/Amd I-BTEL/XII/15 dengan jumlah sewa yang harus dibayar oleh Perusahaan kepada SF setiap bulannya sebesar Rp27,0 miliar. Perjanjian sewa ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal 1 Januari 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dan SF.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

(Continued)

The Company will rent telecommunication networks of SF in order to carry out its business activities in the telecommunication services after the effective date of the Agreement.

As of December 31, 2014, the carrying amount of the radio frequency was nil. Therefore, the Company recognized compensation received from SF amounting to Rp591.0 billion as proceeds from merger activity for telecommunication network service.

m. Lease Agreement Telecommunication Networks

On October 30, 2014, the Company entered into Lease Agreement Telecommunication Networks ("Lease Agreement") with PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), a third party. In accordance with the Lease Agreement, SF is willing to lease the telecommunications network that is used and operated by SF for the Company's operation as a telecommunications provider.

The Lease Agreement is effective for three years from signing of the Lease Agreement. The duration of the lease can be extended based on the terms and conditions mutually agreed between the Company and SF.

The amount of rental to be paid every month by the Company to SF during the term of the lease is equal to Rp30.0 billion. The Company will be charged 1% of rental fee per day for any delay in rental payments.

The Lease Agreement was renewed with the amendment that was signed on December 22, 2015 No. 088A/Comercial/Smartfren/Amd I-BTEL/XII/15, with the amount of rental to be paid every month by the Company to SF is equal to Rp27.0 billion. The Lease Agreement is effective for three-month period from January 1, 2016, and can be renewed based on mutually agreed between the Company and SF.

39. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

(Lanjutan)

n. Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Call and Put Option Agreement*)

Perusahaan mengadakan suatu perjanjian jual beli bersyarat (*call and put option agreement*) dengan McBeal Development Ltd tertanggal 2 April 2015 dimana Perusahaan dan calon pembeli dapat melakukan jual beli saham PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") yang dimiliki oleh Perusahaan dengan harga dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dapat di-exercise sewaktu-waktu. *Option* tersebut telah di-exercise pada tanggal 25 September 2015 sebanyak 1.000.000.000 lembar saham atau sekitar 0,97% dari seluruh saham disetor PT Smartfren Tbk ("SF") dengan nilai USD10 juta atau setara dengan Rp146.650,0juta.

o. Madison Pacific Trust Limited (sebelumnya dengan Credit Suisse)

Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Credit Suisse (Singapura) Limited, sebagai *facility agent*, dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar USD50 juta untuk jangka waktu delapan belas (18) bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun.

Pemberi pinjaman atas pinjaman ini adalah Orchard Centar Master Limited, Orchard Dejima Limited dan Milton Global Resources Limited dengan nilai pinjaman masing-masing sebesar USD26 juta, USD4 juta dan USD20 juta. Pada tanggal 4 Juli 2014, *facility agent* atas pinjaman ini berubah dari dengan Credit Suisse (Singapura) Limited menjadi Madison Pacific Trust Limited ("MPTL"). Perubahan ini telah diketahui dan disetujui bersama antara Perusahaan sebagai peminjam dengan para pemberi pinjaman.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya (Catatan 18 dan 40).

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

(Continued)

n. Call and Put Option Agreement

The Company have entered into a conditional sales and purchase agreement (*call and put option agreement*) with McBeal Development Ltd dated April 2, 2015 where by the Parties may proceed with the sales and purchase of PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") shares under the call and put option agreement and can be exercised at anytime. The option to sell has been exercised on September 25, 2015 the whole 1,000,000,000 shares or approximately 0.97% of issued shares of PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") with total value amounting to USD10 milion or equal to Rp146,650.0 million.

o. Madison Pacific Trust Limited (previously with Credit Suisse)

On August 30, 2012, the Company entered into a credit agreement with Credit Suisse (Singapore) Limited, as the facility agent, with loan facility amounting to USD50 million that will be payable in eighteen (18) months. This loan bears interest of 11.5% per annum.

The original lenders of this loan are Orchard Centar Master Limited, Orchard Dejima Limited and Milton Global Resources Limited in the amount of USD26 million, USD4 million and USD20 million, respectively. On July 4, 2014, the facility agent of this loan changed from Credit Suisse (Singapore) Limited to Madison Pacific Trust Limited ("MPTL"). This change was acknowledged and agreed together with the Company as borrower and lenders

On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors (Notes 18 and 40).

40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN UTANG

Pada tanggal 23 Oktober 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan dengan register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai akibat dari tidak dibayarkannya utang jatuh tempo Perusahaan terhadap Netwave Rp4,7 miliar. Pada rapat kreditor tanggal 8 Desember 2014 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan pembahasan dan pemungutan suara (*voting*) kreditor atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perusahaan dan sebagian besar kreditor konkuren Perusahaan atau sejumlah 94,56% kreditor konkuren telah memberikan suara setuju atas Rencana Perdamaian tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Perjanjian Perdamaian ini Perusahaan dan para kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur didalam Rencana Perdamaian, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada keadaan kegiatan usaha Perusahaan saat ini, Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, dan keadaan pasar, serta kedudukan para kreditor Perusahaan sehubungan dengan jaminan-jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan jaminan-jaminan yang diberikan tersebut.
2. *Cash Waterfall.*
Perusahaan akan berusaha mengalokasikan Sisa Kas Operasional (di luar Utang Baru dan penerbitan Saham Baru) dari kegiatan usaha utama Perusahaan ke dalam suatu rekening Perusahaan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian PKPU.

40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT

On October 23, 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) filed a Suspension of Payment (PKPU) petition against the Company under case register No.59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst as a result of non-payment of overdue payables to Netwave by the Company amounting to Rp4.7 billion. At the creditors meeting on December 8, 2014 held in the Commercial Court of the Central Jakarta District Court, discussions were held and creditors voted on the Amicable Settlement Plan proposed by the Company, with the majority, or 94.56% of the unsecured creditors of the Company voting in favor of the Amicable Settlement Plan.

On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors.

Furthermore, based on the aforementioned, in Amicable Settlement Agreement, the Company and the creditors mutually agree with the terms that have been set out in the Amicable Settlement Agreement, among others, as follows:

1. *Amicable Settlement Agreement was made in consideration of and based on the current condition of the Company's operations, the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, Agreement of Telecommunication Network Lease between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, and the market condition, as well as the position of the creditors in connection with the guarantees held by secured creditors, and the terms and conditions relevant to the guarantees given.*
2. *Cash Waterfall.*
The Company will attempt to allocate the Remaining Amount of Cash Operations from the Company's main business activities (outside New Debt and the issuance of New Shares) in the accounts of the Company and which will be used in accordance with the order of priorities as required by the PKPU settlement agreement.

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

3. Pengesampingan terhadap Kewajiban Lain. Perjanjian Perdamaian ini tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap pembayaran atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perusahaan kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 berikut seluruh perjanjian turutannya (apabila ada).
4. Seluruh bunga, penalti dan/atau denda yang telah timbul sampai dengan Tanggal Homologasi akibat Utang Perusahaan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perusahaan dalam Perjanjian Perdamaian ini.
5. Terhadap tagihan-tagihan lain yang:
 - 1) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau
 - 2) yang baru teridentifikasi setelah Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan hukum, permulaan atau rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang terdapat sebelum Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi yang terdapat putusan badan peradilan atau badan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap yang diakui oleh hukum Indonesia;maka tagihan-tagihan lain sebagaimana disebut di atas (disebut "Utang Diluar Verifikasi") akan tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a) tagihan tersebut dapat diterima oleh Perusahaan namun harus sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) hanya ketika ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tagihan diterima dan diakui kemudian oleh Perusahaan, maka tagihan tersebut akan dibayar Perusahaan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

3. *Waiver of Other Obligations. The Amicable Settlement Agreement is not binding and does not apply to payments or implementation of the obligations of the Company to any parties related to the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 and Agreement of Telecommunication Network Lease Agreement between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 following the entire agreement and its other related agreements (if any).*
- 4.
5. *All interest, penalties and/or fines related to the Company's Debts that have been incurred up to the Official Approval of Settlement Agreement Date will be entirely eliminated, except as otherwise expressly and specifically stated by the Company in the Amicable Settlement Agreement.*
6. *With regard to other outstanding bills that:*
 - 1) *have not been identified in the Amicable Settlement Agreement; or*
 - 2) *those newly identified after the Amicable Settlement Agreement but that came from or arose out of conditions, legal acts, the beginning or a series of events, or laws that occurred before this Amicable Settlement Agreement obtained the binding of the court and arbitration body's decision as recognized by the laws of Indonesia;*

the other outstanding bills as referred to above (referred as "Verification of Outside Debt") will be subject to the following conditions:

 - a) *the outstanding bills may be accepted by the Company but must be in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia (Indonesian Financial Accounting Standards/PSAK) and the prevailing laws; and*
 - b) *only when the above conditions have been met and the outstanding bill is accepted and recognized later by the Company, then the bill will be paid by the Company starting in the 31st year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*

40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)

Utang Usaha

- A. Utang Usaha Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar (utang kategori *Tranche A*), Perusahaan akan melakukan pembayaran tunai atas utang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Utang Usaha Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar, pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.
 - Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang Usaha Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar (utang kategori *Tranche A*), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
 - Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir b) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.
- B. Utang Usaha diatas Rp3,0 miliar dalam mata uang selain Rupiah (utang kategori *Tranche C*) dan Utang Usaha di atas Rp3,0 miliar dalam mata uang Rupiah (utang kategori *Tranche D*)
- Nilai Utang Usaha sampai dengan Rp3,0miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.
 - 30% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
 - Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai utang kategori *Tranche C* sebesar 4% per tahun dan untuk Porsi Tunai utang kategori *Tranche D* sebesar 6% per tahun, yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai di atas.

40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)

Trade Payables

- A. For Trade Payables of Rp1.0 up to Rp3.0 billion (debt category *Tranche A*), the Company will make a cash payment on the payables under the following conditions:
- For Trade Payables of Rp1.0 up to Rp3.0 billion, the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
 - If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Trade Payables of Rp1.0 to Rp3.0 billion (debt category *Tranche A*), then the payment of residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payable payments on the next due date, and this will continue until the final maturity date.
 - If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule in point b) as at the final maturity date, then the remaining amounts of payables will be paid no later than the end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
- B. Trade Payables above Rp3.0 billion in currencies other than Rupiah (debt category *Tranche C*) and Trade Payables above Rp3.0 billion in Indonesian Rupiah (debt category *Tranche D*)
- Trade Payables up to Rp3.0 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.
 - Of the remaining amounts of Trade Payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) will be paid in cash with installments ("Cash Portion") and will be paid not later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
 - The Company will provide interest on Cash Portion of *Tranche C* category at 4% per year and for the Cash Portion of *Tranche D* category at 6% per year, which will be paid by following the above Cash Portion payment schedule.

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

4. 70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond (MCB-A)* Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan Rp2,0 ratus/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya ("UUPT").
5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya, dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan pada jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

4. *Of the remaining amounts of Trade Payables, 70% after deduction of the amounts, as mentioned in point 1) will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp2.0 hundred/share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and its changes and/or enhancements ("UUPT").*
5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest set out in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion and its interest that remain unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.*
6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and unpaid interest in accordance with the schedule referred to in point 5) above as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 6) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

8. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
9. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

Utang Tower Provider (Penyedia Menara)

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang *Tower Provider* atas sewa *tower* yang telah jatuh tempo, belum dibayarkan, dan timbul sampai dengan tanggal 10 November 2014:

- A Utang Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar (utang kategori *Tranche A*)
 - 1) Utang Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.
 - 2) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Perdamaian (utang kategori *Tranche A*), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
 - 3) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir 2) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

8. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 7) above, then the unpaid Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
9. *The Company does not provide interest on the principal amount of the 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

Tower Provider Payables (Tower Provider)

The debt restructuring provisions on Tower Provider Payables for tower rentals that have matured, but are unpaid up to November 10, 2014:

- A *Payables of Rp1.0 up to Rp3.0 billion (debt category of Tranche A)*
 - 1) *Payables Rp1.0 up to Rp3.0 billion the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
 - 2) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement there are insufficient funds to pay payables as set forth in the Amicable Settlement Agreement, (debt category Tranche A), then payment of the residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the payable payments on the next due date, and this will continue until final maturity date.*
 - 3) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule as referred to in point 2) as at the final maturity date, then the remaining unpaid amounts of the payables will be paid no later than end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

B Utang diatas Rp3,0 miliar.

- 1) Nilai utang sampai dengan Rp3,0 miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.
- 2) 30% dari sisa utang setelah dikurang nilai sesuai butir 1) di atas (utang kategori *Tranche D*), berikut dengan bunga sebesar 6% per tahun dari nilai tersebut akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
- 3) 70% dari sisa utang setelah dikurangi nilai sesuai butir 1) di atas akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp2,0 ratus/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
- 4) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir.
- 5) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

B Payables above Rp3.0 billion.

- 1) *Payables up to Rp3.0 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.*
- 2) *Of the remaining amounts of payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) (debt category Tranche D), including its interest at 6% per year will be paid in cash in installments ("Cash Portion") and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
- 3) *Of the remaining amounts of payables, 70% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) above will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp2.0 hundred/ share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of UUPT.*
- 4) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion as set forth in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.*
- 5) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

- 6) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
- 7) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
- 8) Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

C. Sisa Masa Sewa.

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang *Tower Provider* atas nilai sewa untuk sisa masa sewa *tower* berdasarkan perjanjian sewa *tower* yang telah ada antara Perusahaan dengan masing-masing kreditor atas Utang *Tower Provider* yang dihitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan akhir masa sewa *tower* sesuai masing-masing perjanjian sewa tersebut:

1. 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond (MCB-A)* berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp2,0 ratus/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
2. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai yang akan ditukar menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

- 6) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
- 7) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
- 8) *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

C. The Remaining Lease Period.

The debt restructuring provisions of Tower Provider Payables for the remaining term of the tower lease based on the existing tower lease agreements between the Company and each of the creditors on Tower Provider Payables calculated from November 10, 2014 through the end of the lease term in accordance with respective tower lease agreement are as follows:

1. *The total amount (100%) of the remaining term of the lease will be exchanged for Mandatory Convertible Bond (MCB-A) for a period of ten (10) years issued by the Company on the Effective Date at the conversion price of Rp2.0 hundred/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
2. *The Company does not provide interest on the amount to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.*

40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)

D. Penghentian Fasilitas Penyediaan Tower.

Kreditor atas Utang *Tower Provider* dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang *Tower Provider* terkait.

Utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO)

1. Utang Pokok BHP dan USO adalah utang yang diakui Perusahaan secara tertulis sampai dengan tanggal 10 November 2014 ("Utang Pokok BHP"), terdiri atas:
 - a. Utang BHP Frekuensi Pita.
 - b. Utang BHP Frekuensi ISR.
 - c. Utang BHP Telekomunikasi.
 - d. Utang USO.
2. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Utang Pokok BHP, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan Utang Pokok BHP berikutnya.
3. Pembayaran Utang Pokok BHP Frekuensi Pita, Utang BHP Frekuensi ISR, Utang BHP Frekuensi Telekomunikasi dan Utang USO akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-10 setelah Tanggal Homologasi.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang yang diatur dalam butir 3) di atas, maka sisa utang yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir. Apabila masih terdapat sisa utang yang belum dibayarkan setelah tahun ke-10 setelah Tanggal Homologasi maka sisa utang tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun berikutnya secara prorata setiap tahunnya.
5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas maka sisa utang yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran sisa utang pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)

D. Termination of Tower Provider Facilities.

Creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.

Payables on Fee of Right to Use (BHP) and the Universal Service Obligation (USO)

1. BHP and USO Principal Payables represent payables that are recognized by the Company in writing up to November 10, 2014 ("BHP Principal Payables"), consisting of:
 - a. BHP Frequency Band Payables.
 - b. BHP Frequency ISR Payables.
 - c. BHP Telecommunication Payables.
 - d. USO Payables.
2. In the event of excess payment of BHP Principal Payables, the excess will be included in the next repayment installments of BHP Principal Payables.
3. Principals of BHP Frequency Band Payables, BHP Frequency ISR Payables, BHP Frequency Telecommunications Payables and USO Payables will be paid in installments and will be paid no later than the 10th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
4. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the payables as referred to in point 3) above, then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until final maturity date. If there are remaining payables after the 10th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date then these remaining payables will be paid within a period of five (5) years on a pro rata basis each year.
5. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the payables based on schedule as referred in point 4), then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

6. Dalam hal terdapat penjaminan atas pembayaran Utang Pokok BHP dan penjaminan tersebut kemudian jatuh tempo dan diefektifkan/dicairkan sebelum jadwal pembayaran Utang Pokok BHP tersebut di atas berakhir, maka jadwal pembayaran tersebut tidak berlaku lagi kecuali masih terdapat sisa Utang Pokok BHP terkait yang jadwal pembayarannya tetap akan merujuk pada jadwal pembayaran Utang Pokok BHP sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Utang Dana Hasil Wesel Senior

- A. Pembayaran Utang Dana Hasil Wesel Senior akan dilakukan oleh Perusahaan dengan cara sebagai berikut:
 1. 30% dari Utang Dana Hasil Wesel Senior (utang kategori *Tranche C*) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
 2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utang kategori *Tranche C* sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
 3. 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu sepuluh (10) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dan dapat diperpanjang oleh Perusahaan dengan harga pelaksanaan konversi Rp200,0/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
 4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

6. *In the event of a guarantee given for payment of BHP Principal Payables and the guarantee then matures and is effected before the aforementioned BHP Principal Payables repayment schedule expires, the payment schedule is no longer valid unless related BHP Principal Payables remain that still refer to the BHP Principal Payables repayment schedule as stipulated in the Amicable Settlement Agreement.*

Payables on Proceeds from Senior Notes

- A. *Payables on Proceeds from the Senior Notes will be made by the Company in the following manner:*
 1. *Of Payables on Proceeds from Senior Notes (debt category Tranche C), 30% will be paid in cash ("Cash Portion") in installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
 2. *The Company will provide interest at 4% on Cash Portion of debt category Tranche C, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.*
 3. *Of the Affiliate Payables, 70% will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of ten (10) years from the Effective Date and may be extended by the Company at the conversion price of Rp200.0/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
 4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest as mentioned in point 1) above, then payment of the residual value of Cash Portion that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.*

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunganya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/ *Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.
9. Jika diperlukan, Perusahaan akan berusaha meminta atau melakukan upaya/tindakan yang diperlukan agar dilaksanakan penyelesaian/ pembayaran atas Utang Dana Hasil Wesel Senior sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian ini, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan dan ketentuan, antara lain sebagai berikut:

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
8. *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*
9. *If necessary, the Company will attempt to solicit or make efforts/actions needed to be implemented for settlement/payment of Payables on Proceeds from Senior Notes in accordance with the provisions of the Amicable Settlement Agreement, including but not limited to the following acts and provisions, among others:*

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

- a) Secara khusus meminta perhatian pengadilan bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan *Securities Acts* Amerika Serikat, diperkenankan untuk berpedoman pada pengecualian terhadap pendaftaran berdasarkan Pasal 3(a)(10) dari *Securities Acts* 1933 Amerika Serikat, dimana, Pasal 3(a)(10) mengizinkan suatu proses pengadilan di luar Amerika Serikat (dalam hal ini, proses PKPU Perusahaan) untuk melakukan suatu pertukaran Wesel Senior dengan pemegang Wesel Senior yang berada di Amerika Serikat jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b) Atas Porsi Tunai dapat diterbitkan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan dan ditawarkan kepada para pemegang Wesel Senior sebagai pertukaran (*exchange offer*) berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku, termasuk pengecualian pendaftaran yang sesuai berdasarkan *Securities Acts* Amerika Serikat. Surat berharga yang baru dapat memiliki ketentuan dan persyaratan tambahan sebagaimana akan disetujui oleh pemegang Wesel Senior, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Perjanjian Perdamaian ini.
- c) Apabila ada pemegang Wesel Senior yang tidak bersedia untuk melepaskan tagihan berdasarkan hukum manapun, maka mereka tidak berhak untuk menerima surat berharga baru. Ketentuan ini secara khusus tidak mengurangi hak Perusahaan untuk meminta pengakuan atas proses PKPU ini berdasarkan Pasal 15 *Bankruptcy Code* Amerika Serikat atau setiap ketentuan lain dari hukum nasional manapun yang mengizinkan pengakuan atas proses pengadilan asing.
- d) Melakukan upaya yang wajar agar Pemegang Wesel Senior asing dapat dihubungi melalui sistem kliring (*clearing system*). Namun demikian, jika ada Pemegang Wesel Senior asing yang tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk menerima surat berharga baru dalam waktu enam (6) bulan sejak pemberitahuan, maka seluruh hak mereka akan gugur.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

- a) *In particular call to the attention of the court that, in order to comply with the United States Securities Acts, it be allowed to be guided by the exceptions to the registration pursuant to Article 3(a)(10) of the 1933 United States Securities Act, whereby Article 3(a)(10) permits a court outside the United States (in this case, the PKPU process of the Company) to conduct an exchange of Senior Notes by the holders of such Notes who are in the United States providing they meet certain conditions.*
- b) *The Cash Portion may be exchanged for new securities issued by the Company and offered to holders of Senior Notes based on the prevailing capital market regulations, including the appropriate registration exemption under the United States Securities Acts, The new securities may have additional terms and conditions as shall be approved by the holders of the Senior Notes, and the provisions do not conflict with this Amicable Settlement Agreement.*
- c) *If there are any holders of Senior Notes who are not willing to relinquish any claim under the law, then they are not entitled to receive new securities. This provision specifically does not reduce the Company's right to request recognition of this PKPU process under Article 15 United States Bankruptcy Code or any other provision of any national law that allow the recognition of the foreign court.*
- d) *Make a reasonable effort so that foreign holders of Senior Notes may be contacted through the clearing system. However, if there is a foreign holder of Senior Notes that cannot be contacted or does not provide the necessary documentation to receive new securities within six (6) months from the notification, then all their rights will be void.*

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

10. Untuk menghindari keragu-raguan:

- a) Utang Dana Hasil Wesel Senior adalah utang Perusahaan kepada BTPL sebesar USD380,0 juta berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* dan *Supplemental Intercompany Loan Agreement* masing-masing tertanggal 7 Mei 2010 dan 27 Januari 2011 ("*Intercompany Loan Agreement*") dimana Perusahaan sebagai peminjam dan BTPL sebagai pemberi pinjaman.
- b) Dana Hasil Wesel Senior yang diperoleh Perusahaan berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* merupakan dana hasil penerbitan Wesel Senior yang harus diberikan oleh BTPL dalam bentuk pinjaman kepada Perusahaan melalui *Intercompany Loan*, sesuai dengan ketentuan dalam *Offering Memorandum USD250 Million 11.5% Guaranteed Senior Notes Due 2015* dan *USD130 Million Senior Notes at 107%* yang diterbitkan oleh BTPL.
- c) Dengan di-homologasi-nya Perjanjian Perdamaian ini yang juga mencakup skema atau pola penyelesaian Utang Dana Hasil Wesel Senior oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka terhitung sejak Tanggal Homologasi tersebut, Perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh perjanjian atau dokumen yang terkait dengan penerbitan Wesel Senior yang menjadi berakhir, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan seluruh jaminan yang ada dalam rangka penerbitan Wesel Senior, yaitu jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang diberikan oleh Perusahaan, jaminan yang diberikan oleh Para Penjamin, serta jaminan lainnya apabila ada. Dalam hal terdapat putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh hukum Indonesia yang menyatakan Perusahaan dan Para Penjamin wajib melaksanakan pembayaran akibat pencairan setiap jaminan yang diberikan dalam penerbitan Wesel Senior maka pembayaran kewajiban tersebut akan dilakukan Perusahaan dengan mengikuti ketentuan Perjanjian Perdamaian ini dan porsi pembayaran kewajiban tersebut akan mengurangi porsi pembayaran terhadap Utang Dana Hasil Wesel Senior secara sama besar.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

10. For the avoidance of doubt:

- a) *Payables on Proceeds from Senior Notes are Payables of the Company to BTPL amounting to USD380.0 million based on the Intercompany Loan Agreement and Supplemental Intercompany Loan Agreement, dated May 7, 2010 and January 27, 2011, respectively, ("Intercompany Loan Agreement"), wherein the Company is the borrower and BTPL the lender.*
- b) *Proceeds from the Senior Notes were acquired by the Company based on the Intercompany Loan Agreement as the proceeds from the Senior Notes to be provided by BTPL in the form of loans to the Company through Intercompany Loan in accordance with the provisions of the Offering Memorandum, being USD250 million 11.5% Senior Guaranteed Notes Due 2015 and USD130 million Senior Notes at 107%, issued by BTPL.*
- c) *With the Amicable Settlement Agreement, which also includes a scheme or pattern of settlement of Payables on Proceeds from Senior Notes by the Company, then starting from the Official Approval of Settlement Agreement Date, the Company no longer has an obligation to fulfill the entire agreements or documents associated with the issuance of the Senior Notes, which were automatically terminated, including but not limited to compliance with all existing collateral for issuance of the Senior Notes, which are Corporate Guarantee provided by the Company, the guarantee given by the Guarantor, as well as other guarantees, if any. In the event of a court decision that is legally binding and recognized by Indonesian law, which rules that the Company and the Guarantor shall make payment due to execution of any guarantees given in the issuance of Senior Notes, the payment obligations of the Company will be carried out by following the provisions of the Amicable Settlement Agreement and the portion of payment obligations will reduce the portion of payment to Payables on Proceeds from Senior Notes in the same amount. payment to Payables on Proceeds from Senior Notes in the same amount.*

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

Utang Afiliasi

Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

1. 100% dari Utang Afiliasi akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp2 ratus/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
2. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas yang akan dikonversi menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

Utang dengan Jaminan (Utang Kategori Tranche B)

1. Terhadap Utang dengan Jaminan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang diperhitungkan dan diakui adalah seluruh nilai utang pokoknya saja.
2. Seluruh jumlah Utang dengan Jaminan akan dibayarkan secara tunai dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
3. Perusahaan akan memberikan bunga atas Utang dengan Jaminan sebesar 4% yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang dengan Jaminan beserta bunganya yang diatur dalam butir 2) dan 3), maka sisa nilai Utang dengan Jaminan dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran berikutnya pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.
5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Utang dengan Jaminan dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Utang dengan Jaminan") maka Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun secara prorata setiap tahunnya.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

Affiliate Payables

Affiliate Payables will be paid under the following scheme:

1. *All the Affiliate Payables (100%) will be exchanged for the Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date of conversion at an exercise price of Rp2 hundred/share having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
2. *The Company does not provide interest on the amount of payables as referred to in point 1) to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.*

Payables with Collateral (Debt Category Tranche B)

1. *Payables with Collateral in the Amicable Settlement Agreement are included and recognized only for their principal amounts.*
2. *The entire amounts of Payables with Collateral will be paid in cash by installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
3. *The Company will provide interest at 4% on Payables with Collateral, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 2) above.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Payables with Collateral and associated interest as referred in points 2) and 3), then payment of the residual value of Payables with Collateral and associated interest remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payment on the next due date, and this will continue.*
5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of Payables with Collateral and associated interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Payables With Collaterals") then the Remaining Payables with Collateral shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar, Sisa Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Utang dengan Jaminan yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Utang dengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas masih terdapat Sisa Utang dengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

Utang Akibat Derivatif (utang kategori Tranche C)

1. 30% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4% per tahun yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
3. 70% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond (MCB-A)* berjangka waktu sepuluh (10) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200,0/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) dan 2) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Payables with Collateral at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Payables with Collateral will be deferred and combined with Remaining Payables with Collateral on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Payables with Collateral as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Payables with Collateral will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

Derivatives Payables (debt category Tranche C)

1. *Of remaining amount of Derivative Payables, 30% will be paid in cash ("Cash Portion") in installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
2. *The Company will provide interest at 4% on Cash Portion, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.*
3. *Of the Derivative Payables, 70% will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) issued by the Company with a maturity of ten (10) years from the Effective Date at the conversion price of Rp200.0/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest as mentioned in points 1) and 2) above, then payment of the residual value of Cash Portion that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.*

**40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)**

5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai, setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond (MCB B)* berjangka waktu 2 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

Utang Pembiayaan Kendaraan

1. Utang Pembiayaan Kendaraan termasuk bunganya akan dibayar sesuai ketentuan kontrak antara Perusahaan dengan kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini.
2. Kelalaian atau kegagalan pelaksanaan kewajiban Perusahaan kepada kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan berdasarkan kontrak yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini yang menimbulkan akibat atau konsekuensi yang diatur dalam kontrak tersebut, tidak menyebabkan atau tidak dianggap telah terjadi kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.

**40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)**

5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UU PT.*
8. *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

Vehicles Finance Payables

1. *Vehicles Finance Payables and associated interest will be paid in accordance with the terms in the contract between the Company and creditors based on existing Vehicles Finance Payables that were entered into before this Amicable Settlement Agreement.*
2. *Negligence or failure in the implementation of the Company's obligations to creditors on Vehicles Finance Payables under existing contracts prior to the Amicable Settlement Agreement, arising from or due to consequences as stipulated in the contract, shall not cause or be deemed to have resulted in the failure of the implementation of the Amicable Settlement Agreement.*

40. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG (Lanjutan)

Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi, antara
lain sebagai berikut:

1. Tidak ada pemberian jaminan kebendaan dan/atau jaminan perusahaan yang baru yang akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.
2. Setiap Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini yang tidak dimintakan konversi menjadi saham Perusahaan oleh kreditor terkait sampai dengan tanggal jatuh tempo MCB tersebut, maka MCB tersebut menjadi berakhir dan jika terdapat klaim atas nilai MCB tersebut oleh kreditor maka pembayarannya akan dilakukan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU masih memerlukan proses lebih lanjut yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini masih berlangsung.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan mencatat laba modifikasi utang dari transaksi Perjanjian Perdamaian PKPU sebesar Rp192,8 miliar.

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, kreditor atas Utang *Tower Provider* dapat menghentikan layanan penggunaan *tower* yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang *Tower Provider* terkait.

Pada bulan Juni 2015, Perusahaan menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa. Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU maka 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond (MCB-A)*. Pada tahun 2015, Perusahaan mencatat utang nilai sisa masa sewa sebesar Rp1.818,7 miliar dan beban terkait sebesar Rp1.667,8 miliar disajikan dalam laba rugi.

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk melakukan penambahan modal baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan menerbitkan sertifikat OWK bagi masing-masing kreditor yang berhak memperoleh OWK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

40. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(Continued)

Other Restructuring Provisions, among others, are
as follows:

1. No new asset guarantees and/or corporate guarantees shall be given in connection with the Amicable Settlement Agreement, unless otherwise determined by the Company.
2. Each Mandatory Convertible Bonds (MCB) issued pursuant to this Amicable Settlement Agreement whose conversion into shares of the Company is not requested by creditors on its maturity date, shall then be automatically terminated and should a claim on the MCB be subsequently be made by creditors, the payment will be made after the 31st year following the Official Approval of Settlement Agreement Date.

The execution of this Amicable Settlement Agreement in PKPU is still subject to further process, which as of the completion date of the consolidated financial statements is still ongoing.

As of December 31, 2014, the Company recorded a gain on modification of payables of Amicable Settlement Agreement transaction amounting to Rp192.8 billion.

Based on the Amicable Settlement Agreement, creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.

In June 2015, the Company discontinued the use of the leased service tower. Based on the Amicable Settlement Agreement, 100% of the residual value of the lease will be exchanged with the Mandatory Convertible Bond (MCB-A). In 2015, the Company booked residual value payable of the lease amounting to Rp1,818.7 billion and the related expense amounting to Rp1,667.8 billion was presented in profit or loss.

On June 26, 2016, the Company had approval from the General Meeting of Shareholders the Company to perform additional capital without right to order by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) mechanism as stipulated on Amicable Settlement Agreement.

In August 2016, the Company issued MCB-A certificates for each creditors which are entitled to obtain MCB-A as stipulated on Amicable Settlement Agreement.

41. KONTINJENSI

- a. Pada tanggal 18 Juni 2008, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan keputusan No. 26/KPPU-L/2007 agar Perusahaan membayar denda sebesar Rp4,0 miliar kepada Kas Negara atas pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perusahaan mengajukan keberatan atas keputusan KPPU pada tanggal 23 Juli 2008 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 8 April 2015, Perusahaan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan informasi bahwa Mahkamah Agung telah mengkonsolidasikan permohonan keberatan atas keputusan No.26/KPPU-L/2007 (termasuk keberatan dari Perusahaan) dan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili keberatan dari semua pemohon. Pada tanggal 27 Mei 2015, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan keputusan menerima keberatan atas keputusan KPPU dan memutuskan pada pokoknya bahwa Perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999 tersebut diatas.

Pada tanggal 22 Juni 2015, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 5 Desember 2016, telah diberitahukan kepada Perusahaan bahwa pada tanggal 28 Mei 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan kasasi atas putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan amar putusan dalam pemberitahuan resmi tersebut Perusahaan diharuskan membayar denda sebesar Rp 4.000.000.000 kepada kas Negara.

Pembayaran denda tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Perusahaan dengan mengikuti ketentuan klausul 1.5 butir V dalam Perjanjian Perdamaian.

- b. Pengajuan gugatan oleh Pemegang Wesel Senior terhadap Kelompok Usaha pada Pengadilan New York**

Pada tanggal 22 September 2014, terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemegang 25% Wesel Senior-USD yaitu Universal Investment Advisory SA, Vaquero Master EM Credit Fund Ltd, dan Trucharm Ltd yang tergabung dalam Komite Ad Hoc, mengajukan gugatan terhadap Kelompok Usaha terkait dengan pembayaran bunga Wesel Senior-USD yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd. (Entitas Anak) Gugatan tersebut terdaftar pada Pengadilan New York dengan nomor 652890/2014 (Gugatan 1). Pengajuan Gugatan 1 tersebut dilakukan pada saat Kelompok Usaha sedang melakukan upaya negosiasi untuk melakukan restrukturisasi pembayaran Wesel Senior-USD dengan *Steering Committee*.

41. CONTINGENCIES

- a. On June 18, 2008, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) issued Decision No. 26/KPPU-L/2007 ordering the Company to settle fines amounting to Rp4.0 billion to the State Treasury (Kas Negara) for violating Article 5 of Law No. 5 year 1999 on Anti-Monopoly and Unfair Competition.

The Company filed a petition to object against KPPU's decision on July 23, 2008 to the South Jakarta District Court. On April 8, 2015, the Company received letter from the Central Jakarta District Court to provide information that the Supreme Court has consolidated the petition of objection against the Decision No. 26/KPPU-L/2007 (including the objection from the Company), and appointed the District Court of Central Jakarta to adjudicate the objection from all petitioners. On May 27, 2015, the Presiding Judges issued Judgment to accept the objection againts the KPPU Decision and also declared in principle that the Company does not violate Article 5 of Law No. 5 year 1999 as stated above.

On June 22, 2015, KPPU had submitted a cassation regarding the District Court of Central Jakarta decision to the Supreme Court. Based on official notice form the District Court of South Jakarta dated December 5, 2016, had notified the Company that on May 28, 2016 the Supreme Court has issued an appeal verdict on the decision of the Central Jakarta District Court. Based on the decision, the Company is required to pay a penalty a sum of Rp4,000,000,000 to the state treasury.

The payment of penalty will be executed by the Company based on Amicable Settlement Plan clause 1.5 point V.

- b. Lawsuit filed by Senior Notes Holders against the Group in the Supreme Court of New York**

On September 22, 2014, parties acting on behalf of themselves as the holders of 25% of USD Senior Notes, namely Universal Investment Advisory SA, Vaquero EM Credit Master Fund Ltd, and Trucharm Ltd incorporated in the Ad Hoc Committee, and filed a lawsuit against the Group in connection with the payment of interest on the USD Senior Notes issued by Bakrie Telecom Pte., Ltd (a Subsidiary). The lawsuit was registered with the New York Supreme Court under a number 652890/2014 (Claim 1). Submission of Claims 1 was made at the time when the Group making efforts to negotiate restructuring of the payment of the USD Senior Notes with the *Steering Committee*.

41. KONTINJENSI (*Lanjutan*)

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Komite Ad Hoc melakukan perubahan pada Gugatan 1, dimana selain tuntutan pembayaran bunga Wesel Senior-USD, Komite Ad Hoc juga menuntut percepatan pembayaran utang pokok dari Wesel Senior-USD (Gugatan 2). Pengajuan tuntutan pembayaran bunga dan percepatan pembayaran pokok Wesel Senior-USD juga disampaikan oleh Bank of New York Mellon selaku pihak *trustee* yang mengatasmakan pemegang 25% Wesel Senior-USD di atas.

Tuntutan dari Komite Ad Hoc pada dasarnya adalah untuk pokok dan bunga Wesel Senior USD yang telah jatuh tempo (dengan asumsi bahwa Wesel Senior USD telah secara sah dipercepat). Tuntutan ini telah terakomodasi di dalam Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor Perusahaan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian). Perusahaan bermaksud untuk mengajukan permohonan pengakuan atas hasil proses PKPU di New York berdasarkan peraturan Bab 15 Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat dan diharapkan bahwa proses pengakuan tersebut akan menjadi penyelesaian bagi proses peradilan di New York.

Dengan diajukannya permohonan PKPU oleh Netwave maka proses negosiasi tersebut berhenti dan skema restrukturisasi yang pernah diusulkan kemudian dituangkan di dalam Rencana Perdamaian dalam PKPU.

Pada tanggal 9 November 2014, Kelompok Usaha telah menerima notifikasi dari Wali Amanat yang juga mewakili para Pemegang Wesel Senior USD perihal permintaan percepatan pembayaran atas pokok dan bunga yang sudah jatuh tempo dan belum terbayar atas seluruh utang Wesel Senior USD.

Sampai dengan tanggal laporan ini, gugatan tersebut masih berlangsung dan hasil akhirnya belum dapat ditentukan saat ini.

- c. Pada tanggal 5 Juni 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kemenkominfo") sebagai salah satu kreditor yang tagihannya diselesaikan melalui PKPU, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2014 yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Dalam memori peninjauan kembali, Kemenkominfo mendalilkan bahwa Kemenkominfo merupakan kreditor preferen dari Perusahaan, oleh karenanya meminta agar Kemenkominfo dan tagihannya dikeluarkan dari PKPU Perusahaan. Permohonan peninjauan kembali tersebut tidak menghalangi pelaksanaan penyelesaian perdamaian utang yang telah diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

41. CONTINGENCIES (*Continued*)

On October 1, 2014, the Ad Hoc Committee made an amendment to Claim 1, in which in addition to the demands of USD Senior Notes interest payments, the Ad Hoc Committee also demanded accelerated repayment of the principal debt of the USD Senior Notes (Claim 2). Claims for payment of interest and accelerated principal of USD Senior Notes were also submitted by the Bank of New York Mellon as trustee on behalf of the above holders of 25% of the USD Senior Notes.

The Ad Hoc Committee's claim was essentially for principal and interest due on the USD Senior Notes (on the assumption that the USD Senior Notes have been validly accelerated). These claims have been compromised under the Amicable Settlement Plan approved by creditors of the Company in the context of the Suspension of Payment Process (PKPU) of the Company's obligations proceedings (as described in the Settlement Agreement). The Company intends to apply for recognition of the PKPU proceedings in New York under Chapter 15 of the US Bankruptcy Code and is advised that such recognition would be dispositive of the New York litigation.

With the filing of the petition PKPU by Netwave, the negotiation process was stopped and the proposed restructuring scheme was then incorporated into the Amicable Settlement Plan in the PKPU.

On November 9, 2014, the Group received a notice from the Trustee which is also acting on behalf of the USD Senior Notes Holders, regarding the accelerated payment of the principal and any accrued and unpaid interest of the total debt of USD Senior Notes.

As of the date of this report, the lawsuit is still ongoing and the outcome is not presently determinable.

- c. On June 5, 2015, The Ministry of Communication and Information of Republic of Indonesia ("Kemenkominfo") as one of the Company's creditors whose receivables have been settled through PKPU, has requested a Judicial Review on the Commercial Court District Court of Central Jakarta Decision No. 59/Pdt.Sus/PKPU/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 9, 2015, which is considered final and legally binding. In its Judicial Review memorandum, Kemenkominfo has claimed itself to be Preferred Creditor of the Company and therefore it has requested that Kemenkominfo and its receivables be excluded from the Company's PKPU. Said Judicial review shall not in any way obstruct the execution of the payable under the Amicable Settlement Agreement.

41. KONTINJENSI (*Lanjutan*)

Pada tanggal 23 Oktober 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan menolak permohonan peninjauan kembali Kemenkominfo dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kemenkominfo.

Manajemen Perusahaan yakin dapat mempertahankan pendapatnya. Karena itu, tidak ada liabilitas yang dicatat untuk merefleksikan kontinjensi tersebut.

41. CONTINGENCIES (*Continued*)

On October 23, 2015, the Supreme Court decided to decline a judicial review as submitted by Kemenkominfo and as of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not received a decision letter on the judicial review that was requested by Kemenkominfo.

Management of the Company expected to be successful in defending its position. Therefore, no accrual has been made to reflect the contingency.

42. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			Activities not affecting cash flows:
Reklasifikasi beban akrual menjadi utang pihak berelasi	-	11,298	<i>Reclassification of accrued expense to due to a related party</i>

42. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

43. KELANGSUNGAN USAHA

Kelompok Usaha mengalami defisiensi modal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh rugi penurunan nilai aset, penghapusan uang muka dan pengembangan proyek, rugi selisih kurs, beban keuangan dan kerugian usaha dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2016, total liabilitas jangka pendek Kelompok Usaha telah melampaui total asetnya. Lebih lanjut, pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, utang Wesel Senior dalam kondisi wanprestasi (Catatan 17).

Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen telah membuat langkah-langkah dan rencana untuk menghadapi hal tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti semua ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian penyelesaian utang Perusahaan yang sudah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Catatan 40).
- b. Melanjutkan kerjasama dengan para pemasok dan operator telekomunikasi lain dalam rangka mengoptimalkan operasi.
- c. Menerapkan kebijakan pengendalian biaya.
- d. Merestrukturisasi utang Wesel Senior.
- e. Pengembangan bisnis baru.

43. GOING CONCERN

The Group is in a capital deficiency position as of December 31, 2016 and 2015. This condition is mainly caused by impairment loss on assets, advances and project development write-off, loss on foreign exchange, significant finance costs and operating losses from previous years. As of December 31, 2016, total current liabilities of the Group have exceeded its total assets. In addition, as of December 31, 2016 and 2015, Senior Notes was in default condition (Note 17).

In relation to this, management has taken actions and plans to address the going concern issue through, among others, the following measures:

- a. Compliance with the terms and conditions of the Amicable Settlement Agreement that has been approved by the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court (Note 40).
- b. Continuing the partnership agreements with vendors and other telecommunications operators in order to optimize operations.
- c. Implementation of cost-reduction policies.
- d. Restructuring Senior Notes.
- e. New business development.

**44. PERNYATAAN DAN INTERPRETASI AKUNTASI
YANG BELUM DITERAPKAN**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pernyataan dan interpretasi baru, penyesuaian dan revisi atas standar akuntansi yang belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pernyataan dan interpretasi baru, penyesuaian dan revisi atas standar akuntansi yang belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

- PSAK No. 4 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi"
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), "Properti Investasi"
- PSAK No. 15 (Revisi 2015), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 19 (Revisi 2015), "Aset Tak Berwujud"
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015), "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 65 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66 (Revisi 2015), "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67 (Revisi 2015), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar"
- ISAK No. 30 (Revisi 2015), "Pungutan"

Pernyataan akuntansi dan interpretasi revisi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2015), "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK No. 31 (Revisi 2015), "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi"

Pernyataan akuntansi baru dan revisi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap"
- PSAK No. 69, "Agrikultur"

Kelompok Usaha sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan pernyataan dan interpretasi baru, penyesuaian dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**44. ACCOUNTING STATEMENTS AND
INTERPRETATIONS NOT YET ADOPTED**

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued new, adjustment and revised statements and interpretations of accounting standards which are not yet effective for the financial year beginning January 1, 2015.

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued new, adjustment and revised statements and interpretations of accounting standards which are not yet effective for the financial year beginning January 1, 2015.

- PSAK No. 4 (Revised 2015), "Separate Financial Statements"
- PSAK No. 5 (Adjustment 2015), "Operating Segment"
- PSAK No. 7 (Adjustment 2015), "Related Party Disclosures"
- PSAK No. 13 (Adjustment 2015), "Investment Property"
- PSAK No. 15 (Revised 2015), "Investments in Associates and Joint Ventures"
- PSAK No. 19 (Revised 2015), "Intangible Assets"
- PSAK No. 22 (Adjustment 2015), "Business Combinations"
- PSAK No. 24 (Revised 2015), "Employee Benefits"
- PSAK No. 25 (Adjustment 2015), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors"
- PSAK No. 53 (Adjustment 2015), "Share-based Payment"
- PSAK No. 65 (Revised 2015), "Consolidated Financial Statements"
- PSAK No. 66 (Revised 2015), "Joint Arrangements"
- PSAK No. 67 (Revised 2015), "Disclosure of Interests in Other Entities"
- PSAK No. 68 (Adjustment 2015), "Fair Value Measurement"
- ISAK No. 30 (Revised 2015), "Collection"

The revised accounting statement and interpretation issued and effective for the year commencing on or after January 1, 2017 are as follows:

- PSAK No. 1 (Revised 2015), "Presentation of Financial Statements"
- ISAK No. 31 (Revised 2015), "Interpretation of PSAK No. 13: Investment Property"

The new and revised accounting statements issued and effective for the year commencing on or after January 1, 2018 are as follows:

- PSAK No. 16 (Revised 2015), "Fixed Assets"
- PSAK No. 69, "Agriculture"

The Group is evaluating the potential impact on the consolidated financial statements as a result of the adoption of such new, adjustment and revised statements and interpretations.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)**

45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 1 Maret 2017, Huawei Tech Investment, Ltd telah mengkonversi Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki sebesar Rp 1.237.862.796.141 menjadi saham Perusahaan sebanyak 6.189.313.980 lembar saham. Setelah konversi tersebut, struktur kepemilikan saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	2017		Shareholders
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam satuan penuh)/ <i>Number of Shares Issued and Fully Paid (in full amount)</i>	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	
Total saham biasa seri A dan B			Total common shares series A and B
Huawei Tech Investment, Ltd	6.189.313.980	16,83%	Huawei Tech Investment, Ltd
PT Mahindo Agung Sentosa	5.000.439.000	13,60%	PT Mahindo Agung Sentosa
PT Bakrie Global Ventura	2.770.974.713	7,54%	PT Bakrie Global Ventura
Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited	2.213.279.000	6,02%	Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited
PT Bakrie & Brothers Tbk	43.043.142	0,12%	PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Jasa Investindo	1.613.331.000	4,39%	PT Jasa Investindo
Masyarakat	18.943.523.800	51,51%	Public
Total	36.773.904.635	100,00%	Total

Pada tanggal 29 Maret 2017, Perusahaan mengikuti program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016.

Pada tanggal 16 Maret 2017, PT Bakrie Connectivity, Entitas Anak, mengikuti program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016.

Pada tanggal 16 Maret 2017, PT Bakrie Digital Net, Entitas Anak, mengikuti program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015, AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

On March 1, 2017, Mandatory Convertible Bond owned by Huawei amounting to Rp1,237,862,796,141 has converted to shares of the Company of 6,189,313,980 shares. After conversion done, the structure ownership shares of the Company as follow:

On March 29, 2017, the Company entering into Tax Amnesty program was based on Law Number 11 Year 2016.

On March 16, 2017, PT Bakrie Connectivity, a Subsidiary, entering into Tax Amnesty program was based on Law Number 11 Year 2016.

On March 16, 2017, PT Bakrie Digital Net, a Subsidiary, entering into Tax Amnesty program was based on Law Number 11 Year 2016.



PT Bakrie Telecom Tbk.

Wisma Bakrie 1 Lt. 3
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1
Jakarta 12920



+6221 5292 0264



www.bakrietelecom.com



corsec@bakrietelecom.com